



BAB I

Pendahuluan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Payakumbuh
Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Payakumbuh Tahun 2025, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 56);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Daerah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah kota Payakumbuh Nomor 25);
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 Nomor 2)

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 72);
10. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 22).

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

2. Visi dan Misi Kepala Daerah
3. VISI RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2029
4. Gambaran kondisi yang diinginkan dalam 5 tahun ke depan adalah meningkatnya kualitas Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, yang didukung dengan kinerja aparatur sepenuh hati dan penuh integritas, sehingga Payakumbuh maju, sehat, dan sejahtera dapat diwujudkan. Merujuk kepada pengumuman Komisi Pemilihan Umum nomor 27/PL.02.2-Pu/1376/2024 tentang visi, misi dan program pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh tahun 2024 dan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, maka visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih adalah sebagai berikut:
5. “PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN, DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF”
6. Visi ini selanjutnya akan menjadi visi kota Payakumbuh yang menjadi arah pandang semua komponen penyelenggara pemerintahan, Masyarakat dan seluruh stakeholders untuk menyatukan gerak dan langkah dalam Pembangunan kota Payakumbuh. Berdasarkan pendekatan perencanaan secara politis maka pada visi ini terdapat penekanan kebijakan daerah sehingga tanpa mengubah substansi politik. Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut:
7. Payakumbuh meliputi wilayah Payakumbuh dengan kesatuan geografis, kesatuan demografis dan kesatuan budaya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu dan berkembang sejak Pemerintah Kotamadya Payakumbuh disahkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970.
8. Maju memiliki arti menjadi terdepan dan unggul hal ini menunjukkan adanya progres untuk mencapai kualitas hidup yang relatif tinggi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan ketersediaan infrastruktur, sarana dan utilitas yang memperhatikan efek keberlanjutan lingkungan. Kota Maju merupakan sebuah kota yang dipahami maju dari kedua belah pihak: dari kota dan juga masyarakatnya. Kota yang maju tidak hanya terlihat pada ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, tetapi juga pada masyarakatnya yang seimbang baik dari segi kualitas dan juga distribusi kesejahteraannya. Kota yang maju juga ditandai dengan dukungan oleh infrastruktur yang memadai untuk memastikan kualitas hidup yang lebih tinggi dan kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi.
9. Bermartabat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “bermartabat” yaitu memiliki harga diri, kesadaran, dan kebanggaan akan identitas dan jati diri. Kota yang bermartabat memberikan kepercayaan dari masyarakatnya bahwa Kota mereka memiliki karakteristik yang menjadikan mereka bangga akan kotanya. Harga diri menunjukkan eksistensi masyarakat kota dengan karakteristik dan budaya masyarakat yang dapat dijadikan teladan karena ketaatan, ketaqwaan, dan kedisiplinannya, berangkat dari akar budaya minang “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” dalam arti seluas-luasnya tanpa mengabaikan pluralitas budaya yang ada disekitar kita. Oleh karena itu untuk memunculkan sebuah kota yang bermartabat, kota tersebut harus mampu memberikan kualitas hidup yang tinggi, kemajuan ekonomi, ketersediaan infrastruktur, pola pemerintahan yang efektif dan efisien serta keberlanjutan terhadap lingkungan perkotaan, kebudayaan dan identitas jati diri kota.

10. Pemberdayaan adalah proses membangun dan meningkatkan kemampuan, kesadaran, dan kemandirian individu, kelompok, atau masyarakat untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Pemberdayaan dilaksanakan pada berbagai bidang, tidak hanya pada kemampuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran dan kemandirian dalam menghadapi masalah sosial ataupun berpartisipasi dalam proses politik dan memperjuangkan hak-hak mereka tetapi juga pemberdayaan lingkungan dalam mengelola dan melestarikan lingkungan hidup. Pemberdayaan selain meningkatkan kemampuan, dan kemandirian juga meningkatkan kesadaran dan partisipasi individu atau kelompok dalam proses pembangunan sehingga terjadi peningkatan kualitas hidup, dan tercapainya keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat.
11. Pengembangan Kualitas Pendidikan adalah proses meningkatkan atau memperbaiki kemampuan sistem pendidikan dalam mencapai tujuan dan sasaran pendidikan. Pengembangan diartikan adalah peningkatan yang sifatnya tematik, dan parsial tetapi berkelanjutan. Kualitas pendidikan yang baik dipengaruhi oleh kurikulum, metode pembelajaran, kualifikasi guru, infrastruktur, dan tata kelola pendidikan. Pengembangan yang diharapkan dilakukan per-individu melalui peningkatan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan individu, pengembangan organisasi melalui peningkatan kemampuan, efisiensi dan efektifitas dan pengembangan masyarakat melalui meningkatkan kualitas hidup, serta memiliki kemampuan bersaing dan berinovasi. Kualitas pendidikan yang baik dipengaruhi oleh kurikulum, metode pembelajaran, kualifikasi guru, infrastruktur, dan tata kelola pendidikan. Walaupun begitu tidak hanya faktor internal saja yang diperhatikan, tetapi juga faktor luar diantaranya Kondisi sosial ekonomi: Kemiskinan, malnutrisi, dan kurangnya akses terhadap pendidikan yang berdampak negatif pada prestasi siswa. Pengembangan Kualitas pendidikan diharapkan mendorong budaya Pendidikan yang menghargai Pendidikan
12. Sentra UMKM yang Kompetitif adalah Sentra UMKM yang memiliki kemampuan atau keadaan di mana produk dapat bersaing dengan efektif dalam lingkungan yang sama. Secara literal Sentra UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah suatu lokasi atau kawasan yang dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM. Tetapi secara konsep pembentukan Sentra UMKM bertujuan untuk memudahkan pembinaan dan pengembangan kapasitas UMKM karena ter-konsentrasi pada satu wilayah, dan memudahkan dalam penyediaan fasilitas pendukung, baik infrastruktur maupun utilitas, serta memudahkan pengelolaan manajemen dan perluasan akses pasar. Sehingga nantinya UMKM tersebut akan meningkatkan kemampuan produksi, manajemen, pemasaran, dan pendapatan UMKM yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Jadi sentra UMKM yang kompetitif merupakan Sentra UMKM yang dalam konteks bisnis, memiliki kemampuan untuk meningkatkan pangsa pasar, pendapatan, pengembangan produk atau jasa yang inovatif, dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selain itu juga mampu meningkatkan keterampilan, prestasi dan pencapaiannya hingga siap bersaing dengan kabupaten/ Kota lainnya.
13. Dari uraian visi dapat dituangkan pokok-pokok visi adalah maju, sehat dan sejahtera: dari Kota yang maju, masyarakat yang sehat akan melahirkan Payakumbuh yang Sejahtera. walaupun diungkap dalam susunan kata dan kalimat yang berbeda, namun ketiga pokok visi tersebut memiliki isi, esensi, pesan, dan makna yang saling mengait dan melanjut, antara yang awal dan yang kemudian, yang bertujuan untuk melahirkan arahan rinci program yang sesuai dengan konteks permasalahan dan bahasa perencanaan.
14. Dengan visi ini dapat diartikan bahwa pemerintah berkomitmen, konsisten dan berupaya dalam menyediakan sebuah kota, kota Payakumbuh yang maju dan bermartabat melalui pemberdayaan dan pengembangan warga dan kotanya dengan peningkatan kualitas dan kompetensi pada sektor pendidikan dan UMKM. Dengan harapan Kota Payakumbuh mampu bertransformasi dari kota persinggahan menjadi kota destinasi; destinasi pendidikan, destinasi kesehatan, destinasi kuliner, seni budaya dan olahraga. Untuk mencapai Payakumbuh maju dan bermartabat tersebut, dapat dilihat dari pencapaian sasaran visi sebagaimana tabel 3.5. Beberapa target sasaran visi ini mengacu pada target imperative sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 050-459-2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang RPJMD Tahun 2025-2029.
15. Tabel Sasaran Visi RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

N O	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELI NE 2024	TARGET					
				TAHU N 2025	TAHU N 2026	TAHU N 2027	TAHU N 2028	TAHU N 2029	TAHU N 2030
1	Peningkatan Pendapatan Per Kapita	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	64,21	72,02	82,14	92,57	103,84	116,29	129,51

N O	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET					
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
		(ADHB) (Rp Juta)							
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	4,82	4,95	5,06	5,17	5,31	5,43	5,55
2	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	5,19	4,54	4,32	4,17	3,99	3,84	3,63
		Rasio Gini (indeks)	0,313	0,311	0,310	0,309	0,308	0,306	0,305
		Pertumbuhan ekonomi (%)	4,53	5,02	5,79	7,12	7,36	7,65	6,22
3	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,0788	3,4000	3,4150	3,4400	3,4630	3,4824	3,5000
		Indeks Inovasi Daerah	54,62	54,85	55,15	55,25	55,50	55,95	56,05
4	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	80,76	81,43	81,97	82,50	83,09	83,79	84,23
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rp/Tenaga Kerja)	70,58	70,80	71,50	72,02	73,3	74,03	75
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,52	68,37	68,56	68,74	68,97	69,20	69,43

16. Sumber: RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

17. MISI RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2029

18. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

19. Misi Pertama “Mewujudkan SDM yang berkualitas”. Mewujudkan SDM yang berkualitas dimaksudkan untuk melahirkan SDM yang memiliki kemampuan, pengetahuan, loyal, dan sikap yang dapat meningkatkan kinerja didukung dengan kesehatan yang baik. Karakteristik SDM yang berkualitas akan tercapai jika memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kepercayaan diri, watak yang dinamis, siap menghadapi perubahan, memiliki keterampilan yang relevan dengan bidang pekerjaan, memiliki sikap toleransi yang tinggi, memiliki semangat yang tinggi, mampu bekerjasama dengan pihak lain, memahami bidangnya, mempunyai watak yang bermoral tinggi antara lain: jujur, menepati janji serta peka dengan hak dan kepentingan pihak lain. Sumber daya manusia yang berkualitas menciptakan bukan saja nilai komparatif tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti:

intelligence, creativity dan imagination; tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, air, energi otot, sehingga produktivitasnya meningkat dan mampu bersaing dengan SDM daerah lain. Intinya SDM yang berkualitas menyangkut aspek fisik (kualitas fisik) dan aspek non fisik (kualitas non fisik). Kondisi ini diharapkan melahirkan SDM yang dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya baik dalam kehidupan pribadi, maupun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

20. Misi Kedua: “Mewujudkan iklim ekonomi yang kompetitif” Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif, mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan, dan mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial-ekonomi masyarakat, dan meningkatkan investasi di Kota Payakumbuh. Salah satu amanah pembangunan adalah memajukan kesejahteraan umum, memastikan dampak pembangunan dirasakan semua golongan serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Payakumbuh diwujudkan melalui penyediaan lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran, mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui munculnya wirausaha-wirausaha baru yang mampu membuka lapangan kerja sendiri. Memastikan keterjangkauan dan kestabilan harga-harga kebutuhan pokok terutama bagi masyarakat tidak mampu. Menciptakan iklim ekonomi dan investasi yang kondusif menjadi kunci utama dalam mendukung pembangunan ekonomi di Kota Payakumbuh. Lokomotif perekonomian Kota Payakumbuh merupakan sektor potensial yang mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat namun mengedepankan potensi lokal sebagai motor dan pilar utama perekonomian guna kemandirian ekonomi lokal dan daya saing daerah. Sampai tahun 2024, tiga sektor penyumbang utama PDRB Kota Payakumbuh adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (25.02%), sektor konstruksi (13,64) serta sektor Transportasi dan Pergudangan (11,82%).
21. Misi Ketiga: “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Kondusif” Pemerintah memegang peranan penting bagi perkembangan daerah melalui fungsi sebagai regulator serta fasilitator. Dukungan pemerintah dalam pembangunan daerah harus didukung oleh layanan publik yang prima. Untuk mencapai kondisi layanan prima tersebut perlu terwujud pemerintahan yang baik (good government) dan tata kelola yang baik (good governance). Layanan publik perlu didukung birokrasi yang bersih agar tidak menimbulkan biaya birokrasi tinggi. Pelayanan publik juga diharapkan mampu dinamis dan tangkas menjawab kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di lapangan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin bervariasi kebutuhannya maka dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaan yang efektif dan efisien dengan melalui digitalisasi manajemen dan birokrasi sehingga tata kelola pemerintah dapat berjalan efektif. Sistem birokrasi yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama dalam mendukung iklim investasi.
22. Misi Keempat: “Mewujudkan nuansa imani melalui pendekatan budaya dan adat” Kebudayaan menjadi aset utama pembangunan. Kota Payakumbuh sebagai pusat perekonomian luak 50 tidak bisa mengesampingkan sejarah panjang Kota Payakumbuh yang mewariskan generasi saat ini dengan budaya, kesenian dan aspirasi kebudayaan lainnya untuk dikembangkan dengan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat. Kebudayaan-kebudayaan lokal akan didorong untuk terus dikembangkan, tidak sekedar untuk melestarikan namun juga menjadi pemberi warna atas kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Payakumbuh. Kebudayaan juga tidak hanya dipandang sebagai kondisi statis, namun terus berkembang. Kreativitas masyarakat menjadi faktor penting dalam mengembangkan kebudayaan sekaligus melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan kebudayaan tetap terus relevan dalam perkembangan zaman. Kota Payakumbuh sejatinya adalah rumah besar bagi semua orang di luak limopuluah. Nilai-nilai kekeluargaan menjadi pusat gravitasi semua aktivitas individunya. Nilai moral, kesusilaan, agama dan religius digerakkan di lingkup masyarakat terkecil atau keluarga. Keluarga yang harmonis dan sehat secara mental juga akan melahirkan masyarakat yang mampu menempatkan dirinya dalam dinamika zaman yang terus berubah.
23. Misi Kelima: “Mewujudkan sarana perkotaan yang humanis ramah lingkungan dan berkelanjutan” Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Payakumbuh yang tertib, dan inklusif dengan pemenuhan infrastruktur kota yang memadai dan aman bagi setiap penghuninya terutama rasa aman bagi perempuan dan anak. Keamanan tersebut tercipta melalui kuatnya kesadaran kolektif masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Peran serta masyarakat tersebut dibarengi dengan upaya perbaikan layanan Pemerintah, serta penggunaan teknologi yang mampu meningkatkan pengawasan keamanan di tempat-tempat publik serta respons atas pengaduan korban kekerasan secara baik dan cepat. Misi ini juga dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan pengelolaan tata ruang dan wilayah, mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial. Prinsip pembangunan yang berkelanjutan menjadi kunci perbaikan kualitas lingkungan di Kota Payakumbuh.
24. Tabel Keterkaitan Visi dengan Misi RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

VISI	POKOK- POKOK VISI	MISI
Payakumbuh Maju Bermartabat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, dan Sentra UMKM yang Kompetitif	Maju	Misi Pertama: Mewujudkan SDM yang berkualitas Misi Ketiga: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Kondusif. Misi Kelima: Mewujudkan sarana perkotaan yang humanis ramah lingkungan dan berkelanjutan.
	Sehat	Misi Pertama: Mewujudkan SDM yang berkualitas
	Sejahtera	Misi Kedua: Mewujudkan iklim ekonomi yang kompetitif Misi Keempat: Mewujudkan nuansa imani melalui pendekatan budaya dan adat

25. Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh, 2025
26. Pokok-pokok visi dalam RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dapat dijelaskan sebagai berikut:
27. Payakumbuh Maju: Memiliki sarana perkotaan yang humanis ramah lingkungan dan berkelanjutan, antara lain menghadirkan pusat perbelanjaan yang nyaman melalui Revitalisasi dan modernisasi Pasar Tradisional Ibu tematik, tertata, rapi serta bersih. Selain itu juga pendidikan yang berkualitas dan menciptakan sumberdaya manusia yang kompetitif dan berdaya saing. Ditindaklanjuti melalui pemerataan pendidikan dasar dan mendukung sekolah rakyat serta memastikan kelanjutan pendidikan melalui insentif atau kerjasama dengan satuan pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Disamping itu juga maju dari sisi pemerintahan yang menghadirkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan kondusif dengan aparatur yang jujur dan loyal.
28. Payakumbuh Sehat: Peningkatan pelayanan kesehatan yang paripurna. Bidang kesehatan membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, peningkatan fasilitas dan pelayanan RSUD di Kota Payakumbuh. Juga meliputi Gizi Balita, TBC, Kelembagaan layanan kesehatan, kesehatan lingkungan dan sanitasi.
29. Payakumbuh Sejahtera : Peningkatan ekonomi masyarakat yang mampu bersaing dengan daerah sekitarnya, lapangan kerja yang berkualitas dengan prioritas pada kemandirian Masyarakat secara sosial dan ekonomi dengan kawasan pilihan untuk produksi komoditas dari hulu ke hilir, termasuk peningkatan ekonomi berbasis masjid serta partisipasi masyarakat dan dukungan pihak terkait.
- 30.
31. **TUJUAN DAN SASARAN**
32. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis tingkat tinggi yang nantinya menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:
33. Misi Pertama: “Mewujudkan SDM yang Berkualitas”. Dimaksudkan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang berpendidikan, kesehatan yang baik sehingga mampu bersaing.
34. Tujuan: Terwujudnya SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing
35. Sasaran:
36. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
37. Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan
38. Menurunkan Tingkat Kemiskinan
39. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
40. Misi Kedua: “Mewujudkan Iklim Ekonomi yang Kompetitif”. Dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil, berkelanjutan, dan inklusif.
41. Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif
42. Sasaran:
43. Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat
44. Meningkatnya Sektor Strategis Berbasis Potensi Lokal
45. Meningkatnya Iklim Investasi Daerah
46. Misi Ketiga: “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Kondusif”. Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efisien, transparan, akuntabel, serta mampu bersaing dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
47. Tujuan : Terwujudnya tata Kelola pemerintahan dan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
48. Sasaran:

49. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
50. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
51. Meningkatnya Pendapatan Daerah
52. Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat
53. Misi Keempat: “Mewujudkan Nuansa Imani melalui Pendekatan Budaya dan Adat”, dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, dengan tetap menghormati serta memanfaatkan kearifan lokal, budaya, dan adat istiadat sebagai sarana dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis.
54. Tujuan: Terwujudnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK
55. Sasaran: Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Budaya dalam Kehidupan Bermasyarakat
56. Misi Kelima: “Mewujudkan Sarana Perkotaan yang Humanis Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan”, dimaksudkan untuk menciptakan infrastruktur dan fasilitas kota yang nyaman bagi masyarakat, selaras dengan alam, serta dapat bertahan dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan.
57. Tujuan: Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan.
58. Sasaran:
59. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup
60. Meningkatnya Pembangunan infrastruktur yang berkualitas .
61. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Perubahan RPJMD
62. Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, maka dapat dijabarkan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023. Penyusunan prioritas pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2023 diarahkan pada pencapaian tujuan tahun sebelumnya yang belum tercapai dan permasalahan yang muncul dari evaluasi pembangunan tahun 2022. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan RPD untuk tahun 2023 disajikan pada Tabel

63. Tabel

64. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD untuk tahun 2025

65.

No	PRIORITAS/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKA T DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
Prioritas 1 : Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia, sehat, berkualitas dan berdaya saing							
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (tahun)	75.31	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Peningkatan dan pemerataan kualitas dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan (Pemenuhan sarpras puskesmas)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
					Peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat		
					Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan (Sekolahkan dokter umum yang ada menjadi spesialis dan tenaga kesehatan lainnya)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Peningkatan cakupan jaminan kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam penjaminan kesehatan		
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat	13.7		Peningkatan pengendalian penyakit	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Dinas Kesehatan

No	PRIORITAS/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKA T DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pendek) pada Balita (%)			menular dan tidak menular.	Daya Manusia Kesehatan	
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	5.81		Pengoptimalan upaya promotif dan preventif kesehatan melalui kampanye pola hidup bersih dan sehat (Mengoptimalkan upaya deteksi dini, vaksin dll)	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
		Jumlah Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup) (jiwa)	2		Pengoptimalan Sistem pengawasan obat dan makanan		
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) (%)	80		Penanggulangan permasalahan gizi mikro dan gizi makro dan penuntasan masalah stunting.	Program Pengawasan dan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate) (%)	94		Pengembangan kemitraan dengan organisasi non-pemerintah dan swasta dalam mendukung kampanye imunisasi.		
					Dukungan Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi bagi siswa, santri, ibu hamil,	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	Dinas Kesehatan

No	PRIORITAS/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKA T DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					ibu menyusui dan anak Balita.	Upaya Kesehatan Masyarakat	
					Pemenuhan konsumsi pangan masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
2	Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah (tahun)	14.62	Meningkatkan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu, merata dan berkeadilan	Pemerataan dan peningkatan akses dan sarana prasarana Pendidikan PAUD, dasar dan menengah.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk: Literasi (%)	87,5		Peningkatan Kompetensi guru dan pengembangan guru berkarakter (Pelatihan dan kunjungan ke daerah yang lebih maju)	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan

No	PRIORITAS/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKA T DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk: Numerasi (%)	84.4		Penguatan Pendidikan inklusif yang responsif untuk anak-anak disabilitas atau berkebutuhan khusus	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	11.16		Meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik		
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	21,70		Menyiapkan kebijakan yang mengatur tentang pendidikan sekolah negeri dan swasta (Kolaborasi Lembaga swasta, negeri dan diknas dalam meningkatkan kualitas pendidikan)		
		Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	79.09		Meningkatkan pendidikan karakter, sehingga tercipta budaya yang berkarakter dan berakhlak		

No	PRIORITAS/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKA T DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pemberian insentif untuk Guru TPA, guru PAUD dan Guru Non ASN		
					Pemetaan kebutuhan satuan pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (regrouping sekolah)		
				Meningkatkan literasi dan budaya baca masyarakat	Pengembangan budaya literasi berbasis masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Pustaka Arsip
					Mendorong layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Dinas Pustaka Arsip
				Meningkatkan Kualitas Pemuda dan Olah Raga	Peningkatan pembibitan atlit dan pembinaan olahraga prestasi	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Parpora
					Peningkatan sarana dan prasarana Olahraga		
					Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Parpora
						Program Pengembangan	Dinas Parpora

No	PRIORITAS/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKA T DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
						Kapasitas Kepramukaan	
				Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Pemberian beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu dan/atau bagi yang memiliki berprestasi.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
3	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	4.54	Meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial masyarakat	Perluasan cakupan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi masyarakat miskin, kelompok marjinal dan rentan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	100.00		Meningkatkan kualitas dan tata kelola data kemiskinan yang komprehensif, valid dan terintegrasi sebagai dasar dalam rancangan program yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan		
		Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	31.38	Meningkatkan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan terintegrasi	Meningkatkan pengentasan kemiskinan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial

No	PRIORITAS/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKA T DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan dan/atau dari dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan (orang)	5		Meningkatkan perlindungan sosial adaptif terintegrasi untuk memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran berbasis fakta		
					Pemberian fasilitasi bantuan modal usaha dalam peningkatan pendapatan masyarakat miskin	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
					Percepatan penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan graduasi yang terintegrasi		
					Pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemiskinan		
					Pemberian insentif untuk tenaga relawan sosial		

No	PRIORITAS/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKA T DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan		
					Peningkatan sarana dan prasarana penggulangan masalah sosial dan pengembangan sumber daya tenaga kesejahteraan sosial		
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	66.8	Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Seluruh kecamatan
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.151		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
		Indeks Perlindungan Khusus Anak	82.92		Penguatan dukungan anggaran operasional dan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Seluruh kecamatan

No	PRIORITAS/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKA T DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kelurahan (LKK: RT, RW, LPM, Karang Taruna, PKK, Posyandu)		
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	63.89		Penyediaan insentif bagi petugas RT, RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Tarunan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.		
					Penguatan peran organisasi kemasyarakatan dalam pendidikan keluarga dan kelompok masyarakat pada aspek sosial, ekonomi serta politik	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DP3AP2KB
				Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Peningkatan sistem perlindungan perempuan dan anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DP3AP2KB
					Meningkatkan peran keluarga dalam melindungi hak-hak anak.	Program Perlindungan Perempuan	DP3AP2KB
					Meningkatkan peran serta perempuan dalam ketahanan keluarga	Program Pemenuhan Hak Anak	DP3AP2KB

No	PRIORITAS/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKA T DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					Meningkatkan peran serta Perempuan dan anak dalam pembangunan		
				Meningkatkan Pengendalian penduduk Ketahanan Keluarga	Fasilitasi pembimbingan, pengembangan dan penguatan penyiapan pengasuhan 1.000 hari pertama kelahiran.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	DP3AP2KB
					Pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
					Penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat & kesejahteraan keluarga	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
					Meningkatkan pembangunan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
					Pemantapan model kebijakan dan implementasi membangun ketahanan		

No	PRIORITAS/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKA T DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					keluarga dan lingkungan berbasis kearifan lokal		
Prioritas 2 : Peningkatan Perekonomian Yang Berkualitas, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Produk Unggulan Dan Inovasi							
5	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	0.311	Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar	Program Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Nakerin
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4.75		Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi bagi masyarakat.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Nakerin
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rp/ tenaga kerja)	70,8	Meningkatkan kesempatan kerja	Memperkuat kerjasama, kemitraan dan pemanfaatan teknologi untuk menyerap dan/atau menciptakan lapangan kerja baru	Program Hubungan Industrial	Dinas Nakerin
		Proporsi penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	53.81		Mengembangkan kluster industri dan inkubasi bisnis dalam penciptaan pengusaha baru	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Rasio Kewirausahaan (%)	9.3		Meningkatkan kualitas SDM entrepreneur melalui pemberdayaan, pendampingan serta	Program Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Nakerin

No	PRIORITAS/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKA T DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					pendidikan formal dan informal		
6	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)	33.34	Meningkatkan kualitas Usaha mikro dan koperasi	Mendorong peningkatan skala usaha mikro melalui penguatan modal Usaha mikro	Program Pengembangan Umkm	Dinas Koperasi & UKM
		Proporsi jumlah UKM non pertanian (%)	4.69		Penguatan proses bisnis dan kapasitas layanan Usaha mikro melalui perluasan peran ekosistem digital	Program Pemberdayaan UMKM	
		Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (%)	2.365		Perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis		
		Proporsi jumlah IKM (%)	3.43		Peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya lokal.		
		Ketersediaan Pangan Utama (ton)	19,785		Peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro.		
		Stabilisasi Harga Beras (%)	≤ 10		Penataan basis data dan penyederhanaan regulasi pemberdayaan usaha mikro, pengembangan	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM

No	PRIORITAS/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKA T DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					kewirausahaan, dan koperasi		
		Stabilisasi Harga Cabe (%)	≤ 25		Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar)		
		Stabilisasi Harga Bawang (%)	≤ 25		Penguatan kelembagaan Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM
		Tingkat Inflasi	0		Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi.		
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	19.7		Pemberdayaan ekonomi lokal melalui pembentukan koperasi merah putih	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM
		Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	4.95	Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan	Meningkatkan upaya pengendalian harga pangan strategis (inflasi daerah).	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi & UKM
		Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum (%)	3.6		Revitalisasi dan penataan pasar tradisional, pertokoan Payakumbuh dan Pedagang Kaki Lima	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Koperasi & UKM
		Jumlah Tamu wisatawan mancanegara (hotel	0,02		Penerapan kebijakan perlindungan konsumen dan tertib niaga.	Program Stabilisasi Harga Barang	Dinas Koperasi & UKM

No	PRIORITAS/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKA T DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		berbintang) (ribu orang)				Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (juta rupiah/orang)	35.27		Mendorong pertumbuhan dan menciptakan iklim yg kondusif serta perluasan pangsa pasar yang potensial.	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Koperasi & UKM
		Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi (%)	3,595		Peningkatan kualitas, inovasi dan promosi perdagangan secara berkelanjutan.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		ROA BUMD (%)	6.18	Meningkatkan pertumbuhan sektor industri	Mendorong bertumbuhnya industri dari hulu ke hilir	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Nakerin
					Penguatan kelembagaan sentra-sentra industri	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Nakerin
					Meningkatnya industri halal dan standarisasi produk sebagai bagian dari pengembangan ekonomi syariah	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Dinas Nakerin

No	PRIORITAS/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKA T DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					Penguatan infrastruktur pendukung industri.		
					Mendorong pengembangan layanan usaha, pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM) dan kemudahan akses pembiayaan usaha		
					Peningkatan kualitas pendataan dan pengawasan industri		
				Menumbuhkembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif	Inovasi pariwisata berkelanjutan (Sustainability Tourism) dan berbasis komunitas (Community Based Tourism), budaya dan kearifan lokal	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Parpora
					Peningkatan promosi pariwisata Kota Payakumbuh antara lain melalui pelaksanaan event-event pariwisata, budaya dan olah raga	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Parpora

No	PRIORITAS/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKA T DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					Penguatan integrasi Pengembangan Pariwisata Halal dengan industry pariwisata yang adaptif		
					Diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatan nusantara		
					Pengembangan Ekonomi Kreatif dan UMKM dengan Mendorong tumbuhnya sektor ekonomi kreatif dan UMKM melalui penyediaan akses pelatihan, pembiayaan, serta pemasaran produk produk lokal, terutama yang dapat diekspor ke negara negara Global South serta memberikan insentif bagi pelaku usaha yang berinovasi dalam produk dan layanan yang mendukung keberlanjutan		

No	PRIORITAS/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKA T DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing		
				Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor jasa Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan dukungan terhadap pendidikan tinggi dan vokasi menjadi kampus dan sekolah unggulan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
						Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Mengoptimalkan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan fungsi pelayanan perdagangan dan jasa di Kota Payakumbuh dengan menata kembali pusat-pusat kegiatan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi & UKM
					Meningkatkan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang memadai	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Nakerin
					Meningkatkan ketersediaan ruang usaha bagi pengusaha informal, mikro dan kecil di Kota Payakumbuh	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUPR

No	PRIORITAS/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKA T DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
						Program Pengembangan Umkm	Dinas Koperasi & UKM
				Meningkatkan produksi, nilai tambah dan daya saing pertanian, peternakan, perikanan dan Ketahanan Pangan	Penerapan teknologi untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian, peternakan dan perikanan.	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
					Penyediaan bantuan sarana dan prasarana Pertanian, peternakan dan perikanan (Termasuk pemberian subsidi sarana pertanian untuk menekan biaya produksi, serta Penyediaan bibit dan benih varietas unggul)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
					Penguatan infrastruktur pertanian, peternakan dan perikanan	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKD
					Meningkatkan pengawasan penerapan LP2B dengan penerapan insentif dan disinsentif penggunaan lahan		
					Fasilitasi pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, peternakan dan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan	Dinas Pertanian

No	PRIORITAS/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKA T DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani	Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Peningkatan kualitas SDM petani, peternak dan pembudidaya ikan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Pertanian
					Pembinaan dan pengembangan komoditi pertanian (padi, jagung, cabe, bawang, jamur, florikultura, dll)	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Pertanian
					Penguatan lumbung pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
					Meningkatkan ketersediaan pangan		
				Meningkatkan Penerapan ekonomi hijau dalam pembangunan	Optimalisasi upaya sirkular ekonomi (pengelolaan sampah, produksi dan konsumsi berkelanjutan)	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup

No	PRIORITAS/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKA T DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					Meningkatkan pelatihan dan sertifikasi pekerjaan sektor energi terbarukan, pertanian organik, dan usaha/industri ramah lingkungan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
					Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan akibat kegiatan ekonomi	Program Perekonomian Dan Pembangunan (Bagian PBJ)	Setdako
7	Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (Rp)	660	Meningkatkan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi	Peningkatan Data Potensi dan Peluang Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMDPTSP
		Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)	6		Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMDPTSP
		Nilai Transaksi Saham Per Kapita (rupiah)	3,791,998		Peningkatan Upaya Promosi Investasi	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi penanaman Modal	DPMDPTSP
		Total Kredit/PDRB (%)	24.4		Meningkatkan kualitas layanan PTSP kepada masyarakat dan dunia usaha.		

No	PRIORITAS/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKA T DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rasio PDRB sektor Jasa Keuangan (%)	6.05		Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan mitra pembangunan dalam pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Nakerperin
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	24.86				
Prioritas 3 : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas							
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE/ Pemdi)	3.75	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Pengoptimalan layanan publik masyarakat	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
		Indeks Pelayanan Publik	4.51		Peningkatan fasilitasi dan koordinasi kerjasama daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Sekretariat Daerah)	Setdako
		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.60			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekwan
					Optimalisasi pengelolaan arsip daerah	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Pustaka Arsip

No	PRIORITAS/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKA T DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
				Mengembangkan pemerintahan berbasis digital	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Kominfo
					Penguatan aspek pemerintahan digital melalui implementasi SPBE	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Kominfo
					Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik	Program Pencatatan Sipil	Disdukcapil
					Meningkatkan penerapan Smart city		
					Peningkatan dan pengembangan Infrastruktur Digital untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efisien, termasuk penerapan sistem berbasis cloud untuk administrasi pemerintahan dan sistem pembayaran pajak online yang lebih luas dan mudah diakses oleh masyarakat.	Program Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil

No	PRIORITAS/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKA T DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP	78.00	Mewujudkan kelembagaan yang tepat fungsi	Penataan organisasi dan kelembagaan yang tepat fungsi dan adaptif	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
		Opini BPK atas laporan keuangan (opini)	WTP		Penguatan kelembagaan berbasis kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi)	Setdako
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah	3.4		Penguatan fungsi koordinasi dan sinergi antar lembaga		
		Indeks Masyarakat Digital Indonesia	52				
		Indeks Reformasi Hukum	87.2	Mewujudkan SDM Aparatur yang berkualitas	Peningkatan kualitas ASN yang professional dan bebas korupsi	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
		Indeks Inovasi Daerah	54.85		Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM

No	PRIORITAS/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKA T DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					Peningkatan/ perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.		
					Optimalisasi pemenuhan sumber daya aparatur berbasis kebutuhan		
				Meningkatkan transparansi dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset daerah	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pemerintah daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda
					Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
					Mengoptimalkan pengembangan dan penelitian serta inovasi daerah dalam layanan publik	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Bappeda
					Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKD

No	PRIORITAS/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKA T DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					Optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BKD
					Optimalisasi pengelolaan asset- aset daerah, terutama aset sekolah, sarana kesehatan, aset pasar, perkantoran dan infrastruktur.		
					Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten Lima Puluh Kota, terkait dengan pengelolaan aset		
					Peningkatan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
					Peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat

No	PRIORITAS/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKA T DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					Optimalisasi kualitas pengadaan barang dan jasa	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Setdako
					Peningkatan fasilitasi dan koordinasi bidang hukum		
					Peningkatan kebijakan bidang perekonomian		
					Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Perangkat Daerah
10	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap APBD	0.17	Optimalisasi Sumber Pendapatan Daerah	Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD).	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BKD
		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0.35	Pengembangan BUMD	Peningkatan kualitas layanan BUMD	Program Pengelolaan BMD	BKD
					Kerjasama BUMD dengan pihak lain		
					Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BUMD		
11	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum	5	Meningkatkan ketertiban umum dan pelayanan perlindungan masyarakat	Peningkatan fasilitas dalam menunjang	Program Peningkatan	Satpol PP & Damkar

No	PRIORITAS/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKA T DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat	Ketentraman Dan Ketertiban Umum	
		Persentase penegakan Perda	100		Peningkatan kemampuan personal pelayanan ketertiban dan penanganan situasi darurat		
		Angka Kriminalitas (per 1000 penduduk)	3.84		Meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan penegak hukum, masyarakat dan stake holders	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pol PP Damkar
		Persentase Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang Aktif	91.95		Meningkatkan pengamalan pancasila, demokrasi dan HAM dalam kehidupan bermasyarakat	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kesbangpol
		Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan	100		Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga pendidikan Melalui Etika Serta Budaya Politik, Pendidikan	Kesbangpol

No	PRIORITAS/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKA T DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
						Politik Dan pengembangan	
		Persentase Penanganan Konflik Sosial yang Terjadi di Tengah Masyarakat	100		Penguatan peran serta dan koordinasi dengan lembaga dan organisasi budaya	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kesbangpol
						Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Kesbangpol
						Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol
		Indeks Risiko Bencana (IRBI)	103.52	Meningkatkan kualitas pelayanan Penanggulangan Bencana	Mengembangkan sistim informasi kebencanaan yang valid secara terbuka ke masyarakat	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial

No	PRIORITAS/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKA T DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					Mengembangkan sistim deteksi dini kebencanaan	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
					Memperkuat masyarakat Tangguh bencana	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	BPBD
					Meningkatkan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		
					Penguatan mitigasi bencana pada saat bencana dan pasca bencana.		
Prioritas 4 : Peningkatan Tata Kehidupan Sosial Dan Budaya Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah							
12	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Karya Budaya yang Ditetapkan	1	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan	Meningkatkan Penguatan pendidikan karakter berbasis agama kepada tenaga pendidik dan siswa	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan

No	PRIORITAS/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKA T DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		Cakupan Penguatan idiologi Pancasila dan Karakter kebangsaan (%)	58.35		Pemberian insentif kepada guru TPA dan Garin masjid		
					Pemberian bantuan operasional sarana ibadah di Kota Payakumbuh	Program Pemerintahan Dan Kesra (Bagian Kesra)	Setdako
					Pengembangan kelurahan madani		
					Mendorong munculnya kader ulama pembina umat dari mesjid		
					Peningkatan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat		
				Meningkatkan pengembangan kebudayaan	Mengoptimalkan pemberdayaan lembaga adat dalam mendukung kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga
					Pelestarian adat dan budaya dengan pendekatan ABS SBK melalui edukasi dan digitalisasi	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga

No	PRIORITAS/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKA T DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					Meningkatnya upaya penggalan dan penyelamatan literasi Sejarah, budaya dan cagar budaya	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga
					Peningkatan dan penguatan peran dan potensi budaya lokal dalam aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kegiatan bernuansa kebudayaan.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Kesbangpol
						Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kasbangpol
Prioritas 5 : Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan, Dan Berkelanjutan							
13	Meningkatnya dan kualitas lingkungan hidup	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	19.68	Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan	Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH), taman kota dan Tempat Pemakaman Umum (TPU).	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum	Dinas PUPR
		Indeks Kualitas Lahan (indeks)	52.73		Meningkatnya pengelolaan limbah domestik dan non domestik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem drainase	Dinas PUPR

No	PRIORITAS/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKA T DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		RT dengan Akses Sanitasi Aman (%)	20,48		Meningkatnya pengawasan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan	Program Pengendalian, Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LH
		Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	33,13		Meningkatkan upaya mitigasi perubahan iklim melalui program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		
				Meningkatkan pengelolaan persampahan secara terpadu dan komprehensif.	Intensifikasi Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pengurangan sampah (Terkait Sumber daya manusia)	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas LH
					Meningkatkan kualitas sarana prasarana pengelolaan persampahan kota	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas PUPR
					Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan inovasi pengelolaan sampah kota, ditingkat sumber dan	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan	Dinas Lingkungan Hidup

No	PRIORITAS/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKA T DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kawasan (Terkait sarana prasarana)	Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
					Memperkuat kelembagaan dan regulasi pengelolaan persampahan kota, termasuk tingkat local dan non formal (Terkait kelembagaan dan regulasi)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUPR dan dinas PKP
					Optimalisasi penyediaan anggaran pengelolaan sampah		
					Meningkatkan upaya desentralisasi pengelolaan sampah		
				Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatkan pemenuhan prasarana, sarana, utilitas (PSU) permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Dinas PKP
					Meningkatkan akses kepemilikan rumah dan hunian yang layak		
					Bantuan sanitasi dan peningkatan RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah.		

No	PRIORITAS/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKA T DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pencegahan dan revitalisasi kawasan kumuh	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas PKP
					Ikut memsukkseskan program strategis nasional 3 juta rumah		
14	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas	Indeks Infrastruktur	64.09	Meningkatkan infrastruktur perkotaan yang inklusif dan ramah lingkungan	Pengembangan kawasan strategis perkotaan (7 kawasan strategis)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Persentase RT yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau	82.73		Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pembangunan Smart Transportation (termasuk konektivitas dengan destinasi wisata luak nan bungsu, berupa jalan, jembatan, moda transpotasi, dan kerjasama dengan kab 50 kota/ daerah hinterland).	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas PKP
		Konsumsi listrik per kapita (kWh/kapita)	1,273		Ketersediaan prasarana dan sarana perkantoran	Program Pengelolaan Dan	Dinas PUPR

No	PRIORITAS/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKA T DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					pemerintahan yang memadai	Pengembangan Sistem drainase	
		Kapasitas Air Baku (m3/detik)	5.21		Meningkatkan kualitas infrastruktur layanan dasar (PADM, Listrik, Drainase, Persampahan, limbah domestik/ sanitasi (PHBS dan STBM), dll)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PUPR
		Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	90.41		Penataan parkir yang representatif	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
					Meningkatnya kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan (Sarana Perkotaan meliputi berbagai fasilitas publik yang langsung dimanfaatkan oleh masyarakat seperti taman rekreasi, pasar, pelayanan	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas PUPR
						Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPR
						Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas PUPR

No	PRIORITAS/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKA T DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
					sosial (pendidikan, kesehatan peribadatan) dll. Sedangkan prasarana perkotaan merupakan penunjang berfungsinya sarana perkotaan seperti jalan, air limbah, persampahan, drainase dll)	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PUPR
				Meningkatkan kualitas penataan kota	Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan penataan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUPR
					Optimalisasi penataan kota dan pedestrian		

67. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan RKPD
68. Dari program yang ada dalam Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, dalam RKPD Kota Payakumbuh tahun 2025 dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan seperti yang terlihat pada tabel
- 69.

70. Tabel

71. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan RKPD

72.

73.

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Dinas Pendidikan			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi AKIP Dinas Pendidikan oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Pendidikan	80 Nilai 88,50 indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi program kegiatan renstra dengan renja	100 Persen	DINAS PENDIDIKAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	93 Persen	DINAS PENDIDIKAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi pelaporan barang milik daerah	91 Persen	DINAS PENDIDIKAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	DINAS PENDIDIKAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum Dinas Pendidikan sesuai standar	100 Persen	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	88 Persen	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	88 Persen	DINAS PENDIDIKAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah	100 Persen	DINAS PENDIDIKAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS); Persentase anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (APS)	100 % 100 % 74,55 % 98 %	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD/SMP terakreditasi A	76,24 Persen	DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SD/SMP terakreditasi A	76,24 Persen	DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentasi PAUD terakreditasi B	76,50 %	DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Dikmas terakreditasi B	66,67 Persen	DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	100 %	
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Tenaga Pendidik yang dilatih; Persentase sekolah yang dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang divalidasi	51,72 %	DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik Indeks Pemerataan Guru	58 % 81 %	
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pendidik yang memiliki kualifikasi sarjana (S1)	95 Persen	DINAS PENDIDIKAN
Dinas Kesehatan			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinkes Oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas kesehatan	85 Nilai 89 Indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	7 Dokumen	DINAS KESEHATAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersedia	3 Dokumen	DINAS KESEHATAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian yang diadakan	430 Paket	DINAS KESEHATAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kegiatan administasi perkantoran yang tersedia	6 Dokumen	DINAS KESEHATAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang di adakan	107 unit	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen kegiatan penunjang perkantoran yang tersedia	2 Dokumen	DINAS KESEHATAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	20 Unit	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase layanan UKM sesuai standar	100 %	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana, prasarana, alat kesehatan dan penunjang fasilitas kesehatan yang disediakan sesuai standar	11 Unit Kerja	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	100 %	DINAS KESEHATAN
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah dokumen pengelolaan Informasi Kesehatan yang tersedia	3 Dokumen	DINAS KESEHATAN
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RS sesuai standar yang diterbitkan izin operasional	4 Dokumen	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan sesuai standar	100 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen SDM Kesehatan yang tersedia	2 Dokumen	DINAS KESEHATAN
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Kesehatan yang meningkat kompetensinya	5 Orang	DINAS KESEHATAN
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik,toko obat,dll) yang memenuhi standar dan persyaratan peizinan	100 %	
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen izin fasilitas pelayanan kefarmasian yang diterbitkan	1 dokumen	DINAS KESEHATAN
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	jumlah dokumen penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan NO PIRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	1 Dokumen	DINAS KESEHATAN
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen sertifikat laik sehat yang tersedia Jumlah dokumen Sertifikat P- IRT yang diterbitkan	1 dokumen 1 Dokumen	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pelaksanaan germas pada masyarakat	100 %	
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kegiatan advokasi dan kemitraan masyarakat yang tersedia	3 Dokumen	DINAS KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Promkes yang tersedia	3 Dokumen	DINAS KESEHATAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan UKBM yang tersedia	3 dokumen	DINAS KESEHATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
UPT RSUD dr Adnaan WD			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinkes Oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas kesehatan	85 Nilai 89 Indeks	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang tersedia untuk Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	9 Unit Kerja	DINAS KESEHATAN
Puskesmas Ibul			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinkes Oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Kesehatan	85 Nilai 89 Indeks	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang tersedia untuk Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	9 Unit Kerja	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase layanan UKM sesuai standar	100 %	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	100 %	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pelaksanaan germas pada masyarakat	100 %	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan UKBM yang tersedia	3 Dokumen	DINAS KESEHATAN
Puskesmas Parit Rantang			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinkes Oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas kesehatan	85 Nilai 89 Indeks	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang tersedia untuk Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	9 Unit Kerja	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase layanan UKM sesuai standar	100 %	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	100 %	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pelaksanaan gernas pada masyarakat	100 %	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan UKBM yang tersedia	3 Dokumen	DINAS KESEHATAN
Puskesmas Payolansek			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinkes Oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas kesehatan	85 Nilai 89 Indeks	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang tersedia untuk Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	9 Unit Kerja	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase layanan UKM sesuai standar	100 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	100 %	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pelaksanaan germas pada masyarakat	100 %	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan UKBM yang tersedia	3 Dokumen	DINAS KESEHATAN
Puskesmas Tiakar			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinkes Oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas kesehatan	85 Nilai 89 Indeks	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang tersedia untuk Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	9 Unit Kerja	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase layanan UKM sesuai standar	100 %	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	100 %	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pelaksanaan germas pada masyarakat	100 %	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan UKBM yang tersedia	3 Dokumen	DINAS KESEHATAN
Puskesmas Air Tabit			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinkes Oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas kesehatan	85 Nilai 89 Indeks	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang tersedia untuk Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	9 Unit Kerja	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase layanan UKM sesuai standar	100 %	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	100 %	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pelaksanaan germas pada masyarakat	100 %	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan UKBM yang tersedia	3 Dokumen	DINAS KESEHATAN
Puskesmas Tarok			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinkes Oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas kesehatan	85 Nilai 89 Indeks	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang tersedia untuk Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	9 Unit Kerja	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase layanan UKM sesuai standar	100 %	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	100 %	DINAS KESEHATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pelaksanaan germas pada masyarakat	100 %	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan UKBM yang tersedia	3 Dokumen	DINAS KESEHATAN
Puskesmas Lampasi			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinkes Oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas kesehatan	85 Nilai 89 Indeks	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang tersedia untuk pelayan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase layanan UKM sesuai standar	100 %	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	100 %	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pelaksanaan germas pada masyarakat	100 %	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan UKBM yang tersedia	3 Dokumen	DINAS KESEHATAN
Puskesmas Padang Karambia			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinkes Oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas kesehatan	85 Nilai 89 Indeks	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang tersedia untuk Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	9 Unit Kerja	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase layanan UKM sesuai standar	100 %	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	100 %	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pelaksanaan germas pada masyarakat	100 %	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan UKBM yang tersedia	3 Dokumen	DINAS KESEHATAN
UPTD Instalasi Farmasi			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase layanan UKM sesuai standar	100 %	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana, prasarana, alat kesehatan dan penunjang fasilitas kesehatan yang disediakan sesuai standar	11 Unit Kerja	DINAS KESEHATAN
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	94,00 indeks 94,00 Nilai	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Realisasi Program/ Kegiatan Persentase Kesesuaian Renja dan Renstra	100 % 98,00 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan SKPD	100 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Berprilaku Disiplin Persentase ASN Yang Menduduki Jabatan Sesuai Dengan Kompetensi Persentase ASN yang mengikuti Bimtek sesuai Kompetensi	100 % 44,00 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Dinas	93,00 Indeks	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Alat Berat/Alat Besar/ Alat Perbengkelan sesuai Kebutuhan Persentase Kondisi Sarana Dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik Persentase Pemenuhan Layanan Laboratorium Konstruksi yang dilaksanakan	100 % 97,00 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kinerja Operasional	98,00 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Alat Berat/Alat Besar Kondisi Baik Persentase Alat Laboratorium Konstruksi dengan Kondisi Baik Persentase Alat Perbengkelan Kondisi Baik	100 % 98,00 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Penataan sungai Persentase debit air baku yang tersedia Persentase irigasi dengan kondisi baik Persentase sungai yang berfungsi baik	28,45 % 58,63 % 72,90 % 92,85 %	
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sungai yang Terpelihara	30 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelompok P3A/GP3A yang Aktif Persentase Ketersediaan Debit Air Irigasi	92.2 % 94.66 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Pelayanan Air Minum Persentase rumah tangga terlayani air minum perpipaan	90,41 % 92,00 %	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah Terpasang Persentase Sambungan Rumah Pengguna Air Bersih	29460 SR 90.61 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan Prasarana Pengolahan Persampahan	31,00 %	
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Prasarana Pengolahan Sementara Persentase Penyediaan Prasarana Tempat Pengolahan Akhir Sampah	100 % 88 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Pengolahan Air Limbah Akses Aman	0 %	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Rumah yang Memenuhi pengolahan air limbah akses aman	0 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase jalan kota yang memilki drainase	67,74 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Drainase Sesuai Kebutuhan	75,43 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/ Kota Persentase Pelaksanaan Pembangunan Sarana Ibadah Skala Kota (Tahun Jamak) Persentase penyediaan sarana perkantoran tertentu yang representatif Persentase bangunan gedung pemerintah yang representatif	100,00 % 37,50 - 45,00 % 81,90 % 85,04 %	
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Memiliki SLF Persentase Permohonan Izin Bangunan yang Diterbitkan	1,04 % 98,65 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Persentase Jalan Lingkung Kondisi baik	15,00 % 48,27 %	
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jalan Lingkung Sesuai Kebutuhan	80,65 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kota Memenuhi Standar Fungsi dan Kelas	52,83 %	
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan yang Dilayani Penerangan Jalan Umum (PJU) Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar Persentase Ketersediaan Jalan Kota sesuai kebutuhan Persentase Panjang jalan yang dipelihara	31,29 % 47,53 % 8,12 % 99,92 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pekerjaan jasa konstruksi yang berkinerja baik	91,50 %	
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	0,35 Indeks	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Standar Konstruksi	100 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rasio proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasan tanpa Kecelakaan Konstruksi	87 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kepatuhan pelaku pembangunan sesuai rencana tata ruang	46,89 %	
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen dan Regulasi Tata Ruang yang ditetapkan dan dievaluasi	66,67 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang disusun Persentase KKPR yang difasilitasi Persentase Peta dan Informasi RTR yang dihasilkan	50,00 % 75,00 % 84,00 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelanggaran Tata Ruang yang Ditangani	92,00 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase tanah sengketa konflik yang difasilitasi	0 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sengketa, konflik, dan perkara pertanahan yang diinventarisasi	0 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	45,54 %	
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sertifikasi Aset Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota	22,75 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
UPTD Alat Berat			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	94,00 indeks 94,00 Nilai	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Alat Berat/Alat Besar/ Alat Perbengkelan sesuai Kebutuhan Persentase Kondisi Sarana Dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik Persentase Pemenuhan Layanan Laboratorium Konstruksi yang dilaksanakan	100 % 97,00 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Alat Berat/Alat Besar Kondisi Baik Persentase Alat Laboratorium Konstruksi dengan Kondisi Baik Persentase Alat Perbengkelan Kondisi Baik	100 % 98,00 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
UPTD Laboratorium Konstruksi			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	94,00 indeks 94,00 Nilai	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Laboratorium Konstruksi yang dilaksanakan	100 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Alat Berat/Alat Besar Kondisi Baik Persentase Alat Laboratorium Konstruksi dengan Kondisi Baik Persentase Alat Perbengkelan Kondisi Baik	100 % 98,00 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memiliki pengolahan air limbah akses aman	25,41 %	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Rumah yang Memenuhi pengolahan air limbah akses aman	22,58 %	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas PKP	80 nilai 87 indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program dan Kegiatan	95 %	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
			KAWASAN PERMUKIMAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan terhadap Aliran Kas	90 %	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan kepegawaian Dinas PKP	100 %	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	90 %	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	90 %	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	90 %	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	90 %	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penurunan angka Backlog	5161 Unit	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketersediaan Data dan Regulasi terkait SPM Perumahan	100 %	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman Terhadap Regulasi Terkait SPM Perumahan	100 %	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tidak Layak Huni korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang ditingkatkan Kualitasnya	100 %	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Rumah Swadaya	84,31 %	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak huni	97,53 %	
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditingkatkan Kualitasnya	11,52 %	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perentase Penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembang Perumahan Kepada Pemerintah Daerah	26,11 %	
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah dokumen persyaratan serah terima PSU yang selesai diverifikasi sesuai tahapan	5 lokasi	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
			KAWASAN PERMUKIMAN
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Nilai IKM Satpol PP dan Damkar	87 Nilai 90 indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan jumlah evaluasi kinerja yang tersedia	100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program/kegiatan dan persentase dokumen kepegawaian yang lengkap	100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan barang milik daerah Satpol PP dan Damkar	100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan, Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetisinya, Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	100 % 100 % 80 % 100 %	
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelanggaran perda yang ditindaklanjuti	100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase masyarakat yg memahami perda pekat	80 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	100 % 50 %	
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kebakaran WMK yang tertangani dalam waktu tanggap	100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi kejadian kebakaran yang dilaksanakan	100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase relawan yang bersertifikat	100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia yang Dilaksanakan	100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Nilai IKM BPBD	81 Nilai 92 indeks	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja kinerja program/kegiatan	100 %	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	100 %	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kepegawaian BPBD	100 %	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum BPBD sesuai standar	100 %	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100 %	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase layanan umum BPBD sesuai standar	100 %	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100 %	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase cakupan penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana, Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana, Persentase penanganan pasca bencana	100 % 100 % 100 %	
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga kota payakumbuh yang menerima pelayanan informasi rawan bencana	100 %	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga kota payakumbuh yang menerima pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga kota payakumbuh yang menerima pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	100 %	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana melalui jitupasna, rencana rehabilitasi, dan pasca rekonstruksi pasca bencana	100 %	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Dinas Sosial			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial Oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Sosial	90 Nilai 94 Indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi program kegiatan renstra dengan renja	100 %	DINAS SOSIAL
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program dan kegiatan	87 %	DINAS SOSIAL
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Kepegawaian ASN Inspektorat yang sesuai Standar	100 %	DINAS SOSIAL
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Dinas Sosial sesuai standar	100 %	DINAS SOSIAL
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhi kebutuhan sarana prasarana Kantor	100 %	DINAS SOSIAL
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Layanan Umum yang dibayarkan	100 %	DINAS SOSIAL
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD milik Dinas Sosial dalam keadaan baik	100 %	DINAS SOSIAL

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos	70 %	
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan Sumbangan yang berjalan sesuai aturan	100 %	DINAS SOSIAL
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya	65 %	DINAS SOSIAL
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	persentase PPKS yang terlayani	85 %	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	80 %	DINAS SOSIAL
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	100 %	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	100 %	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana yang ditangani	100 %	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	DINAS SOSIAL
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang mendapat Pemberdayaan Masyarakat	100 %	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang terpelihara	100 %	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase terpeliharanya TMP Kusuma Bangsa dan Pejuang 45	100 %	DINAS SOSIAL
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	85 Nilai 92.50 indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan	80 persen	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Terhadap Aliran Kas	80 persen	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Berpakaian Dinas Dengan Atribut Lengkap	100 persen	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana Penunjang Operasional Kantor	80 persen	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN Yang Memakai Barang Milik Daerah	100 persen	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	80 persen	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dibayarkan	80 persen	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktifitasnya Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	3.87 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	80 persen	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Yang Dibina	80 persen	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	46,50 % 46,50 %	
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	46,50 persen	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Penyebarluasan Informasi Kerja	80 persen	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	1424 Orang 4,03 %	
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	75 persen	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna Persentase sentra/klaster industri yang tertata Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	0,10 % 20 % 26.00 %	
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	66,67 persen	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan Persentase Industri yang menerapkan standarisasi mutu produk	100 % 2,60 %	
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Industri Yang Difasilitasi	6 IKM	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah data perusahaan IKM yang masuk ke dalam SIINAS Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	1 perusahaan 70 %	
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Informasi Industri	66,67 persen	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R)			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna Persentase sentra/klaster industri yang tertata Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	0,10 % 20 % 26.00 %	
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	66,67 persen	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP DP3AP2KB oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	82 Nilai 90,60 Indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan pencapaian kinerja sesuai pedoman	100 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan gaji/tunjangan ASN	100 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	35 stel	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum Persentase tamu yang dilayani sesuai standar	100 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 unit	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah updating data dan informasi di website Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 updating 90 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	151 unit	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan yang duduk di legislatif Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	16 % 3,82 % 63,89 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan		
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang memahami konsep gender dan PPRG Persentase pemenuhan dokumen untuk evaluasi PUG	40 lembaga 100 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemberdayaan perempuan pada organisasi kemasyarakatan Jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam kaukus perempuan politik indonesia	53 kelompok 40 orang	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	0 lembaga	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	0 Orang	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Resiko kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	0,248 100 % %	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah advokasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	5 advokasi	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase layanan korban kekerasan perempuan yang dilayani melalui Mediko Legal	100 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	1 dokumen	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Jumlah organisasi perempuan yang aktif	0 Pembelajaran 34 organisasi	
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak	53 kelompok	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga	27 organisasi	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Jumlah perwako,himbauan,MOU terkait perlindungan anak	100 Persentase 1 Dokumen	
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah updating data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (SIMFONI-PPA) Persentase pemanfaatan data gender dan anak oleh satuan kerja terkait	12 updating 90 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak Jumlah perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat	61,31 indeks 750 Skor 9 kelurahan	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelembagaan PHA Jumlah pelembagaan PHA	1 dokumen 40 lembaga	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kekerasan terhadap anak Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	0,023 % 100 % 82,92 indeks	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan banyak pihak	1 dokumen	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan banyak pihak	47 koordinasi	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK,

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
			KELUARGA BERENCANA
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	4 lembaga	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase kebijakan Propinsi tentang data kependudukan yang dilaksanakan oleh Pemko Payakumbuh TFR(Angka kelahiran total) Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	100 % 2,65 % 6,18-6,20 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah perumusan dan pemukhtahiran data keluarga pada aplikasi SiGA	12 pemukhtahiran	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemetaan sistem informasi keluarga	12 kali	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Persentase pemakaian kontrasepsi Modren (Modren Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	11.3 % 63.07 %	
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah pembinnan KB sesuai dengan kearifan lokal	2 momentum strategis	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK,

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
			KELUARGA BERENCANA
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB	100 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian kebutuhan alokon Jumlah Faskes KB yang mendapatkan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	1 dokumen 30 Faskes KB	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Integrasi program Bangga Kencana di Kampung KB	100 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rata rata Usia Perkawinan Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	22,5 Tahun 60,1 Persentase	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kader yang mendapatkan pembinaan sebagai kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga	80 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	53 organisasi	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Dinas Ketahanan Pangan			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan oleh inspektorat Nilai IKM Dinas Ketahanan Pangan	80,95 nilai 86,00 indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan	85 %	DINAS KETAHANAN PANGAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Terhadap Aliran Kas	90 %	DINAS KETAHANAN PANGAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan kepegawaian	100 %	DINAS KETAHANAN PANGAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Umum Sesuai Standar	85 %	DINAS KETAHANAN PANGAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	85 %	DINAS KETAHANAN PANGAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Sesuai Standar	85 %	DINAS KETAHANAN PANGAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasana kantor dalam kondisi baik	85 %	DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase cadangan pangan yang tersedia (Masyarakat+Pemda)	53,00 %	
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	17 %	DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan	58,00 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
	Persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE	62,00 %	
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1. Persentase Pengembangan Usaha Kelembagaan Distribusi Pangan 2. Persentase Informasi Harga yang Up to Date	100 % 18 %	DINAS KETAHANAN PANGAN
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	65 %	DINAS KETAHANAN PANGAN
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Diversifikasi Konsumsi Pangan 2. Persentase Masyarakat yang telah Terampil dalam Mengolah Pangan Lokal Non Beras Non Terigu	22 % 44 %	DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Skor PPH ketersediaan	89,20 skor	
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Instansi Terkait	50 %	DINAS KETAHANAN PANGAN
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Hasil Pemanfaatan Pekarangan	19 %	DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi	90,00 %	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang Memahami Zat Berbahaya bagi Pangan	19 %	DINAS KETAHANAN PANGAN
Dinas Lingkungan Hidup			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Lingkungan Hidup	77,90 Indeks 89 Indeks	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan	95 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja realisasi keuangan program kegiatan	95 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN berpakaian dinas dngan atribut lengkap	100 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum Dinas Llingkungan Hidup sesuai standar	100 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan	100 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan umum DInas Lingkungan Hidup sesuai standar	100 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen Informasi Lingkungan yang Disusun	5 Dokumen	
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen sebagai komitmen pemenuhan RPPLH	100 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,28 Indeks	
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase industri yang dipantau Persentase sungai yang dipantau	100 % 80 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH Publik	14,90 %	
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase jenis spesies tanaman (flora) lokal yang dikelola Persentase RTH kota yang dipelihara dan ditata	1 % 25 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3 yang Memiliki dokumen Lingkungan dan Memiiki Izin PPLH	50 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase rekomendasi teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dikeluarkan terhadap usaha/kegiatan yang mengajukan permohonan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3	60 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	74 %	
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pengawasan dari usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya RPPLH	60 usaha/kegiatan 6 kegiatan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Kelompok Masyarakat dan Sekolah yang terbina Dalam Pengelolaan Lingkungan	20 %	
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah kelurahan yang dibina Persentase sekolah yang dibina dalam pengelolaan persampahan	20 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah	96 %	
Pengelolaan Sampah	Persentase sarana dan prasarana persampahan dalam kondisi baik	100 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UPTD Laboratorium Lingkungan			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,28 Indeks	
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase industri yang dipantau Persentase sungai yang dipantau	100 % 80 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	93 indek	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	100 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi Keuangan	100 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pegawai	100 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Kantor	90 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor dalam Keadaan Baik	100 %	DINAS KEPENDUDUKAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
			DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Layanan Kantor yang Dibayarkan	100 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah	100 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	20 % 75 %	
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan kepemilikan KK Cakupan Kepemilikan KTP el Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	65 % 97,75 % 99,56 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil pelaksanaan inovasi pelayanan dan sosialisasi	3 laporan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan; Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan; Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan; Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 % 100 % 100 % 100 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan akta kelahiran 0-17 tahun Cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan Cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua peristiwa yang perceraianannya dilaporkan Cakupan kepemilikan akta perkawinan pada semua peristiwa yang perkawinannya dilaporkan	100 % 99 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pelaksanaan inovasi pelayanan dan sosialisasi	3 laporan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan bimtek terkait pencatatan sipil	1 laporan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	91 %	
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terlaksananya pemutakhiran dan pemanfaatan database kependudukan	3 dokumen	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan melalui hak akses; Tersedianya standarisasi pelayanan dan media publikasi terkait adminduk	30; 1; 6 OPD; dokumen SP; Media Publikasi	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersusunnya laporan pembinaan dan pengawasan PIAK	2 laporan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	3 Dokumen	
Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya Penyajian data dan Profil Kependudukan	3 dokumen	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Perhubungan			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat Nilai IKM	81 nilai 89 indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen pelayanan publik	90 %	DINAS PERHUBUNGAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi Keuangan Program/Kegiatan	90 %	DINAS PERHUBUNGAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disipilin ASN Dalam Berpakaian	100 %	DINAS PERHUBUNGAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kondisi Sarana Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik	90 %	DINAS PERHUBUNGAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kondisi Sarana Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik	90 %	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam kondisi baik	90 %	DINAS PERHUBUNGAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam kondisi baik	90 %	DINAS PERHUBUNGAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal ; Konektivitas Darat Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	82 % 86 %	
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	0 %	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan dan fasilitas pendukung jalan dalam kondisi baik	90 %	DINAS PERHUBUNGAN
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	86 %	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menggunakan sarana angkutan umum	0 %	DINAS PERHUBUNGAN
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menggunakan sarana angkutan umum	0 %	DINAS PERHUBUNGAN
UPTD Terminal			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal ; Konektivitas Darat Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	82 % 86 %	
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase masyarakat yang menggunakan sarana angkutan umum	0 %	DINAS PERHUBUNGAN
UPTD Parkir			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal ; Konektivitas Darat Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	82 % 86 %	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase kenaikan pengguna jasa parkir	80 %	DINAS PERHUBUNGAN
UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal ; Konektivitas Darat Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	82 % 86 %	
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kenaikan kendaraan yang melaksanakan pengujian	86 %	DINAS PERHUBUNGAN
Dinas Komunikasi dan Informatika			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi AKIP Nilai IKM	81.20 Indeks 86.30 Nilai	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program/kegiatan	100 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	95 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Kepegawaian	100 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum diskominfo sesuai standar	100 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondidi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase pelayanan penyaluran informasi pembangunan daerah melalui media	100 %	
	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	78 %	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mempublikasikan data dan informasi publik melalui PPID	31 OPD	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase penyaluran pengaduan masyarakat melalui LAPOR SP4N ke Perangkat Daerah	100 %	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas	100 %	
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Persentase pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	3 Indeks 85 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	100 % 2.69 Poin	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen statistik yang tersedia Persentase Perangkat Daerah terkait yang mengumpulkan data Rata-rata waktu penyelesaian pengumpulan data statistik sektoral	4 buku 50 % 6 bulan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Tingkat keamanan informasi pemerintah	46.2 Angka 85 %	
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	85 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Koperasi dan UKM oleh Inspektorat Nilai IKM	84,85 Nilai 87,1 Indeks	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Program/Kegiatan	90 %	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas	90 %	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor dalam kondisi baik	0 %	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang lengkap	100 %	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor dalam kondisi baik	80 %	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80 %	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor dalam kondisi baik	80 %	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80 %	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	39,86 %	
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi kelembagaannya	60 Koperasi	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			
	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	60 Unit Usaha	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi aktif Persentase penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	46 % 70 %	
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang diawasi dan dinilai kinerja simpan pinjamnya	60 Koperasi	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	42 % 65 %	
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperkuat SDM nya	120 Pengelola Koperasi	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	22,38 %	
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	32 Koperasi	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya status usaha mikro dari non formal menjadi formal (legalitas usaha) Pertumbuhan wirausaha Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	0,30 % 11,26 % 4,84 %	
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi legalitas usaha	0,20 %	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	0,20 % 1,84 %	
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha mikro yang difasilitasi perluasan jaringan pasarnya	0,10 %	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi Persentase usaha perdagangan yang memiliki izin usaha	12,50 % 29 %	
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	55 %	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana dan prasarana pasar/pertokoan dalam kondisi baik Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	80 % 91,47 % 92 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
	Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang mematuhi SOP		
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana distribusi perdagangan yang disediakan	4 unit	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pelanggaran Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Pasar Persentase Pelanggaran Perda No. 13 Tahun 2016 tentang Pasar Tradisional Persentase Pelanggaran Perda No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Persentase Pelanggaran Perda No. 9 Tahun 2010 tentang Pedagang Kaki Lima	3 %	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase peningkatan jumlah komoditi yang diperdagangkan Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	3 % 4,17 %	
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	95 %	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk	90 %	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pelaku usaha yang tertib niaga Persentase penanganan pengaduan konsumen	27 % 50,48 %	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Potensi alat UTTP yang dilakukan tera ulang	1780 unit	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan Jumlah kerjasama perdagangan	4 % 5 kerjasama	
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Event yang dilaksanakan	3 kali	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
UPTD Promosi Produk UMKM			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah kerjasama perdagangan	5 kerjasama	
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Event yang dilaksanakan	3 kali	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM DPMPSTP Nilai Evaluasi AKIP DPMPSTP oleh Inspektorat	3,74 Indeks 81,20 Nilai	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelayanan publik	100 %	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan	100 %	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan kepegawaian	100 %	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan kantor	80 %	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	100 %	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa layanan kantor yang dibayarkan	100 %	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana gedung kantor yang terpelihara dengan baik	100 %	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi total terhadap target investasi Nilai realisasi investasi	100 % 230 Milyar	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase pembuatan peta potensi investasi yang telah divalidasi	25 %	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah investor Persentase peningkatan Investor yang berinvestasi	10 % 10 %	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal	25 %	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sesuai SOP Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	100 % 100 %	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang sesuai dengan SOP	100 %	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yan dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha Persentase peluang investasi yang telah divalidasi	10 % 28 %	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menyampaikan Laporan kegiatan Penanaman Modal	60 %	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
			TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data perizinan dan non perizinan Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	100 % 100 %	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	100 %	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP DPK oleh Inspektorat Nilai IKM DPK	80,05 nilai 86,75 Indek	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi program kegiatan dengan renstra	95,00 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	100,00 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum DPK sesuai standar	100,00 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor	100,00 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah	100,00 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100,00 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	66,20 Nilai	
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Perpustakaan Jumlah perpustakaan yang dibina	2300 Orang 38 Pustaka	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Jumlah peserta lomba literasi	10000 Orang 120 Orang	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	102 eksemplar 1,60 %	
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi budaya Etnis Nusantara yang ditemukan	102 Eksemplar	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	71,00 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip dinamis sesuai standar kearsipan	35,50 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen/arsip statis yang diterima	550 Arsip	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase peserta sosialisasi yang meningkat pemahamannya dalam mengelola arsip	0 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	40,16 % 4,50 %	
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kader, pemuda pelopor dan wirausaha muda dan pelatihan paskibraka	3 kegiatan	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi yang diberdayakan dan dikembangkan	30 OKP	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan prestasi olahraga (tingkat daerah	55 medali	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase guru/pelatih yang aktif membina pelajar dalam cabang olahraga	80 %	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kompetisi / event olahraga yang diselenggarakan	5 event	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	jumlah olahraga rekreasi dan saran prasarana olahraga yang dikembangkan	2 event / unit	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Peringkat pramuka tingkat propinsi	2 peringkat	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan	1 organisasi kepramukaan	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase objek pemajuan kebudayaan dilestarikan	31 %	
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah cagar budaya yang dilestarikan	3 karya budaya	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah event kesenian tradisional yang dilestarikan	3 event	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga adat yang dilakukan pembinaan	22 lembaga	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Komunitas/Pelaku seni yang ditingkatkan kapasitasnya	5 %	
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	telaksananya kegiatan diplomasi seni dan budaya	2 kegiatan	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah benda cagar budaya yang dilindungi Jumlah cagar budaya dalam kondisi baik/terpelihara	28 bcb 28 cb	
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	jumlah benda cagar budaya yang dilindungi	28 bcb	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase koleksi permuseuman yang dipelihara	100 %	
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	jumlah koleksi museum yang dikelola	80 unit	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Parpora Nilai AKIP oleh Inspektorat	100 Nilai 90 indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen pelayanan publik dan capaian kinerja program/kegiatan	100 %	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang dibayarkan gaji	100 %	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100 %	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	80 %	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	80 %	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	80 %	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	80 %	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah pengembangan destinasi pariwisata Persentase objek wisata unggulan dalam kondisi baik	1 ow 50 %	
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah objek wisata unggulan yang dikembangkan	4 ow	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata rata lama tinggal wisatawan Jumlah kerjasama yang dilakukan dengan pelaku usaha jasa pariwisata Persentase promosi kepariwisataan yang dilaksanakan persentase promosi kepariwisataan yang dilaksanakan	1.50 hari 7 Kerjasama 80 % 80 %	
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	persentase promosi kepariwisataan yang dilaksanakan	80 %	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah karya ekonomi kreatif yang difasilitasi	1 fasilitasi	
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	jumlah pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi	1 kegiatan	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
UPTD Pengelola Objek Wisata dan Usaha Pariwisata			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah pengembangan destinasi pariwisata Persentase objek wisata unggulan dalam kondisi baik	1 ow 50 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah objek wisata unggulan yang dikembangkan	4 ow	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP dari Inspektorat Nilai IKM Dinas Pertanian	83,50 Nilai 88,00 indek	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah populasi sapi yang dipelihara	80 ekor	DINAS PERTANIAN
UPTD Puskesmas			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase angka kematian ternak Persentase fasilitasi pemasaran hasil produksi peternakan	0,30 % 35 %	
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan kesehatan hewan yang difasilitasi	1 kegiatan	DINAS PERTANIAN
UPTD Perbenihan dan Pelayanan Jasa Alsintan			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana peternakan	18,34 % 85 %	
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Persentase pemanfaatan SDG Padi Bersertifikat sesuai target tanam 2. Indeks Pertanaman 3. Persentase pemenuhan layanan sarana pendukung pertanian	62 %; 2,8 ; 90 %	DINAS PERTANIAN
UPTD RPH dan Pasar Ternak			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase angka kematian ternak Persentase fasilitasi pemasaran hasil produksi peternakan	0,30 % 35 %	
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Unit Usaha yang memiliki Sertifikasi NKV	7 %	DINAS PERTANIAN
Dinas Pertanian			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase kelompok pembudidaya yang menerapkan teknologi anjuran Jumlah total produksi perikanan	45 % 560 ton	
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	1. Persentase pemanfaatan lahan budidaya 2. Jumlah pembudidya yang mendapat akses permodalan 3. Jumlah peningkatan kelas kelompok pembudidaya	63 %; 7 orang; 1 Kelompok	DINAS PERTANIAN
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1. Persentase penggunaan benih ikan unggul yang digunakan pembudidaya 2. Persentase penurunan kematian ikan	70 % 6 %	DINAS PERTANIAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka konsumsi ikan JUmlah produksi olahan hasil perikanan	33,40 kg/kapita/th 7 ton	
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah peningkatan unit usaha pengolahan dan pemasaran perikanan	1 unit	DINAS PERTANIAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP dari Inspektorat Nilai IKM Dinas Pertanian	83,50 Nilai 88,00 indek	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sasaran, proram dan kegiatan renja perangkat daerah selaras dengan renstra	90 %	DINAS PERTANIAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan Dinas	90 %	DINAS PERTANIAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	90 %	DINAS PERTANIAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan dokumen evaluasi pelayanan publik	2 Dokumen	DINAS PERTANIAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	90 %	DINAS PERTANIAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	90 %	DINAS PERTANIAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	90 %	DINAS PERTANIAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana peternakan	18,34 % 85 %	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1. Persentase pupuk yang disalurkan 2. Jumlah alsintan yang di salurkan 3. Persentase pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	100 %; 2 jenis; 100 %	DINAS PERTANIAN
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Persentase pemanfaatan SDG Padi Bersertifikat sesuai target tanam 2. Indeks Pertanaman 3. Persentase pemenuhan layanan sarana pendukung pertanian	62 %; 2,8 %; 90 %	DINAS PERTANIAN
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	1) tersedianya bibit ternak 2) pelatihan Budidaya ternak/pengolahan pakan 3) Tersedianya Pakan Ternak	500 dosis; 1 kali; 20 ton	DINAS PERTANIAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan prasarana pertanian	59,20 %	
Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Rekomendasi Lahan Pertanian Berkelanjutan	12 laporan	DINAS PERTANIAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana yang dibangun	5 unit	DINAS PERTANIAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase angka kematian ternak Persentase fasilitasi pemasaran hasil produksi peternakan	0,30 % 35 %	
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Persentase pelayanan ternak di paster sesuai sop - Persentase fasilitasi pemotongan dan pendistribusian daging tepat waktu	100 %; 100 %	DINAS PERTANIAN
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentasi fasilitasi penanggulangan bencana pertanian	60 %	
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	1. Persentase luas lahan serangan OPT yang dikendalikan (Padi) 2. Persentase luas lahan serangan OPT yang dikendalikan (Kakao) 3. Jumlah Petani yang memanfaatkan Akses Permodalan Dan Pembiayaan 4. Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan yang memanfaatkan akses Permodalan	1. 50% 2. 40% 3. 2595 petani 4. 17 Pelaku Usaha	DINAS PERTANIAN
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase fasilitasi pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan	40 %	
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemasaran hasil olahan pertanian	6 UP3HP	DINAS PERTANIAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani ternak yang menerapkan teknologi tepat guna Persentase luas tanam yang menerapkan teknologi tepat guna	23 % 45 %	
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna	45 %	DINAS PERTANIAN
Sekretariat Daerah			
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
SEKRETARIAT DAERAH			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	88,60 Indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IKM Sekretariat Daerah Persentase capaian kinerja program/ kegiatan	100 % 89 nilai	SEKRETARIAT DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	90 %	SEKRETARIAT DAERAH
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	100 %	SEKRETARIAT DAERAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	SEKRETARIAT DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum Sekretariat Daerah sesuai standar	100 %	SEKRETARIAT DAERAH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor	90 %	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %	SEKRETARIAT DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	90 %	SEKRETARIAT DAERAH
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kepada KDH dan WKDH	100 %	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan baik	100 %	SEKRETARIAT DAERAH
Penataan Organisasi	Indeks Kelembagaan Perangkat Daerah	39.09 %	SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase acara kedinasan (seremonial keprotokolan) yang difasilitasi dengan baik	100 %	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD indeks reformasi hukum	3,4000 Nilai 87 Indeks	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan tepat waktu	100 %	SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase koordinasi hukum yang difasilitasi Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi	100 %	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen Kesepakatan Bersama/ Nota Kesepahaman yang difasilitasi	5 MoU/PKS	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan jasa	91,58 Indeks	
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	100 %	SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase hasil monitoring evaluasi yang ditindaklanjuti	100 %	SEKRETARIAT DAERAH
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pembinaan dan pendampingan advokasi pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui elektronik	100 % 4 kali	SEKRETARIAT DAERAH
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen kebijakan bidang pertambangan energi yang disusun	1 dokumen	SEKRETARIAT DAERAH
Sekretariat DPRD			
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
SEKRETARIAT DPRD			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Sekretariat DPRD oleh Inspektorat Nilai IKM Sekretariat DPRD	72,95 Nilai 85 Indeks	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program/kegiatan Persentase konsisten program kegiatan renstra dengan renja	100 %	SEKRETARIAT DPRD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	90 %	SEKRETARIAT DPRD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	SEKRETARIAT DPRD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum Sekretariat Dewan yang sesuai standar	100 %	SEKRETARIAT DPRD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor	90 %	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %	SEKRETARIAT DPRD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	90 %	SEKRETARIAT DPRD
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 %	SEKRETARIAT DPRD
Layanan Administrasi DPRD	Persentase terlaksananya layanan administrasi DPRD	100 %	SEKRETARIAT DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	persentase ranperda yang ditetapkan	100 %	
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase terlaksananya pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	100 %	SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran	100 %	SEKRETARIAT DPRD
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	100 %	SEKRETARIAT DPRD
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas DPRD	100 %	SEKRETARIAT DPRD

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi	100 %	SEKRETARIAT DPRD
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase terlaksananya fasilitasi tugas DPRD	100 %	SEKRETARIAT DPRD
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
PERENCANAAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Nilai IKM Bappeda	89 indeks 89 Indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program / kegiatan Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja Bappeda yang selaras dengan Renstra Bappeda	100 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	95 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum Bappeda sesuai standar	100 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan umum Bappeda sesuai standar	100 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD, Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100 %, 100 %,	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPD Persentase Pagu Belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	100 % 19.50 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan data pembangunan daerah	98,5 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data capaian kinerja PD yang akuntabel Persentase PD yang mencapai target kinerja tahunan rata-rata minimal 90%	93,55 % 97.50 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase implementasi SIPD sesuai tahapan perencanaan Tingkat akseibilitas data	100 % 71.43 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan , Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 % 100 %, 100 %	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang sosial budaya "Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang sosial budaya	100 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang ekonomi Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang ekonomi	100 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	75 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen penelitian bidang sosial dan kependudukan yang disusun	1 dokumen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	1 Dokumen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Badan Keuangan Daerah			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
KEUANGAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat Nilai IKM	72 Nilai 88 Indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi capaian kinerja program/ kegiatan	100 %	BADAN KEUANGAN DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan PD terhadap aliran kas	95 persen	BADAN KEUANGAN DAERAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase ASN yang berkapasitas	100 persen	BADAN KEUANGAN DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	80 persen	BADAN KEUANGAN DAERAH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	undefined	80 %	BADAN KEUANGAN DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan perkantoran yang terfasilitasi dengan baik	80 persen	BADAN KEUANGAN DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset yang terpelihara	100 persen	BADAN KEUANGAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD tepat waktu Persentase realisasi belanja terhadap anggaran Laporan keuangan berbasis akrual	27 Des 95 % ADA -	
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	persentase dokumen penganggaran yang dihasilkan	100 %	BADAN KEUANGAN DAERAH
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase meningkatnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	100 %	BADAN KEUANGAN DAERAH
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya kualitas laporan keuangan PD	100 %	BADAN KEUANGAN DAERAH
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan urusan kewenangan daerah dan bantuan yang tersalurkan	70 %	BADAN KEUANGAN DAERAH
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan dan implementasi sistem terhadap data keuangan daerah	100 %	BADAN KEUANGAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang telah mengelola BMD dengan baik	93.54 %	
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD dan Aset Kota yang terkelola dengan baik	93,54 %	BADAN KEUANGAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	13.50 %	
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah Nilai IKM	5 % 86,5 Nilai	BADAN KEUANGAN DAERAH
UPTD Fasilitasi Pembiayaan			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
KEUANGAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat Nilai IKM	72 Nilai 88 Indeks	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase fasilitasi pembiayaan yang lancar dari total pembiayaan	100 persen	BADAN KEUANGAN DAERAH
UPTD Pajak Daerah			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
KEUANGAN			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	13.50 %	
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah Nilai IKM	5 % 86,5 Nilai	BADAN KEUANGAN DAERAH
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
KEPEGAWAIAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi AKIP BKPSDM oleh Inspektorat Nilai IKM BKPSM	81,15 Nilai 90,00 indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program/kegiatan Persentase Capaian Kinerja program/ kegiatan Persentase konsistensi program kegiatan renstra dan renja Persentase konsistensi program kegiatan renstra dengan renja	100 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	95 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum BKPSDM sesuai standar	100 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor	90 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	90 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	12 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase penerimaan PNS sesuai dengan formasi yang dibutuhkan	100 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase penyusunan formasi yang sesuai dengan analisis jabatan	100 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase PNS yang difasilitasi tugas belajar dan izin belajar untuk Pengembangan Kompetensi ASN	100 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	12 %	
Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi	62 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang memiliki sertifikat Kompetensi Manajerial	60.00 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Inspektorat			
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
INSPEKTORAT DAERAH			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi AKIP Inspektorat Nilai IKM Inspektorat	83,00 89,00 Nilai Indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen pelayanan publik	100 %	INSPEKTORAT
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	90 %	INSPEKTORAT
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan kepegawaian yang sesuai standar	100 %	INSPEKTORAT
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum yang sesuai standar	100 %	INSPEKTORAT
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pengadaan yang diadakan	100 %	INSPEKTORAT
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Layanan Umum yang dibayarkan	100 %	INSPEKTORAT
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kondisi BMD dalam keadaan baik	80 %	INSPEKTORAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai Kapabilitas APIP Nilai indek refomasi birokrasi pada area pengawasan	3 Level 66 Indeks	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pelaksanaan pengawasan Internal	100 %	INSPEKTORAT
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu	100 %	INSPEKTORAT

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perangkat daerah yang meningkat nilai evaluasi internal dan eksternal Nilai Maturitas SPIP Rata-rata nilai AKIP PD hasil Evaluasi inspektorat	100 % 3 Level A Nilai	
Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	100 %	INSPEKTORAT
Kecamatan Payakumbuh Barat			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Payakumbuh Barat oleh Inspektorat Nilai IKM Kecamatan Payakumbuh Barat	81 Nilai 91,00 Indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase Capaian Kinerja Program Kegiatan 2. Persentase Konsistensi Program Kegiatan Renstra dengan Renja	100 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi Keuangan Program Kegiatan	95 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Umum Kecamatan Payakumbuh Barat yang diproses tepat waktu	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi Baik	80 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Usulan Musrenbang Kec. Payakumbuh Barat yang diterima Perangkat Daerah Persentase Pelayanan yang diproses tepat waktu	75 % 85 %	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Usulan Musrenbang yang menjadi skala prioritas	75 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelayanan Publik	100 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/ RW) yang aktif IKM	100 % 91,00 Indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan lingkup Pemberdayaan yang difasilitasi	100 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan lingkup Trantib yang difasilitasi	100 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	100 %	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pembinaan dan Monitoring, Evaluasi Lembaga Kemasyarakatan yang terlaksana	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kelurahan Bulakan Balai Kandi			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/ RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kelurahan Ibul			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kelurahan Koto Tengah			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/ RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 Indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kelurahan Kubu Gadang			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/ RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 Indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kelurahan Labuah Basilang			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kelurahan Subarang Batuang			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/ RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 Indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kelurahan Nunang Daya Bangun			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kelurahan Padangdata Tanahmati			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kelurahan Padang Tinggi Piliang			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/ RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kelurahan Padangtengah Balainanduo			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/ RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 Indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kelurahan Pakan Sinayan			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/ RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 Indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kelurahan Parak Batuang			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kelurahan Parit Rantang			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kelurahan Payolansek			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kelurahan Talang			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kelurahan Tanjung Pauh			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kelurahan Tanjunggodang Sungaipinago			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/ RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kecamatan Payakumbuh Timur			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Payakumbuh Timur Oleh Inspektorat Nilai IKM Kecamatan Payakumbuh Timur	81 Nilai 91.00 Indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program kegiatan Persentase konsistensi program kegiatan renstra dengan renja	100 persen 90 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	95 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	80 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum kecamatan payakumbuh timur sesuai standar	80 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor	80 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah	80 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	80 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan Payakumbuh Timur yang diterima Perangkat Daerah Persentase Pelayanan yang diproses tepat waktu	70,00 % 85,00 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan	100 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase dokumen pelayanan yang diproses	100 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	100 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	"Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Kec. Pyk Timur	100 %	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kegiatan trantibum yang difasilitasi	100 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi di Kec. Pyk Timur	100 %	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase peningkatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	100 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Kelurahan Balai Jariang			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Kelurahan Koto Baru			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Kelurahan Koto Panjang			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Kelurahan Padang Alai Bodi			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Kelurahan Padang Tengah Payobadar			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Kelurahan Padang Tiakar			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Kelurahan Payobasung			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Kelurahan Sicincin			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Kelurahan Tiakar			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 91,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 persen	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Kecamatan Payakumbuh Utara			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat Nilai IKM	81 Nilai 91 Indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Kegiatan	95 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	95 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Umum Kecamatan Payakumbuh Utara sesuai standar	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah	100 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan musrenbang yang diterima Perangkat Daerah Persentase pelayanan masyarakat yang diproses tepat waktu	75 % 85 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan	75 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Dokumen Pelayanan yang diproses	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM	100 % 91 Indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	100 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan lingkup Trantib yang difasilitasi	100 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	100 %	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pembinaan dan monev lembaga kemasyarakatan yang terlaksana	100 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Kelurahan Balai Tongah Koto			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM	100 % 91 Indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Kelurahan Ikua Koto Dibalai			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM	100 % 91 Indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Kelurahan Kapalo Koto Dibalai			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM	100 % 91 Indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapakrajo			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM	100 % 91 Indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Kelurahan Napar			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM	100 % 91 Indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Kelurahan Ompang Tanah Sirah			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM	100 % 91 Indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Kelurahan Tigo Koto Diate			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM	100 % 91 Indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Kelurahan Tigo Koto Dibuah			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM	100 % 91 Indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Kelurahan Taratak Padang Kampuang			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif Nilai IKM	100 % 91 Indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Kecamatan Payakumbuh Selatan			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Payakumbuh selatan Oleh Inspektorat Nilai IKM Kecamatan Payakumbuh Selatan	81 Nilai 90 Indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program / kegiatan Persentase konsistensi program kegiatan renstra dengan renja	100 % 95 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	90 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum kecamatan yang sesuai standar	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan musrenbang kecamatan payakumbuh selatan yang diterima perangkat daerah Persentase pelayanan yang diproses tepat waktu	75,00 % 85,00 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan	75 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelayanan Publik	100 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 90,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Telaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	100 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	"Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti kec pyk selatan	100 %	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan trantibum yang difasilitasi	100 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi di kec. Pyk Selatan	100 %	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pembinaan dan Monitoring Evaluasi lembaga kemasyarakatan yang terlaksana	100 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Kelurahan Balai Panjang			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 90,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Telaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Kelurahan Koto Tuo Limo Kampung			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 90,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Telaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Kelurahan Limbukan			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 90,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Telaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Kelurahan Padang Karambia			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 90,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Telaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Kelurahan Sawah Padang Aur Kuning			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 90,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Telaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Kelurahan Kapalo Koto Ampangan			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 90,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Telaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan	85 %	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Kecamatan Lamposi Tigo Nagori			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Nilai IKM	81 nilai 90 indeks	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program / kegiatan	100 %	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	90 %	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum kecamatan yang sesuai standar	80 %	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor	85 %	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah	85 %	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	85 %	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan Musrenbang Kec. latina yang diterima Perangkat Daerah Persentase pelayanan yang diproses tepat waktu	70,00 % 85,00 %	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan	70 %	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelayanan Publik	100 %	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 90,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan	85 %	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	100 %	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	"Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti kec latina	100 %	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan lingkup trantibum yang difasilitasi	100 %	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi di kec. latina	100 %	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pembinaan dan monitoring evaluasi kegiatan kemasyarakatan yang terlaksana	100 %	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
Kelurahan Koto Panjang Dalam			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 90,00 indeks	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan	85 %	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
Kelurahan Koto Panjang Padang			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 90,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan	85 %	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
Kelurahan Padang Sikabu			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 90,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan	85 %	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
Kelurahan Parambahan			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 90,00 indeks	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan	85 %	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
Kelurahan Sungai Durian			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 90,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan	85 %	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
Kelurahan Parik Muko Aia			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan	100 % 90,00 indeks	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan	85 %	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik			
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kesbangpol oleh Inspektorat Nilai IKM Kesbangpol	80 nilai 93 indeks	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program/kegiatan	90 %	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program/kegiatan	92 %	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian layanan umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80 %	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian layanan umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80 %	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	90 %	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	120 orang	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	100 %	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan	3 kegiatan	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	93 %	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	1 rekomendasi	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	100 %	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	11 rekomendasi	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik sosial yang diselesaikan	100 %	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah informasi konflik sosial yang ditindaklanjuti	10 kasus	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

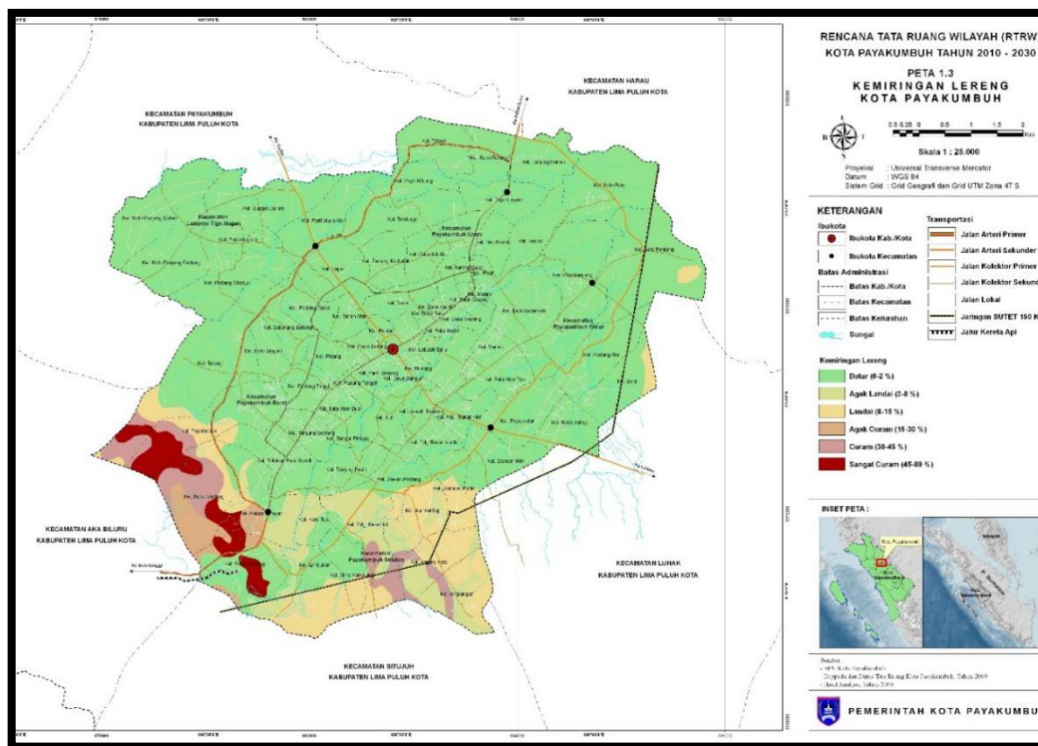
C. DATA UMUM DAERAH

a. Aspek Geografis

Aspek geografis Kota Payakumbuh menampilkan karakteristik lokasi dan wilayah serta potensi pengembangan wilayah yang ada di Kota Payakumbuh. Sedangkan gambaran kondisi demografi akan menampilkan cakupan perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu pada Kota Payakumbuh.

Gambaran umum kondisi daerah merupakan dasar dalam membuat perencanaan pembangunan, baik dari aspek geografi dan demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai sumber informasi yang akan diolah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Payakumbuh yang berupa data yang tersedia secara series kurun waktu beberapa tahun terakhir.

Secara geografis, Kota Payakumbuh terletak pada 00°10'sampai dengan 00°17' LS dan 100°35' sampai dengan 100°45' BT pada ketinggian 514 m dari permukaan laut. Kota Payakumbuh merupakan kota kecil dengan luas wilayah $\pm 80,43 \text{ Km}^2$ atau $\pm 0,19\%$ dari luas Provinsi Sumatera Barat dan berjarak $\pm 120\text{km}$ dari Kota Padang sebagai pusat ibukota Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh dataran dengan kemiringan $<2,00\%$ seluas 6.601,7 Ha atau 82,08% dari total luas Kota Payakumbuh, selebihnya merupakan dataran dengan kemiringan $>2,00\%$ seluas 1.441,3 Ha atau 17,92% dari luas wilayah Kota Payakumbuh yang berlokasi di wilayah selatan dan barat daya Kota Payakumbuh.



Gambar I.1
Peta Kemiringan Lereng Kota Payakumbuh
 Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010–2030

Tabel I.1
Klasifikasi Kemiringan Lahan di Kota Payakumbuh

No	Kemiringan Lahan	Lereng (%)	Kelas	(Luas)	
				Ha	%
1	Datar	0-2	A	6.601,7	82,08
2	Agak Landai	2-8	B	304,0	3,78
3	Landai	8-15	C	588,8	7,32
4	Agak Curam	15-30	D	112,6	1,40
5	Curam	30-45	E	298,4	3,71
6	Sangat Curam	45-60	F	137,5	1,71
Luas				8.043,0	100,00

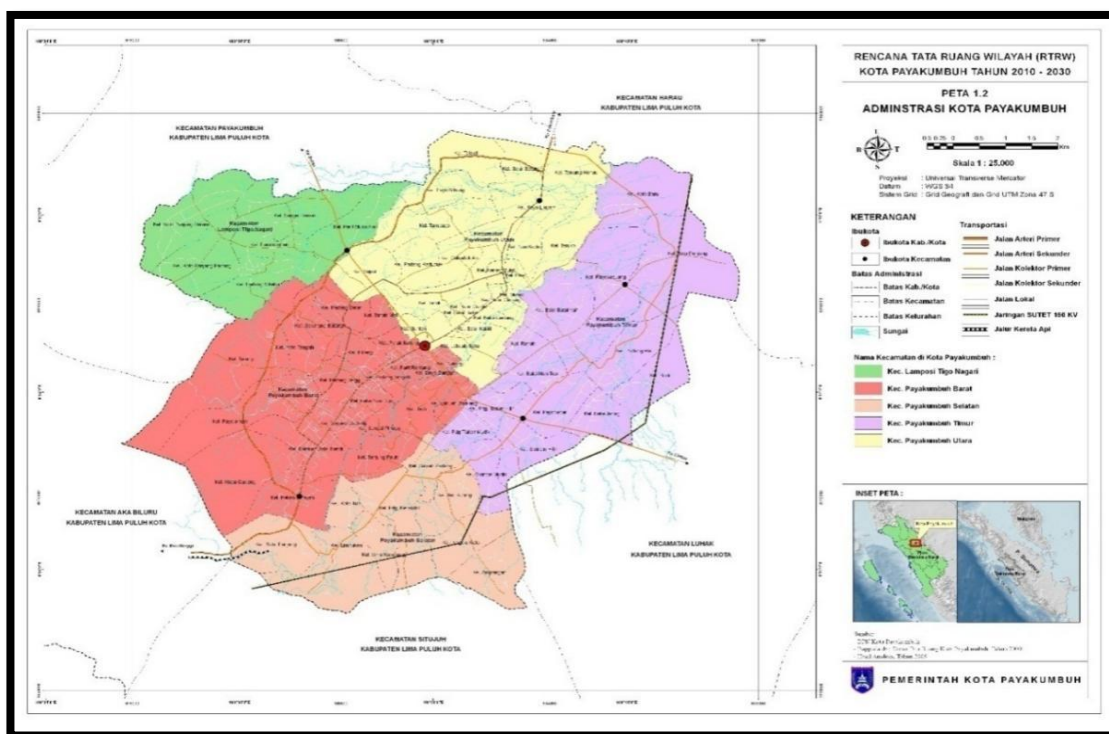
sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010–2030

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan Kecamatan Payakumbuh Selatan, maka terbentuklah Kecamatan Payakumbuh Selatan dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, sehingga Kota Payakumbuh memiliki 5 (lima) kecamatan yang sebelumnya memiliki 3 (tiga) kecamatan. Kelima Kecamatan di Kota Payakumbuh tersebut adalah Kecamatan Payakumbuh

Barat, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kecamatan Payakumbuh Selatan dan Kecamatan Iamposi Tigo Nagori.

Selanjutnya Secara administratif Kota Payakumbuh berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara : Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh
- Sebelah Selatan : Kecamatan Luhak dan Kecamatan Situjuah
- Sebelah Barat : Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Akabiluru
- Sebelah Timur : Kecamatan Luhak dan Kecamatan Harau



Gambar I.2
Batas Administrasi Kota Payakumbuh
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010–2030

Tabel I.2
Pembagian Wilayah Administratif Kota Payakumbuh Tahun 2025

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah		
				Kelurahan	RW	RT
1	Payakumbuh Barat	Tanjung Pauh	19,064	17	58	168
2	Payakumbuh Utara	Pdg. Kaduduak	14,528	9	35	122
3	Payakumbuh Timur	Tiakar	22,730	9	33	91

4	Payakumbuh Selatan	Sawah Padang	14,683	6	16	50
5	Lamposi Tigo Nagori	Sei Durian	9,425	6	14	50
Total			80,43	47	156	481

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka, 2025

Kota Payakumbuh dialiri oleh 8 (delapan) sungai yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku, kegiatan pertanian dan objek wisata. Sungai yang mengalir di Kota Payakumbuh tersebut diantaranya :

1. Sungai Batang Agam

Sungai Batang Agam mengalir melalui Kecamatan Payakumbuh Selatan, Payakumbuh Barat, Payakumbuh Timur dan Payakumbuh Utara sepanjang 15,60 km dan lebar 25 meter. Sungai ini juga dijadikan sumber air baku oleh PDAM semenjak tahun 2019. Terhitung tahun 2020, sungai batang agam juga dijadikan sebagai salah satu objek wisata oleh Pemerintah Kota dengan menyediakan berbagai fasilitas pendukung di sepanjang sungai batang agam tersebut dimana pada tahun ini fasilitas pendukung telah selesai dibangun di Kawasan Tanjung Gadang Sungai Pinago dan Tanjung Pauh. Sumber air sungai batang agam ini berasal dari air permukaan dengan rata-rata debit air sebesar 4,52 m³/detik.

2. Sungai Batang Lampasi

Sungai Batang Lampasi memiliki panjang 11,60 km dan lebar 20 meter mengalir melewati Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan Kecamatan Payakumbuh Utara dengan rata-rata debit air sebesar 3,53 m³/detik. Air sungai ini dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan dan peternakan oleh masyarakat.

3. Sungai Batang Sinamar

Sungai Batang Sinamar mengalir melewati Kecamatan Payakumbuh Utara yaitu pada Kelurahan Ompang Tanah Sirah sepanjang 4,5 km dan lebar 15 meter. Pemanfaatan air dari sungai ini belum dapat dioptimalkan untuk keperluan irigasi karena elevasi pada hulu sungai sangat rendah dan hanya melewati Kota Payakumbuh sepanjang ±3 (tiga) Km, Sungai Batang Sinamar juga merupakan batas alami dengan Kabupaten Limapuluh Kota.

4. Sungai Batang Pulau

Sungai Batang Pulau telah dimanfaatkan sebagai sumber air untuk mengalir lahan masyarakat. Sungai ini memiliki panjang 11,40 km dan lebar 5 meter

yang melewati Sungai Batang Lampasi memiliki panjang 11,60 km dan lebar 20 meter mengalir melewati Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan Kecamatan Payakumbuh Utara. Air dari sungai ini dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan dan peternakan oleh masyarakat.

5. Sungai Talang

Sungai Talang mengalir melewati Kecamatan Payakumbuh Timur dan Payakumbuh Selatan dengan panjang 5 km dan lebar 5 meter. Dalam Rencana Detail Tata Ruang, direncanakan jaringan drainase primer terdapat pada sungai talang yang merupakan sistem jaringan drainase perkotaan.

6. Sungai Baih

Sungai Baih juga termasuk sungai yang masuk pada rencana pengembangan jaringan drainase primer di Kota Payakumbuh. Sungai ini memiliki panjang 5 km dan lebar 6 meter yang mengalir melewati kecamatan Payakumbuh Timur.

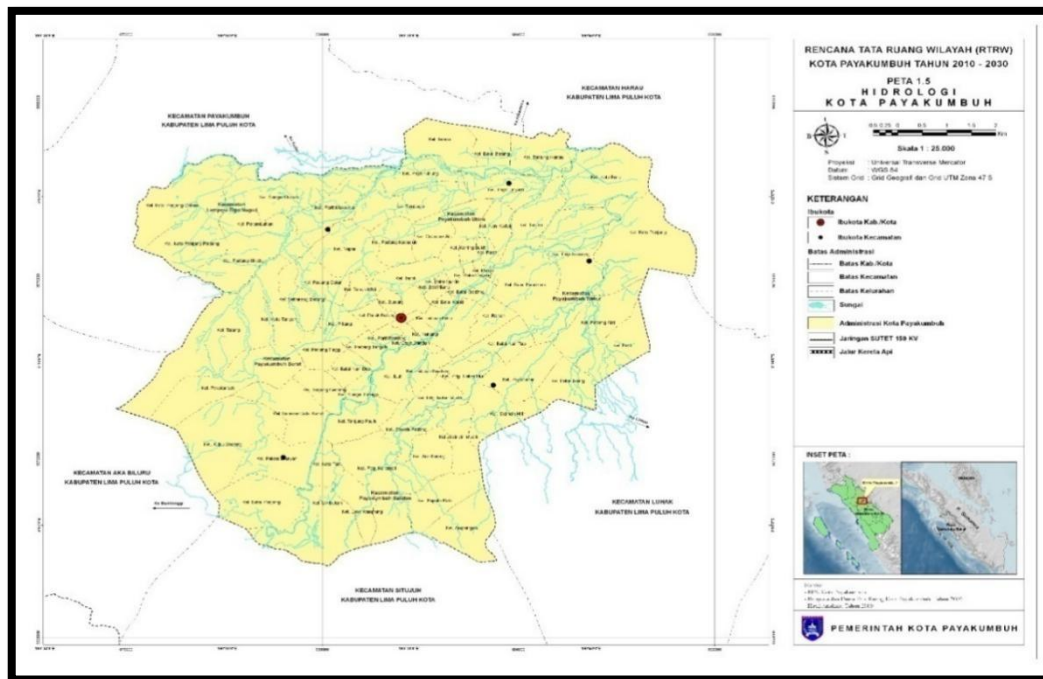
7. Sungai Batang Sikali

Sungai Batang Sikali dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber air irigasi bagi lahan pertanian mereka dimana rata-rata debit air sungai ini 0,51 m³/detik dan panjang 10 km dan lebar 6 meter yang melewati Kecamatan Payakumbuh Selatan dan Kecamatan Payakumbuh Timur

8. Sungai Tembok Jua

Sungai Tembok Jua juga dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian mereka. Sungai ini memiliki panjang 6,30 km dan lebar 4 km yang melewati Payakumbuh Utara. Sungai Batang Sikali dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber air irigasi bagi lahan pertanian mereka. Sungai ini memiliki panjang 10 km dan lebar 6 meter yang melewati Kecamatan Payakumbuh Selatan dan Kecamatan Payakumbuh Timur.

Untuk menjaga agar sungai ini dapat memberikan manfaat dan juga dapat mengalir dengan baik, maka Pemerintah Kota Payakumbuh selalu merencanakan pemeliharaan/ rehabilitasi terhadap sungai ini dan kawasan pendukungnya.



Gambar I.3
Peta Hidrologi Kota Payakumbuh

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 – 2030

Untuk mendukung kegiatan pertanian dan ketersediaan air baku, Pemerintah Kota Payakumbuh melalui pendanaan APBN dan sumber dana lainnya telah memiliki 2 embung yaitu:

1. Mata Air Bulakan/ Embung Bulakan

Mata Air Bulakan berada di wilayah Kelurahan Limbukan, dimana selain sebagai sumber air baku, mata air ini juga digunakan untuk lahan pertanian dan perikanan. Embung Bulakan dibangun pada tahun 2018 dengan dana APBN yang memiliki debit air sebesar 500 liter/detik.

2. Embung Lurah Rawang

Pembangunan embung ini dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara pada tahun 2018. Pembangunan embung ini ditujukan untuk penyediaan sumber air baku yang dipergunakan untuk air minum, irigasi lahan pertanian masyarakat dan peternakan dengan Debit air sebesar 7 liter/detik.

Pemanfaatan ruang wilayah di Kota Payakumbuh lebih didominasi untuk areal pertanian seperti lahan persawahan dan kebun/ ladang. Pemanfaatan ruang wilayah merupakan bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan alam. Berikut dapat dilihat luas penggunaan lahan menurut jenisnya di Kota Payakumbuh pada tabel I.3.

Tabel I.3
Luas Penggunaan Lahan Menurut Jenisnya di Kota Payakumbuh
Tahun 2019 – 2023

No	Jenis Penggunaan Lahan	2019		2020		2021		2022		2023	
		Luas (Ha)	(%)	Luas (Ha)	(%)	Luas (Ha)	(%)	Luas (Ha)	(%)	Luas (Ha)	(%)
1.	Sawah	2.749	34,18	2.751	34,20	2.733,1	34,20	2.733	33,98	2.719	33.81
2.	Tanah utk Bangu-nan & Sekitarnya	2.970	36,92	2.543	31,62	2.543	31,62	1.831	22,76	1792,00	22,28
3.	Kebun/ Ladang	1.450	18,03	1.320	16,41	1.320	16,41	2.301	28,61	2.301	28.61
4.	Kolam	-	-	-	-	-	-	64	0,80	71	0.88
5.	Hutan	283	3,52	283	3,52	283	3,52	458	5,70	458.	5.69
6.	Padang Rumput	4	0,05	4	0,05	4	0,05	4	0,05	4	0.05
7.	Lainnya	587	7,30	1.142	14,20	1.142	14,20	652	8,10	697.96	8.68
Jumlah		8.043	100,00	8.043	100,00	8.043	100,00	8.043	100,00	8.043	100,00

Sumber : Dinas Pertanian 2024

Perubahan luas penggunaan lahan menurut jenisnya di Kota Payakumbuh sesuai dengan hasil kajian revisi RTRW Perda No 5 Tahun 2020 dan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kota Payakumbuh No 1 tahun 2021.

Tabel I.4
Luas Penggunaan Lahan Pertanian di Kota Payakumbuh
Tahun 2019-2024 (Ha)

No	Kecamatan	Luas Daerah	2020		2021		2022		2023		2024	
			Sawah	Bukan Sawah	Sawah	Bukan Sawah	Sawah	Bukan Sawah	Sawah	Bukan Sawah	Sawah	Bukan Sawah
1	Payakumbuh Barat	1.966	529	577	414,23	567	414,23	567	411,72	324	410,63	570,3
2	Payakumbuh Timur	2.273	663	772	847,57	772	847,57	772	845,47	397	845,00	774,3
3	Payakumbuh Utara	1.453	745	191	713,45	191	713,45	191	709,85	149	711,00	193,3
4	Payakumbuh Selatan	1.409	378	491	397,04	491	397,04	491	395	179	395,00	492,3
5	Lamposi Tigo Nagori	942	436	293	360,87	293	360,87	293	357	281	357,41	296,3
Jumlah		8.043	2.749	2.324	2.749	2.324	2.733,16	2.314	2.719,04	1.330	2.719,50	2.326,5

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2020-2024

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kota Payakumbuh penggunaan lahan untuk lahan pertanian lebih banyak di Kecamatan Payakumbuh Timur dengan total luas lahan pertanian sebesar 1.242,47 Ha atau 54,66% dari luas wilayahnya, yang didominasi lahan yang digarap sebagai sawah sebanyak 845,47 Ha. Sementara dari perbandingan lahan pertanian dengan luas wilayah, paling besar di kawasan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dengan peruntukkan lahan pertanian sebanyak

67,73% dari total luas wilayah. Jika dilihat dari rata-rata penggunaan lahan dari masing-masing wilayah kecamatan, 3 (tiga) kecamatan yang ada di Kota Payakumbuh penggunaan lahannya ditujukan untuk lahan pertanian yaitu >50,00% dari luas masing-masing wilayah, yaitu Payakumbuh Timur, Payakumbuh Utara, dan Lamposi Tigo Nagori.

b. Aspek Geologi

Material padat pembentuk permukaan Kota Payakumbuh terdiri dari humus, soil (tanah), aluvial (sungai dari farmasi sedimen), metamorphosis (malihan), vulkanik dan intrusi (terobosan). Pembentukan dan penyebaran material tersebut merupakan hasil dari berbagai proses yang berasal dari dalam bumi (endogen) dan dari luar (exogen). Berbagai proses dalam (endogen) mencakup tektonik dan vulkanisme (kegunungapian). Berbagai proses dari luar terdiri dari pelapukan, erosi, transportasi dan sedimentasi.

Urutan tataletak material padat penyusun bentang alam Kota Payakumbuh secara stratigrafis adalah sebagai berikut:

- 1) Humus dan Soil (tanah) dengan ketebalan beragam dari beberapa sentimeter hingga beberapa meter.
- 2) Aluvial sungai (Q al) terdiri dari lempung, pasir, kerikil dan bongkah batuan beku dan kwarsit, vdiendapkan disepanjang dataran banjir. Ketebalan bervariasi dapat mencapai puluhan meter.
- 3) Seimen Formasi Brani (Tob) Konglomerat kasar beraneka ragam dengan sisipan batu pasir. Komponen dari konglomerat kasar terdiri dari : kwarsit, granit, filit dan batu gamping. Tersementasi dengan baik, dan secara lokal ada yang terbersikkan. Ketebalan formasi brani 600 m, berumur oligosen dan hubungan secara manjari-jemari (*Interfingering*) dengan sedimen Formasi Sangkarewang.
- 4) Malihan, anggota Filit dan Serpih Formasi Kuantan (PCks) mayoritas terdiri dari serpih dan filit kemerahan sampai coklat tua mengandung sisipan tipis batusabak kelabu, kwarsit, batu lanan, rijang kelabu dan lava andesit sampai basalt. Pada kontak dengan batuan intrusi, PCks bermalih menjadi sekis, genes dan batu tanduk. PCks berhubungan secara manjari-jemari (*Interfingering*) dengan PCKl dan PCkg, dengan tebal keseluruhan mencapai 5000 m, berumur Permo-Karbon.
- 5) Malihan, anggota batu gamping Formasi Kuantan (PCKl) Batu gamping pejal, berongga, putih kelabu hingga kemerahan. Mengandung sisipan tipis batusabak, filit, serpih terkensikkan dan kwarsit. Umumnya membentuk topografi kasar, berumur karbon. Di Kota Payakumbuh,

material PCks dan PCkl, tersingkap (exposed) di batas barat daya kota, dan menjadi salah satu objek wisata di gua Nagalau Indah.

- 6) Volkanik Tufa batuapung (Qpt) terdiri dari batuapung putih kekuningan, berdiameter $\frac{1}{2}$ s/d 10 cm didalam massa dasar kaca kelaran bekomposisi riolit. Secara lokal, dibagian bawah Qpt mencapai ratusan meter, berumur kwaiter, dan merupakan mayoritas material penyusun permukaan Kota Payakumbuh.
- 7) Volkanik Andesit Gunung Malintang (Qamg) : Breksi andesit sampai basalt, aglomerat, pecahan lava berongga, endapan lahan dan lava. Merupakan material dan kegiatan gunung api malintang, diselatan Kota Payakumbuh nberumur Kwaiter.
- 8) Volkanik Andesit sampai basalt (Ta) : aliran lava yang tak dipisah, breksi, aglomerat dan batuan hipabisal berkomposisi andesit sampai basalt. Berumur miosen (Tersier atas) tersingkap dibarat daya perbukitan batugamping (PCkl) dibatas barat daya Kota Payakumbuh.

Data struktur geologi yang ada di Kota Payakumbuh, hanya satu kedudukan struktur lapisan pada sedimen formasi brani yaitu sudut kemiringan (dip) lapisan 250 dengan arah kemiringan (dip direction) kearah selatan dilereng utara Gunung Malintang . Data perihal kehadiran struktur patahan (sesar) maupun kekar (joint), nihil. Namun, data regional memperlihatkan bahwa Kota Payakumbuh di kelilingi oleh tiga zona patahan besar yaitu :

- 1) Zona Patahan Mangani ; 12 km di barat laut Kota Payakumbuh
- 2) Zona Patahan Sungai Takung ; 15 km di tenggara di balik gunung malintang
- 3) Zona Patahan Sungai Pakis ; 35 km di timur laut Kota Payakumbuh.

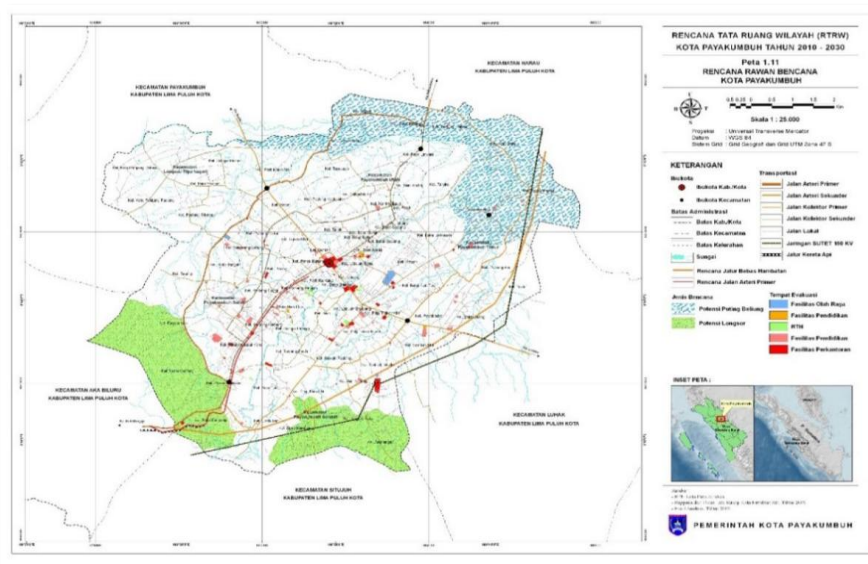
Ketiga zona patahan tersebut, diluar wilayah administrasi Kota Payakumbuh, namun hal tersebut diatas perlu diantisipasi sebagai kawasan yang akan terkena dampak sebagai kawasan evakuasi bencana alam, dari wilayah sekitarnya.

c. Wilayah Rawan Bencana

Kejadian bencana alam ataupun bencana sosial mengakibatkan penurunan pada daya dukung wilayah, dikarenakan adanya sumber daya

yang rusak akibat bencana. Merujuk data topografi lahan di Kota Payakumbuh, dimana didominasi lahan yang berada pada kemiringan $<2,00\%$ atau datar dan curah hujan yang cukup tinggi, maka bencana yang cukup rawan terjadi di Kota Payakumbuh dan harus menjadi perhatian adalah bencana angin puting beliung baik itu disertai oleh hujan deras maupun tidak. Selain itu potensi bencana tanah longsor dapat terjadi di beberapa Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Barat dan Payakumbuh Selatan. Sedangkan ancaman bencana alam gempa bumi, Kota Payakumbuh relatif aman karena payakumbuh tidak terletak pada zona patahan, begitu juga bencana alam banjir, dan letusan gunung api.

Dengan mengetahui potensi bencana tersebut, peruntukan pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan lokasi pembangunan seperti pemukiman, perdagangan, pendidikan dan sebagainya; serta pengawasan dan pengendalian dari izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan untuk meminimalkan penyelewengan pembangunan dan resiko yang muncul apabila bencana terjadi. Gambar I.4 di bawah menunjukkan potensi rawan bencana yang ada di Kota Payakumbuh.



Gambar I-4

Peta Rencana Rawan Bencana Kota Payakumbuh

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 – 2030

2. Data Jumlah Penduduk

a. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

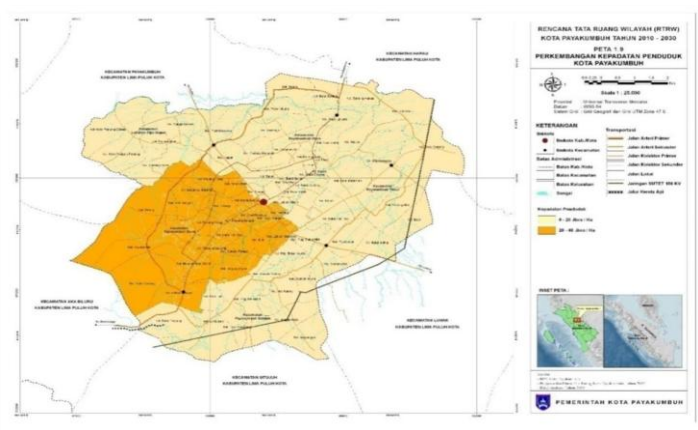
Kondisi kependudukan Kota Payakumbuh setiap tahun mengalami peningkatan, dimana tercatat laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,31% pada tahun 2024. Penduduk ini bermukim tersebar pada 5 (lima) kecamatan, sehingga kepadatan penduduk pada setiap kecamatan berbeda-beda. Kondisi ini ditampilkan pada tabel I.6 berikut.

Tabel I.6
Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	LUAS (KM ²)	2020		2021		2022		2023		2024	
			Jumlah (Jiwa)	Density (Jiwa/Km ²)	Jumlah (Jiwa)	Density (Jiwa/Km ²)	Jumlah (Jiwa)	Density (Jiwa/Km ²)	Jumlah (Jiwa)	Density (Jiwa/Km ²)	Jumlah (Jiwa)	Density (Jiwa/Km ²)
1.	Payakumbuh Barat	19,064	54.532	2.861	55.133	2.893	55.938	2.934	56.490	2.964	57.200	3.001
2.	Payakumbuh Timur	22,730	29.325	1.290	29.669	1.305	32.762	1.441	30.450	1.339	12.931	1.357
3.	Payakumbuh Utara	14,528	32.242	2,219	32.443	2.233	30.125	2.074	32.930	2.266	30.850	2.284
4.	Payakumbuh Selatan	14,683	11.990	817	12.205	831	12.469	849	12.680	864	33.190	881
5.	Lamposi Tigo Nagori	9,425	11.487	1.218	11.734	1.244	12.031	1.276	12.280	1.303	12.560	1.333
	Total	80,43	139.576	1.735	141.184	1.755	143.325	1.782	144.830	1.801	146.731	1.825

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2019–2024

Data diatas menunjukan tingkat kepadatan penduduk mengalami peningkatan di setiap kecamatan, dimana tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat pada Kecamatan Payakumbuh Barat dengan kepadatan 3.001 jiwa/km² diikuti oleh Kecamatan Payakumbuh Utara dengan kepadatan sebesar 2.284 jiwa/km². Kondisi ini disebabkan oleh kedua kecamatan ini merupakan pusat perdagangan barang dan jasa atau daerah pusat bisnis serta pusat pemerintahan di Kota Payakumbuh. Selain dari faktor tersebut pilihan/ preferensi masyarakat terhadap lokasi pemukiman juga dipengaruhi oleh topografi wilayah seperti luas daerah Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Payakumbuh Selatan tidak terlalu berbeda, tetapi karena Kecamatan Payakumbuh Selatan lebih didominasi perbukitan, sehingga kecamatan Payakumbuh Utara lebih dipilih sebagai kawasan pemukiman dibandingkan Payakumbuh Selatan.



Gambar I-5

Peta Perkembangan Kepadatan Kota Payakumbuh

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 – 2030

b. Struktur dan Karakteristik Penduduk

1) Struktur Penduduk Berdasarkan Usia

Klasifikasi penduduk berdasarkan usia berguna untuk memperlihatkan karakteristik penduduk suatu daerah, dan juga untuk menunjukkan tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan) antara penduduk produktif dengan penduduk non produktif. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan data pada tabel I.7, didapatkan *dependency ratio* atau rasio ketergantungan penduduk di Kota Payakumbuh.

Tabel I.7

Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2019-2023

No	Kelompok Usia	2019	2020	2021	2022	2023
1.	0-4	13.825	12.682	12.728	12.825	13.110
2.	5 -9	13.126	11.521	11.467	11.503	11.970
3.	10 -14	12.104	12.392	12.284	12.180	11.660
4.	15-19	11.771	11.761	11.777	11.848	12.391
5.	20-24	9.775	11.357	11.338	11.358	11.470
6.	25-29	10.589	11.406	11.493	11.604	11.330
7.	30-34	10.705	10.459	10.606	10.788	11.350
8.	35-39	9.692	10.417	10.582	10.786	10.440
9.	40-44	9.276	9.879	10.032	10.218	10.340
10.	45-49	8.226	9.019	9.202	9.424	9.610
11.	50-54	7.269	7.758	7.923	8.114	8.680
12.	55-59	6.087	6.664	6.843	7.052	7.380
13.	60-64	4.812	5.385	5.549	5.728	6.210
14.	65+	8.316	8.876	9.360	9.897	10.820
Jumlah		135.573	139.576	141.184	143.325	146.731

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2019–2024

Selanjutnya jika ditampilkan dalam bentuk histogram, gambaran struktur penduduk Kota Payakumbuh dapat dilihat pada diagram II-1 yang berkaitan erat dengan analisis tingkat ketergantungan pada struktur penduduk Kota Payakumbuh.

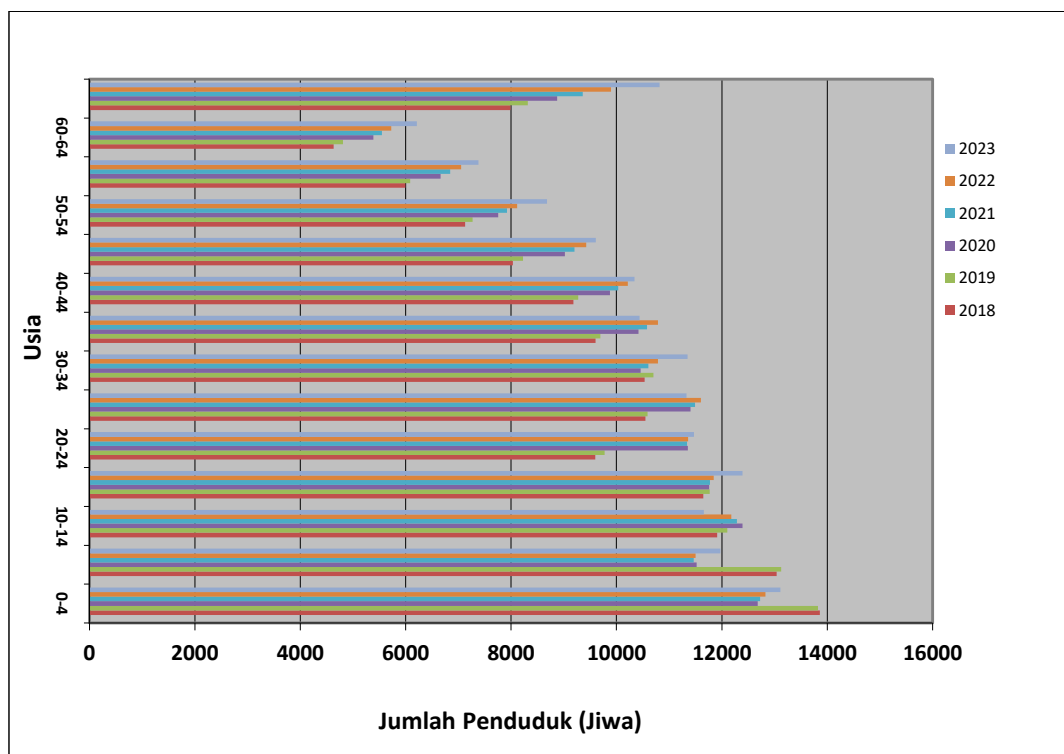


Diagram II-1
Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023
Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2019–2024

Jika memperhatikan tabel dan diagram jumlah penduduk perkelompok usia di atas, kondisi kependudukan di Kota Payakumbuh bercirikan ekspansif, dimana tingginya tingkat kelahiran dan rendahnya tingkat kematian, yang berarti kualitas layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah sudah cukup baik dari tahun ke tahun. Selain itu jumlah penduduk produktif (15 -64 tahun) lebih banyak dari jumlah penduduk non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas), dimana perbandingan ini akan menghasilkan rasio beban tanggungan penduduk yang ditampilkan pada tabel I.8.

Tabel I.8
Perhitungan Rasio Beban Tanggungan Penduduk Tahun 2019– 2023

No	Kelompok Umur	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kelompok Umur Non-Produktif	47.371	45.471	45.839	46.405	47.560
2	Kelompok Umur Produktif	88.202	94.105	95.345	96.920	99.201

3	Rasio Beban Tanggungan (:100)	54	48	48	48	48

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2019-2024

Rasio yang dihasilkan pada tabel di atas menunjukkan ada penurunan rasio tanggungan antara usia non produktif dengan usia produktif dibanding tahun 2019 dengan rasio 54, dimana pada tahun 2023 rasionya 48 : 100, dimana setiap 100 jiwa usia produktif akan menanggung 48 jiwa non produktif.

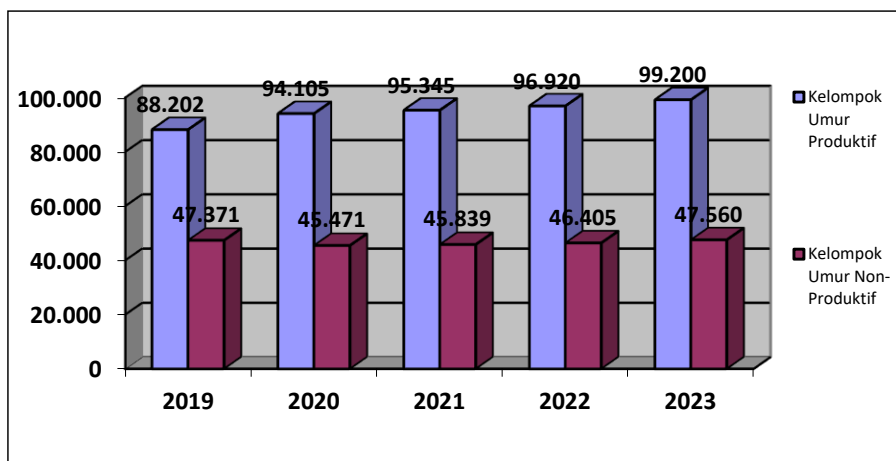


Diagram II-2

Rasio Beban Tanggungan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2019 – 2023

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2019-2023 (data diolah)

2) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan rasio jenis kelamin di Kota Payakumbuh, dimana untuk tahun 2023 rasio jumlah laki-laki terhadap perempuan adalah 101,47 dimana dari 100 jiwa perempuan di Kota Payakumbuh sebanding dengan 101 jiwa laki-laki, komposisi ini dapat dilihat pada tabel I.9.

Tabel I.9

Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	2019		2020		2021		2022		2023	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1.	Payakumbuh Barat	26.515	26.751	27.330	27.204	27.567	27.566	28.100	27.838	28.100	27.838
2.	Payakumbuh Timur	14.175	14.302	14.825	14.500	14.981	14.688	16.817	15.945	16.817	15.945
3.	Payakumbuh Utara	16.063	16.206	16.247	15.995	16.382	16.061	15.294	14.831	15.294	14.831
4.	Payakumbuh Selatan	5.678	5.728	6.044	5.946	6.163	6.042	6.359	6.110	6.359	6.110
5.	Lamposi Tigo Nagori	5.055	5.100	5.804	5.681	5.925	5.809	6.164	5.867	6.164	5.867

	Total	67.486	68.087	70.250	69.326	71.018	70.166	72.734	70.591	73.760	72.971

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2019–2024

3) Struktur Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kota Payakumbuh pada tahun 2023 didominasi oleh sektor jasa sebanyak 48.790 orang diikuti oleh sektor industri pengolahan sebanyak 14.445 orang dan terakhir sektor pertanian, kehutanan, perburuhan dan perikanan sebanyak 10.902 orang. Semua sektor mata pencaharian mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan jumlah penduduk Kota Payakumbuh yang bekerja adalah sebanyak 77.907 orang dan yang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan adalah 3.770 orang.

Tabel I.10

Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuhan, Perikanan	6.290	6.259	7.100	7.100	10.902
2	Industri Pengolahan	13.682	13.891	14.419	14.419	14.445
3	Jasa	43.210	44.994	47.979	47.979	48.790
Jumlah yang Bekerja		64.545	63.182	65.144	69.498	74.137
Jumlah Pengangguran/ yang Mencari Kerja		2.538	2.710	4.664	4.805	3.770
Total		67.083	65.892	69.808	74.303	77.907

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2019–2024

4) Struktur Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat partisipasi pendidikan di Kota Payakumbuh pada tabel I.11 terlihat bahwa secara umum meningkat setiap jenjang pendidikan setiap tahun, ini terjadi karena peningkatan kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pendidikan. Data ini juga berguna bagi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menghitung jumlah guru, sekolah dan sarana pendidikan lainnya yang berguna untuk meningkatkan SDM yang berdaya saing.

Tabel I.11

**Tingkat Partisipasi Pendidikan Penduduk Kota Payakumbuh
Tahun 2017-2021**

No	Tingkat Pendidikan	Usia (Tahun)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	SD	7-12	99,19	100	99,75	99,99	99,97	98,41	99,43	99,76
2.	SLTP	13-15	97,81	96,86	98,72	98,11	97,98	98,61	98,24	99,09
3.	SLTA	16-18	89,40	83,04	85,23	86,10	88,78	93,73	94,30	88,53

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2018-2024

3. Realisasi Pendapatan menurut jenis Pendapatan

a. Realisasi Pendapatan menurut jenis Pendapatan

Dalam TA 2025, Pemerintah Kota Payakumbuh merencanakan penerimaan pendapatan daerah melalui APBD setelah perubahan sebesar Rp762.795.053.515,00 yang bersumber dari PAD sebesar Rp157.990.952.046,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp604.804.101.469,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp0,00. Rencana penerimaan daerah sejumlah tersebut, dianggarkan untuk membiayai belanja daerah sebesar Rp851.009.111.090,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp738.081.315.556,00, belanja modal sebesar Rp106.201.784.050,00 belanja tak terduga sebesar Rp6.726.011.484,00

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025, diperoleh realisasi pendapatan daerah sebesar Rp782.436.280.864,00. Jumlah tersebut mencapai poin 102,57% dari jumlah pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp762.795.053.515,00.

Secara rinci capaian perolehan pendapatan Tahun 2025 jika dibanding dengan anggaran Tahun 2025 maupun realisasi Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025

Jenis Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Diatas (Dibawah)	
			(Rp)	%
1	2	3	4 = 3-2	5
Pendapatan Asli Daerah	157.990.952.046,00	166.878.567.156,00	8.887.615.110,00	5,63
Pajak Daerah	41.080.651.214,00	44.752.209.670,00	3.671.558.456,00	8,94
Retribusi Daerah	92.534.636.288,00	96.656.956.695,00	4.122.320.407,00	4,45
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.275.525.706,00	13.275.525.706,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	11.100.138.838,00	12.193.875.085,00	1.093.736.247,00	9,85
Pendapatan Transfer	604.804.101.469,00	611.557.713.708,00	6.753.612.239,00	1,12
Pendapatan Transfer	574.958.593.689,00	579.808.401.303,00	4.849.807.614,00	0,84
Dana Perimbangan	566.286.737.689,00	571.136.545.303,00	4.849.807.614,00	0,86
Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	9.462.938.000,00	9.796.122.200,00	333.184.200,00	3,52
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	455.249.984.730,00	462.467.647.730,00	7.217.663.000,00	1,59
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	19.055.674.000,00	16.570.513.841,00	(2.485.160.159,00)	(13,04)
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	82.518.140.959,00	82.302.261.532,00	(215.879.427,00)	(0,26)
Dana Insentif Daerah (DID)	8.671.856.000,00	8.671.856.000,00	-	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.845.507.780,00	31.749.312.405,00	1.903.804.625,00	6,38
Pendapatan Bagi Hasil	29.845.507.780,00	31.749.312.405,00	1.903.804.625,00	6,38
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	29.845.507.780,00	31.749.312.405,00	1.903.804.625,00	6,38
Bantuan Keuangan	-	-	-	-
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Propinsi	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-
Pendapatan Hibah	-	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	#DIV/0!
Jumlah	762.795.053.515,00	782.436.280.864,00	19.641.227.349,00	2,57

Pada tabel di atas terlihat bahwa realisasi penerimaan pendapatan daerah semuanya dapat memenuhi target yang ditetapkan untuk Pendapatan Asli Daerah mencapai 105,63% untuk Pendapatan Transfer mencapai 101,12% dan juga untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Dimana pada target Tahun 2025 adalah nihil namun pada akhir Tahun 2025 ini kita menerima Bantuan Kemasyarakatan dari

Presiden Republik Indonesia sebesar Rp4.000.000.000,00 kepada daerah yang terdampak bencana alam.

Realisasi penerimaan atas Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp166.678.567.156,00 dari target anggaran sebesar Rp157.990.952.046,00 atau terealisasi sebesar 105,63% Pendapatan Transfer sebesar Rp611.557.713.708,00 memenuhi target sebesar Rp604.804.101.469,00 atau terealisasi sebesar 101,12%. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp4.000.000.000,00 yang merupakan Bantuan Kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia kepada daerah yang terdampak Bencana yang terjadi di Sumatera Barat dari Pemerintah Pusat dimana sebelumnya tidak ditargetkan.

**Tabel 1.2 Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran
2025 dan 2024**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Payakumbuh – Tahun 2025

Jenis Pendapatan	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Diatas (Dibawah)	
			(Rp)	%
1	2	3	4 = 3-2	5
Pendapatan Asli Daerah	166.878.567.156,00	138.649.853.624,00	(28.228.713.532,00)	(16,92)
Pajak Daerah	44.752.209.670,00	23.691.080.250,00	(21.061.129.420,00)	(47,06)
Retribusi Daerah	96.656.956.695,00	92.815.819.897,00	(3.841.136.798,00)	(3,97)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.275.525.706,00	12.381.453.735,00	(894.071.971,00)	(6,73)
Lain-lain PAD yang Sah	12.193.875.085,00	9.761.499.742,00	(2.432.375.343,00)	(19,95)
Pendapatan Transfer	611.557.713.708,00	613.134.671.289,00	1.576.957.581,00	0,26
Pendapatan Transfer	579.808.401.303,00	575.781.818.001,00	(4.026.583.302,00)	(0,69)
Dana Perimbangan	571.136.545.303,00	556.806.053.001,00	(14.330.492.302,00)	(2,51)
Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	9.796.122.200,00	11.296.067.000,00	1.499.944.800,00	15,31
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	462.467.647.730,00	453.856.467.847,00	(8.611.179.883,00)	(1,86)
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	16.570.513.841,00	11.649.788.700,00	(4.920.725.141,00)	(29,70)
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	82.302.261.532,00	80.003.729.454,00	(2.298.532.078,00)	(2,79)
Dana Insentif Daerah (DID)	8.671.856.000,00	18.975.765.000,00	10.303.909.000,00	118,82
Pendapatan Transfer Antar Daerah	31.749.312.405,00	37.352.853.288,00	5.603.540.883,00	17,65
Pendapatan Bagi Hasil	31.749.312.405,00	37.352.853.288,00	5.603.540.883,00	17,65
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	31.749.312.405,00	37.352.853.288,00	5.603.540.883,00	17,65
Bantuan Keuangan	-	-	-	-
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Propinsi	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	4.000.000.000,00	1.536.000.000,00	(4.000.000.000,00)	-
Pendapatan Hibah	-	1.536.000.000,00	1.536.000.000,00	#DIV/0!
Dana Darurat	4.000.000.000,00	-	(4.000.000.000,00)	####
Jumlah	782.436.280.864,00	753.320.524.913,00	(30.651.755.951,00)	(3,92)

Realisasi Pendapatan Tahun 2025 sebesar Rp782.436.280.864,00 mengalami peningkatan sebesar Rp29.115.755.950,00 atau 3,86 % diatas realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp753.320.524.914,00. Peningkatan terbesar terjadi pada Pendapatan Asli Daerah. Hal ini berkaitan dengan penyesuaian tarif setelah di

sahkannya Perda Pendapatan dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku di Tahun 2024 dan juga pendapatan dari opsen pajak yang sekarang merupakan objek pajak daerah yang mulai diberlakukan pada Tahun 2025 ini.

b. Realisasi Belanja menurut jenis Belanja

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025, diperoleh realisasi belanja daerah sebesar Rp765.455.545.090,00. Jumlah tersebut mencapai poin 89,95% dari jumlah belanja yang dianggarkan sebesar Rp851.009.111.090,00.

Secara rinci capaian realisasi belanja Tahun 2025 jika dibanding dengan anggaran Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.3. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Diatas (Dibawah)	
			(Rp)	%
1	2	3	4 = 2-3	5
BELANJA OPERASI	738.081.315.556,00	671.423.912.478,00	66.657.403.078,00	9,03
Belanja Pegawai	427.783.039.819,00	381.919.511.232,00	45.863.528.587,00	10,72
Belanja Barang dan Jasa	287.002.812.574,00	266.709.729.551,00	20.293.083.023,00	7,07
Belanja Hibah	22.270.963.163,00	21.829.971.695,00	440.991.468,00	1,98
Belanja Bantuan Sosial	1.024.500.000,00	964.700.000,00	59.800.000,00	5,84
BELANJA MODAL	106.201.784.050,00	94.027.132.612,00	12.174.651.438,00	11,46
Belanja Modal Tanah	1.647.190.400,00	1.598.164.430,00	49.025.970,00	2,98
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.700.361.892,00	38.662.905.255,00	8.037.456.637,00	17,21
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.429.352.556,00	26.140.617.432,00	3.288.735.124,00	11,18
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	26.167.197.162,00	25.423.870.469,00	743.326.693,00	2,84
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.234.682.040,00	2.178.598.026,00	56.084.014,00	2,51
Belanja Modal Aset Lainnya	23.000.000,00	22.977.000,00	23.000,00	0,00
BELANJA TAK TERDUGA	6.726.011.484,00	4.500.000,00	6.721.511.484,00	99,93
Belanja Tidak Terduga	6.726.011.484,00	4.500.000,00	6.721.511.484,00	99,93
Jumlah	851.009.111.090,00	765.455.545.090,00	85.553.566.000,00	10,05

Dari komponen belanja yang ada yakni Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan belanja Transfer. Realisasi terbesar berada pada Belanja Operasi mencapai angka 90,97%. selanjutnya Belanja Modal sebesar Rp94.027.132.612,00 atau 88,54% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp106.201.784.050,00 dengan komponen terbesar pada Belanja Modal asset Lainnya yang terealisasi sebesar 99,90% dan untuk Belanja Tak terduga pada tahun ini realisasinya sebesar Rp4.500.000,00 untuk belanja terkait pengembalian atas kelebihan pendapatan Tahun 2024.

Tabel 1.4 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Jenis Belanja	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Diatas (Dibawah)	
			(Rp)	%
1	2	3	4 = 2-3	5
BELANJA OPERASI	671.423.912.478,00	668.220.386.847,00	3.203.525.631,00	0,48
Belanja Pegawai	381.919.511.232,00	376.394.619.531,00	5.524.891.701,00	1,45
Belanja Barang dan Jasa	266.709.729.551,00	261.363.190.982,00	5.346.538.569,00	2,00
Belanja Hibah	21.829.971.695,00	27.373.461.334,00	-5.543.489.639,00	-25,39
Belanja Bantuan Sosial	964.700.000,00	3.089.115.000,00	-2.124.415.000,00	-220,22
BELANJA MODAL	94.027.132.612,00	73.985.819.648,00	20.041.312.964,00	21,31
Belanja Modal Tanah	1.598.164.430,00	834.832.535,00	763.331.895,00	47,76
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.662.905.255,00	21.973.427.518,00	16.689.477.737,00	43,17
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.140.617.432,00	17.929.842.688,00	8.210.774.744,00	31,41
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.423.870.469,00	30.784.644.322,00	-5.360.773.853,00	-21,09
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.178.598.026,00	2.459.672.585,00	-281.074.559,00	-12,90
Belanja Modal Aset Lainnya	22.977.000,00	3.400.000,00	19.577.000,00	0,00
BELANJA TAK TERDUGA	4.500.000,00	518.850.784,00	-514.350.784,00	#####
Belanja Tidak Terduga	4.500.000,00	518.850.784,00	-514.350.784,00	#####
Jumlah	765.455.545.090,00	742.725.057.279,00	22.730.487.811,00	2,97

Realisasi Belanja Tahun 2025 sebesar Rp765.455.545.090,00 mengalami peningkatan sebesar Rp22.730.487.811,00 atau 2,97% diatas realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp742.725.057.279,00. Hal ini berkaitan dengan kondisi perekonomian nasional yang mulai meningkat kearah yang lebih baik sehingga berimbas ke daerah yang mengakibatkan meningkatnya realisasi pendapatan daerah dan akan berdampak kepada meningkatnya belanja daerah.

c. Realisasi Pembiayaan

Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kota Payakumbuh mengalokasikan Pembiayaan sebesar Rp88.214.057.575,00 dengan realisasi sebesar Rp88.214.057.575,00 atau sebesar 100,00 % terdapat peningkatan sebesar Rp3.095.467.634,00 dibanding Tahun Anggaran 2024. Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 terdiri dari

a. Penerimaan pembiayaan

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 dan realisasi Tahun 2024. Rincian anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2024		%	Realisasi Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi		
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	88.214.057.575,00	88.214.057.575,00	100,00	85.118.589.941,00
Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	88.214.057.575,00	88.214.057.575,00	100,00	85.118.589.941,00
Jumlah	88.214.057.575,00	88.214.057.575,00	100,00	85.118.589.941,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Payakumbuh tidak mengalokasikan Pengeluaran Pembiayaan.

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran untuk Tahun 2025 adalah sebesar Rp105.194.793.349,00 diperoleh dari

-	Realisasi Penggunaan SiLPA 2024	88.214.057.575,00
-	Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025	-
	Jumlah Pembiayaan Netto	88.214.057.575,00
	Surplus	16.980.735.774,00
	SILPA Tahun 2025	105.194.793.349,00



BAB II

Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2025

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Payakumbuh
Tahun 2025

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN APBD TAHUN 2024

Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dimana pemerintah daerah diamanatkan untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025.

Amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri juga menyatakan bahwa adanya perubahan atau percepatan jadwal dalam penyusunan dokumen penganggaran untuk tahun 2025 ini. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan KUA dan PPAS dijadwalkan untuk disepakati dengan DPRD bulan Agustus setiap tahunnya. Namun berdasarkan SE Mendagri diatas, jadwal pembahasan rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS antara Kepala Daerah bersama DPRD guna memperoleh kesepakatan bersama, dilaksanakan pada minggu pertama bulan Juni Tahun 2025 untuk provinsi dan minggu kedua bulan Juni Tahun 2025 untuk kabupaten/kota.

Untuk pelaksanaan APBD TA 2025 ini, program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, saat ini telah memasuki tahapan pelaksanaan semester kedua. Dalam pelaksanaannya terdapat kondisi yang juga menuntut perlunya dilakukan perubahan anggaran, baik yang disebabkan oleh peninjauan atas asumsi dasar karena dinamika yang berkembang, pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan serta adanya silpa anggaran yang terjadi

akibat dari kelebihan dari tahun yang lalu, yang digunakan untuk kegiatan tahun berjalan. Kondisi tersebut mendorong perlunya pengajuan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dimulai dengan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 yang kemudian disusul dengan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari perubahannya. Perubahan KUA disusun untuk memenuhi amanat Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA);
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Perubahan APBD yang disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

1. Perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah;
2. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang

semula ditetapkan dalam KUA.

Perkembangan dinamika yang terjadi di bidang ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan serta pendapatan daerah yang perlu disesuaikan, serta besaran sisa lebih anggaran yang selesai dihitung dan diaudit oleh BPK sehingga pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 perlu disesuaikan agar tetap konsisten dengan rencana pembangunan daerah.

Selain itu dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 terdapat beberapa peraturan perundang-undangan dan kebutuhan mendesak yang menyebabkan perlu dilakukannya penyesuaian terhadap penjabaran APBD yang telah ditetapkan, melalui mekanisme perubahan penjabaran APBD mendahului perubahan, yaitu: adanya perubahan transfer ke daerah (TKD) sesuai dengan KMK Nomor 29 Tahun 2025 dan perubahan belanja sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja. Pergeseran ini dengan merubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penyesuaian pergeseran anggaran dilaksanakan sebelum penetapan perubahan APBD TA 2025 dengan cara merubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD TA 2025 dan telah diberitahukan kepada Pimpinan DPRD Kota Payakumbuh untuk selanjutnya ditampung dalam rancangan Perubahan APBD TA 2025.

Berdasarkan kondisi diatas, perubahan dokumen perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD. Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD dibahas bersama dengan DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Perubahan Kebijakan Umum APBD serta

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD. Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan PPAS APBD yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.

2.1. Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2.1.1 Perubahan Anggaran Pendapatan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Beberapa kebijakan pendapatan daerah dirumuskan untuk meningkatkan pendapatan daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Penyesuaian target dan nomenklatur pendapatan asli daerah berdasarkan kondisi perekonomian daerah dan aturan yang berlaku.
- Penyesuaian pendapatan transfer berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi.
- Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pendapatan daerah meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk memobilisasi Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan daerah lainnya. Pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD nanti. Sedangkan untuk pendapatan transfer, komponen bagi hasil pajak serta komponen bagi hasil bukan pajak dan bantuan keuangan provinsi adalah dua unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan dana perimbangan yang akan diperoleh nantinya. Untuk mencapai target APBD, Pemerintah Kota Payakumbuh perlu menggali sumber-sumber pendapatan daerah, antara lain mengintensifkan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan meningkatkan hasil kekayaan daerah serta sumber-sumber penghasilan lainnya yang tidak memberatkan masyarakat dan mengganggu jalannya proses produksi di wilayah Kota Payakumbuh.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya yang menyatakan bahwa jika terjadi pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA, Pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian dengan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan ditetapkan oleh Kepala Daerah. Menyikapi hal tersebut Pemerintah Kota Payakumbuh telah melakukan pergeseran anggaran dengan merubah Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 05 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara keseluruhan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 khusus untuk Pendapatan Daerah sesuai dengan peraturan yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan evaluasi realisasi pendapatan daerah semester I Tahun Anggaran 2024, prognosis semester II serta rancangan

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024, terjadi kenaikan target sebesar Rp. 6.916.564.743,00. Kenaikan target merupakan akumulasi dari naik turunnya semua item pendapatan daerah. Untuk pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 10.143.442.754,00 sementara terjadi penurunan target pada pendapatan transfer pusat sesuai dengan KMK nomor 29 Tahun 2025 terkait dengan efisiensi anggaran dan juga penyesuaian pendapatan DAK Non Fisik akibat di carryoverkannya silpa DAK Non fisik tahun lalu, sehingga pendapatan transfer pusat turun sebesar Rp. 8.593.042.444,00. Juga untuk komponen Pendapatan transfer Antar Daerah melalui pendapatan bagi hasil pajak provinsi mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.366.164.743,00.

Target pendapatan pada perubahan tentunya tidak terlepas juga dari realisasi pendapatan pada semester I TA 2025. Berikut dapat dilihat realisasi pendapatan kondisi Bulan Juni Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II.1

Rincian Realisasi Pendapatan Daerah Semester 1 Bulan Juni Tahun Anggaran 2025

Kode	URAIAN	TARGET DI APBD AWAL 2025	TARGET DI PERGESERAN	REALISASI JUNI 2025	%
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	147.847.509.292	147.847.509.292	73.737.723.162	49,87
4.1.01	Pajak Daerah	41.673.402.980	41.673.402.980	19.175.225.700	46,01
4.1.02	Retribusi Daerah	87.572.567.148	87.572.567.148	37.568.150.801	42,90
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.381.453.735	12.381.453.735	11.275.525.706	91,07
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.220.085.429	6.220.085.429	5.718.820.955	91,94
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	608.030.979.480	599.650.544.480	311.148.505.941	51,89
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	583.551.636.133	575.171.201.133	301.384.426.766	52,40
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.479.343.347	24.479.343.347	9.764.079.175	39,89
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0	0,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	0	0	0	0,00
	PENDAPATAN DAERAH	755.878.488.772	747.498.053.772	384.886.229.103	51,49

Sumber : Badan Keuangan Daerah, data diolah 2025

Selanjutnya dengan adanya perubahan Pendapatan Daerah tersebut, daerah perlu melakukan langkah-langkah perbaikan pengelolaan keuangan daerah (APBD). Berkaitan dengan kondisi pendapatan daerah di atas, maka kebijakan pendapatan daerah pada Perubahan KUA tahun anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta Lain-Lain PAD yang Sah, dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah serta memperhatikan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 dan evaluasi kinerja pendapatan sampai dengan bulan Juni 2025, dimana pada Perubahan KUA Tahun 2025 dibandingkan dengan target PAD di APBD Awal maka Pendapatan Asli Daerah bertambah sebesar Rp. 10.143.442.754,00 atau naik sebesar 6,86% dari Rp. 147.847.509.292,00 menjadi Rp. 157.990.952.046,00. Berdasarkan kondisi ini maka kebijakan pendapatan asli daerah di Perubahan KUA Tahun 2025 diarahkan sebagai berikut :

- a. Penerimaan pajak daerah, dimana pada Perubahan KUA 2025 penerimaan dari pajak daerah mengalami penurunan sebesar Rp. 592.751.766,00 sehingga menjadi Rp.41.080.651.214,00. Ini disebabkan salah satu komponen pada Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) tenaga listrik, dimana PT PLN memberikan discount tarif pada bulan Januari dan Februari 2025 serta pada bulan Mei 2025 kepada konsumen kemudian dilihat dari realisasi tahun lalu 2024 dari target Rp. 10.150.392.728, realisasi sebesar Rp. 9.887.809.189 atau 97,41%. Pada jenis pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) target dihilangkan sesuai Perda Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2024 pada pasal 41 ayat (3) “Wilayah Pemungutan Pajak MBLB terutang merupakan wilayah Daerah tempat Pengambilan

MBLB”, dikarenakan wilayah kota Payakumbuh bukan merupakan wilayah yang berpotensi dalam pajak MBLB.

- b. Penerimaan retribusi daerah, dimana pada Perubahan KUA 2025 penerimaan dari retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.123.069.140,- dari target diawal sebesar Rp. 87.572.567.148,00 sehingga menjadi Rp. 92.695.636.288,00. Kenaikan ini sebagian besar dari peningkatan pendapatan BLUD RSUD dan Puskesmas.
- c. Penyesuaian penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Untuk Perubahan KUA 2025, penerimaan dari sektor ini bertambah sebesar Rp. 894.071.971,00 atau naik sebesar 7,22% dari Rp. 12.381.453.735,00 menjadi Rp. 13.275.525.706,00. Peningkatan ini karena naiknya target bagian laba atas penyertaan modal ke Bank Nagari sehingga target Bagian laba menjadi Rp. 11.275.525.706,00 dan Laba Pamtigo sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- d. Penyesuaian penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dimana pada Perubahan KUA TA.2025 bertambah sebesar Rp. 4.719.053.409,00 atau naik 75,87% dari target awal sebesar Rp. 6.220.085.429,00 menjadi Rp. 10.939.138.838,00. Kenaikan ini sebagian besar berasal dari pendapatan BLUD yang merupakan Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan; Dana Insentif Daerah; dan Dana Desa. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum) dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik). Adapun Transfer Antar

Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak dari Propinsi). Pendapatan transfer bertujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah.

Pada Perubahan KUA TA 2025, pendapatan transfer mengalami penurunan jika dibandingkan dengan target di APBD awal sebesar Rp. 3.226.878.011,00 atau turun 0,53% dari Rp. 608.030.979.480,00 menjadi Rp. 604.804.101.469,00. Kebijakan pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 adalah melakukan penyesuaian target transfer pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan lahirnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terjadi pengurangan terget pendapatan transfer dari DAK Fisik Irigasi dan DAU yang diarahkan Bidang Pekerjaan Umum yang mengalami pemotongan.

Berdasarkan hal tersebut perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan perubahan pendapatan sebagai berikut:

- a. Pendapatan transfer pusat mengalami penurunan sebesar Rp. 3.226.878.011,00 atau turun 0,53%. Penurunan ini disebabkan adanya :
 - 1) Penyesuaian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya akibat adanya Silpa DAK Non Fisik tahun sebelumnya dan pada tahun 2025 Kota Payakumbuh tidak mendapatkan alokasi pendapatan DAK Non Fisik tersebut, sehingga DAU

yang tidak ditentukan penggunaannya akan mengalami pemotongan sebesar silpa DAK tersebut yakni sebesar Rp. 248.663.270,00

- 2) Penyesuaian Pendapatan DAU yang diarahkan bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp. 4.849.874.000,- menjadi nol rupiah
- 3) Penyesuaian Pendapatan DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan sebesar Rp. 2.368.504.000,- menjadi nol rupiah
- 4) Penyesuaian lebih salur DBH Pajak dan DBH Sumber daya alam sehingga target DBH berkurang sebesar Rp. 690.831.000,00. Disamping itu pada perubahan 2025 ini juga mengalokasikan pendapatan dari DBH CHT sebesar Rp. 48.513.000,-, Penganggaran DBH CHT disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-223-2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan gubernur Nomor 903.782-2024 tentang Penetapan Alokasi Dana bagi hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dan bagian Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun Anggaran 2025 PMK Nomor 295 tahun 2024 dan juga penganggaran pendapatan DBH Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp. 48.513.000,- yang belum kita alokasikan diawal
- 5) penyesuaian pendapatan DAK Non Fisik yang turun akibat *carryover* sisa tahun lalu sebesar Rp. 435.170.174,00. Namun untuk perubahan 2025 ini, DAK Non Fisik mendapatkan alokasi penerimaan baru dari DAK Non Fisik BOP Penyuluh pertanian sebesar Rp. 186.960.000,00

- b. Pendapatan transfer antar daerah berupa Dana bagi hasil pajak provinsi mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.366.164.433 atau naik 21,92% dari semula sebesar Rp. 24.479.343.347,00 menjadi Rp. 29.845.507.780,- yang berasal dari DBH Pajak Bahan Bakar, DBH Pajak Air Permukaan dan DBH Pajak Rokok.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 tetap tidak ada target yang diproyeksikan.

Berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, maka perubahan pendapatan daerah Kota Payakumbuh dalam pada Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2025 adalah sebagaimana terdapat pada Tabel II.2. berikut :

Tabel II.2.
Ringkasan Perubahan Pendapatan Daerah
Kota Payakumbuh Tahun 2025

Kode	URAIAN	APBD 2025 AWAL	PERUBAHAN APBD TA 2025	SELISIH	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	PENDAPATAN DAERAH	755.878.488.772	762.795.053.515	6.916.564.743	0,92
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	147.847.509.292	157.990.952.046	10.143.442.754	6,86
4.1.01	Pajak Daerah	41.673.402.980	41.080.651.214	(592.751.766)	(1,42)
4.1.02	Retribusi Daerah	87.572.567.148	92.534.636.288	4.962.069.140	5,67
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.381.453.735	13.275.525.706	894.071.971	7,22
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.220.085.429	11.100.138.838	4.880.053.409	78,46
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	608.030.979.480	604.804.101.469	(3.226.878.011)	(0,53)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	583.551.636.133	574.958.593.689	(8.593.042.444)	(1,47)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.479.343.347	29.845.507.780	5.366.164.433	21,92
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0	0
4.3.1	Pendapatan Hibah	0	0	0	0

Sumber :Badan Keuangan Daerah, Perubahan APBD Tahun 2025

Dibandingkan dengan APBD awal TA 2025, target pendapatan daerah pada perubahan APBD 2025 diperkirakan akan mencapai sebesar Rp762.795.053.515,00 dari semula sebesar Rp. 755.878.488.772,00 dan naik sebesar Rp6.916.564.743,00- atau naik 0,92%.

2.1.2 Perubahan Anggaran Belanja

Kebijakan perubahan rencana belanja Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan melihat kondisi dan mempertimbangkan realisasi anggaran Semester 1 tahun 2025, dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dan pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, serta memperhatikan adanya penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang memuat pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dan pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

Perubahan belanja daerah tetap mendukung capaian prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintah wajib yang terkait dengan Pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja Daerah untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja Daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Perubahan kebijakan belanja daerah pada tahun 2025 tetap diupayakan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah

juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan.

Kebijakan belanja pada perubahan 2025 berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan Perangkat Daerah, tetap dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya.

Perubahan rencana belanja daerah pada perubahan 2025 meliputi penambahan maupun penyesuaian alokasi belanja baik melalui penggeseran anggaran antar belanja maupun antar program dan kegiatan. Perubahan rencana belanja dipengaruhi adanya perubahan peraturan perundang-undangan atau pedoman teknis belanja tertentu seperti DAK dan dipengaruhi juga ketersediaan dana yang bersumber dari peningkatan pendapatan maupun penerimaan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya.

1. Untuk belanja yang bersifat mandatory, Pemerintah Kota Payakumbuh selalu berkomitmen untuk memenuhi persyaratan persentase anggaran yang diamanatkan. Dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk belanja yang bersifat mandatory, pada perubahan KUA TA 2025 ini Pemerintah Kota Payakumbuh memang belum semuanya dapat dipenuhi mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah, namun pemerintah Kota Payakumbuh selalu berupaya untuk memenuhi belanja minimal yang persyaratan sebagaimana yang diamanatkan juga oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dimana Kabupaten/Kota sampai tahun 2027 sudah harus memenuhi semua belanja tersebut. Strategi dan kebijakan yang tepat harus bisa diambil Kota Payakumbuh untuk memenuhi amanat tersebut.

Berdasarkan gambaran kebijakan belanja diatas, jika dibandingkan dengan belanja daerah di APBD awal 2025 maka pada perubahan APBD Tahun 2025 ini, pemerintah Kota Payakumbuh menargetkan kenaikan belanja sebesar Rp. 22.347.329.959,00 atau naik 2,70% yang dialokasikan berdasarkan prioritas dan kebijakan pusat, provinsi dan daerah dan mempertimbangkan realisasi anggaran berjalan di tahun 2025 ini.

Sebagai gambaran untuk realisasi belanja daerah pada semester I Bulan Juni 2025 baru mencapai 37,46% dari total belanja daerah, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.3
Rincian Realisasi Belanja Daerah Semester 1 Bulan Juni Tahun
Anggaran 2025

URAIAN	APBD AWAL 2025	PERGESERAN	REALISASI JUNI 2025	%
1	2	3	4	5 = 4/3 * 100
BELANJA DAERAH	828.661.781.131	817.599.220.873	306.308.342.100	37,46
BELANJA OPERASI	749.026.189.911	729.856.697.911	296.451.541.270	40,62
Belanja Pegawai	427.164.999.371	429.103.774.347	190.041.537.597	44,29

Belanja Barang dan Jasa	298.453.977.377	277.390.510.401	97.054.496.521	34,99
Belanja Hibah	22.270.713.163	22.225.913.163	8.392.507.152	37,76
Belanja Bantuan Sosial	1.136.500.000	1.136.500.000	963.000.000	84,73
BELANJA MODAL	78.847.034.707	86.953.966.449	9.856.800.830	11,34
Belanja Modal Tanah	1.786.010.650	1.468.010.650	4.627.350	0,32
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.545.795.232	33.244.176.832	8.215.237.817	24,71
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.587.381.533	26.308.070.575	362.736.449	1,38
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.352.034.002	24.362.895.102	668.027.544	2,74
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.519.013.290	1.514.013.290	606.171.670	40,04
Belanja Modal Aset Lainnya	56.800.000	56.800.000	-	-
BELANJA TIDAK TERDUGA	788.556.513	788.556.513	0	-
Belanja Tidak Terduga	788.556.513	788.556.513	0	-
BELANJA TRANSFER	0	0	0	-
Belanja Transfer	0	0	0	-

Sumber : Badan Keuangan Daerah, data diolah 2025

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, kebijakan belanja Daerah Kota Payakumbuh pada Perubahan KUA Tahun 2025 yaitu :

2. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
3. Mempertahankan belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta menjadi mandatory spending, pemenuhan SPM, penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem
4. Belanja daerah berupa belanja operasi setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta

pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.

5. Belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
6. Mendukung program kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.
7. Menampung belanja terkait dengan persetujuan mendahului Perubahan APBD Tahun 2025 yang harus ditampung dalam perubahan APBD, antara lain :
 - a. Pergeseran dalam rangka penyesuaian transfer ke daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 29 tahun 2025 .
 - b. Pergeseran belanja dalam rangka efisiensi sesuai dengan amanat Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900/833/SJ.
8. Mengalokasikan belanja yang bersumber dari SiLPA yang bersifat terikat seperti SiLPA DAU Dukungan Kelurahan dan SiLPA Insentif Fiskal serta SiLPA DAU yang diarahkan Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan serta Bidang Pekerjaan Umum.

Merencanakan perubahan belanja program dan kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Rencana belanja daerah Kota Payakumbuh pada perubahan APBD tahun 2025 untuk belanja operasi adalah untuk pemenuhan belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta komponen belanja modal meliputi belanja dari penggunaan hasil efisiensi anggaran dan kegiatan strategis lainnya. Berkenaan dengan kebijakan terkait dengan belanja daerah maka rencana belanja daerah Pemerintah Kota Payakumbuh untuk

perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp851.009.000.090,00.

Secara terperinci rencana belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 seperti tabel berikut:

Tabel II.4
Belanja Daerah Perubahan APBD
Kota Payakumbuh Tahun 2025

URAIAN	APBD AWAL 2025	PERUBAHAN APBD TA 2025	SELISIH	%
1	2	3	4 = 3 - 2	5
BELANJA DAERAH	828.661.781.131	851.009.111.090	22.347.329.959	2,70
BELANJA OPERASI	749.026.189.911	738.081.315.556	(10.451.164.803)	(1,46)
Belanja Pegawai	427.164.999.371	427.783.039.819	618.040.448	0,14
Belanja Barang dan Jasa	298.453.977.377	287.002.812.574	(11.451.146.803)	(3,84)
Belanja Hibah	22.270.713.163	22.270.963.163	250.000	0,00
Belanja Bantuan Sosial	1.136.500.000	1.024.500.000	(112.000.000)	(9,85)
BELANJA MODAL	78.847.034.707	106.201.784.050	27.354.749.343	34,69
Belanja Modal Tanah	1.786.010.650	1.647.190.400	(138.820.250)	(7,77)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.545.795.232	46.700.361.892	20.154.566.660	75,92
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.587.381.533	29.429.352.556	2.841.971.023	10,69
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.352.034.002	26.167.197.162	3.815.163.160	17,07
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.519.013.290	2.234.682.040	715.668.750	47,11
Belanja Modal Aset Lainnya	56.800.000	23.000.000	(33.800.000)	(59,51)
BELANJA TIDAK TERDUGA	788.556.513	6.726.011.484	5.937.454.971	752,95
Belanja Tidak Terduga	788.556.513	6.726.011.484	5.937.454.971	752,95
BELANJA TRANSFER	0	0	0	0,00
Belanja Transfer	0		0	0,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Perubahan APBD Tahun 2025

2.3. Pembiayaan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah Kota Payakumbuh menganut prinsip keseimbangan antara pendapatan dan belanja (balance budgeting). Namun jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Sumber-

sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran dapat diperoleh dari SiLPA ataupun pinjaman daerah dan sebisa mungkin menghindari penjualan aset daerah yang dipisahkan. Apabila terjadi pinjaman daerah, maka besaran pinjaman daerah harus sesuai kemampuan pengembalian pinjaman oleh daerah.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD, maka kebijakan pembiayaan daerah tetap difokuskan pada :

1. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya ditetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2024.
3. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah maka diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto nilainya harus menutup terjadinya defisit anggaran sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan likuiditas keuangan daerah.

2.3.1.Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan bersumber dari :

- a. SiLPA;
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Penerimaan pembiayaan daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 semula direncanakan sebesar Rp. 72.783.292.359,00 berubah menjadi sebesar Rp.88.214.057.575,00 Hal ini diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

2.3.2.Perubahan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk :

- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- b. Penyertaan modal daerah;
- c. Pembentukan dana cadangan;
- d. Pemberian pinjaman daerah, dan/atau
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan adanya perubahan proyeksi pada penerimaan pembiayaan daerah, maka Total Pembiayaan Netto yang merupakan selisih dari Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, pada Tahun Anggaran 2025 juga mengalami perubahan dari semula direncanakan sebesar Rp. 72.783.292.359,00 pada APBD awal Tahun Anggaran 2025, bertambah menjadi sebesar Rp88.214.057.575,00 atau naik sebesar Rp15.430.765.216,00 atau 21,20%. Pembiayaan netto tersebut selanjutnya akan dipergunakan untuk menutupi kekurangan defisit anggaran yang terjadi, sehingga akan terjadi keseimbangan antara

penerimaan dengan pengeluaran. Secara rinci perubahan proyeksi pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2025 dapat digambarkan sebagaimana pada Tabel II.5 berikut:

Tabel II.5
Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2025

No.	URAIAN	APBD TA. 2025	PERUBAHAN APBD TA.2025	SELISIH
1	2	3	4	5 = 4 - 3
6.	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	72.783.292.359	88.214.057.575	15.430.765.216
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	72.783.292.359	88.214.057.575	15.430.765.216
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0
PEMBIAYAAN NETTO		72.783.292.359	88.214.057.575	15.430.765.216
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)		0	0	0

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Perubahan APBD Tahun 2025

Berikut matrik Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2025

NO	KODE	URAIAN	AWAL	PERUBAHAN	TAMBAH / KURANG	%
		Dinas Pendidikan	209.443.709. 402,00	200.001.532. 581,00	(9.442.176. 821,00)	0,95
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	-
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			-	-
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	1.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-
1	1.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	147.953.550, 00	51.993.550,0 0	(95.960.000 ,00)	0,35
2	1.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	186.194.050, 00	169.869.950, 00	(16.324.100 ,00)	0,91
	1.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-
3	1.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	147.301.893. 087,00	148.179.917. 426,00	878.024.339 ,00	1,01
4	1.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	723.696.000, 00	792.832.000, 00	69.136.000, 00	1,10
	1.01.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-	-
5	1.01.01.2.0 3.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	40.835.500,0 0	33.275.000,0 0	(7.560.500, 00)	0,81
	1.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-
6	1.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	75.000.000,0 0	68.000.000,0 0	(7.000.000, 00)	0,91
	1.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-

7	1.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.018.000,0 0	16.340.000,0 0	(13.678.000 ,00)	0,54
8	1.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.389.000,0 0	99.389.000,0 0	-	1,00
9	1.01.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.097.000,0 0	11.667.000,0 0	(430.000,00)	0,96
10	1.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	177.255.000, 00	177.255.000, 00	-	1,00
11	1.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	105.732.950, 00	75.232.900,0 0	(30.500.050 ,00)	0,71
12	1.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	44.173.600,0 0	54.173.600,0 0	10.000.000, 00	1,23
13	1.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	315.967.000, 00	141.821.000, 00	(174.146.00 0,00)	0,45
	1.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-
14	1.01.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	102.002.000, 00	102.002.000, 00	-	1,00
15	1.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.324.400,0 0	53.324.400,0 0	-	1,00
	1.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
16	1.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	244.686.400, 00	195.192.400, 00	(49.494.000 ,00)	0,80
17	1.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	318.384.180, 00	386.967.660, 00	68.583.480, 00	1,22
	1.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
18	1.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.950.000,0 0	42.950.000,0 0	-	1,00
19	1.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	168.160.000, 00	192.160.000, 00	24.000.000, 00	1,14

		Operasional atau Lapangan				
20	1.01.01.2.0 9.0005	Pemeliharaan Mebel	21.011.590,0 0	0,00	(21.011.590 ,00)	-
21	1.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.770.000,0 0	51.770.000,0 0	-	1,00
22	1.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	108.611.280, 00	0,00	(108.611.28 0,00)	-
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			-	-
	1.01.02.2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			-	-
23	1.01.02.2.0 1.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	125.449.300, 00	125.449.300, 00	-	1,00
24	1.01.02.2.0 1.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	83.751.180,0 0	133.694.140, 00	49.942.960, 00	1,60
25	1.01.02.2.0 1.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	428.089.032, 00	428.089.032, 00	-	1,00
26	1.01.02.2.0 1.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	111.064.890, 00	111.064.890, 00	-	1,00
27	1.01.02.2.0 1.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	318.353.052, 00	318.353.052, 00	-	1,00
28	1.01.02.2.0 1.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	758.933.800, 00	858.339.800, 00	99.406.000, 00	1,13
29	1.01.02.2.0 1.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	49.973.520,0 0	49.973.520,0 0	-	1,00
30	1.01.02.2.0 1.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	306.612.000, 00	266.534.000, 00	(40.078.000 ,00)	0,87
31	1.01.02.2.0 1.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.805.330.10 0,00	1.725.330.10 0,00	(80.000.000 ,00)	0,96
32	1.01.02.2.0 1.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada	256.940.500, 00	165.850.000, 00	(91.090.500 ,00)	0,65

		Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				
33	1.01.02.2.0 1.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	29.624.000,0 0	62.524.000,0 0	32.900.000, 00	2,11
34	1.01.02.2.0 1.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	15.511.000.0 00,00	15.312.500.0 00,00	(198.500.00 0,00)	0,99
35	1.01.02.2.0 1.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	42.925.000,0 0	37.645.000,0 0	(5.280.000, 00)	0,88
36	1.01.02.2.0 1.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	19.944.000,0 0	19.719.000,0 0	(225.000,00)	0,99
37	1.01.02.2.0 1.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	39.857.000,0 0	39.632.000,0 0	(225.000,00)	0,99
38	1.01.02.2.0 1.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	202.000.000, 00	202.000.000, 00	-	1,00
39	1.01.02.2.0 1.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	200.000.000, 00	200.000.000, 00	-	1,00
40	1.01.02.2.0 1.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.003.974.25 3,00	1.044.531.05 3,00	40.556.800, 00	1,04
41	1.01.02.2.0 1.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	787.718.596, 00	881.244.976, 00	93.526.380, 00	1,12
42	1.01.02.2.0 1.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	6.348.800.00 0,00	398.000.000, 00	(5.950.800. 000,00)	0,06
43	1.01.02.2.0 1.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	207.928.000, 00	719.568.000, 00	511.640.000 ,00	3,46
	1.01.02.2.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			-	-
44	1.01.02.2.0 2.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	168.402.174, 00	522.604.214, 00	354.202.040 ,00	3,10
45	1.01.02.2.0 2.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	3.319.680.00 0,00	183.000.000, 00	(3.136.680. 000,00)	0,06

46	1.01.02.2.0 2.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	284.797.600, 00	245.231.600, 00	(39.566.000 ,00)	0,86
47	1.01.02.2.0 2.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	702.751.350, 00	702.751.350, 00	-	1,00
48	1.01.02.2.0 2.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	51.511.500,0 0	106.955.500, 00	55.444.000, 00	2,08
49	1.01.02.2.0 2.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	24.497.350,0 0	138.960.600, 00	114.463.250 ,00	5,67
50	1.01.02.2.0 2.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	9.750.600.00 0,00	9.949.100.00 0,00	198.500.000 ,00	1,02
51	1.01.02.2.0 2.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	39.034.800,0 0	14.065.800,0 0	(24.969.000 ,00)	0,36
52	1.01.02.2.0 2.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	39.469.300,0 0	36.841.150,0 0	(2.628.150, 00)	0,93
53	1.01.02.2.0 2.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	169.800.000, 00	169.800.000, 00	-	1,00
54	1.01.02.2.0 2.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	228.000.000, 00	675.685.000, 00	447.685.000 ,00	2,96
	1.01.02.2.0 3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			-	-
55	1.01.02.2.0 3.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	180.559.400, 00	180.559.400, 00	-	1,00
56	1.01.02.2.0 3.0007	Pengadaan Mebel PAUD	110.413.000, 00	110.413.000, 00	-	1,00
57	1.01.02.2.0 3.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	2.945.711.10 0,00	2.945.711.10 0,00	-	1,00
58	1.01.02.2.0 3.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada	149.466.200, 00	162.966.200, 00	13.500.000, 00	1,09

		Satuan Pendidikan PAUD				
59	1.01.02.2.0 3.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	351.333.450,00	339.628.050,00	(11.705.400,00)	0,97
60	1.01.02.2.0 3.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.920.800.000,00	2.920.800.000,00	-	1,00
61	1.01.02.2.0 3.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	49.601.800,00	41.441.800,00	(8.160.000,00)	0,84
62	1.01.02.2.0 3.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	200.000.000,00	200.000.000,00	-	1,00
63	1.01.02.2.0 3.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	58.999.700,00	58.999.700,00	-	1,00
64	1.01.02.2.0 3.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	30.240.950,00	30.240.950,00	-	1,00
65	1.01.02.2.0 3.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.869.210.000,00	40.770.000,00	(1.828.440.000,00)	0,02
66	1.01.02.2.0 3.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	550.812.610,00	550.812.610,00	-	1,00
67	1.01.02.2.0 3.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	859.934.000,00	859.934.000,00	-	1,00
	1.01.02.2.0 4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			-	-
68	1.01.02.2.0 4.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	553.680.000,00	27.000.000,00	(526.680.000,00)	0,05
69	1.01.02.2.0 4.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.699.720.000,00	2.692.835.000,00	(6.885.000,00)	1,00
70	1.01.02.2.0 4.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	30.777.500,00	25.452.500,00	(5.325.000,00)	0,83
71	1.01.02.2.0 4.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah	1.534.100.000,00	1.534.100.000,00	-	1,00

		Nonformal/Kesetaraan				
72	1.01.02.2.0 4.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	11.960.500,0 0	10.770.500,0 0	(1.190.000,00)	0,90
73	1.01.02.2.0 4.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	36.779.000,0 0	30.744.000,0 0	(6.035.000,00)	0,84
74	1.01.02.2.0 4.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	249.999.758,00	249.999.758,00	-	1,00
75	1.01.02.2.0 4.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	44.474.000,0 0	37.249.000,0 0	(7.225.000,00)	0,84
	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			-	-
	1.01.03.2.0 1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			-	-
76	1.01.03.2.0 1.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	92.143.000,0 0	91.918.000,0 0	(225.000,00)	1,00
	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			-	-
	1.01.04.2.0 1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			-	-
77	1.01.04.2.0 1.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	125.076.550,00	118.017.050,00	(7.059.500,00)	0,94

		Dinas Kesehatan	221.057.853. 052,00	238.588.325. 063,00	17.530.472. 011,00	1,08
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	-
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			-	-
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	1.02.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-
78	1.02.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76.760.650,0 0	75.008.650,0 0	(1.752.000, 00)	0,98
79	1.02.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.686.150,0 0	65.039.300,0 0	(1.646.850, 00)	0,98
	1.02.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-
80	1.02.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	76.770.962.3 01,00	76.655.251.0 41,00	(115.711.26 0,00)	1,00
81	1.02.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	506.736.000, 00	570.904.000, 00	64.168.000, 00	1,13
82	1.02.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37.015.000,0 0	37.015.000,0 0	-	1,00
	1.02.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-
83	1.02.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	438.974.750, 00	438.974.750, 00	-	1,00
	1.02.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-
84	1.02.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,0 0	15.590.000,0 0	5.590.000,0 0	1,56

85	1.02.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	62.744.700,0 0	29.156.700,0 0	(33.588.000 ,00)	0,46
86	1.02.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.644.000,0 0	115.241.500, 00	65.597.500, 00	2,32
87	1.02.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.726.000,0 0	18.440.200,0 0	(3.285.800, 00)	0,85
88	1.02.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.050.000,00	8.050.000,00	-	1,00
89	1.02.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	247.786.000, 00	143.403.000, 00	(104.383.00 0,00)	0,58
	1.02.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-
90	1.02.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	247.700.000, 00	367.590.000, 00	119.890.000 ,00	1,48
91	1.02.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	305.870.000, 00	167.046.000, 00	(138.824.00 0,00)	0,55
92	1.02.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	155.164.000, 00	155.164.000 ,00	-
93	1.02.01.2.0 7.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000, 00	119.338.000, 00	19.338.000, 00	1,19
	1.02.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
94	1.02.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	293.641.436, 00	294.440.760, 00	799.324,00	1,00
95	1.02.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.163.201.84 0,00	995.451.695, 00	(167.750.14 5,00)	0,86
	1.02.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
96	1.02.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.950.000,0 0	42.950.000,0 0	-	1,00

97	1.02.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	379.499.800,00	362.610.000,00	(16.889.800,00)	0,96
98	1.02.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.929.900,00	20.929.900,00	-	1,00
99	1.02.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	20.113.200,00	20.113.200,00	-
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-	-
	1.02.02.2.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			-	-
100	1.02.02.2.0 1.0002	Pembangunan Puskesmas	13.399.067.800,00	13.248.440.700,00	(150.627.100,00)	0,99
101	1.02.02.2.0 1.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	3.560.100,00	178.102.060,00	174.541.960,00	50,03
102	1.02.02.2.0 1.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7.183.650,00	906.401.064,00	899.217.414,00	126,18
103	1.02.02.2.0 1.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	124.999.900,00	742.999.900,00	618.000.000,00	5,94
104	1.02.02.2.0 1.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	23.738.000,00	23.738.000,00	-	1,00
	1.02.02.2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-
105	1.02.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	295.735.800,00	277.375.800,00	(18.360.000,00)	0,94

106	1.02.02.2.0 2.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	200.595.250,00	193.111.000,00	(7.484.250,00)	0,96
107	1.02.02.2.0 2.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	106.206.800,00	52.024.300,00	(54.182.500,00)	0,49
108	1.02.02.2.0 2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	48.371.400,00	41.996.400,00	(6.375.000,00)	0,87
109	1.02.02.2.0 2.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	30.813.700,00	30.813.700,00	-	1,00
110	1.02.02.2.0 2.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	116.009.550,00	89.684.550,00	(26.325.000,00)	0,77
111	1.02.02.2.0 2.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	21.279.300,00	21.279.300,00	-	1,00
112	1.02.02.2.0 2.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	21.139.650,00	21.139.650,00	-	1,00
113	1.02.02.2.0 2.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	13.150.000,00	13.150.000,00	-	1,00
114	1.02.02.2.0 2.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	321.779.350,00	343.967.350,00	22.188.000,00	1,07
115	1.02.02.2.0 2.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	137.351.900,00	102.439.900,00	(34.912.000,00)	0,75
116	1.02.02.2.0 2.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	232.862.000,00	232.862.000,00	-	1,00
117	1.02.02.2.0 2.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	553.501.850,00	521.367.900,00	(32.133.950,00)	0,94
118	1.02.02.2.0 2.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	54.243.500,00	71.791.000,00	17.547.500,00	1,32
119	1.02.02.2.0 2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	68.900.800,00	89.319.700,00	20.418.900,00	1,30
120	1.02.02.2.0 2.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	550.504.100,00	598.787.300,00	48.283.200,00	1,09

12 1	1.02.02.2.0 2.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	11.847.500,0 0	8.787.500,00	(3.060.000,00)	0,74
12 2	1.02.02.2.0 2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	53.032.100,0 0	41.961.100,0 0	(11.071.000,00)	0,79
12 3	1.02.02.2.0 2.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	4.678.200,00	24.333.200,0 0	19.655.000,00	5,20
12 4	1.02.02.2.0 2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	383.927.500,00	268.667.500,00	(115.260.000,00)	0,70
12 5	1.02.02.2.0 2.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.820.055.500,00	18.475.453.800,00	655.398.250,00	1,04
12 6	1.02.02.2.0 2.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	267.015.000,00	267.015.000,00	-	1,00
12 7	1.02.02.2.0 2.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	118.827.750,00	124.138.850,00	5.311.100,00	1,04
12 8	1.02.02.2.0 2.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	181.840.300,00	295.895.300,00	114.055.000,00	1,63
12 9	1.02.02.2.0 2.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	957.995.250,00	138.791.300,00	(819.203.950,00)	0,14
13 0	1.02.02.2.0 2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	46.450.000,00	46.450.000,00	-	1,00
13 1	1.02.02.2.0 2.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	18.163.450,00	18.163.450,00	-	1,00
	1.02.02.2.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			-	-
13 2	1.02.02.2.0 3.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	115.950.000,00	115.950.000,00	-	1,00
	1.02.02.2.0 4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-

13 3	1.02.02.2.0 4.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	36.974.700,0 0	6.093.500,00	(30.881.200 ,00)	0,16
13 4	1.02.02.2.0 4.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.282.100,00	5.206.000,00	(4.076.100, 00)	0,56
13 5	1.02.02.2.0 4.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	177.382.100, 00	16.424.100,0 0	(160.958.00 0,00)	0,09
13 6	1.02.02.2.0 4.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	15.614.850,0 0	14.849.850,0 0	(765.000,00)	0,95
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			-	-
	1.02.03.2.0 2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			-	-
13 7	1.02.03.2.0 2.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	5.001.000,00	5.001.000,00	-	1,00
	1.02.03.2.0 3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-
13 8	1.02.03.2.0 3.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	776.865.650, 00	506.695.900, 00	(270.169.75 0,00)	0,65

	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			-	-
	1.02.04.2.0 1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			-	-
13 9	1.02.04.2.0 1.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	56.740.000,0 0	6.028.000,00	(50.712.000 ,00)	0,11
	1.02.04.2.0 3	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			-	-
14 0	1.02.04.2.0 3.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	435.942.900, 00	435.942.900, 00	-	1,00
	1.02.04.2.0 4	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan			-	-

		Depot Air Minum (DAM)				
14 1	1.02.04.2.0 4.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	15.240.450,0 0	72.211.700,0 0	56.971.250,00	4,74
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-	-
	1.02.05.2.0 1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-
14 2	1.02.05.2.0 1.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.088.028.20 0,00	1.088.028.20 0,00	-	1,00
	1.02.05.2.0 2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-
14 3	1.02.05.2.0 2.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	69.748.800,0 0	69.748.800,0 0	-	1,00
	1.02.05.2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-
14 4	1.02.05.2.0 3.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	169.359.150,0 00	76.177.150,0 0	(93.182.000,00)	0,45

		Daya Masyarakat (UKBM)				
		UPT RSUD dr Adnaan WD			-	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	-
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			-	-
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			-	-
145	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	81.420.373.616,00	91.041.524.515,00	9.621.150.899,00	1,12
		Puskesmas Ibul			-	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	-
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			-	-
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			-	-
146	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.460.384.848,00	1.567.729.508,00	107.344.660,00	1,07
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-	-
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat			-	-

		Daerah Kabupaten/Kota				
14 7	1.02.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	22.496.000,0 0	22.496.000,0 0	-	1,00
14 8	1.02.02.2.0 2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22.525.000,0 0	22.525.000,0 0	-	1,00
14 9	1.02.02.2.0 2.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.120.000,00	6.120.000,00	-	1,00
15 0	1.02.02.2.0 2.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.440.000,00	5.440.000,00	-	1,00
15 1	1.02.02.2.0 2.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	98.390.250,0 0	98.390.250,0 0	-	1,00
15 2	1.02.02.2.0 2.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.360.000,00	1.360.000,00	-	1,00
15 3	1.02.02.2.0 2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.180.000,00	9.180.000,00	-	1,00
15 4	1.02.02.2.0 2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	850.000,00	850.000,00	-	1,00
15 5	1.02.02.2.0 2.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	7.650.000,00	7.650.000,00	-	1,00
15 6	1.02.02.2.0 2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	56.121.750,0 0	56.121.750,0 0	-	1,00
15 7	1.02.02.2.0 2.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	157.501.000, 00	157.501.000, 00	-	1,00
15 8	1.02.02.2.0 2.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3.255.000,00	3.255.000,00	-	1,00
15 9	1.02.02.2.0 2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.275.000,00	1.275.000,00	-	1,00
16 0	1.02.02.2.0 2.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	3.060.000,00	3.060.000,00	-	1,00
16 1	1.02.02.2.0 2.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	48.195.000,0 0	48.195.000,0 0	-	1,00
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-	-

	1.02.05.2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-
16 2	1.02.05.2.0 3.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.753.900,00	4.753.900,00	-	1,00
		Puskesmas Parit Rantang			-	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	-
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			-	-
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD			-	-
16 3	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.003.051.46 3,00	1.058.393.96 5,00	55.342.502, 00	1,06
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-	-
	1.02.02.2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-
16 4	1.02.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	13.310.000,0 0	13.310.000,0 0	-	1,00
16 5	1.02.02.2.0 2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22.100.000,0 0	22.100.000,0 0	-	1,00

166	1.02.02.2.0 2.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.400.000,00	3.400.000,00	-	1,00
167	1.02.02.2.0 2.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.420.000,00	4.420.000,00	-	1,00
168	1.02.02.2.0 2.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	82.443.700,00	82.443.700,00	-	1,00
169	1.02.02.2.0 2.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.080.000,00	4.080.000,00	-	1,00
170	1.02.02.2.0 2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.650.000,00	7.650.000,00	-	1,00
171	1.02.02.2.0 2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.349.000,00	3.349.000,00	-	1,00
172	1.02.02.2.0 2.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	5.100.000,00	5.100.000,00	-	1,00
173	1.02.02.2.0 2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	41.949.650,00	41.949.650,00	-	1,00
174	1.02.02.2.0 2.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	132.966.000,00	132.966.000,00	-	1,00
175	1.02.02.2.0 2.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6.303.000,00	6.303.000,00	-	1,00
176	1.02.02.2.0 2.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	13.820.000,00	13.820.000,00	-	1,00
177	1.02.02.2.0 2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.321.950,00	2.321.950,00	-	1,00
178	1.02.02.2.0 2.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	2.040.000,00	2.040.000,00	-	1,00
179	1.02.02.2.0 2.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	49.725.000,00	49.725.000,00	-	1,00
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-	-
	1.02.05.2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-

180	1.02.05.2.0 3.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.542.700,00	7.542.700,00	-	1,00
		Puskesmas Payolansek			-	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	-
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			-	-
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD			-	-
181	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.036.607.99 5,00	1.067.096.91 1,00	30.488.916, 00	1,03
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-	-
	1.02.02.2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-
182	1.02.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	20.082.000,0 0	20.082.000,0 0	-	1,00
183	1.02.02.2.0 2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	27.965.000,0 0	27.965.000,0 0	-	1,00
184	1.02.02.2.0 2.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.160.000,00	8.160.000,00	-	1,00
185	1.02.02.2.0 2.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.260.000,0 0	13.260.000,0 0	-	1,00

186	1.02.02.2.0 2.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	91.140.950,0 0	91.140.950,0 0	-	1,00
187	1.02.02.2.0 2.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.020.000,00	1.020.000,00	-	1,00
188	1.02.02.2.0 2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.730.000,0 0	11.730.000,0 0	-	1,00
189	1.02.02.2.0 2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.876.400,00	2.876.400,00	-	1,00
190	1.02.02.2.0 2.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3.060.000,00	3.060.000,00	-	1,00
191	1.02.02.2.0 2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	53.329.500,0 0	53.329.500,0 0	-	1,00
192	1.02.02.2.0 2.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	156.659.000, 00	156.659.000, 00	-	1,00
193	1.02.02.2.0 2.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.105.250,00	8.105.250,00	-	1,00
194	1.02.02.2.0 2.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.154.000,00	1.154.000,00	-	1,00
195	1.02.02.2.0 2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.550.000,00	2.550.000,00	-	1,00
196	1.02.02.2.0 2.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	3.060.000,00	3.060.000,00	-	1,00
197	1.02.02.2.0 2.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	41.140.000,0 0	41.140.000,0 0	-	1,00
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-	-
	1.02.05.2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-
198	1.02.05.2.0 3.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.542.800,00	5.542.800,00	-	1,00
		Puskesmas Tiakar			-	-

	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	-
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			-	-
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			-	-
199	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.075.660,00	1.098.471.859,00	22.811.859,00	1,02
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-	-
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-
200	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	28.790.000,00	28.790.000,00	-	1,00
201	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	32.300.000,00	32.300.000,00	-	1,00
202	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.200.000,00	10.200.000,00	-	1,00
203	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.290.000,00	6.290.000,00	-	1,00
204	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	96.838.000,00	96.838.000,00	-	1,00
205	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.275.000,00	1.275.000,00	-	1,00
206	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.500.000,00	8.500.000,00	-	1,00

207	1.02.02.2.0 2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.550.000,00	2.550.000,00	-	1,00
208	1.02.02.2.0 2.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	5.780.000,00	5.780.000,00	-	1,00
209	1.02.02.2.0 2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	77.083.750,00	77.083.750,00	-	1,00
210	1.02.02.2.0 2.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	165.798.000,00	165.798.000,00	-	1,00
211	1.02.02.2.0 2.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6.240.000,00	6.240.000,00	-	1,00
212	1.02.02.2.0 2.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	850.000,00	850.000,00	-	1,00
213	1.02.02.2.0 2.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.007.000,00	1.007.000,00	-	1,00
214	1.02.02.2.0 2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.358.700,00	1.358.700,00	-	1,00
215	1.02.02.2.0 2.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	2.040.000,00	2.040.000,00	-	1,00
216	1.02.02.2.0 2.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	35.955.000,00	35.955.000,00	-	1,00
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-	-
	1.02.05.2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-
217	1.02.05.2.0 3.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.838.550,00	7.838.550,00	-	1,00
		Puskesmas Air Tabit			-	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	-

	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			-	-
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			-	-
218	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.157.105,00	1.168.780,24 1,00	11.675.241,00	1,01
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-	-
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-
219	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	25.166.000,00	25.166.000,00	-	1,00
220	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	34.680.000,00	34.680.000,00	-	1,00
221	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.100.000,00	5.100.000,00	-	1,00
222	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.760.000,00	4.760.000,00	-	1,00
223	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	86.816.750,00	86.816.750,00	-	1,00
224	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.020.000,00	1.020.000,00	-	1,00
225	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.250.000,00	4.250.000,00	-	1,00
226	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.500.000,00	8.500.000,00	-	1,00
227	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	4.080.000,00	4.080.000,00	-	1,00

		Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				
228	1.02.02.2.0 2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	71.434.000,0 0	71.434.000,0 0	-	1,00
229	1.02.02.2.0 2.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	146.414.000,00	146.414.000,00	-	1,00
230	1.02.02.2.0 2.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6.830.500,00	6.830.500,00	-	1,00
231	1.02.02.2.0 2.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	938.000,00	938.000,00	-	1,00
232	1.02.02.2.0 2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.360.000,00	1.360.000,00	-	1,00
233	1.02.02.2.0 2.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	2.040.000,00	2.040.000,00	-	1,00
234	1.02.02.2.0 2.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	27.030.000,0 0	27.030.000,0 0	-	1,00
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-	-
	1.02.05.2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-
235	1.02.05.2.0 3.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.211.700,00	3.211.700,00	-	1,00
		Puskesmas Tarok			-	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	-
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			-	-
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-

	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD			-	-
23 6	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.489.177.00 0,00	1.565.625.07 8,00	76.448.078, 00	1,05
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-	-
	1.02.02.2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-
23 7	1.02.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	20.821.000,0 0	20.821.000,0 0	-	1,00
23 8	1.02.02.2.0 2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	36.720.000,0 0	36.720.000,0 0	-	1,00
23 9	1.02.02.2.0 2.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.240.000,0 0	12.240.000,0 0	-	1,00
24 0	1.02.02.2.0 2.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.780.000,00	5.780.000,00	-	1,00
24 1	1.02.02.2.0 2.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	109.498.500, 00	109.498.500, 00	-	1,00
24 2	1.02.02.2.0 2.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.120.000,00	6.120.000,00	-	1,00
24 3	1.02.02.2.0 2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.180.000,00	9.180.000,00	-	1,00
24 4	1.02.02.2.0 2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.550.000,00	2.550.000,00	-	1,00
24 5	1.02.02.2.0 2.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	5.780.000,00	5.780.000,00	-	1,00
24 6	1.02.02.2.0 2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	89.519.250,0 0	89.519.250,0 0	-	1,00
24 7	1.02.02.2.0 2.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	191.035.000, 00	191.035.000, 00	-	1,00

248	1.02.02.2.0 2.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	892.000,00	892.000,00	-	1,00
249	1.02.02.2.0 2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.445.000,00	1.445.000,00	-	1,00
250	1.02.02.2.0 2.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	2.040.000,00	2.040.000,00	-	1,00
251	1.02.02.2.0 2.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	35.955.000,00	35.955.000,00	-	1,00
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-	-
	1.02.05.2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-
252	1.02.05.2.0 3.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.005.250,00	5.005.250,00	-	1,00
		Puskesmas Lampasi			-	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	-
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			-	-
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD			-	-
253	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.355.000.000,00	1.492.124.719,00	137.124.719,00	1,10
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-	-

	1.02.02.2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-
25 4	1.02.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	21.235.000,0 0	21.235.000,0 0	-	1,00
25 5	1.02.02.2.0 2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	28.900.000,0 0	28.900.000,0 0	-	1,00
25 6	1.02.02.2.0 2.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	16.320.000,0 0	16.320.000,0 0	-	1,00
25 7	1.02.02.2.0 2.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.060.000,00	3.060.000,00	-	1,00
25 8	1.02.02.2.0 2.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	85.723.000,0 0	85.723.000,0 0	-	1,00
25 9	1.02.02.2.0 2.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.400.000,00	3.400.000,00	-	1,00
26 0	1.02.02.2.0 2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.260.000,0 0	13.260.000,0 0	-	1,00
26 1	1.02.02.2.0 2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.397.000,00	2.397.000,00	-	1,00
26 2	1.02.02.2.0 2.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	5.100.000,00	5.100.000,00	-	1,00
26 3	1.02.02.2.0 2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	69.372.750,0 0	69.372.750,0 0	-	1,00
26 4	1.02.02.2.0 2.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	155.610.000, 00	155.610.000, 00	-	1,00
26 5	1.02.02.2.0 2.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10.749.000,0 0	10.749.000,0 0	-	1,00
26 6	1.02.02.2.0 2.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.165.500,00	1.165.500,00	-	1,00
26 7	1.02.02.2.0 2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.020.000,00	1.020.000,00	-	1,00
26 8	1.02.02.2.0 2.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	2.040.000,00	2.040.000,00	-	1,00

26 9	1.02.02.2.0 2.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	35.870.000,0 0	35.870.000,0 0	-	1,00
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-	-
	1.02.05.2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-
27 0	1.02.05.2.0 3.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.742.650,00	5.742.650,00	-	1,00
		Puskesmas Padang Karambia			-	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	-
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			-	-
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD			-	-
27 1	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	878.622.000, 00	966.922.488, 00	88.300.488, 00	1,10
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-	-
	1.02.02.2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-

27 2	1.02.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	29.135.350,0 0	29.135.350,0 0	-	1,00
27 3	1.02.02.2.0 2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.785.000,0 0	18.785.000,0 0	-	1,00
27 4	1.02.02.2.0 2.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.590.000,00	4.590.000,00	-	1,00
27 5	1.02.02.2.0 2.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.315.000,00	3.315.000,00	-	1,00
27 6	1.02.02.2.0 2.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	99.528.950,0 0	99.528.950,0 0	-	1,00
27 7	1.02.02.2.0 2.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	340.000,00	340.000,00	-	1,00
27 8	1.02.02.2.0 2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.460.000,00	6.460.000,00	-	1,00
27 9	1.02.02.2.0 2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.650.000,00	7.650.000,00	-	1,00
28 0	1.02.02.2.0 2.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.040.000,00	2.040.000,00	-	1,00
28 1	1.02.02.2.0 2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	65.940.700,0 0	65.940.700,0 0	-	1,00
28 2	1.02.02.2.0 2.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	153.343.000, 00	153.343.000, 00	-	1,00
28 3	1.02.02.2.0 2.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6.240.000,00	6.240.000,00	-	1,00
28 4	1.02.02.2.0 2.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	772.550,00	772.550,00	-	1,00
28 5	1.02.02.2.0 2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.040.000,00	2.040.000,00	-	1,00
28 6	1.02.02.2.0 2.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutanusiaan	3.060.000,00	3.060.000,00	-	1,00
28 7	1.02.02.2.0 2.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	34.340.000,0 0	34.340.000,0 0	-	1,00
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-	-

	1.02.05.2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-
28 8	1.02.05.2.0 3.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.776.000,00	1.776.000,00	-	1,00
		UPTD Instalasi Farmasi			-	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	-
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			-	-
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-	-
	1.02.02.2.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			-	-
28 9	1.02.02.2.0 1.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	6.503.279.50 3,00	13.254.386.2 09,00	6.751.106.7 06,00	2,04
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	53.919.115.8 09,00	56.740.255.3 88,00	2.821.139.5 79,00	1,05
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	-
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN			-	-

		UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	1.03.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-
29 0	1.03.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	131.988.750,00	54.304.100,00	(77.684.650,00)	0,41
29 1	1.03.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	175.000.000,00	73.752.000,00	(101.248.000,00)	0,42
29 2	1.03.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	231.845.050,00	227.829.500,00	(4.015.550,00)	0,98
	1.03.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-
29 3	1.03.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.763.611.426,00	8.763.629.430,00	18.004,00	1,00
29 4	1.03.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	647.125.600,00	858.764.000,00	211.638.400,00	1,33
	1.03.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-
29 5	1.03.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	95.140.000,00	112.102.500,00	16.962.500,00	1,18
	1.03.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-
29 6	1.03.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.960.000,00	14.960.000,00	-	1,00
29 7	1.03.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.745.000,00	35.245.000,00	(5.500.000,00)	0,87
29 8	1.03.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.996.600,00	55.493.000,00	(14.503.600,00)	0,79
29 9	1.03.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	32.000.000,00	(8.000.000,00)	0,80

300	1.03.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.999.500,0 0	14.999.500,0 0	-	1,00
301	1.03.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.993.000,0 0	19.993.000,0 0	-	1,00
302	1.03.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	799.001.000,00	360.161.000,00	(438.840.000,00)	0,45
	1.03.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-
303	1.03.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.265.000,0 0	36.759.000,0 0	14.494.000,00	1,65
304	1.03.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	9.681.000,00	61.951.000,0 0	52.270.000,00	6,40
305	1.03.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.978.000,00	181.230.000,00	171.252.000,00	18,16
306	1.03.01.2.0 7.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.250.000,00	6.250.000,00	-	1,00
	1.03.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
307	1.03.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.063.005.436,00	4.342.985.360,00	279.979.924,00	1,07
308	1.03.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	370.222.620,00	474.553.626,00	104.331.006,00	1,28
	1.03.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
309	1.03.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	269.670.000,00	269.670.000,00	-	1,00
310	1.03.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	354.380.000,00	354.380.000,00	-	1,00

		Operasional atau Lapangan				
31 1	1.03.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	87.872.040,0 0	87.872.040,0 0	-	1,00
31 2	1.03.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.200.000,0 0	18.200.000,0 0	-	1,00
31 3	1.03.01.2.0 9.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.350.000,0 0	27.350.000,0 0	-	1,00
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			-	-
	1.03.02.2.0 1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			-	-
31 4	1.03.02.2.0 1.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	1.349.999.25 0,00	1.524.081.46 0,00	174.082.210 ,00	1,13
31 5	1.03.02.2.0 1.0077	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	91.799.950,0 0	91.799.950,0 0	-	1,00
31 6	1.03.02.2.0 1.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	3.184.432.65 0,00	3.153.952.55 0,00	(30.480.100 ,00)	0,99
	1.03.02.2.0 2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			-	-
31 7	1.03.02.2.0 2.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1.104.971.95 0,00	1.033.701.95 0,00	(71.270.000 ,00)	0,94
31 8	1.03.02.2.0 2.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	4.458.740.00 0,00	3.457.573.93 0,00	(1.001.166. 070,00)	0,78

319	1.03.02.2.0 2.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	433.458.950,00	278.384.950,00	(155.074.000,00)	0,64
320	1.03.02.2.0 2.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.676.431.240,00	1.736.406.792,00	59.975.552,00	1,04
321	1.03.02.2.0 2.0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	59.999.750,00	59.999.900,00	150,00	1,00
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			-	-
	1.03.03.2.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			-	-
322	1.03.03.2.0 1.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0,00	0,00	-	-
323	1.03.03.2.0 1.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	174.924.000,00	217.787.500,00	42.863.500,00	1,25
	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			-	-
	1.03.04.2.0 1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			-	-
324	1.03.04.2.0 1.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	2.200.693.950,00	2.198.287.400,00	(2.406.550,00)	1,00
325	1.03.04.2.0 1.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	597.129.295,00	618.127.795,00	20.998.500,00	1,04
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			-	-
	1.03.05.2.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah			-	-

		Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				
326	1.03.05.2.0 1.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	0,00	0,00	-	-
327	1.03.05.2.0 1.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	0,00	0,00	-	-
328	1.03.05.2.0 1.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	0,00	0,00	-	-
329	1.03.05.2.0 1.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0,00	0,00	-	-
	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			-	-
	1.03.06.2.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			-	-
330	1.03.06.2.0 1.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	1.222.839.70 0,00	2.824.413.75 0,00	1.601.574.0 50,00	2,31
331	1.03.06.2.0 1.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	4.057.731.23 0,00	4.535.930.53 0,00	478.199.300 ,00	1,12
332	1.03.06.2.0 1.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	-	-
333	1.03.06.2.0 1.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	1.330.138.77 0,00	1.313.800.64 2,00	(16.338.128 ,00)	0,99
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			-	-
	1.03.08.2.0 1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan			-	-

		(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				
33 4	1.03.08.2.0 1.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	652.205.652,00	55.000.000,00	(597.205.652,00)	0,08
33 5	1.03.08.2.0 1.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	464.199.570,00	249.658.512,00	(214.541.058,00)	0,54
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			-	-
	1.03.09.2.0 1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			-	-
33 6	1.03.09.2.0 1.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	2.163.024.950,00	2.972.127.400,00	809.102.450,00	1,37
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			-	-
	1.03.10.2.0 1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			-	-

337	1.03.10.2.0 1.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	-	-
338	1.03.10.2.0 1.0032	Pembangunan Jalan	853.497.550,00	2.214.219.300,00	1.360.721.750,00	2,59
339	1.03.10.2.0 1.0033	Rekonstruksi Jalan	2.653.458.520,00	3.269.304.535,00	615.846.015,00	1,23
340	1.03.10.2.0 1.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	472.495.800,00	0,00	(472.495.800,00)	-
341	1.03.10.2.0 1.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	2.330.012.000,00	3.481.618.280,00	1.151.606.280,00	1,49
342	1.03.10.2.0 1.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	110.000.000,00	110.000.000,00	-	1,00
343	1.03.10.2.0 1.0040	Pembangunan Jembatan	0,00	0,00	-	-
344	1.03.10.2.0 1.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	132.499.900,00	93.477.900,00	(39.022.000,00)	0,71
345	1.03.10.2.0 1.0044	Rehabilitasi Jalan	564.651.000,00	241.145.000,00	(323.506.000,00)	0,43
346	1.03.10.2.0 1.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.382.721.740,00	1.322.871.516,00	(59.850.224,00)	0,96
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			-	-
	1.03.11.2.0 1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			-	-
347	1.03.11.2.0 1.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	100.000.000,00	97.285.000,00	(2.715.000,00)	0,97
348	1.03.11.2.0 1.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	125.000.000,00	106.795.000,00	(18.205.000,00)	0,85
	1.03.11.2.0 2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			-	-

349	1.03.11.2.0 2.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	119.999.660,00	73.377.756,00	(46.621.904,00)	0,61
	1.03.11.2.0 4	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			-	-
350	1.03.11.2.0 4.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	100.000.000,00	57.806.500,00	(42.193.500,00)	0,58
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			-	-
	1.03.12.2.0 1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			-	-
351	1.03.12.2.0 1.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	199.999.900,00	70.815.500,00	(129.184.400,00)	0,35
352	1.03.12.2.0 1.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	75.000.000,00	45.740.000,00	(29.260.000,00)	0,61
	1.03.12.2.0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			-	-
353	1.03.12.2.0 3.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	156.549.710,00	41.840.252,00	(114.709.458,00)	0,27
354	1.03.12.2.0 3.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	94.285.000,00	4.860.000,00	(89.425.000,00)	0,05
	1.03.12.2.0 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			-	-
355	1.03.12.2.0 4.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran	240.499.980,00	227.046.910,00	(13.453.070,00)	0,94

		pemanfaatan ruang dalam RTR				
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	-
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			-	-
	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			-	-
	2.10.04.2.0 1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			-	-
35 6	2.10.04.2.0 1.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	-	-
	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			-	-
	2.10.10.2.0 1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			-	-
35 7	2.10.10.2.0 1.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	142.445.000,00	39.667.250,00	(102.777.750,00)	0,28
		UPTD Alat Berat			-	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	-
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			-	-
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	1.03.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah			-	-

		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
358	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	1.991.000.000,00	1.991.000.000,00	-	1,00
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
359	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	274.999.650,00	243.585.060,00	(31.414.590,00)	0,89
		UPTD Laboratorium Konstruksi			-	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	-
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			-	-
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-
360	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.999.800,00	0,00	(78.999.800,00)	-
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
361	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	214.999.720,00	202.330.562,00	(12.669.158,00)	0,94
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15.467.060.150,00	15.210.395.430,00	(256.664.720,00)	0,98
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	-
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN			-	-

		UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			-	-
	1.03.05.2.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			-	-
36 2	1.03.05.2.0 1.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	4.053.174.05 8,00	4.053.174.05 8,00	-	1,00
36 3	1.03.05.2.0 1.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	436.501.900, 00	496.501.930, 00	60.000.030, 00	1,14
36 4	1.03.05.2.0 1.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	60.911.000,0 0	60.911.000,0 0	-	1,00
36 5	1.03.05.2.0 1.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	2.829.930.00 0,00	2.829.930.00 0,00	-	1,00
36 6	1.03.05.2.0 1.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	124.156.500, 00	0,00	(124.156.50 0,00)	-
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			-	-
	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	1.04.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-
36 7	1.04.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.851.000,0 0	14.437.250,0 0	(6.413.750, 00)	0,69
36 8	1.04.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	18.704.000,0 0	18.704.000,0 0	-	1,00

		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
369	1.04.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.935.000,00	8.935.000,00	-	1,00
	1.04.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-
370	1.04.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.188.605.16 8,00	3.080.597.83 0,00	(108.007.33 8,00)	0,97
371	1.04.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	196.852.000, 00	236.068.800, 00	39.216.800, 00	1,20
	1.04.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-
372	1.04.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	35.000.000,0 0	34.035.500,0 0	(964.500,00)	0,97
	1.04.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-
373	1.04.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.990.000,00	8.990.000,00	-	1,00
374	1.04.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.195.000,0 0	45.195.000,0 0	-	1,00
375	1.04.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.369.000,0 0	24.369.000,0 0	-	1,00
376	1.04.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.343.500,00	4.343.500,00	-	1,00
377	1.04.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.988.080,00	5.988.080,00	-	1,00
378	1.04.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	345.054.000, 00	172.456.000, 00	(172.598.00 0,00)	0,50
	1.04.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-
379	1.04.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	82.809.000,0 0	82.809.000, 00	-
	1.04.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
380	1.04.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.305.116,0 0	59.298.076,0 0	3.992.960,0 0	1,07

38 1	1.04.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85.699.080,0 0	86.126.328,0 0	427.248,00	1,00
	1.04.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
38 2	1.04.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.950.000,0 0	42.950.000,0 0	-	1,00
38 3	1.04.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	369.100.000, 00	364.700.000, 00	(4.400.000, 00)	0,99
38 4	1.04.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.620.000,0 0	20.620.000,0 0	-	1,00
38 5	1.04.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	97.779.480,0 0	97.779.480,0 0	-	1,00
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			-	-
	1.04.02.2.0 1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			-	-
38 6	1.04.02.2.0 1.0002	Identifikasi Lahan- Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	22.129.800,0 0	12.089.500,0 0	(10.040.300 ,00)	0,55
38 7	1.04.02.2.0 1.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	21.983.200,0 0	21.693.200,0 0	(290.000,00)	0,99
38 8	1.04.02.2.0 1.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	21.345.300,0 0	18.305.750,0 0	(3.039.550, 00)	0,86
38 9	1.04.02.2.0 1.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	24.628.750,0 0	17.778.000,0 0	(6.850.750, 00)	0,72

390	1.04.02.2.0 1.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	137.865.730,00	88.042.760,00	(49.822.970,00)	0,64
391	1.04.02.2.0 1.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	91.545.800,00	17.852.500,00	(73.693.300,00)	0,20
	1.04.02.2.0 2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			-	-
392	1.04.02.2.0 2.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	37.135.700,00	41.965.750,00	4.830.050,00	1,13
393	1.04.02.2.0 2.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	22.360.000,00	19.111.500,00	(3.248.500,00)	0,85
394	1.04.02.2.0 2.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	30.065.400,00	41.013.300,00	10.947.900,00	1,36
	1.04.02.2.0 3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			-	-
395	1.04.02.2.0 3.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	203.465.200,00	203.197.200,00	(268.000,00)	1,00
	1.04.02.2.0 4	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			-	-
396	1.04.02.2.0 4.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	19.999.950,00	19.999.950,00	-	1,00
	1.04.02.2.0 6	Penerbitan Izin Pembangunan dan			-	-

		Pengembangan Perumahan				
397	1.04.02.2.0 6.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	14.145.100,0 0	10.758.500,0 0	(3.386.600,00)	0,76
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			-	-
	1.04.03.2.0 3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			-	-
398	1.04.03.2.0 3.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.549.215.95 0,00	2.640.325.70 0,00	91.109.750,00	1,04
399	1.04.03.2.0 3.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	37.340.500,0 0	44.522.100,0 0	7.181.600,0 0	1,19
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			-	-
	1.04.05.2.0 1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			-	-
400	1.04.05.2.0 1.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	154.819.888,00	164.819.888,00	10.000.000,00	1,06
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	13.264.409.5 95,00	13.230.682.0 35,00	(33.727.560,00)	1,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	-
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			-	-
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			-	-

		DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	1.05.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-
40 1	1.05.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.545.450,00	7.636.150,00	(1.909.300, 00)	0,80
40 2	1.05.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.261.200,0 0	60.614.000,0 0	13.352.800, 00	1,28
	1.05.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-
40 3	1.05.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.163.514.93 5,00	5.086.899.31 9,00	(76.615.616 ,00)	0,99
40 4	1.05.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	202.485.000, 00	233.157.000, 00	30.672.000, 00	1,15
40 5	1.05.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.313.750,00	5.051.500,00	(1.262.250, 00)	0,80
	1.05.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-
40 6	1.05.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	233.754.000, 00	336.680.750, 00	102.926.750 ,00	1,44
	1.05.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-
40 7	1.05.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.260.000,00	1.810.000,00	(450.000,00)	0,80
40 8	1.05.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	28.884.898,0 0	28.884.898, 00	-
40 9	1.05.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.884.900,0 0	38.316.000,0 0	10.431.100, 00	1,37
41 0	1.05.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.881.450,00	2.306.450,00	(575.000,00)	0,80
41 1	1.05.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.497.800,00	4.553.450,00	55.650,00	1,01

41 2	1.05.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.950.000,0 00	95.096.000,0 0	(65.854.000 ,00)	0,59
	1.05.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-
41 3	1.05.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.087.000,0 0	470.017.602, 00	431.930.602 ,00	12,34
41 4	1.05.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	56.308.000,0 0	130.419.900, 00	74.111.900, 00	2,32
41 5	1.05.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.953.800,0 0	141.774.750, 00	78.820.950, 00	2,25
	1.05.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
41 6	1.05.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.450.000,00	2.760.000,00	(690.000,00)	0,80
41 7	1.05.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.968.000,0 0	23.312.000,0 0	(1.656.000, 00)	0,93
41 8	1.05.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.192.720,0 0	111.354.194, 00	51.161.474, 00	1,85
	1.05.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
41 9	1.05.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.950.000,0 0	39.190.000,0 0	(3.760.000, 00)	0,91
42 0	1.05.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	572.200.000, 00	404.410.000, 00	(167.790.00 0,00)	0,71
42 1	1.05.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.230.000,0 0	10.230.000,0 0	-	1,00
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			-	-

	1.05.02.2.0 1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			-	-
42 2	1.05.02.2.0 1.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	72.106.500,0 0	38.312.450,0 0	(33.794.050 ,00)	0,53
42 3	1.05.02.2.0 1.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	71.153.900,0 0	71.153.900,0 0	-	1,00
42 4	1.05.02.2.0 1.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	3.457.914.13 0,00	3.327.680.51 6,00	(130.233.61 4,00)	0,96
	1.05.02.2.0 2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			-	-
42 5	1.05.02.2.0 2.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	30.013.500,0 0	13.472.500,0 0	(16.541.000 ,00)	0,45
42 6	1.05.02.2.0 2.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	1.025.320.55 0,00	751.384.900, 00	(273.935.65 0,00)	0,73
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN			-	-

		PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
	1.05.04.2.0 1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			-	-
42 7	1.05.04.2.0 1.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	21.247.100,0 0	20.041.800,0 0	(1.205.300, 00)	0,94
42 8	1.05.04.2.0 1.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.255.339.06 0,00	1.238.917.65 6,00	(16.421.404 ,00)	0,99
42 9	1.05.04.2.0 1.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	366.949.000, 00	406.740.150, 00	39.791.150, 00	1,11
	1.05.04.2.0 3	Investigasi Kejadian Kebakaran			-	-
43 0	1.05.04.2.0 3.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	12.070.650,0 0	6.494.450,00	(5.576.200, 00)	0,54
	1.05.04.2.0 4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			-	-
43 1	1.05.04.2.0 4.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	137.107.750, 00	61.874.750,0 0	(75.233.000 ,00)	0,45
	1.05.04.2.0 5	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			-	-

43 2	1.05.04.2.0 5.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	82.499.450,0 0	60.135.000,0 0	(22.364.450 ,00)	0,73
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.192.217.35 9,00	5.075.868.26 5,00	(116.349.09 4,00)	0,98
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	-
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			-	-
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	1.05.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-
43 3	1.05.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.014.350,0 0	22.014.350,0 0	-	1,00
43 4	1.05.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.936.750,00	9.936.750,00	-	1,00
	1.05.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-
43 5	1.05.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.683.187.02 5,00	3.673.289.63 5,00	(9.897.390, 00)	1,00
43 6	1.05.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	157.707.000, 00	154.202.000, 00	(3.505.000, 00)	0,98
	1.05.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-

437	1.05.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	61.626.360,0 0	58.084.240,0 0	(3.542.120,00)	0,94
	1.05.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-
438	1.05.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.172.000,00	2.172.000,00	-	1,00
439	1.05.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000,00	16.270.000,0 0	16.220.000,00	325,4 0
440	1.05.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.612.000,0 0	17.660.000,0 0	48.000,00	1,00
441	1.05.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.664.850,0 0	13.664.850,0 0	-	1,00
442	1.05.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.568.000,00	8.568.000,00	-	1,00
443	1.05.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.495.080,00	6.495.080,00	-	1,00
444	1.05.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	186.156.000,0 00	73.268.000,0 0	(112.888.000,00)	0,39
	1.05.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
445	1.05.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	66.516.000,0 0	93.303.000,0 0	26.787.000,00	1,40
446	1.05.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.333.000,0 0	108.685.230,00	46.352.230,00	1,74
	1.05.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
447	1.05.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	1,00
448	1.05.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.299.384,0 0	53.499.600,0 0	(11.799.784,00)	0,82
449	1.05.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96.498.360,0 0	72.218.680,0 0	(24.279.680,00)	0,75
	1.05.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
450	1.05.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	42.950.000,0 0	39.190.000,0 0	(3.760.000,00)	0,91

		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
45 1	1.05.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	203.490.000, 00	182.980.000, 00	(20.510.000 ,00)	0,90
45 2	1.05.01.2.0 9.0005	Pemeliharaan Mebel	4.960.000,00	3.840.000,00	(1.120.000, 00)	0,77
45 3	1.05.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.430.000,00	8.160.000,00	730.000,00	1,10
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			-	-
	1.05.03.2.0 1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			-	-
45 4	1.05.03.2.0 1.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	24.999.900,0 0	24.999.900,0 0	-	1,00
	1.05.03.2.0 2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			-	-
45 5	1.05.03.2.0 2.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	22.999.850,0 0	22.999.850,0 0	-	1,00
45 6	1.05.03.2.0 2.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	20.000.000,0 0	20.000.000,0 0	-	1,00
45 7	1.05.03.2.0 2.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	20.499.950,0 0	9.449.950,00	(11.050.000 ,00)	0,46
45 8	1.05.03.2.0 2.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	4.598.000,00	15.738.750,0 0	11.140.750, 00	3,42
45 9	1.05.03.2.0 2.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan	165.000.000, 00	168.819.450, 00	3.819.450,0 0	1,02

		Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				
460	1.05.03.2.0 2.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	72.000.250,0 0	72.000.250,0 0	-	1,00
	1.05.03.2.0 3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			-	-
461	1.05.03.2.0 3.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	61.993.900,0 0	54.382.750,0 0	(7.611.150,00)	0,88
462	1.05.03.2.0 3.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	19.997.000,0 0	34.860.000,0 0	14.863.000,00	1,74
463	1.05.03.2.0 3.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	19.992.000,0 0	12.280.000,0 0	(7.712.000,00)	0,61
464	1.05.03.2.0 3.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	19.979.900,0 0	1.345.500,00	(18.634.400,00)	0,07
	1.05.03.2.0 4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			-	-
465	1.05.03.2.0 4.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	19.990.450,0 0	19.990.450,0 0	-	1,00
		Dinas Sosial	6.356.430,10 0,00	5.906.114,97 5,00	(450.315,12 5,00)	0,93
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	-
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			-	-
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	1.06.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-

466	1.06.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.207.000,00	1.916.750,00	(290.250,00)	0,87
467	1.06.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.219.500,00	73.801.750,00	20.582.250,00	1,39
	1.06.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-
468	1.06.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.511.568.330,00	2.511.603.210,00	34.880,00	1,00
469	1.06.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	156.000.000,00	202.700.000,00	46.700.000,00	1,30
	1.06.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-
470	1.06.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	32.000.000,00	32.000.000,00	-	1,00
	1.06.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-
471	1.06.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.884.000,00	6.905.000,00	3.021.000,00	1,78
472	1.06.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	108.036.600,00	128.419.600,00	20.383.000,00	1,19
473	1.06.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.585.500,00	45.468.500,00	11.883.000,00	1,35
474	1.06.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.090.000,00	15.090.000,00	-	1,00
475	1.06.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.343.500,00	3.754.450,00	(589.050,00)	0,86
476	1.06.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.601.100,00	7.045.300,00	2.444.200,00	1,53
477	1.06.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.798.000,00	97.895.000,00	(97.903.000,00)	0,50
	1.06.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-
478	1.06.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	163.923.000,00	187.723.000,00	23.800.000,00	1,15

479	1.06.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87.618.000,0 0	166.822.000,00	79.204.000,00	1,90
	1.06.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
480	1.06.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.688.560,00	3.688.560,00	-	1,00
481	1.06.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	353.746.160,00	278.741.155,00	(75.005.005,00)	0,79
	1.06.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
482	1.06.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.950.000,00	42.950.000,00	-	1,00
483	1.06.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	216.640.000,00	216.640.000,00	-	1,00
484	1.06.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.470.000,00	13.470.000,00	-	1,00
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			-	-
	1.06.02.2.0 2	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			-	-
485	1.06.02.2.0 2.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	11.311.500,00	6.093.500,00	(5.218.000,00)	0,54
	1.06.02.2.0 3	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			-	-

486	1.06.02.2.0 3.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	419.220.000,00	297.425.000,00	(121.795.000,00)	0,71
487	1.06.02.2.0 3.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	23.760.500,00	14.550.000,00	(9.210.500,00)	0,61
488	1.06.02.2.0 3.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	125.708.500,00	66.692.000,00	(59.016.500,00)	0,53
489	1.06.02.2.0 3.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	10.057.000,00	5.722.000,00	(4.335.000,00)	0,57
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			-	-
	1.06.04.2.0 1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			-	-
490	1.06.04.2.0 1.0001	Penyediaan Permakanan	440.984.750,00	490.997.250,00	50.012.500,00	1,11
491	1.06.04.2.0 1.0002	Penyediaan Sandang	24.667.800,00	22.655.300,00	(2.012.500,00)	0,92
492	1.06.04.2.0 1.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	25.321.000,00	27.336.250,00	2.015.250,00	1,08
493	1.06.04.2.0 1.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	43.712.150,00	30.302.250,00	(13.409.900,00)	0,69
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			-	-
	1.06.05.2.0 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan			-	-

		Daerah Kabupaten/Kota				
49 4	1.06.05.2.0 2.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	239.667.000, 00	71.374.750,0 0	(168.292.25 0,00)	0,30
49 5	1.06.05.2.0 2.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	171.761.500, 00	118.636.500, 00	(53.125.000 ,00)	0,69
49 6	1.06.05.2.0 2.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	0,00	0,00	-	-
49 7	1.06.05.2.0 2.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	592.016.100, 00	490.228.600, 00	(101.787.50 0,00)	0,83
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			-	-
	1.06.06.2.0 1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			-	-
49 8	1.06.06.2.0 1.0001	Penyediaan Makanan	50.697.000,0 0	39.172.000,0 0	(11.525.000 ,00)	0,77
49 9	1.06.06.2.0 1.0002	Penyediaan Sandang	24.990.400,0 0	23.290.400,0 0	(1.700.000, 00)	0,93
50 0	1.06.06.2.0 1.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	25.000.400,0 0	20.750.400,0 0	(4.250.000, 00)	0,83
	1.06.06.2.0 2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			-	-
50 1	1.06.06.2.0 2.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	99.000,00	0,00	(99.000,00)	-
50 2	1.06.06.2.0 2.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	20.037.000,0 0	20.037.000,0 0	-	1,00
	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			-	-
	1.06.07.2.0 1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			-	-

503	1.06.07.2.0 1.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	56.591.500,0 0	45.742.000,0 0	(10.849.500,00)	0,81
504	1.06.07.2.0 1.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	48.457.750,0 0	78.475.500,0 0	30.017.750,00	1,62
		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	6.708.934.97 1,00	6.500.668.31 3,00	(208.266.658,00)	0,97
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	-
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			-	-
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	2.07.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-
505	2.07.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.652.800,0 0	29.652.800,0 0	-	1,00
506	2.07.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.322.500,0 0	66.956.000,0 0	633.500,00	1,01
	2.07.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-
507	2.07.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.596.633.01 3,00	2.500.033.53 3,00	(96.599.480,00)	0,96
508	2.07.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	184.499.200,00	246.120.000,00	61.620.800,00	1,33
	2.07.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-
509	2.07.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	31.625.000,0 0	31.625.000,0 0	-	1,00
	2.07.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-

510	2.07.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.972.000,00	4.972.000,00	-	1,00
511	2.07.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.890.000,00	36.544.000,00	8.654.000,00	1,31
512	2.07.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.700.000,00	194.425.500,00	185.725.500,00	22,35
513	2.07.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.957.000,00	33.797.000,00	8.840.000,00	1,35
514	2.07.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.848.500,00	16.683.800,00	(4.164.700,00)	0,80
515	2.07.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.010.700,00	3.010.700,00	-	1,00
516	2.07.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.321.000,00	6.341.000,00	(5.980.000,00)	0,51
517	2.07.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	253.697.000,00	85.064.000,00	(168.633.000,00)	0,34
	2.07.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
518	2.07.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.530.000,00	110.277.000,00	65.747.000,00	2,48
519	2.07.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	169.606.000,00	305.256.000,00	135.650.000,00	1,80
	2.07.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
520	2.07.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.682.052,00	155.880.192,00	(24.801.860,00)	0,86
521	2.07.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	140.133.440,00	112.401.394,00	(27.732.046,00)	0,80
	2.07.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
522	2.07.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	42.950.000,00	39.190.000,00	(3.760.000,00)	0,91

		atau Kendaraan Dinas Jabatan				
52 3	2.07.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.870.000,0 0	74.050.000,0 0	(6.820.000, 00)	0,92
52 4	2.07.01.2.0 9.0005	Pemeliharaan Mebel	35.880.000,0 0	35.880.000,0 0	-	1,00
52 5	2.07.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.300.000,0 0	34.490.000,0 0	9.190.000,0 0	1,36
52 6	2.07.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.000.000,0 0	182.400.000, 00	127.400.000 ,00	3,32
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			-	-
	2.07.03.2.0 1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			-	-
52 7	2.07.03.2.0 1.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	731.342.036, 00	731.787.386, 00	445.350,00	1,00
	2.07.03.2.0 2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			-	-
52 8	2.07.03.2.0 2.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	28.089.750,0 0	21.726.250,0 0	(6.363.500, 00)	0,77
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			-	-
	2.07.04.2.0 1	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			-	-
52 9	2.07.04.2.0 1.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	52.505.950,0 0	29.974.450,0 0	(22.531.500 ,00)	0,57
	2.07.04.2.0 3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			-	-

530	2.07.04.2.0 3.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	61.632.170,0 0	61.303.052,0 0	(329.118,00)	0,99
531	2.07.04.2.0 3.0003	Job Fair/Bursa Kerja	125.598.000, 00	0,00	(125.598.00 0,00)	-
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			-	-
	2.07.05.2.0 2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			-	-
532	2.07.05.2.0 2.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	23.537.550,0 0	17.338.750,0 0	(6.198.800, 00)	0,74
533	2.07.05.2.0 2.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.200.900,00	4.155.750,00	(45.150,00)	0,99
534	2.07.05.2.0 2.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	0,00	0,00	-	-
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			-	-
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			-	-
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			-	-

	3.31.02.2.0 1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			-	-
53 5	3.31.02.2.0 1.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	25.647.800,0 0	22.029.800,0 0	(3.618.000, 00)	0,86
53 6	3.31.02.2.0 1.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	253.617.300, 00	295.663.800, 00	42.046.500, 00	1,17
53 7	3.31.02.2.0 1.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	439.334.750, 00	364.368.384, 00	(74.966.366 ,00)	0,83
53 8	3.31.02.2.0 1.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	10.830.450,0 0	9.080.450,00	(1.750.000, 00)	0,84
	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			-	-
	3.31.03.2.0 1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			-	-
53 9	3.31.03.2.0 1.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	11.726.300,0 0	9.976.300,00	(1.750.000, 00)	0,85

54 0	3.31.03.2.0 1.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	48.931.600,0 0	48.230.250,0 0	(701.350,00)	0,99
	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			-	-
	3.31.04.2.0 1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			-	-
54 1	3.31.04.2.0 1.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	7.959.350,00	6.209.350,00	(1.750.000,00)	0,78
54 2	3.31.04.2.0 1.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	10.731.550,0 0	8.981.550,00	(1.750.000,00)	0,84
		UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R)			-	-
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			-	-
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN			-	-

		BIDANG PERINDUSTRIAN				
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			-	-
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			-	-
543	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	833.169.310,00	564.792.872,00	(268.376.438,00)	0,68
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	9.634.102.279,00	9.519.505.089,00	(114.597.190,00)	0,99
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	-
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			-	-
	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-
544	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.666.500,00	11.691.500,00	4.025.000,00	1,53
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-
545	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.398.475.539,00	3.398.586.797,00	111.258,00	1,00

546	2.08.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	235.091.000,00	279.898.000,00	44.807.000,00	1,19
	2.08.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-
547	2.08.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	32.000.000,00	27.000.000,00	(5.000.000,00)	0,84
	2.08.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-
548	2.08.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.826.000,00	5.826.000,00	-	1,00
549	2.08.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	204.252.000,00	409.841.630,00	205.589.630,00	2,01
550	2.08.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.954.000,00	46.033.000,00	3.079.000,00	1,07
551	2.08.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.322.000,00	12.322.000,00	-	1,00
552	2.08.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.141.600,00	3.141.600,00	-	1,00
553	2.08.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.018.520,00	5.018.520,00	-	1,00
554	2.08.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197.563.000,00	98.551.000,00	(99.012.000,00)	0,50
	2.08.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
555	2.08.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.478.000,00	110.795.000,00	62.317.000,00	2,29
	2.08.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
556	2.08.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.630.000,00	1.630.000,00	-	1,00
557	2.08.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.634.770,00	64.155.334,00	7.520.564,00	1,13
558	2.08.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	264.243.600,00	160.987.824,00	(103.255.776,00)	0,61
	2.08.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah			-	-

		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
559	2.08.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.950.000,0 0	39.190.000,0 0	(3.760.000,00)	0,91
560	2.08.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	335.880.000,00	290.300.000,00	(45.580.000,00)	0,86
561	2.08.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.228.000,00	23.950.000,00	(21.278.000,00)	0,53
562	2.08.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	52.696.584,00	52.696.584,00	-
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			-	-
	2.08.02.2.0 1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			-	-
563	2.08.02.2.0 1.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	6.807.200,00	6.807.200,00	-	1,00
	2.08.02.2.0 2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			-	-
564	2.08.02.2.0 2.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	111.310.300,00	69.394.300,00	(41.916.000,00)	0,62

	2.08.02.2.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			-	-
56 5	2.08.02.2.0 3.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	36.053.000,0 0	0,00	(36.053.000 ,00)	-
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			-	-
	2.08.03.2.0 1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			-	-
56 6	2.08.03.2.0 1.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	59.550.750,0 0	64.976.000,0 0	5.425.250,0 0	1,09
56 7	2.08.03.2.0 1.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	57.136.000,0 0	53.261.000,0 0	(3.875.000, 00)	0,93
	2.08.03.2.0 2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			-	-
56 8	2.08.03.2.0 2.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban	90.138.250,0 0	97.314.750,0 0	7.176.500,0 0	1,08

		Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-
569	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	50.036.500,00	50.036.500,00	-
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			-	-
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-
570	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	9.989.750,00	6.116.000,00	(3.873.750,00)	0,61
571	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	467.866.150,00	334.728.650,00	(133.137.500,00)	0,72
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			-	-

57 2	2.08.04.2.0 2.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	189.151.250,00	242.969.000,00	53.817.750,00	1,28
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			-	-
	2.08.05.2.0 1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-
57 3	2.08.05.2.0 1.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	5.621.000,00	5.621.000,00	-	1,00
57 4	2.08.05.2.0 1.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	2.045.700,00	2.045.700,00	-	1,00
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			-	-
	2.08.06.2.0 1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			-	-
57 5	2.08.06.2.0 1.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	72.518.400,00	62.918.400,00	(9.600.000,00)	0,87
57 6	2.08.06.2.0 1.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	14.197.950,00	10.597.950,00	(3.600.000,00)	0,75

		Kewenangan Kabupaten/Kota				
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			-	-
	2.08.07.2.0 1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			-	-
57 7	2.08.07.2.0 1.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	98.311.400,0 0	110.709.400,00	12.398.000,00	1,13
	2.08.07.2.0 2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-
57 8	2.08.07.2.0 2.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	207.506.250,00	107.759.500,00	(99.746.750,00)	0,52
	2.08.07.2.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-
57 9	2.08.07.2.0 3.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	52.353.400,00	42.586.450,00	(9.766.950,00)	0,81
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN			-	-

		KELUARGA BERENCANA				
	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			-	-
	2.14.02.2.0 1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			-	-
58 0	2.14.02.2.0 1.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	22.121.500,0 0	17.979.000,0 0	(4.142.500,00)	0,81
	2.14.02.2.0 2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			-	-
58 1	2.14.02.2.0 2.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	90.000.000,0 0	90.000.000,0 0	-	1,00
58 2	2.14.02.2.0 2.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	46.200.000,0 0	46.200.000,0 0	-	1,00
58 3	2.14.02.2.0 2.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	60.000.000,0 0	60.000.000,0 0	-	1,00
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			-	-
	2.14.03.2.0 1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			-	-

584	2.14.03.2.0 1.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	245.000.000,00	245.000.000,00	-	1,00
585	2.14.03.2.0 1.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	80.000.000,00	80.000.000,00	-	1,00
586	2.14.03.2.0 1.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.000.000,00	70.000.000,00	-	1,00
587	2.14.03.2.0 1.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	146.800.000,00	146.800.000,00	-	1,00
	2.14.03.2.0 2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			-	-
588	2.14.03.2.0 2.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	662.024.000,00	662.024.000,00	-	1,00
	2.14.03.2.0 3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			-	-
589	2.14.03.2.0 3.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.500.000,00	13.500.000,00	-	1,00
590	2.14.03.2.0 3.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode	166.757.000,00	166.757.000,00	-	1,00

		Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				
59 1	2.14.03.2.0 3.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	33.050.000,0 0	33.050.000,0 0	-	1,00
	2.14.03.2.0 4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			-	-
59 2	2.14.03.2.0 4.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	263.200.000,0 00	263.200.000,0 00	-	1,00
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			-	-
	2.14.04.2.0 1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			-	-
59 3	2.14.04.2.0 1.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	26.220.000,0 0	26.220.000,0 0	-	1,00
59 4	2.14.04.2.0 1.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	130.000.000,0 00	130.000.000,0 00	-	1,00

59 5	2.14.04.2.0 1.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	544.120.750, 00	544.120.750, 00	-	1,00
59 6	2.14.04.2.0 1.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	7.997.750,00	7.997.750,00	-	1,00
	2.14.04.2.0 2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			-	-
59 7	2.14.04.2.0 2.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	276.000.000, 00	276.000.000, 00	-	1,00
59 8	2.14.04.2.0 2.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca	331.200.000, 00	331.200.000, 00	-	1,00

		salin/kelahiran, Baduta/Balita)				
		Dinas Ketahanan Pangan	3.383.291.328,00	3.309.282.732,00	(74.008.596,00)	0,98
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	-
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			-	-
	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-
599	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.390.350,00	17.393.000,00	(4.997.350,00)	0,78
600	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.541.850,00	42.318.250,00	(20.223.600,00)	0,68
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-
601	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.013.787.563,00	1.986.507.616,00	(27.279.947,00)	0,99
602	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	129.312.000,00	137.488.000,00	8.176.000,00	1,06
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-
603	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	23.011.000,00	30.250.000,00	7.239.000,00	1,31
604	2.09.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11.172.250,00	1.383.000,00	(9.789.250,00)	0,12
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-
605	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	1.608.000,00	1.608.000,00	-	1,00

		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
606	2.09.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.209.000,0 0	21.897.000,0 0	5.688.000,0 0	1,35
607	2.09.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.250.850,00	9.353.950,00	1.103.100,0 0	1,13
608	2.09.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.389.500,00	8.389.500,00	-	1,00
609	2.09.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.265.700,00	2.495.500,00	(2.770.200,00)	0,47
610	2.09.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.694.000,00	80.605.000,0 0	(77.089.000,00)	0,51
	2.09.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
611	2.09.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	62.034.000,0 0	107.037.000,00	45.003.000,00	1,73
612	2.09.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.000.000,0 0	90.118.000,0 0	77.118.000,00	6,93
613	2.09.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.750.000,00	15.300.000,0 0	10.550.000,00	3,22
	2.09.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
614	2.09.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.765.890,0 0	32.974.200,0 0	(791.690,00)	0,98
615	2.09.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.022.975,0 0	83.381.616,0 0	(9.641.359,00)	0,90
	2.09.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
616	2.09.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.950.000,0 0	39.190.000,0 0	(3.760.000,00)	0,91

617	2.09.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.800.000,0 0	78.800.000,0 0	-	1,00
618	2.09.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.159.900,00	9.170.000,00	10.100,00	1,00
	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			-	-
	2.09.02.2.0 1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			-	-
619	2.09.02.2.0 1.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	17.857.000,0 0	7.957.750,00	(9.899.250,00)	0,45
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			-	-
	2.09.03.2.0 1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			-	-
620	2.09.03.2.0 1.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	47.137.000,0 0	46.937.000,0 0	(200.000,00)	1,00
621	2.09.03.2.0 1.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	87.462.900,0 0	129.961.250,00	42.498.350,00	1,49
622	2.09.03.2.0 1.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	19.100.500,0 0	5.378.500,00	(13.722.000,00)	0,28

	2.09.03.2.0 2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			-	-
62 3	2.09.03.2.0 2.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	26.346.000,0 0	0,00	(26.346.000 ,00)	-
62 4	2.09.03.2.0 2.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	30.979.000,0 0	6.229.000,00	(24.750.000 ,00)	0,20
	2.09.03.2.0 4	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			-	-
62 5	2.09.03.2.0 4.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	20.755.750,0 0	3.963.500,00	(16.792.250 ,00)	0,19
62 6	2.09.03.2.0 4.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	218.968.500, 00	236.377.450, 00	17.408.950, 00	1,08
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			-	-
	2.09.04.2.0 1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			-	-
62 7	2.09.04.2.0 1.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	29.816.000,0 0	5.066.000,00	(24.750.000 ,00)	0,17
	2.09.04.2.0 2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			-	-
62 8	2.09.04.2.0 2.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	17.430.000,0 0	5.880.000,00	(11.550.000 ,00)	0,34
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			-	-
	2.09.05.2.0 1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan			-	-

		Segar Daerah Kabupaten/Kota				
629	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	33.784.100,00	26.439.350,00	(7.344.750,00)	0,78
630	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	36.539.750,00	39.433.300,00	2.893.550,00	1,08
		Dinas Lingkungan Hidup	21.712.835.769,00	26.147.590.470,00	4.434.754.701,00	1,20
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	-
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			-	-
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-
631	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.166.350,00	23.285.300,00	(2.881.050,00)	0,89
632	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	97.215.350,00	21.475.350,00	(75.740.000,00)	0,22
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-
633	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.340.451.258,00	3.250.354.108,00	(90.097.150,00)	0,97
634	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	226.128.000,00	279.052.000,00	52.924.000,00	1,23
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-

635	2.11.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	198.924.000,00	198.924.000,00	-	1,00
	2.11.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-
636	2.11.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.184.000,00	1.672.000,00	488.000,00	1,41
637	2.11.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.958.000,00	17.958.000,00	-	1,00
638	2.11.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.879.650,00	17.361.600,00	1.481.950,00	1,09
639	2.11.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.153.500,00	642.600,00	(2.510.900,00)	0,20
640	2.11.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.838.000,00	6.910.000,00	1.072.000,00	1,18
641	2.11.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.530.000,00	138.530.000,00	-	1,00
	2.11.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
642	2.11.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	183.795.000,00	183.795.000,00	-
643	2.11.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	61.280.500,00	61.280.500,00	-	1,00
644	2.11.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	62.933.000,00	62.933.000,00	-
645	2.11.01.2.0 7.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	237.477.750,00	237.477.750,00	-	1,00
	2.11.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
646	2.11.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.040.000,00	1.040.000,00	-	1,00
647	2.11.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.471.524,00	84.471.524,00	-	1,00
648	2.11.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	-	-
649	2.11.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	242.806.240,00	264.522.800,00	21.716.560,00	1,09

	2.11.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
65 0	2.11.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.950.000,0 0	42.950.000,0 0	-	1,00
65 1	2.11.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	163.210.000,00	163.210.000,00	-	1,00
65 2	2.11.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.060.000,00	14.880.000,00	10.820.000,00	3,67
65 3	2.11.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52.863.000,00	52.863.000,00	-	1,00
	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			-	-
	2.11.02.2.0 1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			-	-
65 4	2.11.02.2.0 1.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	113.342.130,00	176.422.130,00	63.080.000,00	1,56
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			-	-
	2.11.03.2.0 1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			-	-
65 5	2.11.03.2.0 1.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	381.162.460,00	358.157.160,00	(23.005.300,00)	0,94

		Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			-	-
	2.11.04.2.0 1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			-	-
65 6	2.11.04.2.0 1.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.534.722.52 0,00	2.083.640.01 0,00	548.917.490 ,00	1,36
	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			-	-
	2.11.05.2.0 1	Penyimpanan sementara Limbah B3			-	-
65 7	2.11.05.2.0 1.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	12.646.310,0 0	12.646.310,0 0	-	1,00
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			-	-
	2.11.06.2.0 1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			-	-

658	2.11.06.2.0 1.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	14.849.000,00	26.679.000,00	11.830.000,00	1,80
	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			-	-
	2.11.08.2.0 1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-
659	2.11.08.2.0 1.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	240.167.940,00	173.627.680,00	(66.540.260,00)	0,72
660	2.11.08.2.0 1.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	591.145.000,00	490.179.900,00	(100.965.100,00)	0,83
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			-	-
	2.11.11.2.0 1	Pengelolaan Sampah			-	-
661	2.11.11.2.0 1.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	4.022.566.662,00	7.500.254.930,00	3.477.688.268,00	1,86
662	2.11.11.2.0 1.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa,	9.450.635.715,00	9.781.849.956,00	331.214.241,00	1,04

		RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				
		UPTD Laboratorium Lingkungan			-	-
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	-
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			-	-
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			-	-
	2.11.03.2.0 1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			-	-
66 3	2.11.03.2.0 1.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	390.010.910, 00	418.544.862, 00	28.533.952, 00	1,07
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.520.865.77 0,00	4.549.588.54 6,00	28.722.776, 00	1,01
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	-
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			-	-
	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	2.12.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan			-	-

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
664	2.12.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.643.000,0 0	11.229.000,0 0	(414.000,00)	0,96
665	2.12.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.594.000,0 0	152.207.000, 00	62.613.000, 00	1,70
	2.12.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-
666	2.12.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.612.693.61 0,00	2.703.182.19 2,00	90.488.582, 00	1,03
667	2.12.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	143.568.000, 00	194.814.000, 00	51.246.000, 00	1,36
	2.12.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-
668	2.12.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	39.932.500,0 0	51.300.000,0 0	11.367.500, 00	1,28
	2.12.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-
669	2.12.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.163.000,00	6.163.000,00	-	1,00
670	2.12.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.148.560,0 0	41.148.560,0 0	-	1,00
671	2.12.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.540.700,00	6.540.700,00	-	1,00
672	2.12.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.248.300,00	4.248.300,00	-	1,00
673	2.12.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.461.500,00	3.461.500,00	-	1,00
674	2.12.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.464.000, 00	70.727.000,0 0	(70.737.000 ,00)	0,50
	2.12.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-
675	2.12.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	3.688.000,00	9.982.000,00	6.294.000,0 0	2,71

67 6	2.12.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.129.000,00	160.653.000,00	50.524.000,00	1,46
	2.12.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
67 7	2.12.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.402.560,00	105.161.480,00	3.758.920,00	1,04
67 8	2.12.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.205.440,00	113.963.560,00	2.758.120,00	1,02
	2.12.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
67 9	2.12.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.950.000,00	42.950.000,00	-	1,00
68 0	2.12.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.020.000,00	116.650.000,00	3.630.000,00	1,03
68 1	2.12.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.090.000,00	21.810.000,00	10.720.000,00	1,97
68 2	2.12.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	40.226.400,00	40.226.400,00	-
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			-	-
	2.12.02.2.0 1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			-	-
68 3	2.12.02.2.0 1.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	289.463.910,00	123.418.270,00	(166.045.640,00)	0,43
68 4	2.12.02.2.0 1.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	10.615.000,00	26.570.800,00	15.955.800,00	2,50

	2.12.02.2.0 3	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			-	-
68 5	2.12.02.2.0 3.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	59.722.600,0 0	58.195.750,0 0	(1.526.850, 00)	0,97
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			-	-
	2.12.03.2.0 1	Pelayanan Pencatatan Sipil			-	-
68 6	2.12.03.2.0 1.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	10.765.000,0 0	4.809.000,00	(5.956.000, 00)	0,45
68 7	2.12.03.2.0 1.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	229.599.590, 00	177.970.384, 00	(51.629.206 ,00)	0,78
	2.12.03.2.0 2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			-	-
68 8	2.12.03.2.0 2.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	42.024.700,0 0	21.068.700,0 0	(20.956.000 ,00)	0,50
	2.12.03.2.0 3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			-	-
68 9	2.12.03.2.0 3.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	9.786.850,00	0,00	(9.786.850, 00)	-
	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			-	-
	2.12.04.2.0 1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			-	-
69 0	2.12.04.2.0 1.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	12.991.400,0 0	12.991.400,0 0	-	1,00
	2.12.04.2.0 3	Penyelenggaraan Pengelolaan			-	-

		Informasi Administrasi Kependudukan				
69 1	2.12.04.2.0 3.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	13.259.700,0 0	13.259.700,0 0	-	1,00
69 2	2.12.04.2.0 3.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	11.999.550,0 0	24.379.550,0 0	12.380.000,00	2,03
	2.12.04.2.0 4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			-	-
69 3	2.12.04.2.0 4.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	205.296.550,00	205.296.550,00	-	1,00
	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			-	-
	2.12.05.2.0 1	Penyusunan Profil Kependudukan			-	-
69 4	2.12.05.2.0 1.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	31.398.750,0 0	25.210.750,0 0	(6.188.000,00)	0,80
		Dinas Perhubungan	8.003.541.80 1,00	8.963.806.21 9,00	960.264.418 ,00	1,12
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	-
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			-	-
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	2.15.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan			-	-

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
695	2.15.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.414.850,0 0	10.414.850,0 0	-	1,00
696	2.15.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.614.000,0 0	91.544.000,0 0	35.930.000,00	1,65
	2.15.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-
697	2.15.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.915.157.37 5,00	4.703.192.52 5,00	(211.964.850,00)	0,96
698	2.15.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	245.827.200,00	246.415.200,00	588.000,00	1,00
	2.15.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-
699	2.15.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	105.793.240,00	105.793.240,00	-	1,00
	2.15.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-
700	2.15.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.801.000,00	1.801.000,00	-	1,00
701	2.15.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000,00	83.609.098,00	83.559.098,00	1.672,18
702	2.15.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.071.000,00	28.511.000,00	(560.000,00)	0,98
703	2.15.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	122.714.150,00	91.962.150,00	(30.752.000,00)	0,75
704	2.15.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.445.300,00	2.445.300,00	-	1,00
705	2.15.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.166.000,00	75.913.000,00	(70.253.000,00)	0,52
	2.15.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-
706	2.15.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas	50.000,00	36.759.000,00	36.709.000,00	735,18

		Operasional atau Lapangan				
707	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000,00	97.980.000,00	97.930.000,00	1.959,60
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
708	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.980.000,00	2.350.000,00	370.000,00	1,19
709	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.849.236,00	82.849.236,00	-	1,00
710	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.210.000,00	6.210.000,00	-	1,00
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
711	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.950.000,00	42.950.000,00	-	1,00
712	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	294.470.000,00	304.810.000,00	10.340.000,00	1,04
713	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.560.000,00	0,00	(2.560.000,00)	-
714	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000,00	0,00	(50.000,00)	-
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			-	-
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			-	-
715	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	50.000,00	0,00	(50.000,00)	-

	2.15.02.2.0 2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			-	-
71 6	2.15.02.2.0 2.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	69.899.500,0 0	641.352.500, 00	571.453.000 ,00	9,18
71 7	2.15.02.2.0 2.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	156.440.950, 00	520.240.300, 00	363.799.350 ,00	3,33
	2.15.02.2.0 6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			-	-
71 8	2.15.02.2.0 6.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.211.244.25 0,00	1.118.911.07 0,00	(92.333.180 ,00)	0,92
71 9	2.15.02.2.0 6.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	50.000,00	0,00	(50.000,00)	-
	2.15.02.2.0 9	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			-	-
72 0	2.15.02.2.0 9.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	50.000,00	0,00	(50.000,00)	-
	2.15.02.2.1 1	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			-	-
72 1	2.15.02.2.1 1.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000,00	0,00	(50.000,00)	-
		UPTD Terminal			-	-

	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	-
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			-	-
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			-	-
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			-	-
722	2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	50.000,00	0,00	(50.000,00)	-
723	2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	50.000,00	0,00	(50.000,00)	-
724	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	50.000,00	0,00	(50.000,00)	-
		UPTD Parkir			-	-
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	-
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			-	-
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			-	-
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			-	-
725	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan	387.009.750,00	363.250.750,00	(23.759.000,00)	0,94

		Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				
		UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor			-	-
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	-
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			-	-
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			-	-
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			-	-
726	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12.084.000,00	79.352.000,00	67.268.000,00	6,57
727	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50.000,00	0,00	(50.000,00)	-
728	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	2,00
729	2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50.000,00	0,00	(50.000,00)	-
730	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50.190.000,00	125.190.000,00	75.000.000,00	2,49
		Dinas Komunikasi dan Informatika	9.825.069.664,00	9.723.285.464,00	(101.784.200,00)	0,99
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	-
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN			-	-

		BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	2.16.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-
73 1	2.16.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.004.350,0 0	26.004.350,0 0	-	1,00
73 2	2.16.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.909.300,0 0	55.254.600,0 0	11.345.300, 00	1,26
	2.16.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-
73 3	2.16.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.552.147.45 4,00	3.552.478.09 8,00	330.644,00	1,00
73 4	2.16.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	180.196.000, 00	226.556.000, 00	46.360.000, 00	1,26
	2.16.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-
73 5	2.16.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40.000.000,0 0	34.000.000,0 0	(6.000.000, 00)	0,85
	2.16.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-
73 6	2.16.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.571.000,00	5.433.000,00	2.862.000,0 0	2,11
73 7	2.16.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.435.000,0 0	31.435.000,0 0	-	1,00
73 8	2.16.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.271.600,0 0	20.271.600,0 0	-	1,00
73 9	2.16.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.256.000,00	7.256.000,00	-	1,00
74 0	2.16.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	301.804.000, 00	150.968.000, 00	(150.836.00 0,00)	0,50
	2.16.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-

74 1	2.16.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.265.000,0 0	110.277.000, 00	88.012.000, 00	4,95
74 2	2.16.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.773.000,0 0	170.782.840, 00	119.009.840 ,00	3,30
	2.16.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
74 3	2.16.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.549.800,00	1.549.800,00	-	1,00
74 4	2.16.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.192.720,0 0	61.739.952,0 0	1.547.232,0 0	1,03
	2.16.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
74 5	2.16.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.950.000,0 0	39.190.000,0 0	(3.760.000, 00)	0,91
74 6	2.16.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	134.040.000, 00	118.200.000, 00	(15.840.000 ,00)	0,88
74 7	2.16.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	22.820.000,0 0	22.820.000, 00	-
74 8	2.16.01.2.0 9.0011	Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.820.000,0 0	0,00	(22.820.000 ,00)	-
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			-	-
	2.16.02.2.0 1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			-	-
74 9	2.16.02.2.0 1.0014	Relasi Media	720.576.400, 00	599.949.200, 00	(120.627.20 0,00)	0,83

750	2.16.02.2.0 1.0017	Pelayanan Informasi Publik	187.481.800,00	117.054.976,00	(70.426.824,00)	0,62
751	2.16.02.2.0 1.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	754.726.160,00	718.806.896,00	(35.919.264,00)	0,95
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			-	-
	2.16.03.2.0 2	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			-	-
752	2.16.03.2.0 2.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	74.851.000,00	245.684.000,00	170.833.000,00	3,28
753	2.16.03.2.0 2.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	496.034.850,00	139.375.050,00	(356.659.800,00)	0,28
754	2.16.03.2.0 2.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.828.828.900,00	3.101.193.850,00	272.364.950,00	1,10
755	2.16.03.2.0 2.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	74.908.750,00	0,00	(74.908.750,00)	-
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			-	-
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			-	-
	2.20.02.2.0 1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			-	-
756	2.20.02.2.0 1.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	59.997.500,00	54.182.500,00	(5.815.000,00)	0,90
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			-	-

	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			-	-
	2.21.02.2.0 1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			-	-
75 7	2.21.02.2.0 1.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	86.479.080,0 0	112.822.752, 00	26.343.672, 00	1,30
		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	11.308.636.3 60,00	13.494.668.6 49,00	2.186.032.2 89,00	1,19
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	-
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			-	-
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	2.17.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-
75 8	2.17.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.496.250,00	6.496.250,00	-	1,00
75 9	2.17.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.420.650,0 0	48.420.650,0 0	-	1,00
	2.17.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-
76 0	2.17.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.552.515.37 3,00	4.395.380.67 3,00	(157.134.70 0,00)	0,97
76 1	2.17.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	240.371.550, 00	288.365.550, 00	47.994.000, 00	1,20

	2.17.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-	-
76 2	2.17.01.2.0 3.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20.010.000,0 0	0,00	(20.010.000 ,00)	-
	2.17.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-
76 3	2.17.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	39.000.000,0 0	39.000.000,0 0	-	1,00
	2.17.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-
76 4	2.17.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.838.000,00	4.838.000,00	-	1,00
76 5	2.17.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	12.000.000,0 0	12.000.000, 00	-
76 6	2.17.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.324.000,0 0	22.324.000,0 0	-	1,00
76 7	2.17.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.386.050,0 0	29.386.050,0 0	-	1,00
76 8	2.17.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.147.850,00	7.147.850,00	-	1,00
76 9	2.17.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.996.500,0 0	12.996.500,0 0	-	1,00
77 0	2.17.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	218.953.000, 00	110.833.000, 00	(108.120.00 0,00)	0,51
	2.17.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-
77 1	2.17.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	0,00	5.118.000,00	5.118.000,0 0	-
77 2	2.17.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.262.750,0 0	95.188.000,0 0	47.925.250, 00	2,01
	2.17.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
77 3	2.17.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.242.468,0 0	97.158.200,0 0	14.915.732, 00	1,18
77 4	2.17.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.890.000,00	8.890.000,00	-	1,00

77 5	2.17.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.539.866.88 0,00	1.525.299.84 8,00	(14.567.032 ,00)	0,99
	2.17.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
77 6	2.17.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.950.000,0 0	39.190.000,0 0	(3.760.000, 00)	0,91
77 7	2.17.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	188.400.000, 00	188.400.000, 00	-	1,00
77 8	2.17.01.2.0 9.0005	Pemeliharaan Mebel	1.360.000,00	1.360.000,00	-	1,00
77 9	2.17.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.099.090, 00	278.730.480, 00	78.631.390, 00	1,39
	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			-	-
	2.17.03.2.0 1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			-	-
78 0	2.17.03.2.0 1.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	19.999.200,0 0	19.749.200,0 0	(250.000,00)	0,99
	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			-	-
	2.17.04.2.0 1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan			-	-

		Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
78 1	2.17.04.2.0 1.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	14.999.800,0 0	14.999.550,0 0	(250,00)	1,00
	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			-	-
	2.17.05.2.0 1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			-	-
78 2	2.17.05.2.0 1.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	79.999.610,0 0	75.999.470,0 0	(4.000.140,00)	0,95
	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			-	-
	2.17.06.2.0 1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			-	-
78 3	2.17.06.2.0 1.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	0,00	161.207.650,00	161.207.650,00	-
	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			-	-
	2.17.07.2.0 1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan			-	-

		Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
784	2.17.07.2.0 1.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	93.337.350,0 0	88.232.350,0 0	(5.105.000,00)	0,95
785	2.17.07.2.0 1.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	19.999.550,0 0	19.999.550,0 0	-	1,00
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			-	-
	2.17.08.2.0 1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			-	-
786	2.17.08.2.0 1.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	99.347.150,0 0	84.846.850,0 0	(14.500.300,00)	0,85
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			-	-
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			-	-
	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			-	-
	3.30.02.2.0 6	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			-	-
787	3.30.02.2.0 6.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	19.679.350,0 0	19.679.350,0 0	-	1,00
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN			-	-

		SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
	3.30.03.2.0 1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			-	-
78 8	3.30.03.2.0 1.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	887.968.087,00	3.012.767.936,00	2.124.799.849,00	3,39
78 9	3.30.03.2.0 1.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	476.794.652,00	648.037.992,00	171.243.340,00	1,36
	3.30.03.2.0 2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			-	-
79 0	3.30.03.2.0 2.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1.733.236.850,00	1.437.986.650,00	(295.250.200,00)	0,83
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			-	-
	3.30.04.2.0 2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			-	-
79 1	3.30.04.2.0 2.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	15.450.050,00	15.450.050,00	-	1,00
79 2	3.30.04.2.0 2.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	15.960.250,00	15.960.250,00	-	1,00
79 3	3.30.04.2.0 2.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1	85.475.800,00	135.475.650,00	49.999.850,00	1,58

		(Satu) Kabupaten/Kota				
	3.30.04.2.0 3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-
79 4	3.30.04.2.0 3.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	10.615.250,0 0	10.615.250,0 0	-	1,00
79 5	3.30.04.2.0 3.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	7.346.800,00	7.346.800,00	-	1,00
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			-	-
	3.30.06.2.0 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			-	-
79 6	3.30.06.2.0 1.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	59.086.700,0 0	59.086.700,0 0	-	1,00
	3.30.07	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			-	-
	3.30.07.2.0 1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			-	-
79 7	3.30.07.2.0 1.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	88.728.150,0 0	41.415.150,0 0	(47.313.000 ,00)	0,47
		UPTD Promosi Produk UMKM			-	-
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			-	-
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			-	-

	3.30.07	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			-	-
	3.30.07.2.0 1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			-	-
79 8	3.30.07.2.0 1.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	267.081.350, 00	409.289.200, 00	142.207.850 ,00	1,53
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.789.305.51 9,00	4.880.968.28 5,00	91.662.766, 00	1,02
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	-
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			-	-
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	2.18.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-
79 9	2.18.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.022.300,0 0	10.022.300,0 0	-	1,00
80 0	2.18.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.850,00	18.049.850,0 0	8.050.000,0 0	1,81
	2.18.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-
80 1	2.18.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.815.529.29 5,00	2.822.252.31 0,00	6.723.015,0 0	1,00
80 2	2.18.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	138.384.000, 00	162.350.000, 00	23.966.000, 00	1,17

	2.18.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-
80 3	2.18.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	51.000.000,0 0	62.450.000,0 0	11.450.000, 00	1,22
80 4	2.18.01.2.0 5.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	24.999.500,0 0	25.045.650,0 0	46.150,00	1,00
	2.18.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-
80 5	2.18.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000,00	6.202.000,00	(1.798.000, 00)	0,78
80 6	2.18.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.998.500,0 0	29.998.500,0 0	-	1,00
80 7	2.18.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.999.750,00	9.999.750,00	-	1,00
80 8	2.18.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.337.950,00	3.337.950,00	-	1,00
80 9	2.18.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.548.000,00	3.548.000,00	-	1,00
81 0	2.18.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.350.000,0 0	43.970.000,0 0	(44.380.000 ,00)	0,50
	2.18.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-
81 1	2.18.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	0,00	32.774.000,0 0	32.774.000, 00	-
81 2	2.18.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	65.350.000,0 0	65.350.000, 00	-
	2.18.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
81 3	2.18.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.999.984,0 0	63.602.576,0 0	13.602.592, 00	1,27
81 4	2.18.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	779.824.440, 00	673.993.704, 00	(105.830.73 6,00)	0,86
	2.18.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-

815	2.18.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.950.000,0 0	39.190.000,0 0	(3.760.000,00)	0,91
816	2.18.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	238.900.000,00	158.500.000,00	(80.400.000,00)	0,66
817	2.18.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.740.000,00	18.740.000,00	-	1,00
818	2.18.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.500.000,00	89.455.674,00	61.955.674,00	3,25
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			-	-
	2.18.02.2.0 2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			-	-
819	2.18.02.2.0 2.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	59.999.700,00	56.014.950,00	(3.984.750,00)	0,93
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			-	-
	2.18.03.2.0 1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			-	-
820	2.18.03.2.0 1.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	54.999.850,00	54.922.300,00	(77.550,00)	1,00
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			-	-
	2.18.04.2.0 1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			-	-

82 1	2.18.04.2.0 1.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	159.966.350,00	301.354.971,00	141.388.621,00	1,88
82 2	2.18.04.2.0 1.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	19.996.500,00	19.996.500,00	-	1,00
82 3	2.18.04.2.0 1.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	29.998.000,00	29.998.000,00	-	1,00
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			-	-
	2.18.05.2.0 1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			-	-
82 4	2.18.05.2.0 1.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	19.999.800,00	14.899.800,00	(5.100.000,00)	0,74
82 5	2.18.05.2.0 1.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	0,00	0,00	-	-
82 6	2.18.05.2.0 1.0006	Pengawasan Penanaman Modal	53.262.000,00	26.761.000,00	(26.501.000,00)	0,50
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			-	-
	2.18.06.2.0 1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-
82 7	2.18.06.2.0 1.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi	39.999.750,00	38.188.500,00	(1.811.250,00)	0,95

		Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.674.055.73 3,00	3.666.899.60 6,00	(7.156.127, 00)	1,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	-
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			-	-
	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	2.23.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-
82 8	2.23.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.970.000,00	11.605.000,0 0	5.635.000,0 0	1,94
82 9	2.23.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.805.500,00	4.805.500,00	-	1,00
	2.23.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-
83 0	2.23.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.149.788.46 5,00	2.096.053.58 0,00	(53.734.885 ,00)	0,98
83 1	2.23.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	90.960.000,0 0	144.696.000, 00	53.736.000, 00	1,59
	2.23.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-
83 2	2.23.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	16.000.000,0 0	16.000.000,0 0	-	1,00
	2.23.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-
83 3	2.23.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.532.000,00	6.532.000,00	-	1,00

834	2.23.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.689.500,0 0	16.689.500,0 0	-	1,00
835	2.23.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	63.149.850,0 0	48.899.850,0 0	(14.250.000,00)	0,77
836	2.23.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.486.350,0 0	11.296.750,0 0	(2.189.600,00)	0,84
837	2.23.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.016.500,00	4.913.000,00	(103.500,00)	0,98
838	2.23.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116.143.000,00	58.063.000,00	(58.080.000,00)	0,50
	2.23.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-
839	2.23.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.247.000,0 0	127.247.000,00	50.000.000,00	1,65
840	2.23.01.2.0 7.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000,00	0,00	(100.000,00)	-
	2.23.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
841	2.23.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.405.488,00	132.646.848,00	13.241.360,00	1,11
842	2.23.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	183.125.590,00	182.685.448,00	(440.142,00)	1,00
	2.23.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
843	2.23.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.950.000,0 0	39.190.000,0 0	(3.760.000,00)	0,91
844	2.23.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	121.630.000,00	146.950.000,00	25.320.000,00	1,21
845	2.23.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.358.720,0 0	24.724.360,0 0	(5.634.360,00)	0,81

	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			-	-
	2.23.02.2.0 1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-
84 6	2.23.02.2.0 1.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	170.163.500,00	170.163.500,00	-	1,00
84 7	2.23.02.2.0 1.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	192.354.000,00	192.354.000,00	-	1,00
84 8	2.23.02.2.0 1.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	52.472.250,00	52.472.250,00	-	1,00
84 9	2.23.02.2.0 1.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	51.035.120,00	51.035.120,00	-	1,00
	2.23.02.2.0 2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-
85 0	2.23.02.2.0 2.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	100.000,00	0,00	(100.000,00)	-
85 1	2.23.02.2.0 2.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	27.995.300,00	25.324.300,00	(2.671.000,00)	0,90
	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			-	-
	2.23.03.2.0 2	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			-	-
85 2	2.23.03.2.0 2.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	12.204.700,00	12.204.700,00	-	1,00

	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			-	-
	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			-	-
	2.24.02.2.0 1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			-	-
85 3	2.24.02.2.0 1.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	50.280.900,0 0	36.355.900,0 0	(13.925.000 ,00)	0,72
	2.24.02.2.0 2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			-	-
85 4	2.24.02.2.0 2.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	53.992.000,0 0	53.992.000,0 0	-	1,00
	2.24.02.2.0 3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			-	-
85 5	2.24.02.2.0 3.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	100.000,00	0,00	(100.000,00)	-
		Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	14.620.678.3 03,00	14.213.547.4 78,00	(407.130.82 5,00)	0,97
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	-
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			-	-
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			-	-
	2.19.02.2.0 1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda			-	-

		Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				
856	2.19.02.2.0 1.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	31.816.250,0 0	55.928.500,0 0	24.112.250,00	1,76
857	2.19.02.2.0 1.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	28.261.500,0 0	21.011.500,0 0	(7.250.000,00)	0,74
	2.19.02.2.0 2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-
858	2.19.02.2.0 2.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	58.515.000,0 0	49.653.750,0 0	(8.861.250,00)	0,85
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			-	-
	2.19.03.2.0 1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			-	-
859	2.19.03.2.0 1.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui	1.212.168.48 0,00	1.259.020.90 5,00	46.852.425,00	1,04

		perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota				
860	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	61.663.350,00	30.180.850,00	(31.482.500,00)	0,49
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-
861	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3.171.049.550,00	3.111.477.050,00	(59.572.500,00)	0,98
862	2.19.03.2.02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	394.999.200,00	313.434.700,00	(81.564.500,00)	0,79
863	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	62.977.400,00	46.775.000,00	(16.202.400,00)	0,74
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			-	-
864	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah,	299.948.250,00	429.199.500,00	129.251.250,00	1,43

		nasional, dan internasional				
	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			-	-
	2.19.04.2.0 1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			-	-
86 5	2.19.04.2.0 1.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	442.466.000,00	437.661.000,00	(4.805.000,00)	0,99
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			-	-
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			-	-
	2.22.02.2.0 1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			-	-
86 6	2.22.02.2.0 1.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	67.550.100,00	60.712.600,00	(6.837.500,00)	0,90
	2.22.02.2.0 2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			-	-
86 7	2.22.02.2.0 2.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	300.023.950,00	288.518.450,00	(11.505.500,00)	0,96
86 8	2.22.02.2.0 2.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	60.000.200,00	49.816.450,00	(10.183.750,00)	0,83
	2.22.02.2.0 3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			-	-

869	2.22.02.2.0 3.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	125.000.200, 00	99.768.200,0 0	(25.232.000 ,00)	0,80
870	2.22.02.2.0 3.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	1.225.883.65 0,00	1.083.573.15 0,00	(142.310.50 0,00)	0,88
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			-	-
	2.22.03.2.0 1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			-	-
871	2.22.03.2.0 1.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	86.999.800,0 0	74.097.300,0 0	(12.902.500 ,00)	0,85
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			-	-
	2.22.05.2.0 1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			-	-
872	2.22.05.2.0 1.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	21.542.800,0 0	18.807.800,0 0	(2.735.000, 00)	0,87
	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			-	-
	2.22.06.2.0 1	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			-	-
873	2.22.06.2.0 1.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	25.196.000,0 0	24.201.250,0 0	(994.750,00)	0,96
874	2.22.06.2.0 1.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	100.000.340, 00	96.420.340,0 0	(3.580.000, 00)	0,96
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			-	-
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			-	-
	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			-	-

		DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	3.26.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-
87 5	3.26.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.041.450,0 0	28.567.250,0 0	(9.474.200, 00)	0,75
87 6	3.26.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.282.450,0 0	18.020.650,0 0	(2.261.800, 00)	0,89
	3.26.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-
87 7	3.26.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.961.393.37 1,00	3.895.781.37 1,00	(65.612.000 ,00)	0,98
87 8	3.26.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	309.163.200, 00	314.955.200, 00	5.792.000,0 0	1,02
	3.26.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-
87 9	3.26.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	32.000.000,0 0	32.000.000,0 0	-	1,00
	3.26.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-
88 0	3.26.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.262.000,00	5.696.000,00	1.434.000,0 0	1,34
88 1	3.26.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.877.000,00	8.635.000,00	(1.242.000, 00)	0,87
88 2	3.26.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.227.800,0 0	14.526.350,0 0	(701.450,00)	0,95
88 3	3.26.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.037.000,00	5.377.000,00	(660.000,00)	0,89
88 4	3.26.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.573.000, 00	106.068.000, 00	(104.505.00 0,00)	0,50
	3.26.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-
88 5	3.26.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	26.905.000,0 0	26.905.000,0 0	-	1,00

886	3.26.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.001.000,0 0	33.001.000,0 0	-	1,00
	3.26.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
887	3.26.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.750.000,00	3.010.000,00	(740.000,00)	0,80
888	3.26.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	280.911.322,00	255.107.062,00	(25.804.260,00)	0,91
889	3.26.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	201.720.020,00	264.223.660,00	62.503.640,00	1,31
	3.26.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
890	3.26.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.950.000,0 0	42.950.000,0 0	-	1,00
891	3.26.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	295.770.000,00	295.770.000,00	-	1,00
892	3.26.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.540.000,00	9.540.000,00	-	1,00
893	3.26.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,0 0	0,00	(15.000.000,00)	-
894	3.26.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.500.000,00	133.965.270,00	126.465.270,00	17,86
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			-	-
	3.26.02.2.0 3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			-	-
895	3.26.02.2.0 3.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	25.000.000,0 0	0,00	(25.000.000,00)	-

89 6	3.26.02.2.0 3.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	50.000.000,0 0	0,00	(50.000.000 ,00)	-
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			-	-
	3.26.03.2.0 1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			-	-
89 7	3.26.03.2.0 1.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	54.996.000,0 0	38.661.750,0 0	(16.334.250 ,00)	0,70
89 8	3.26.03.2.0 1.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	346.114.550, 00	307.950.800, 00	(38.163.750 ,00)	0,89
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			-	-
	3.26.05.2.0 1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			-	-
89 9	3.26.05.2.0 1.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	361.000.000, 00	435.615.200, 00	74.615.200, 00	1,21
90 0	3.26.05.2.0 1.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	35.000.000,0 0	26.361.500,0 0	(8.638.500, 00)	0,75
		UPTD Pengelola Objek Wisata dan Usaha Pariwisata			-	-
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			-	-

	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			-	-
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			-	-
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			-	-
901	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	448.601.120,00	360.601.120,00	(88.000.000,00)	0,80
		dinas pertanian	19.189.749.460,00	19.361.094.752,00	171.345.292,00	1,01
		UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak			-	-
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			-	-
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			-	-
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	3.27.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			-	-
902	3.27.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	236.606.000,00	236.606.000,00	-	1,00
		UPTD Puskesmas			-	-
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			-	-
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			-	-
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			-	-
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner			-	-

		dalam Daerah Kabupaten/Kota				
90 3	3.27.04.2.0 3.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	221.093.500, 00	175.599.328, 00	(45.494.172 ,00)	0,79
		UPTD Perbenihan dan Pelayanan Jasa Alsintan			-	-
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			-	-
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			-	-
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			-	-
	3.27.02.2.0 2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			-	-
90 4	3.27.02.2.0 2.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	412.685.690, 00	432.180.354, 00	19.494.664, 00	1,05
		UPTD RPH dan Pasar Ternak			-	-
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			-	-
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			-	-
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			-	-
	3.27.04.2.0 2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			-	-
90 5	3.27.04.2.0 2.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan	470.393.370, 00	452.606.186, 00	(17.787.184 ,00)	0,96

		Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				
		Dinas Pertanian			-	-
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			-	-
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			-	-
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			-	-
	3.25.04.2.0 2	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			-	-
90 6	3.25.04.2.0 2.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	522.069.000,00	522.069.000,00	-	1,00
90 7	3.25.04.2.0 2.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	119.744.550,00	107.404.050,00	(12.340.500,00)	0,90
	3.25.04.2.0 4	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			-	-
90 8	3.25.04.2.0 4.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	23.416.250,00	23.416.250,00	-	1,00
90 9	3.25.04.2.0 4.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	350.060.465,00	306.543.331,00	(43.517.134,00)	0,88
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			-	-
	3.25.06.2.0 2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			-	-

910	3.25.06.2.0 2.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	84.147.500,0 0	71.272.500,0 0	(12.875.000,00)	0,85
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			-	-
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	3.27.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-
911	3.27.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.113.550,0 0	19.113.550,0 0	-	1,00
912	3.27.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.193.000,0 0	90.263.000,0 0	6.070.000,0 0	1,07
	3.27.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-
913	3.27.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.644.135,2 16,00	10.543.713,6 84,00	(100.421,53 2,00)	0,99
914	3.27.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	416.097.600,0 00	514.093.600,0 00	97.996.000,0 00	1,24
	3.27.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-
915	3.27.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	95.000.000,0 0	95.000.000,0 0	-	1,00
	3.27.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-
916	3.27.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.252.000,00	6.252.000,00	-	1,00
917	3.27.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.947.640,0 0	55.688.640,0 0	(259.000,00)	1,00

918	3.27.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.929.750,0 0	19.929.750,0 0	-	1,00
919	3.27.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.992.000,00	6.992.000,00	-	1,00
920	3.27.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	338.341.000,00	164.071.000,00	(174.270.000,00)	0,48
	3.27.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-
921	3.27.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.241.000,00	235.324.100,00	193.083.100,00	5,57
	3.27.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
922	3.27.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	242.940.856,00	224.639.056,00	(18.301.800,00)	0,92
923	3.27.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	193.515.820,00	345.590.622,00	152.074.802,00	1,79
	3.27.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
924	3.27.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.950.000,00	39.190.000,00	(3.760.000,00)	0,91
925	3.27.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	852.940.000,00	607.900.000,00	(245.040.000,00)	0,71
926	3.27.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.460.000,00	26.350.000,00	5.890.000,00	1,29
927	3.27.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.882.423,00	189.738.423,00	179.856.000,00	19,20
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			-	-

	3.27.02.2.0 1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			-	-
92 8	3.27.02.2.0 1.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	151.782.000, 00	151.782.000, 00	-	1,00
92 9	3.27.02.2.0 1.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	95.458.570,0 0	74.347.712,0 0	(21.110.858 ,00)	0,78
	3.27.02.2.0 2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			-	-
93 0	3.27.02.2.0 2.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	178.866.750, 00	354.151.650, 00	175.284.900 ,00	1,98
	3.27.02.2.0 5	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			-	-
93 1	3.27.02.2.0 5.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	98.782.500,0 0	49.053.000,0 0	(49.729.500 ,00)	0,50
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			-	-
	3.27.03.2.0 1	Pengembangan Prasarana Pertanian			-	-
93 2	3.27.03.2.0 1.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	355.777.100, 00	305.597.900, 00	(50.179.200 ,00)	0,86
	3.27.03.2.0 2	Pembangunan Prasarana Pertanian			-	-

933	3.27.03.2.0 2.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	925.873.000,00	925.873.000,00	-	1,00
934	3.27.03.2.0 2.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.226.567.000,00	1.226.567.000,00	-	1,00
935	3.27.03.2.0 2.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	10.788.000,00	10.788.000,00	-	1,00
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			-	-
	3.27.04.2.0 4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			-	-
936	3.27.04.2.0 4.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	20.875.450,00	19.944.200,00	(931.250,00)	0,96
937	3.27.04.2.0 4.0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	19.937.650,00	19.937.650,00	-	1,00
938	3.27.04.2.0 4.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	198.525.260,00	101.044.416,00	(97.480.844,00)	0,51
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			-	-
	3.27.05.2.0 1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			-	-
939	3.27.05.2.0 1.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	39.999.400,00	39.999.400,00	-	1,00
940	3.27.05.2.0 1.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman	9.999.700,00	9.999.700,00	-	1,00

		Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				
	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			-	-
	3.27.06.2.0 1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			-	-
94 1	3.27.06.2.0 1.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	20.748.750,0 0	17.773.750,0 0	(2.975.000,00)	0,86
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			-	-
	3.27.07.2.0 1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			-	-
94 2	3.27.07.2.0 1.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	74.827.500,0 0	74.723.500,0 0	(104.000,00)	1,00
94 3	3.27.07.2.0 1.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	29.999.750,0 0	126.288.500,00	96.288.750,00	4,21
94 4	3.27.07.2.0 1.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	199.792.900,00	145.789.150,00	(54.003.750,00)	0,73
94 5	3.27.07.2.0 1.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	0,00	195.887.800,00	195.887.800,00	-
		Sekretariat Daerah	32.949.194.0 11,00	35.669.454.4 51,00	2.720.260.4 40,00	1,08
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			-	-
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH			-	-
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-

	4.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-
94 6	4.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.812.300,0 0	16.812.300,0 0	-	1,00
94 7	4.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.581.750,0 0	108.947.400, 00	26.365.650, 00	1,32
	4.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-
94 8	4.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.643.997,0 96,00	10.422.872,9 51,00	(221.124.14 5,00)	0,98
94 9	4.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	550.122.600, 00	784.902.600, 00	234.780.000 ,00	1,43
	4.01.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-	-
95 0	4.01.01.2.0 3.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000,0 0	50.000.000,0 0	-	1,00
	4.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-
95 1	4.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	80.000.000,0 0	80.000.000,0 0	-	1,00
	4.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-
95 2	4.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.985.000,0 0	73.115.000,0 0	38.130.000, 00	2,09
95 3	4.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.996.000,0 0	117.638.500, 00	17.642.500, 00	1,18
95 4	4.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.743.000,0 0	77.254.000,0 0	7.511.000,0 0	1,11
95 5	4.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	59.476.350,0 0	62.297.350,0 0	2.821.000,0 0	1,05
95 6	4.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	424.123.150, 00	392.285.650, 00	(31.837.500 ,00)	0,92
95 7	4.01.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	889.697.000, 00	1.626.412,50 0,00	736.715.500 ,00	1,83

95 8	4.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.396.423.00 0,00	873.055.000, 00	(523.368.00 0,00)	0,63
	4.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-
95 9	4.01.01.2.0 7.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.600.000.00 0,00	2.512.110.00 0,00	912.110.000 ,00	1,57
96 0	4.01.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.446.222.00 0,00	1.446.222.00 0,00	-	1,00
96 1	4.01.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	199.835.675, 00	195.917.950, 00	(3.917.725, 00)	0,98
96 2	4.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.898.000,0 0	1.061.082.00 0,00	1.016.184.0 00,00	23,63
96 3	4.01.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.998.388,0 0	200.009.388, 00	100.011.000 ,00	2,00
96 4	4.01.01.2.0 7.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.989.900,0 0	91.497.250,0 0	(8.492.650, 00)	0,92
	4.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
96 5	4.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	941.039.294, 00	920.332.204, 00	(20.707.090 ,00)	0,98
96 6	4.01.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	391.790.000, 00	530.040.250, 00	138.250.250 ,00	1,35
96 7	4.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.632.956.72 0,00	1.908.916.82 4,00	275.960.104 ,00	1,17
	4.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
96 8	4.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	612.180.000, 00	612.390.000, 00	210.000,00	1,00

969	4.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	754.140.000,00	590.750.000,00	(163.390.000,00)	0,78
970	4.01.01.2.0 9.0005	Pemeliharaan Mebel	9.750.000,00	27.500.000,00	17.750.000,00	2,82
971	4.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.210.000,00	29.660.000,00	7.450.000,00	1,34
972	4.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	233.721.600,00	518.618.685,00	284.897.085,00	2,22
973	4.01.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	-	1,00
974	4.01.01.2.0 9.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	92.720.000,00	126.920.000,00	34.200.000,00	1,37
	4.01.01.2.1 1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			-	-
975	4.01.01.2.1 1.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	845.117.768,00	827.946.187,00	(17.171.581,00)	0,98
976	4.01.01.2.1 1.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	66.119.520,00	206.623.480,00	140.503.960,00	3,12
977	4.01.01.2.1 1.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	1,00
978	4.01.01.2.1 1.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	591.390.000,00	600.000.000,00	8.610.000,00	1,01
	4.01.01.2.1 2	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			-	-

979	4.01.01.2.1 2.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	476.300.500,00	593.379.000,00	117.078.500,00	1,25
980	4.01.01.2.1 2.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	321.242.000,00	494.995.000,00	173.753.000,00	1,54
981	4.01.01.2.1 2.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	94.895.200,00	155.774.700,00	60.879.500,00	1,64
	4.01.01.2.1 3	Penataan Organisasi			-	-
982	4.01.01.2.1 3.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	74.300.700,00	67.540.700,00	(6.760.000,00)	0,91
983	4.01.01.2.1 3.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	190.449.700,00	177.001.700,00	(13.448.000,00)	0,93
984	4.01.01.2.1 3.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	39.102.750,00	39.102.450,00	(300,00)	1,00
	4.01.01.2.1 4	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			-	-
985	4.01.01.2.1 4.0001	Fasilitasi Keprotokolan	99.980.050,00	152.983.550,00	53.003.500,00	1,53
986	4.01.01.2.1 4.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2.171.064.900,00	1.542.718.482,00	(628.346.418,00)	0,71
987	4.01.01.2.1 4.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	324.467.000,00	361.339.000,00	36.872.000,00	1,11
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			-	-
	4.01.02.2.0 1	Administrasi Tata Pemerintahan			-	-
988	4.01.02.2.0 1.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	432.352.000,00	325.551.200,00	(106.800.800,00)	0,75
989	4.01.02.2.0 1.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	63.888.750,00	52.717.800,00	(11.170.950,00)	0,83
990	4.01.02.2.0 1.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	407.766.550,00	275.741.050,00	(132.025.500,00)	0,68
	4.01.02.2.0 2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			-	-

99 1	4.01.02.2.0 2.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	700.158.450, 00	783.639.950, 00	83.481.500, 00	1,12
99 2	4.01.02.2.0 2.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	1.962.037.70 0,00	1.938.037.70 0,00	(24.000.000 ,00)	0,99
99 3	4.01.02.2.0 2.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	532.935.000, 00	526.172.500, 00	(6.762.500, 00)	0,99
	4.01.02.2.0 3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			-	-
99 4	4.01.02.2.0 3.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	113.766.000, 00	51.341.250,0 0	(62.424.750 ,00)	0,45
99 5	4.01.02.2.0 3.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	435.931.750, 00	578.451.750, 00	142.520.000 ,00	1,33
99 6	4.01.02.2.0 3.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	7.978.000,00	7.978.000,00	-	1,00
	4.01.02.2.0 4	Fasilitasi Kerja Sama Daerah			-	-
99 7	4.01.02.2.0 4.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	9.946.000,00	14.631.000,0 0	4.685.000,0 0	1,47
99 8	4.01.02.2.0 4.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2.953.400,00	2.953.400,00	-	1,00
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			-	-
	4.01.03.2.0 1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			-	-
99 9	4.01.03.2.0 1.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	32.499.000,0 0	32.498.800,0 0	(200,00)	1,00
10 00	4.01.03.2.0 1.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	64.533.150,0 0	64.532.900,0 0	(250,00)	1,00
	4.01.03.2.0 2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			-	-
10 01	4.01.03.2.0 2.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	18.603.350,0 0	18.603.350,0 0	-	1,00

	4.01.03.2.0 3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			-	-
10 02	4.01.03.2.0 3.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	26.245.900,0 0	24.737.900,0 0	(1.508.000, 00)	0,94
10 03	4.01.03.2.0 3.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	150.888.000, 00	209.765.000, 00	58.877.000, 00	1,39
10 04	4.01.03.2.0 3.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	65.019.000,0 0	39.534.000,0 0	(25.485.000 ,00)	0,61
	4.01.03.2.0 4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			-	-
10 05	4.01.03.2.0 4.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	12.853.100,0 0	10.602.850,0 0	(2.250.250, 00)	0,82
		Sekretariat DPRD	38.920.255.9 34,00	33.874.702.3 78,00	(5.045.553. 556,00)	0,87
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			-	-
	4.02	SEKRETARIAT DPRD			-	-
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	4.02.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-
10 06	4.02.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.417.500,00	8.517.400,00	(900.100,00)	0,90
10 07	4.02.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.332.100,0 0	55.916.000,0 0	(1.416.100, 00)	0,98
	4.02.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-
10 08	4.02.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.778.665.34 6,00	2.815.104.22 0,00	36.438.874, 00	1,01
10 09	4.02.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	195.120.000, 00	286.230.000, 00	91.110.000, 00	1,47

	4.02.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-
10 10	4.02.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25.000.000,0 0	25.000.000,0 0	-	1,00
	4.02.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-
10 11	4.02.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.994.000,0 0	20.994.000,0 0	-	1,00
10 12	4.02.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.082.000,0 0	933.650.500, 00	847.568.500 ,00	10,85
10 13	4.02.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.669.000,0 0	82.327.000,0 0	4.658.000,0 0	1,06
10 14	4.02.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.353.700,0 0	25.339.650,0 0	3.985.950,0 0	1,19
10 15	4.02.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	55.198.150,0 0	55.198.150,0 0	-	1,00
10 16	4.02.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	265.356.250, 00	354.405.000, 00	89.048.750, 00	1,34
10 17	4.02.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.629.255.00 0,00	1.292.062.00 0,00	(337.193.00 0,00)	0,79
	4.02.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-
10 18	4.02.01.2.0 7.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.386.992.00 0,00	2.386.992.00 0,00	-	1,00
10 19	4.02.01.2.0 7.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	-	-
10 20	4.02.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.750.000,0 0	48.750.000,0 0	-	1,00
	4.02.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
10 21	4.02.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	245.545.488, 00	268.192.528, 00	22.647.040, 00	1,09

10 22	4.02.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	673.962.240, 00	766.655.052, 00	92.692.812, 00	1,14
	4.02.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
10 23	4.02.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	232.680.000, 00	232.680.000, 00	-	1,00
10 24	4.02.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	385.010.000, 00	385.010.000, 00	-	1,00
10 25	4.02.01.2.0 9.0005	Pemeliharaan Mebel	34.960.000,0 0	4.960.000,00	(30.000.000 ,00)	0,14
10 26	4.02.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.457.000,0 0	62.216.000,0 0	(11.241.000 ,00)	0,85
10 27	4.02.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	238.413.000, 00	238.413.000, 00	-	1,00
	4.02.01.2.1 5	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			-	-
10 28	4.02.01.2.1 5.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	9.339.484.89 0,00	9.174.210.00 8,00	(165.274.88 2,00)	0,98
10 29	4.02.01.2.1 5.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	178.752.000, 00	178.752.000, 00	-	1,00
10 30	4.02.01.2.1 5.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	31.250.000,0 0	31.250.000,0 0	-	1,00
	4.02.01.2.1 6	Layanan Administrasi DPRD			-	-
10 31	4.02.01.2.1 6.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	121.913.120, 00	99.037.120,0 0	(22.876.000 ,00)	0,81
10 32	4.02.01.2.1 6.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	64.258.000,0 0	74.258.000,0 0	10.000.000, 00	1,16
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			-	-

	4.02.02.2.0 1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			-	-
10 33	4.02.02.2.0 1.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	88.657.850,0 0	77.769.450,0 0	(10.888.400 ,00)	0,88
	4.02.02.2.0 2	Pembahasan Kebijakan Anggaran			-	-
10 34	4.02.02.2.0 2.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	35.720.350,0 0	35.720.350,0 0	-	1,00
10 35	4.02.02.2.0 2.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	15.276.900,0 0	18.899.100,0 0	3.622.200,0 0	1,24
10 36	4.02.02.2.0 2.0003	Pembahasan APBD	189.022.750, 00	189.022.750, 00	-	1,00
10 37	4.02.02.2.0 2.0004	Pembahasan APBD Perubahan	163.195.500, 00	154.171.500, 00	(9.024.000, 00)	0,94
10 38	4.02.02.2.0 2.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	30.417.550,0 0	30.417.550,0 0	-	1,00
	4.02.02.2.0 3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			-	-
10 39	4.02.02.2.0 3.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	14.099.950,0 0	27.746.750,0 0	13.646.800, 00	1,97
10 40	4.02.02.2.0 3.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	11.590.050,0 0	16.756.550,0 0	5.166.500,0 0	1,45
10 41	4.02.02.2.0 3.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	15.399.750,0 0	26.249.750,0 0	10.850.000, 00	1,70
10 42	4.02.02.2.0 3.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	9.999.700,00	15.830.000,0 0	5.830.300,0 0	1,58
	4.02.02.2.0 4	Peningkatan Kapasitas DPRD			-	-
10 43	4.02.02.2.0 4.0002	Pendalaman Tugas DPRD	1.755.682.00 0,00	595.278.000, 00	(1.160.404. 000,00)	0,34
10 44	4.02.02.2.0 4.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	264.000.000, 00	294.000.000, 00	30.000.000, 00	1,11
10 45	4.02.02.2.0 4.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	450.736.000, 00	359.478.000, 00	(91.258.000 ,00)	0,80
	4.02.02.2.0 5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			-	-
10 46	4.02.02.2.0 5.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	5.366.624.00 0,00	2.683.285.00 0,00	(2.683.339. 000,00)	0,50

10 47	4.02.02.2.0 5.0003	Pelaksanaan Reses	2.682.206.80 0,00	2.767.555.00 0,00	85.348.200, 00	1,03
	4.02.02.2.0 8	Fasilitasi Tugas DPRD			-	-
10 48	4.02.02.2.0 8.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8.550.756.00 0,00	6.676.403.00 0,00	(1.874.353. 000,00)	0,78
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.999.817.20 6,00	8.764.362.59 4,00	(235.454.61 2,00)	0,97
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			-	-
	5.01	PERENCANAAN			-	-
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	5.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-
10 49	5.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.999.000,0 0	14.999.000,0 0	-	1,00
10 50	5.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.625.450,0 0	87.955.450,0 0	11.330.000, 00	1,15
	5.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-
10 51	5.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.120.459.90 2,00	5.121.728.91 2,00	1.269.010,0 0	1,00
10 52	5.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	308.982.800, 00	307.820.800, 00	(1.162.000, 00)	1,00
	5.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-
10 53	5.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	43.000.000,0 0	43.000.000,0 0	-	1,00
10 54	5.01.01.2.0 5.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	0,00	0,00	-	-
	5.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-

10 55	5.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.804.000,00	4.804.000,00	-	1,00
10 56	5.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	-	-
10 57	5.01.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.250.000,00	0,00	(6.250.000, 00)	-
10 58	5.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.106.000,0 0	30.106.000,0 0	-	1,00
10 59	5.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.722.000,0 0	18.978.000,0 0	(4.744.000, 00)	0,80
10 60	5.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.938.450,0 0	19.938.450,0 0	-	1,00
10 61	5.01.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.404.500,00	4.404.500,00	-	1,00
10 62	5.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	341.112.000, 00	154.774.000, 00	(186.338.00 0,00)	0,45
10 63	5.01.01.2.0 6.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11.999.900,0 0	11.999.900,0 0	-	1,00
	5.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-
10 64	5.01.01.2.0 7.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	599.334.000, 00	599.334.000, 00	-	1,00
10 65	5.01.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.759.000,0 0	36.759.000,0 0	-	1,00
10 66	5.01.01.2.0 7.0005	Pengad aan Mebel	30.934.000,0 0	37.074.000,0 0	6.140.000,0 0	1,20
10 67	5.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.698.000,0 0	110.635.000, 00	79.937.000, 00	3,60
	5.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
10 68	5.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.999.364,0 0	106.584.664, 00	31.585.300, 00	1,42

1069	5.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.477.840,00	116.091.418,00	4.613.578,00	1,04
	5.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
1070	5.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.950.000,00	42.950.000,00	-	1,00
1071	5.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	290.600.000,00	290.600.000,00	-	1,00
1072	5.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.750.000,00	26.750.000,00	6.000.000,00	1,29
1073	5.01.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.468.000,00	83.356.000,00	69.888.000,00	6,19
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			-	-
	5.01.02.2.0 1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			-	-
1074	5.01.02.2.0 1.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	59.999.700,00	33.293.000,00	(26.706.700,00)	0,55
1075	5.01.02.2.0 1.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	129.999.700,00	68.908.750,00	(61.090.950,00)	0,53
1076	5.01.02.2.0 1.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	17.959.850,00	20.999.000,00	3.039.150,00	1,17
1077	5.01.02.2.0 1.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	624.999.950,00	341.574.200,00	(283.425.750,00)	0,55

	5.01.02.2.0 2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			-	-
10 78	5.01.02.2.0 2.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	11.429.500,0 0	11.429.500,0 0	-	1,00
	5.01.02.2.0 3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			-	-
10 79	5.01.02.2.0 3.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	46.090.750,0 0	15.770.750,0 0	(30.320.000 ,00)	0,34
10 80	5.01.02.2.0 3.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	12.388.500,0 0	85.039.000,0 0	72.650.500, 00	6,86
	5.01.02.2.0 4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			-	-
10 81	5.01.02.2.0 4.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	86.999.150,0 0	90.773.900,0 0	3.774.750,0 0	1,04
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			-	-
	5.01.03.2.0 1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			-	-
10 82	5.01.03.2.0 1.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	21.307.450,0 0	21.307.450,0 0	-	1,00

10 83	5.01.03.2.0 1.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	190.692.100, 00	208.191.800, 00	17.499.700, 00	1,09
10 84	5.01.03.2.0 1.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12.799.750,0 0	16.801.750,0 0	4.002.000,0 0	1,31
	5.01.03.2.0 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			-	-
10 85	5.01.03.2.0 2.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	7.996.400,00	96.430.750,0 0	88.434.350, 00	12,06
10 86	5.01.03.2.0 2.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5.999.550,00	5.485.800,00	(513.750,00)	0,91
	5.01.03.2.0 3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			-	-
10 87	5.01.03.2.0 3.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	47.364.050,0 0	69.514.050,0 0	22.150.000, 00	1,47
10 88	5.01.03.2.0 3.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	59.402.900,0 0	41.023.900,0 0	(18.379.000 ,00)	0,69

10 89	5.01.03.2.0 3.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	118.849.800,00	96.767.500,00	(22.082.300,00)	0,81
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			-	-
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			-	-
	5.05.02.2.0 2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			-	-
10 90	5.05.02.2.0 2.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	99.999.700,00	99.999.700,00	-	1,00
	5.05.02.2.0 3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			-	-
10 91	5.05.02.2.0 3.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	99.999.700,00	99.999.700,00	-	1,00
10 92	5.05.02.2.0 3.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	-	-
	5.05.02.2.0 4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			-	-
10 93	5.05.02.2.0 4.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	0,00	0,00	-	-
10 94	5.05.02.2.0 4.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	87.164.500,00	70.409.000,00	(16.755.500,00)	0,81
10 95	5.05.02.2.0 4.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	0,00	0,00	-	-

		Badan Keuangan Daerah	19.709.378.4 26,00	23.326.162.3 76,00	3.616.783.9 50,00	1,18
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			-	-
	5.02	KEUANGAN			-	-
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	5.02.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-
10 96	5.02.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.834.900,0 0	23.819.800,0 0	984.900,00	1,04
10 97	5.02.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.003.600,0 0	21.003.600,0 0	-	1,00
	5.02.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-
10 98	5.02.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.294.623.97 3,00	8.916.092.27 9,00	(378.531.69 4,00)	0,96
10 99	5.02.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	386.141.300, 00	417.390.300, 00	31.249.000, 00	1,08
11 00	5.02.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	27.279.300,0 0	27.279.300,0 0	-	1,00
	5.02.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-
11 01	5.02.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	65.000.000,0 0	130.000.000, 00	65.000.000, 00	2,00
	5.02.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-
11 02	5.02.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.630.000,00	3.630.000,00	-	1,00
11 03	5.02.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.967.600,0 0	43.006.000,0 0	38.400,00	1,00
11 04	5.02.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.773.000,0 0	28.773.000,0 0	-	1,00

11 05	5.02.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.499.400,00	1.499.400,00	-	1,00
11 06	5.02.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	53.119.500,0 0	78.295.500,0 0	25.176.000, 00	1,47
11 07	5.02.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	522.820.000, 00	260.440.000, 00	(262.380.00 0,00)	0,50
	5.02.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-
11 08	5.02.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	294.072.000, 00	294.072.000 ,00	-
11 09	5.02.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	0,00	52.306.766,0 0	52.306.766, 00	-
11 10	5.02.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	347.071.272, 00	347.071.272 ,00	-
	5.02.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
11 11	5.02.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.095.000,00	4.000.000,00	(2.095.000, 00)	0,66
11 12	5.02.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.198.390, 00	253.198.390, 00	-	1,00
	5.02.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
11 13	5.02.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.950.000,0 0	39.190.000,0 0	(3.760.000, 00)	0,91
11 14	5.02.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	439.110.000, 00	336.250.000, 00	(102.860.00 0,00)	0,77
11 15	5.02.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,0 0	40.000.000,0 0	20.000.000, 00	2,00

	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			-	-
	5.02.02.2.0 1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			-	-
11 16	5.02.02.2.0 1.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	28.371.150,0 0	28.371.150,0 0	-	1,00
11 17	5.02.02.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	29.074.700,0 0	23.437.550,0 0	(5.637.150,00)	0,81
11 18	5.02.02.2.0 1.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	21.856.300,0 0	13.745.000,0 0	(8.111.300,00)	0,63
11 19	5.02.02.2.0 1.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	22.240.150,0 0	21.483.750,0 0	(756.400,00)	0,97
11 20	5.02.02.2.0 1.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	3.583.350,00	2.204.500,00	(1.378.850,00)	0,62
11 21	5.02.02.2.0 1.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	5.536.950,00	5.510.000,00	(26.950,00)	1,00
11 22	5.02.02.2.0 1.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.398.034.55 0,00	1.344.392.00 0,00	(53.642.550,00)	0,96
11 23	5.02.02.2.0 1.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	80.536.300,0 0	68.629.300,0 0	(11.907.000,00)	0,85
11 24	5.02.02.2.0 1.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	26.924.350,0 0	26.924.350,0 0	-	1,00
	5.02.02.2.0 2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			-	-
11 25	5.02.02.2.0 2.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	5.932.000,00	5.048.000,00	(884.000,00)	0,85

11 26	5.02.02.2.0 2.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	107.407.500, 00	106.227.500, 00	(1.180.000, 00)	0,99
11 27	5.02.02.2.0 2.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100.052.250, 00	100.052.250, 00	-	1,00
11 28	5.02.02.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	35.050.000,0 0	33.812.000,0 0	(1.238.000, 00)	0,96
11 29	5.02.02.2.0 2.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	54.342.550,0 0	50.090.550,0 0	(4.252.000, 00)	0,92
11 30	5.02.02.2.0 2.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	797.798.150, 00	146.198.150, 00	(651.600.00 0,00)	0,18
	5.02.02.2.0 3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			-	-
11 31	5.02.02.2.0 3.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	390.203.750, 00	18.015.000,0 0	(372.188.75 0,00)	0,05
11 32	5.02.02.2.0 3.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	61.593.500,0 0	27.407.000,0 0	(34.186.500 ,00)	0,44

11 33	5.02.02.2.0 3.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	316.874.250,00	49.986.250,00	(266.888.000,00)	0,16
11 34	5.02.02.2.0 3.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	65.089.000,00	56.327.000,00	(8.762.000,00)	0,87
11 35	5.02.02.2.0 3.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	7.035.400,00	5.440.850,00	(1.594.550,00)	0,77
11 36	5.02.02.2.0 3.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	7.075.000,00	4.853.000,00	(2.222.000,00)	0,69
11 37	5.02.02.2.0 3.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	7.911.100,00	8.991.000,00	1.079.900,00	1,14
11 38	5.02.02.2.0 3.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	208.292.150,00	131.199.200,00	(77.092.950,00)	0,63
	5.02.02.2.0 4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			-	-
11 39	5.02.02.2.0 4.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	788.556.513,00	6.726.011.484,00	5.937.454.971,00	8,53
	5.02.02.2.0 5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			-	-

11 40	5.02.02.2.0 5.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	10.070.400,0 0	8.042.000,00	(2.028.400,00)	0,80
11 41	5.02.02.2.0 5.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	82.874.800,0 0	380.291.500,00	297.416.700,00	4,59
11 42	5.02.02.2.0 5.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	160.241.000,00	82.760.750,00	(77.480.250,00)	0,52
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			-	-
	5.02.03.2.0 1	Pengelolaan Barang Milik Daerah			-	-
11 43	5.02.03.2.0 1.0001	Penyusunan Standar Harga	58.444.150,00	19.279.150,00	(39.165.000,00)	0,33
11 44	5.02.03.2.0 1.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	41.740.500,00	45.987.700,00	4.247.200,00	1,10
11 45	5.02.03.2.0 1.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	320.871.000,00	177.677.000,00	(143.194.000,00)	0,55
11 46	5.02.03.2.0 1.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	44.997.300,00	0,00	(44.997.300,00)	-
11 47	5.02.03.2.0 1.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	693.891.200,00	28.746.000,00	(665.145.200,00)	0,04
11 48	5.02.03.2.0 1.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	78.457.150,00	70.947.650,00	(7.509.500,00)	0,90
11 49	5.02.03.2.0 1.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	9.223.000,00	3.678.750,00	(5.544.250,00)	0,40
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			-	-
	5.02.04.2.0 1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			-	-

11 50	5.02.04.2.0 1.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	162.927.300, 00	16.198.000,0 0	(146.729.30 0,00)	0,10
11 51	5.02.04.2.0 1.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	311.070.050, 00	321.588.050, 00	10.518.000, 00	1,03
11 52	5.02.04.2.0 1.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	141.516.000, 00	136.461.235, 00	(5.054.765, 00)	0,96
11 53	5.02.04.2.0 1.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	36.566.350,0 0	44.729.800,0 0	8.163.450,0 0	1,22
11 54	5.02.04.2.0 1.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	34.969.750,0 0	29.622.250,0 0	(5.347.500, 00)	0,85
11 55	5.02.04.2.0 1.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	89.827.150,0 0	70.203.000,0 0	(19.624.150 ,00)	0,78
11 56	5.02.04.2.0 1.0011	Penagihan Pajak Daerah	31.741.250,0 0	31.741.250,0 0	-	1,00
11 57	5.02.04.2.0 1.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	96.105.800,0 0	64.365.800,0 0	(31.740.000 ,00)	0,67
11 58	5.02.04.2.0 1.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	91.888.200,0 0	97.526.950,0 0	5.638.750,0 0	1,06
11 59	5.02.04.2.0 1.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	154.954.200, 00	147.161.900, 00	(7.792.300, 00)	0,95
		UPTD Fasilitas Pembiayaan			-	-
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			-	-
	5.02	KEUANGAN			-	-
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	5.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD			-	-

11 60	5.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.009.045.00 0,00	1.009.045.00 0,00	-	1,00
		UPTD Pajak Daerah			-	-
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			-	-
	5.02	KEUANGAN			-	-
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			-	-
	5.02.04.2.0 1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			-	-
11 61	5.02.04.2.0 1.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	247.540.000, 00	218.434.200, 00	(29.105.800 ,00)	0,88
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.574.622.6 41,00	17.713.358.4 70,00	2.138.735.8 29,00	1,14
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			-	-
	5.03	KEPEGAWAIAN			-	-
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	5.03.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-
11 62	5.03.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.241.800,00	5.241.800,00	-	1,00
11 63	5.03.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	270.757.350, 00	192.697.350, 00	(78.060.000 ,00)	0,71
	5.03.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-
11 64	5.03.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.714.712.1 05,00	14.595.566.5 69,00	1.880.854.4 64,00	1,15
11 65	5.03.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	165.984.000, 00	223.816.000, 00	57.832.000, 00	1,35

	5.03.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-
11 66	5.03.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	47.331.850,0 0	50.875.000,0 0	3.543.150,0 0	1,07
	5.03.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-
11 67	5.03.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.971.000,0 0	10.971.000,0 0	-	1,00
11 68	5.03.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.982.500,0 0	24.811.000,0 0	4.828.500,0 0	1,24
11 69	5.03.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.279.000,0 0	33.279.000,0 0	-	1,00
11 70	5.03.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.992.000,0 0	12.992.000,0 0	-	1,00
11 71	5.03.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.498.200,00	4.498.200,00	-	1,00
11 72	5.03.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.673.750,00	1.495.000,00	(1.178.750, 00)	0,56
11 73	5.03.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.978.000,0 0	92.862.000,0 0	5.884.000,0 0	1,07
	5.03.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-
11 74	5.03.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	451.000,00	0,00	(451.000,00)	-
11 75	5.03.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	490.000,00	58.164.000,0 0	57.674.000, 00	118,7 0
11 76	5.03.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.356.000,0 0	254.535.000, 00	179.179.000 ,00	3,38
	5.03.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
11 77	5.03.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.994.926,0 0	41.122.926,0 0	(5.872.000, 00)	0,88
11 78	5.03.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.980.000,00	7.350.000,00	3.370.000,0 0	1,85

1179	5.03.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68.286.360,0 0	68.827.075,0 0	540.715,00	1,01
	5.03.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
1180	5.03.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.950.000,0 0	42.950.000,0 0	-	1,00
1181	5.03.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	134.040.000,00	114.350.000,00	(19.690.000,00)	0,85
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			-	-
	5.03.02.2.0 1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			-	-
1182	5.03.02.2.0 1.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	5.059.950,00	5.059.950,00	-	1,00
1183	5.03.02.2.0 1.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	301.680.050,00	112.413.300,00	(189.266.750,00)	0,37
1184	5.03.02.2.0 1.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2.999.650,00	2.999.650,00	-	1,00
1185	5.03.02.2.0 1.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.999.800,00	4.999.800,00	-	1,00
	5.03.02.2.0 2	Mutasi dan Promosi ASN			-	-
1186	5.03.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	4.999.950,00	6.945.100,00	1.945.150,00	1,39
1187	5.03.02.2.0 2.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4.999.250,00	6.045.250,00	1.046.000,00	1,21
1188	5.03.02.2.0 2.0003	Pengelolaan Promosi ASN	175.414.150,00	685.848.250,00	510.434.100,00	3,91

	5.03.02.2.0 3	Pengembangan Kompetensi ASN			-	-
11 89	5.03.02.2.0 3.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	371.439.000, 00	371.439.000, 00	-	1,00
	5.03.02.2.0 4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			-	-
11 90	5.03.02.2.0 4.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3.967.000,00	2.357.000,00	(1.610.000, 00)	0,59
11 91	5.03.02.2.0 4.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	102.718.150, 00	71.386.050,0 0	(31.332.100 ,00)	0,69
11 92	5.03.02.2.0 4.0007	Pembinaan Disiplin ASN	4.479.150,00	4.479.150,00	-	1,00
11 93	5.03.02.2.0 4.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	4.465.550,00	6.075.550,00	1.610.000,0 0	1,36
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			-	-
	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			-	-
	5.04.02.2.0 1	Pengembangan Kompetensi Teknis			-	-
11 94	5.04.02.2.0 1.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	294.251.450, 00	188.578.750, 00	(105.672.70 0,00)	0,64
	5.04.02.2.0 2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			-	-
11 95	5.04.02.2.0 2.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	276.335.450, 00	223.865.750, 00	(52.469.700 ,00)	0,81

11 96	5.04.02.2.0 2.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	268.864.250, 00	184.462.000, 00	(84.402.250 ,00)	0,69
		Inspektorat	11.279.151.7 99,00	11.055.502.7 58,00	(223.649.04 1,00)	0,98
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			-	-
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH			-	-
	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	6.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-
11 97	6.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.968.500,00	8.968.500,00	-	1,00
11 98	6.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.965.750,0 0	104.063.750, 00	43.098.000, 00	1,71
	6.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-
11 99	6.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.943.797.11 9,00	7.939.984.20 4,00	(3.812.915, 00)	1,00

12 00	6.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	118.560.000, 00	159.516.000, 00	40.956.000, 00	1,35
	6.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-
12 01	6.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	55.000.000,0 0	55.000.000,0 0	-	1,00
12 02	6.01.01.2.0 5.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	577.763.000, 00	0,00	(577.763.00 0,00)	-
12 03	6.01.01.2.0 5.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40.025.000,0 0	33.254.500,0 0	(6.770.500, 00)	0,83
	6.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-
12 04	6.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.973.000,00	3.973.000,00	-	1,00
12 05	6.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.414.000,0 0	135.866.000, 00	112.452.000 ,00	5,80
12 06	6.01.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	104.946.700, 00	207.366.540, 00	102.419.840 ,00	1,98
12 07	6.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.923.750,0 0	69.923.750,0 0	-	1,00
12 08	6.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.470.000,0 0	23.915.000,0 0	13.445.000, 00	2,28
12 09	6.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.746.900,00	4.165.000,00	(3.581.900, 00)	0,54
12 10	6.01.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.436.250,0 0	10.436.250,0 0	-	1,00
12 11	6.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	266.846.000, 00	133.411.000, 00	(133.435.00 0,00)	0,50
	6.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-
12 12	6.01.01.2.0 7.0005	Pengad aan Mebel	52.251.000,0 0	318.073.000, 00	265.822.000 ,00	6,09
12 13	6.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	166.281.000, 00	459.040.004, 00	292.759.004 ,00	2,76

	6.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
12 14	6.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.899.080,00	87.040.760,00	(22.858.320,00)	0,79
	6.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
12 15	6.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.950.000,00	39.190.000,00	(3.760.000,00)	0,91
12 16	6.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	268.080.000,00	236.400.000,00	(31.680.000,00)	0,88
12 17	6.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.010.000,00	18.010.000,00	-	1,00
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			-	-
	6.01.02.2.0 1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			-	-
12 18	6.01.02.2.0 1.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	125.930.000,00	131.162.500,00	5.232.500,00	1,04
12 19	6.01.02.2.0 1.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	534.558.000,00	377.657.000,00	(156.901.000,00)	0,71
12 20	6.01.02.2.0 1.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	28.979.000,00	41.216.250,00	12.237.250,00	1,42
	6.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			-	-
12 21	6.01.02.2.0 2.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	22.152.000,00	26.982.000,00	4.830.000,00	1,22
12 22	6.01.02.2.0 2.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	132.312.500,00	132.312.500,00	-	1,00

	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			-	-
	6.01.03.2.0 2	Pendampingan dan Asistensi			-	-
12 23	6.01.03.2.0 2.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	50.372.500,0 0	50.372.500,0 0	-	1,00
12 24	6.01.03.2.0 2.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	424.540.750, 00	248.202.750, 00	(176.338.00 0,00)	0,58
		Kecamatan Payakumbuh Barat	17.362.801.7 33,00	18.081.277.7 10,00	718.475.977 ,00	1,04
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-
12 25	7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.999.750,0 0	39.340.000,0 0	13.340.250, 00	1,51
12 26	7.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.100.000,0 0	107.680.000, 00	32.580.000, 00	1,43
	7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-
12 27	7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.806.101.1 83,00	10.374.425.5 02,00	(431.675.68 1,00)	0,96
12 28	7.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	483.120.000, 00	733.896.000, 00	250.776.000 ,00	1,52
	7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-

12 29	7.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	85.000.000,0 0	79.000.000,0 0	(6.000.000, 00)	0,93
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-
12 30	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.991.000,0 0	11.991.000,0 0	-	1,00
12 31	7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	185.000.050, 00	169.641.800, 00	(15.358.250 ,00)	0,92
12 32	7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.000.000,0 0	15.184.650,0 0	(3.815.350, 00)	0,80
12 33	7.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.700,00	4.200.700,00	-	1,00
12 34	7.01.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.632.000,00	5.632.000,00	-	1,00
12 35	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.124.000,0 0	55.859.000,0 0	(31.265.000 ,00)	0,64
	7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
12 36	7.01.01.2.0 7.0005	Pengad aan Mebel	0,00	68.530.000,0 0	68.530.000, 00	-
12 37	7.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.967.000,0 0	187.331.900, 00	139.364.900 ,00	3,91
12 38	7.01.01.2.0 7.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	184.444.250, 00	113.717.650, 00	(70.726.600 ,00)	0,62
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
12 39	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.316.000,0 0	94.316.536,0 0	536,00	1,00
12 40	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	918.228.960, 00	1.123.852.56 0,00	205.623.600 ,00	1,22
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-

12 41	7.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	282.500.000,00	282.500.000,00	-	1,00
12 42	7.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.870.000,00	46.870.000,00	-	1,00
12 43	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	138.430.000,00	88.430.000,00	2,77
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			-	-
	7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			-	-
12 44	7.01.02.2.0 1.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	34.999.750,00	34.999.750,00	-	1,00
	7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			-	-
12 45	7.01.02.2.0 2.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.275.250,00	5.275.250,00	-	1,00
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
12 46	7.01.03.2.0 2.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	208.499.900,00	161.154.900,00	(47.345.000,00)	0,77

		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			-	-
1247	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	144.923.400,00	101.550.150,00	(43.373.250,00)	0,70
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			-	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			-	-
1248	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.433.250,00	12.433.250,00	-	1,00
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			-	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			-	-
1249	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	119.207.250,00	131.691.750,00	12.484.500,00	1,10
1250	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24.858.000,00	24.858.000,00	-	1,00
		Kelurahan Bulakan Balai Kandi			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-

	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
12 51	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	89.930.720,0 0	148.110.100, 00	58.179.380, 00	1,65
12 52	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	110.069.050, 00	76.756.900,0 0	(33.312.150 ,00)	0,70
		Kelurahan Ibuh			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
12 53	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	102.285.510, 00	153.756.510, 00	51.471.000, 00	1,50
12 54	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	97.714.200,0 0	71.686.300,0 0	(26.027.900 ,00)	0,73
		Kelurahan Koto Tengah			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
12 55	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	122.957.510, 00	222.801.090, 00	99.843.580, 00	1,81
12 56	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	77.042.500,0 0	47.912.500,0 0	(29.130.000 ,00)	0,62
		Kelurahan Kubu Gadang			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-

	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
12 57	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	133.028.610, 00	194.328.610, 00	61.300.000, 00	1,46
12 58	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	66.971.150,0 0	31.114.400,0 0	(35.856.750 ,00)	0,46
		Kelurahan Labuah Basilang			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
12 59	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	69.987.360,0 0	148.704.360, 00	78.717.000, 00	2,12
12 60	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	129.999.800, 00	76.226.950,0 0	(53.772.850 ,00)	0,59
		Kelurahan Subarang Batuang			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
12 61	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	134.956.660, 00	175.309.660, 00	40.353.000, 00	1,30
12 62	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	65.043.300,0 0	50.564.600,0 0	(14.478.700 ,00)	0,78
		Kelurahan Nunang Daya Bangun			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-

	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
12 63	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	70.018.000,0 0	182.709.340, 00	112.691.340 ,00	2,61
12 64	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	129.999.800, 00	82.331.750,0 0	(47.668.050 ,00)	0,63
		Kelurahan Padangdata Tanahmati			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
12 65	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	137.597.510, 00	179.929.510, 00	42.332.000, 00	1,31
12 66	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	62.402.450,0 0	44.937.400,0 0	(17.465.050 ,00)	0,72
		Kelurahan Padang Tinggi Piliang			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
12 67	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	69.999.080,0 0	145.026.080, 00	75.027.000, 00	2,07
12 68	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	130.000.700, 00	80.417.150,0 0	(49.583.550 ,00)	0,62

		Kelurahan Padangtengah Balainanduo			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
12 69	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	113.138.510, 00	191.478.510, 00	78.340.000, 00	1,69
12 70	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	86.861.200,0 0	33.990.500,0 0	(52.870.700 ,00)	0,39
		Kelurahan Pakan Sinayan			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
12 71	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	78.533.000,0 0	141.751.990, 00	63.218.990, 00	1,80
12 72	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	121.466.950, 00	83.122.950,0 0	(38.344.000 ,00)	0,68
		Kelurahan Parak Batuang			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
12 73	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	78.401.360,0 0	170.807.860, 00	92.406.500, 00	2,18

12 74	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	121.598.600, 00	54.058.800,0 0	(67.539.800 ,00)	0,44
		Kelurahan Parit Rantang			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
12 75	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	109.132.720, 00	143.225.220, 00	34.092.500, 00	1,31
12 76	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	90.687.850,0 0	82.920.700,0 0	(7.767.150, 00)	0,91
		Kelurahan Payolansek			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
12 77	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	106.285.510, 00	218.215.542, 00	111.930.032 ,00	2,05
12 78	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	93.639.900,0 0	49.282.900,0 0	(44.357.000 ,00)	0,53
		Kelurahan Talang			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
12 79	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	112.191.360, 00	161.112.360, 00	48.921.000, 00	1,44

12 80	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	87.808.500,0 0	63.754.500,0 0	(24.054.000 ,00)	0,73
		Kelurahan Tanjung Pauh			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
12 81	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	85.670.360,0 0	119.934.360,0 00	34.264.000,00	1,40
12 82	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	114.329.600,0 00	105.508.450,0 00	(8.821.150,00)	0,92
		Kelurahan Tanjunggodang Sungaipinago			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
12 83	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	85.710.360,0 0	169.028.360,0 00	83.318.000,00	1,97
12 84	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	114.550.350,0 00	56.099.150,0 0	(58.451.200,00)	0,49
		Kecamatan Payakumbuh Timur	11.293.524.2 30,00	12.272.480.9 65,00	978.956.735 ,00	1,09
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan			-	-

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1285	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.711.100,00	26.853.100,00	6.142.000,00	1,30
1286	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.679.700,00	44.934.550,00	15.254.850,00	1,51
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-
1287	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.072.788.956,00	6.948.002.960,00	(124.785.996,00)	0,98
1288	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	286.032.000,00	398.786.000,00	112.754.000,00	1,39
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-
1289	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60.000.000,00	55.000.000,00	(5.000.000,00)	0,92
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-
1290	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.252.000,00	1.252.000,00	-	1,00
1291	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.055.000,00	32.545.350,00	(1.509.650,00)	0,96
1292	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.338.600,00	9.675.300,00	4.336.700,00	1,81
1293	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.615.900,00	1.615.900,00	-	1,00
1294	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.727.000,00	10.654.000,00	(50.073.000,00)	0,18
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-
1295	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	62.598.000,00	62.598.000,00	-
1296	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	671.988.000,00	671.988.000,00	-	1,00

	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
12 97	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.581.076,0 0	74.581.076,0 0	-	1,00
12 98	7.01.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	242.000,00	242.000,00	-	1,00
12 99	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	592.911.480,00	568.857.770,00	(24.053.710,00)	0,96
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
13 00	7.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	179.100.000,00	189.440.000,00	10.340.000,00	1,06
13 01	7.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.970.360,00	19.394.360,00	9.424.000,00	1,95
13 02	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.667.408,00	252.962.328,00	217.294.920,00	7,09
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			-	-
	7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			-	-
13 03	7.01.02.2.0 1.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	39.939.500,00	32.714.500,00	(7.225.000,00)	0,82
	7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			-	-

13 04	7.01.02.2.0 2.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.712.750,0 0	13.712.750,0 0	-	1,00
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
13 05	7.01.03.2.0 2.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	76.858.700,0 0	76.348.700,0 0	(510.000,00)	0,99
	7.01.03.2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			-	-
13 06	7.01.03.2.0 3.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	120.479.850, 00	116.144.850, 00	(4.335.000, 00)	0,96
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			-	-
	7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			-	-
13 07	7.01.04.2.0 1.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19.530.600,0 0	15.705.600,0 0	(3.825.000, 00)	0,80
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			-	-
	7.01.05.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			-	-

13 08	7.01.05.2.0 1.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	79.299.750,0 0	106.257.250, 00	26.957.500, 00	1,34
13 09	7.01.05.2.0 1.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.042.500,00	7.042.500,00	-	1,00
		Kelurahan Balai Jariang			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
13 10	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	81.421.000,0 0	150.335.680, 00	68.914.680, 00	1,85
13 11	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	118.579.000, 00	131.389.850, 00	12.810.850, 00	1,11
		Kelurahan Koto Baru			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
13 12	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	51.666.000,0 0	133.949.000, 00	82.283.000, 00	2,59
13 13	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	148.334.000, 00	147.776.450, 00	(557.550,00)	1,00
		Kelurahan Koto Panjang			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-

	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
13 14	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	81.252.040,0 0	150.249.010, 00	68.996.970, 00	1,85
13 15	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	118.747.960, 00	131.476.510, 00	12.728.550, 00	1,11
		Kelurahan Padang Alai Bodi			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
13 16	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	79.533.720,0 0	148.530.695, 00	68.996.975, 00	1,87
13 17	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120.466.280, 00	133.194.835, 00	12.728.555, 00	1,11
		Kelurahan Padang Tengah Payobadar			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
13 18	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	75.985.360,0 0	150.848.335, 00	74.862.975, 00	1,99
13 19	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	124.014.640, 00	130.877.195, 00	6.862.555,0 0	1,06
		Kelurahan Padang Tiakar			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-

	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
13 20	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	97.919.930,0 0	166.916.905, 00	68.996.975, 00	1,70
13 21	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	102.080.070, 00	114.451.170, 00	12.371.100, 00	1,12
		Kelurahan Payobasung			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
13 22	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	91.538.360,0 0	151.544.835, 00	60.006.475, 00	1,66
13 23	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	108.461.640, 00	130.180.695, 00	21.719.055, 00	1,20
		Kelurahan Sicincin			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
13 24	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	81.610.720,0 0	150.607.695, 00	68.996.975, 00	1,85
13 25	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	118.389.280, 00	131.117.835, 00	12.728.555, 00	1,11
		Kelurahan Tiakar			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-

	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
13 26	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	57.210.269,0 0	126.207.101, 00	68.996.832, 00	2,21
13 27	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	142.789.731, 00	155.518.325, 00	12.728.594, 00	1,09
		Kecamatan Payakumbuh Utara	10.880.510.6 91,00	11.182.554.4 13,00	302.043.722 ,00	1,03
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-
13 28	7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.935.300,00	15.056.250,0 0	8.120.950,0 0	2,17
13 29	7.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.329.800,00	13.292.250,0 0	6.962.450,0 0	2,10
	7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-
13 30	7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.281.376.69 3,00	7.186.166.69 9,00	(95.209.994 ,00)	0,99
13 31	7.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	296.256.000, 00	391.466.000, 00	95.210.000, 00	1,32
	7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-
13 32	7.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	53.000.000,0 0	53.000.000,0 0	-	1,00
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-

13 33	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	723.000,00	1.761.000,00	1.038.000,0 0	2,44
13 34	7.01.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	21.667.500,0 0	21.667.500, 00	-
13 35	7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.318.000,00	43.608.680,0 0	38.290.680, 00	8,20
13 36	7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.744.500,00	8.385.000,00	5.640.500,0 0	3,06
13 37	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.384.000, 00	49.837.000,0 0	(51.547.000 ,00)	0,49
	7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-
13 38	7.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.850,00	58.967.000,0 0	58.886.150, 00	729,3 4
13 39	7.01.01.2.0 7.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	-	-
13 40	7.01.01.2.0 7.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	-	-
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
13 41	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.522.638,0 0	91.522.638,0 0	-	1,00
13 42	7.01.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.225.000,00	1.225.000,00	-	1,00
13 43	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	721.805.280, 00	758.598.226, 00	36.792.946, 00	1,05
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
13 44	7.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	229.940.000, 00	170.300.000, 00	(59.640.000 ,00)	0,74

13 45	7.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.030.000,00	9.540.000,00	7.510.000,0 0	4,70
13 46	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	-	-
13 47	7.01.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	-	-
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			-	-
	7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			-	-
13 48	7.01.02.2.0 1.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	36.547.850,0 0	29.247.850,0 0	(7.300.000, 00)	0,80
	7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			-	-
13 49	7.01.02.2.0 2.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.572.000,00	4.572.000,00	3.000.000,0 0	2,91
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
13 50	7.01.03.2.0 2.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	111.684.750, 00	83.974.750,0 0	(27.710.000 ,00)	0,75

		Pembangunan di Kelurahan				
	7.01.03.2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			-	-
13 51	7.01.03.2.0 3.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	48.882.850,0 0	43.102.850,0 0	(5.780.000,00)	0,88
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			-	-
	7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			-	-
13 52	7.01.04.2.0 1.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.270.000,00	21.030.000,0 0	17.760.000,00	6,43
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			-	-
	7.01.05.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			-	-
13 53	7.01.05.2.0 1.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	74.257.950,0 0	100.479.700,00	26.221.750,00	1,35
13 54	7.01.05.2.0 1.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.624.000,00	3.624.000,00	-	1,00
		Kelurahan Balai Tongah Koto			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN			-	-

		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
13 55	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	68.801.360,0 0	122.342.510, 00	53.541.150, 00	1,78
13 56	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	131.198.350, 00	131.198.150, 00	(200,00)	1,00
		Kelurahan Ikua Koto Dibalai			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
13 57	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	52.619.860,0 0	56.009.860,0 0	3.390.000,0 0	1,06
13 58	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	147.380.050, 00	147.379.900, 00	(150,00)	1,00
		Kelurahan Kapalo Koto Dibalai			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
13 59	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	47.308.360,0 0	106.849.510, 00	59.541.150, 00	2,26
13 60	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	152.692.450, 00	152.692.450, 00	-	1,00
		Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapakrajo			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-

	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
13 61	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	41.304.360,0 0	100.845.510, 00	59.541.150, 00	2,44
13 62	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	158.695.300, 00	158.695.000, 00	(300,00)	1,00
		Kelurahan Napar			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
13 63	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	79.150.360,0 0	122.012.000, 00	42.861.640, 00	1,54
13 64	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120.849.650, 00	98.545.000,0 0	(22.304.650 ,00)	0,82
		Kelurahan Ompang Tanah Sirah			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
13 65	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	37.667.360,0 0	86.900.860,0 0	49.233.500, 00	2,31
13 66	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	162.332.450, 00	116.489.000, 00	(45.843.450 ,00)	0,72
		Kelurahan Tigo Koto Diate			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-

	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
13 67	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	38.429.000,0 0	75.624.000,0 0	37.195.000, 00	1,97
13 68	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	161.571.050, 00	133.766.100, 00	(27.804.950 ,00)	0,83
		Kelurahan Tigo Koto Dibaruah			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
13 69	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	98.355.220,0 0	90.421.220,0 0	(7.934.000, 00)	0,92
13 70	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	101.644.750, 00	112.968.650, 00	11.323.900, 00	1,11
		Kelurahan Taratak Padang Kampuang			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
13 71	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	32.649.000,0 0	42.039.000,0 0	9.390.000,0 0	1,29
13 72	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	167.351.300, 00	167.351.300, 00	-	1,00
		Kecamatan Payakumbuh Selatan	7.741.166.17 1,00	8.119.121.95 1,00	377.955.780 ,00	1,05

	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-
13 73	7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.774.500,00	5.007.000,00	2.232.500,0 0	1,80
13 74	7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	499.700,00	499.700,00	-	1,00
13 75	7.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.725.300,0 0	14.493.500,0 0	2.768.200,0 0	1,24
	7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-
13 76	7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.150.222.80 9,00	4.914.377.64 9,00	(235.845.16 0,00)	0,95
13 77	7.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	233.116.000, 00	303.156.000, 00	70.040.000, 00	1,30
13 78	7.01.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	799.000,00	799.000,00	-	1,00
	7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-
13 79	7.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	39.100.000,0 0	37.000.000,0 0	(2.100.000, 00)	0,95
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-
13 80	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.911.000,00	5.911.000,00	-	1,00
13 81	7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.179.000,0 0	41.479.000,0 0	300.000,00	1,01

13 82	7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.445.200,00	6.919.400,00	1.474.200,00	1,27
13 83	7.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.856.000,00	2.856.000,00	-	1,00
13 84	7.01.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	637.800,00	637.800,00	-
13 85	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.929.000,00	58.680.000,00	(5.249.000,00)	0,92
	7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-
13 86	7.01.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	0,00	64.645.000,00	64.645.000,00	-
13 87	7.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.841.000,00	181.145.340,00	159.304.340,00	8,29
13 88	7.01.01.2.0 7.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	172.523.800,00	151.973.800,00	(20.550.000,00)	0,88
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
13 89	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.809.082,00	38.327.752,00	(15.481.330,00)	0,71
13 90	7.01.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	345.000,00	345.000,00	-	1,00
13 91	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	433.608.120,00	504.711.020,00	71.102.900,00	1,16
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
13 92	7.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	148.080.000,00	139.500.000,00	(8.580.000,00)	0,94
13 93	7.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.000.000,00	11.000.000,00	-	1,00
13 94	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	215.217.930,00	215.217.930,00	-

	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			-	-
	7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			-	-
13 95	7.01.02.2.0 1.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16.749.950,0 0	16.749.950,0 0	-	1,00
	7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			-	-
13 96	7.01.02.2.0 2.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.384.850,00	2.384.850,00	-	1,00
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
13 97	7.01.03.2.0 2.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	51.292.600,0 0	50.357.600,0 0	(935.000,00)	0,98
	7.01.03.2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			-	-
13 98	7.01.03.2.0 3.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	11.885.650,0 0	18.570.150,0 0	6.684.500,0 0	1,56
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			-	-

	7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			-	-
13 99	7.01.04.2.0 1.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.619.900,00	3.599.900,00	(1.020.000,00)	0,78
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			-	-
	7.01.05.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			-	-
14 00	7.01.05.2.0 1.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	55.216.650,00	78.216.550,00	22.999.900,00	1,42
14 01	7.01.05.2.0 1.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	251.800,00	251.800,00	-	1,00
		Kelurahan Balai Panjang			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
14 02	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	60.284.000,00	76.704.500,00	16.420.500,00	1,27
14 03	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	139.716.000,00	131.596.550,00	(8.119.450,00)	0,94
		Kelurahan Koto Tuo Limo Kampung			-	-

	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
14 04	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	58.276.860,00	103.378.860,00	45.102.000,00	1,77
14 05	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	141.722.900,00	104.949.600,00	(36.773.300,00)	0,74
		Kelurahan Limbukan			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
14 06	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	116.524.150,00	121.436.000,00	4.911.850,00	1,04
14 07	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	83.475.800,00	86.897.150,00	3.421.350,00	1,04
		Kelurahan Padang Karambia			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
14 08	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	93.312.000,00	103.044.500,00	9.732.500,00	1,10
14 09	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	106.687.850,00	105.624.500,00	(1.063.350,00)	0,99
		Kelurahan Sawah Padang Aur Kuning			-	-

	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
14 10	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	107.858.500,00	107.852.000,00	(6.500,00)	1,00
14 11	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	92.141.300,00	100.475.750,00	8.334.450,00	1,09
		Kelurahan Kapalo Koto Ampangan			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
14 12	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	77.572.000,00	103.190.000,00	25.618.000,00	1,33
14 13	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	122.428.900,00	105.159.850,00	(17.269.050,00)	0,86
		Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	7.549.702.527,00	7.734.262.146,00	184.559.619,00	1,02
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-
14 14	7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.334.500,00	15.413.000,00	(921.500,00)	0,94

14 15	7.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.594.300,0 0	61.045.250,0 0	(549.050,00)	0,99
	7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-
14 16	7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.989.011.91 9,00	4.779.669.11 0,00	(209.342.80 9,00)	0,96
14 17	7.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	225.226.000, 00	289.596.000, 00	64.370.000, 00	1,29
	7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-
14 18	7.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	44.070.000,0 0	39.000.000,0 0	(5.070.000, 00)	0,88
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-
14 19	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.904.000,00	7.904.000,00	-	1,00
14 20	7.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	95.034.000,0 0	95.034.000, 00	-
14 21	7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.091.000,0 0	42.139.000,0 0	(1.952.000, 00)	0,96
14 22	7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.928.850,0 0	8.643.500,00	(2.285.350, 00)	0,79
14 23	7.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	70.000,00	0,00	(70.000,00)	-
14 24	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.260.000,0 0	22.433.000,0 0	(42.827.000 ,00)	0,34
	7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-
14 25	7.01.01.2.0 7.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	850.000,00	850.000,00	-
14 26	7.01.01.2.0 7.0005	Pengad aan Mebel	0,00	22.109.000,0 0	22.109.000, 00	-
14 27	7.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.000,00	74.063.000,0 0	73.947.000, 00	638,4 7

14 28	7.01.01.2.0 7.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	175.115.300,00	189.899.300,00	14.784.000,00	1,08
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
14 29	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.944.000,00	28.657.000,00	(2.287.000,00)	0,93
14 30	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	360.902.640,00	411.789.866,00	50.887.226,00	1,14
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
14 31	7.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125.330.000,00	125.990.000,00	660.000,00	1,01
14 32	7.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.750.000,00	11.770.000,00	(3.980.000,00)	0,75
14 33	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.872.448,00	21.454.080,00	8.581.632,00	1,67
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			-	-
	7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			-	-
14 34	7.01.02.2.0 1.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.091.450,00	25.091.450,00	-	1,00
	7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat			-	-

		Daerah yang Ada di Kecamatan				
14 35	7.01.02.2.0 2.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.571.400,00	3.571.400,00	-	1,00
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
14 36	7.01.03.2.0 2.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	47.795.300,0 0	46.010.300,0 0	(1.785.000,00)	0,96
	7.01.03.2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			-	-
14 37	7.01.03.2.0 3.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	38.287.000,0 0	45.790.000,0 0	7.503.000,0 0	1,20
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			-	-
	7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			-	-
14 38	7.01.04.2.0 1.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.928.350,0 0	9.228.350,00	(1.700.000,00)	0,84
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			-	-
	7.01.05.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai			-	-

		Penugasan Kepala Daerah				
14 39	7.01.05.2.0 1.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	35.560.450,0 0	49.610.150,0 0	14.049.700,00	1,40
14 40	7.01.05.2.0 1.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.249.650,00	3.249.650,00	-	1,00
		Kelurahan Koto Panjang Dalam			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
14 41	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	87.599.510,0 0	106.787.510,00	19.188.000,00	1,22
14 42	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	112.400.500,00	112.400.500,00	-	1,00
		Kelurahan Koto Panjang Padang			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
14 43	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	62.463.360,0 0	107.018.360,00	44.555.000,00	1,71
14 44	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	137.234.280,00	109.570.150,00	(27.664.130,00)	0,80
		Kelurahan Padang Sikabu			-	-

	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
14 45	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	87.769.550,00	104.049.150,00	16.279.600,00	1,19
14 46	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	112.230.400,00	112.259.650,00	29.250,00	1,00
		Kelurahan Parambahan			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
14 47	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	69.596.360,00	115.444.360,00	45.848.000,00	1,66
14 48	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	130.403.900,00	101.542.900,00	(28.861.000,00)	0,78
		Kelurahan Sungai Durian			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
14 49	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	93.131.360,00	110.016.360,00	16.885.000,00	1,18
14 50	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	106.868.400,00	106.868.150,00	(250,00)	1,00

		Kelurahan Parik Muko Aia			-	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	-
	7.01	KECAMATAN			-	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	-
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	-
14 51	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	60.236.400,0 0	78.531.000,0 0	18.294.600,00	1,30
14 52	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	139.763.950,00	139.763.650,00	(300,00)	1,00
		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	4.329.793.33 8,00	4.131.791.53 8,00	(198.001.80 0,00)	0,95
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			-	-
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			-	-
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-
	8.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-
14 53	8.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.338.000,00	14.375.350,0 0	6.037.350,0 0	1,72
14 54	8.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.030.350,0 0	47.632.850,0 0	22.602.500,00	1,90
	8.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-
14 55	8.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.425.902.86 5,00	1.114.886.75 1,00	(311.016.11 4,00)	0,78
14 56	8.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	90.716.500,0 0	101.872.500,00	11.156.000,00	1,12

	8.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-
14 57	8.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	13.000.000,0 0	13.000.000,0 0	-	1,00
	8.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-
14 58	8.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.344.000,00	3.344.000,00	-	1,00
14 59	8.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.520.000,0 0	69.126.000,0 0	48.606.000, 00	3,37
14 60	8.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.072.000,0 0	23.952.000,0 0	6.880.000,0 0	1,40
14 61	8.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.746.900,00	8.746.900,00	-	1,00
14 62	8.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.895.250,00	5.966.400,00	2.071.150,0 0	1,53
14 63	8.01.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.182.750,00	3.622.500,00	(5.560.250, 00)	0,39
14 64	8.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.390.000, 00	96.742.000,0 0	(55.648.000 ,00)	0,63
	8.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-
14 65	8.01.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	4.799.000,00	7.565.000,00	2.766.000,0 0	1,58
	8.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
14 66	8.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.199.020,0 0	24.384.468,0 0	3.185.448,0 0	1,15
14 67	8.01.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.370.000,00	4.590.000,00	1.220.000,0 0	1,36
14 68	8.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.778.760,0 0	25.648.776,0 0	(129.984,00)	0,99
	8.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-

14 69	8.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.440.000,0 0	24.000.000,0 0	(13.440.000 ,00)	0,64
14 70	8.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.360.000,0 0	30.800.000,0 0	(10.560.000 ,00)	0,74
14 71	8.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.480,0 0	15.000.480,0 0	-	1,00
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			-	-
	8.01.02.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			-	-
14 72	8.01.02.2.0 1.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	244.146.750, 00	116.315.050, 00	(127.831.70 0,00)	0,48
14 73	8.01.02.2.0 1.0008	Pembentukan Paskibraka	525.983.100, 00	723.700.550, 00	197.717.450 ,00	1,38
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			-	-

	8.01.03.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			-	-
14 74	8.01.03.2.0 1.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	865.877.763,00	810.756.413,00	(55.121.350,00)	0,94
14 75	8.01.03.2.0 1.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	58.115.500,00	64.617.500,00	6.502.000,00	1,11
14 76	8.01.03.2.0 1.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	6.856.200,00	6.856.200,00	-	1,00

		Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			-	-
	8.01.04.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			-	-
14 77	8.01.04.2.0 1.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100.933.850, 00	119.924.100, 00	18.990.250, 00	1,19
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			-	-
	8.01.05.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			-	-
14 78	8.01.05.2.0 1.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	209.098.650, 00	225.995.650, 00	16.897.000, 00	1,08

		Kepercayaan di Daerah				
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			-	-
	8.01.06.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			-	-
14 79	8.01.06.2.0 1.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	213.221.100, 00	256.368.600, 00	43.147.500, 00	1,20
14 80	8.01.06.2.0 1.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	41.831.550,0 0	53.249.050,0 0	11.417.500, 00	1,27
14 81	8.01.06.2.0 1.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	136.643.000, 00	118.752.450, 00	(17.890.550 ,00)	0,87

JUMLAH	828.661.781. 131,00	851.009.111. 090,00	22.347.329. 959,00	1,03

BAB III

Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Payakumbuh
Tahun 2025

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. URUSAN PENDIDIKAN

Urusan Pendidikan diselenggarakan oleh **Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh** melalui 4 (empat) kebijakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 200.001.532.531,- dan terealisasi sebesar Rp 184.886.944.741,- atau 92,44%, dengan Capaian Kinerja Program dan Capaian Kinerja Keluaran sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
1	Pemantapan Pengelolaan keuangan Daerah, Termasuk Pendapatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	88,50%	87,28%	99,00%
			Penilaian AKIP oleh Inspektorat	80	70,50*	88,00
2	Pemanfaatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)					
3	Optimalisasi pemenuhan 8 standar pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	100%	96,41%	96,41%
			Persentase anak usia 13-15 tahun	100%	80,88%	80,88%

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
			yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS)			
			Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS)	74,55%	80,09%	107,43%
			Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (APS)	98%	95%	96,94%
			Persentase SD/SMP Terakreditasi A	75,26%	72,82%	96,76%
			Persentase PAUD Terakreditasi B	76,50%	72,46%	94,72%
			Persentase Dikmas Terakreditasi B	60%	66,67%	111,12%
			APK PAUD	69%	82,91%	120,16%
			APK SD/MI/Paket A	115%	114%	99,13%
			APK SMP/MTs/Paket B	98%	135%	138%
			APM SD/MI/Paket A	100%	103%	103%
			APM SMP/MTs/Paket B	84%	113%	134,52%
4	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengawasan pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	100%	100%	100%
		Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	- Persentase Guru yang Memiliki	58%	77,01%	132,78%
				81%	85%	104,94%

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
			Sertifikat Pendidik - Indeks Pemerataan Guru			

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian Kinerja Keluaran masing-masing sub kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada table dibawah ini:

c. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam PK

Urusan Pendidikan dilaksanakan melalui 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 75 (tujuh puluh lima) Sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja yaitu:

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target kinerja 88,50% dan realisasi 87,28% dengan capaian kinerja 99,00%
- Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat dengan target kinerja 80% dan realisasi 70,50 dengan capaian kinerja 88,00

Pelaksanaan program ini didukung oleh 8 (delapan) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp221.863.450,- dan terealisasi sebesar Rp148.953.089,- atau 67,14% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, berupa Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Renja Perubahan, Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja, Penyusunan Program/Kegiatan Dinas Pendidikan dan Literasi/Inovasi Pendidikan
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, berupa Penyusunan Laporan akhir Tahun, LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Profil Pendidikan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp148.972.749.426,- dan terealisasi sebesar Rp136.675.638.383,- atau 91,75% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, berupa penyediaan Gaji dan Tunjangan 1.460 ASN (PNS dan PPK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, berupa penyediaan honorarium Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp33.275.000,- dan terealisasi sebesar Rp33.124.500,- atau 99,5567,14% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, berupa Penyusunan Laporan Aset Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dan PAUD, SD, SMP Negeri se Kota Payakumbuh.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp68.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp64.599.592,- atau 95,00% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, berupa Pengadaan 68 paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp575.878.500,- dan terealisasi sebesar Rp551.954.458,- atau 95,85% melalui 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, berupa penyediaan 15 paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, berupa penyediaan 16 paket peralatan dan perlengkapan kantor berupa Laptop, Printer dan SSD untuk Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, berupa penyediaan 2 paket peralatan rumah tangga yang terdiri dari Lemari Arsip, Lemari Kaca dan Kulkas untuk Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, berupa Penyediaan 94 paket Alat Tulis Kantor dan alat kebersihan pada kantor Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, berupa penyediaan 35 paket barang cetak, penggandaan dan penjilidan pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, berupa penyediaan 3 jenis surat kabar yaitu 1 surat kabar nasional dan 2 surat kabar lokal untuk Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dan Sanggar Kegiatan Belajar Kota Payakumbuh
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, berupa penyediaan biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh baik dalam maupun luar Provinsi Sumatera Barat.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp155.326.400,- dan terealisasi sebesar Rp138.005.480,- atau 88,85% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Mebel, berupa pengadaan 7 unit mebel yang terdiri dari Back drop, Kursi Kerja, Kursi Tamu, Kursi tunggu, Meja pelayanan, dan Meja Rapat pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, berupa pengadaan 6 unit Air Conditioner pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp582.160.060,- dan terealisasi sebesar Rp493.542.051,- atau 84,78% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, berupa penyediaan jasa telekomunikasi/internet, air dan listrik untuk Dinas Pendidikan, SKB Kota Payakumbuh dan 3 TK Negeri Pembina dan PAUD Percontohan.
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, berupa pembayaran gaji Tenaga Harian Lepas (THL) yang ditugaskan pada SKB Kota Payakumbuh, Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, PAUD Percontohan, Outsourcing Kebersihan dan Outsourcing sopir.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar **Rp582.160.060,-** dan terealisasi sebesar **Rp493.542.051,-** atau 84,78% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, berupa pembayaran pajak, servis dan BBM kendaraan dinas/jabatan pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, berupa penyediaan pembayaran pajak, servis dan BBM 20 unit kendaraan dinas/jabatan
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, berupa jasa pemeliharaan 65 unit AC dan komputer unit/jaringan pada Dinas Pendidikan dan SKB Kota Payakumbuh

II. Program Pengelolaan Pendidikan

Program Pengelolaan Pendidikan dengan indikator kinerja yaitu:

- Persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS) dengan target 100% realisasi 96,41% dengan capaian kinerja 96,41%
- Persentase anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) dengan target 100% realisasi 80,88% dengan capaian kinerja 80,88%
- Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) dengan target 74,55 % realisasi 80,09% dengan capaian kinerja 107,43%
- Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (APS) dengan target 98% realisasi 95% dengan capaian kinerja 96,94%
- Persentase SD/SMP Terakreditasi A dengan target kinerja 75,26% dan realisasi 72,82% dengan capaian kinerja 96,76%.
- Persentase PAUD Terakreditasi B dengan target kinerja 76,50% dan realisasi 72,46% dengan capaian kinerja 94,72%.
- Persentase Dikmas Terakreditasi B dengan target kinerja 60% dan realisasi 66,67% dengan capaian kinerja 111,12%.
- APK PAUD dengan target kinerja 69% dan realisasi 82,91% dengan capaian kinerja 120,16%,
- APK SD/MI/Paket A dengan target kinerja 115% dan realisasi 114% dengan capaian kinerja 99,13%,
- APK SMP/MTs/Paket B dengan target kinerja 98% dan realisasi 135% dengan capaian kinerja 138%,
- APM SD/MI/Paket A dengan target kinerja 100% dan realisasi 103% dengan capaian kinerja 103%.
- APM SMP/MTs/Paket B dengan target kinerja 84% dan realisasi 113% dengan capaian kinerja 134,52%.

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp23.100.041.863,- dan terealisasi sebesar Rp 21.794.994.522,- atau 94,35% melalui 21 (dua puluh satu) sub kegiatan yaitu

- 1) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah, berupa Pembangunan 1 ruang Unit Kesehatan Sekolah untuk SD Negeri 64 Kota Payakumbuh.

- 2) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, berupa Pemasangan Paving Blok SDN 18 Payakumbuh dan Pembangunan Gerbang SDN 35 Payakumbuh.
- 3) Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, berupa Rehab Seding Ruang Kepala Sekolah dan Ruang Guru SDN 59 Payakumbuh, Rehab Seding Ruang Guru SDN 57 Payakumbuh, Rehab Seding Ruang Guru SDN 31 Payakumbuh dan Rehab Seding Ruang Guru SDN 41 Payakumbuh.
- 4) Rehabilitasi Seding/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah, berupa rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah pada SDN 22 Payakumbuh.
- 5) Rehabilitasi Seding/Berat Ruang Unit Perpustakaan Sekolah, berupa Rehab Ruang Perpustakaan SDN 22 Payakumbuh dan Rehab Ruang Perpustakaan SDN 50 Payakumbuh
- 6) Pengadaan Mebel Sekolah, berupa pengadaan mebel sekolah untuk SDN 57 Payakumbuh, SDN 55 Payakumbuh, SDN 44 Payakumbuh, SDN 41 Payakumbuh, SDN 64 Payakumbuh, SDN 58 Payakumbuh dan SDN 39 Payakumbuh
- 7) Pengadaan Perlengkapan Sekolah, kegiatan ini direncanakan untuk pengadaan Alat Musik SD N 38 Kota Payakumbuh.
- 8) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, berupa pelaksanaan kegiatan minat bakat dan kreatifitas siswa dari tingkat kota sampai nasional dengan cabang lomba yaitu Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Kompetensi Olimpiade Siswa Nasional (KOSN) dan Pelaksanaan HUT Kota Payakumbuh.
- 9) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, berupa pemberian insentif 150 orang guru honor dan pengelola database sekolah dasar Negeri dan swasta se-Kota Payakumbuh.
- 10) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, berupa pelaksanaan pelatihan dalam pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah se Kota Payakumbuh, pelatihan kepada guru-guru SD berupa : Pelatihan Public Speaking, Peningkatan Kompetensi dalam menjaga keamanan pangan disekolah, Pelatihan adab dan karakter, Pelatihan Tahfidz, Pendidikan Pembelajaran Mendalam bagi PTK Non BOSKIN, Pelatihan Pengembangan SDM dan Sosialisasi kebijakan Kemdikdasmen Tahun 2025.

- 11) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, berupa pelaksanaan Pendampingan ke sekolah tentang 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan Piloting Sekolah.
- 12) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, berupa pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar untuk 84 sekolah yang mengelola dana BOS.
- 13) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, berupa pelatihan dan sosialisasi pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar untuk 84 orang operator dari sekolah yang mengelola dana BOS.
- 14) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan, berupa pelaksanaan rapat koordinasi tentang Pelaksanaan dan Evaluasi ANBK, Akreditasi Sekolah, sosialisasi pengisian Ijazah Peserta Didik dan Kurikulum Sekolah.
- 15) Pemberian Layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi, berupa Sosialisasi Pemberian Layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi.
- 16) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik, berupa pemberian 404 paket Alat Tulis untuk Peserta Didik di Sekolah Negeri Kota Payakumbuh
- 17) Pembangunan Ruang Kelas Baru, berupa Hibah Penambahan Ruang Kelas untuk SDIT IPHI Kota Payakumbuh.
- 18) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, berupa Rehab Ruang Ibadah SDN 38 Payakumbuh, Rehab Pagar SDN 55 Payakumbuh, Pemasangan Paving Blok SDN 20 Payakumbuh, Rehab Halaman Sekolah SDN 61 Payakumbuh, Rehab Halaman Sekolah SDN 38 Payakumbuh, Rehab Halaman Sekolah SDN 57 Payakumbuh, Rehab Halaman Sekolah dan Drainase SDN 21 Payakumbuh, Rehabilitasi Pagar SDN 61 Payakumbuh, Rehabilitasi Pagar SDN 26 Payakumbuh dan Rehab Sarana dan Prasarana SDN 58 Payakumbuh
- 19) Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas, berupa Rehab Sedang 4 Ruang Kelas SDN 22 Payakumbuh, Rehab Sedang 6 Ruang Kelas SDN 03 Payakumbuh, Rehab Sedang 6 Ruang Kelas SDN 16 Payakumbuh, Rehab Sedang 4 Ruang Kelas SDN 50 Payakumbuh, Rehab Sedang Ruang 4 ruang Kelas SDN 41 Payakumbuh dan Rehab Sedang 1 ruang Ruang Kelas SDN 61 Payakumbuh.

- 20) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar, berupa pemberian beasiswa kurang mampu untuk 796 peserta didik SD Negeri dan Swasta di Kota Payakumbuh.
- 21) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, berupa Pengadaan TIK untuk SDN 38 Payakumbuh dan SDS Pius Payakumbuh sumber dana dari DAK yang terdiri dari 15 unit SPC Chromebook X1 Mini, 1 unit SPC SW 300, 1 unit SPS Connector Type C to HDMI/VGA dan 1 unit SPC Projector P100 dan Pengadaan chromebook yang bersumber pada Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdiri dari 13 unit untuk SDN 29 Payakumbuh, 13 unit untuk SDN 46 Payakumbuh dan 14 unit untuk SDN 66 Payakumbuh.

2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp12.744.955.214,- dan terealisasi sebesar Rp 12.000.010.713,- atau 94,15% melalui 11 (sebelas) sub kegiatan yaitu

- 1) Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana Utilitas Sekolah, berupa Pemeliharaan dan Pengecatan SMPN 2 Payakumbuh, Pemasangan Paving Blok SMPN 6 Payakumbuh, Rehab Ruang Laboratorium Komputer SMPN 1 Payakumbuh dan Rehab Ruang Perpustakaan SMPN 1 Payakumbuh
- 2) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama, berupa pemberian beasiswa kurang mampu untuk 283 peserta didik Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Kota Payakumbuh.
- 3) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, berupa pelaksanaan minat bakat dan kreatifitas siswa dari tingkat kota sampai nasional dengan rincian lomba FLS2N, O2SN, KOSN, Gala Siswa Indonesia (GSI) dan Peringatan HUT Kota Payakumbuh.
- 4) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, berupa pemberian insentif 100 orang guru honor SMP Negeri dan swasta se Kota Payakumbuh dan pengelola database SMP Negeri se Kota Payakumbuh.
- 5) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, berupa pelaksanaan pelatihan terhadap 100 orang guru dalam pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah se Kota Payakumbuh, pelatihan kepada guru-guru SMP berupa : Peningkatan Kompetensi dalam menjaga keamanan pangan disekolah, Pelatihan Adab dan Karakter, Pendidikan Pembelajaran Mendalam bagi PTK Non BOSKIN, Pelatihan Pengembangan SDM, Sosialisasi Kebijakan

Kemdikdasmen Tahun 2025 dan Penyaluran Dana Hibah PGRI Kota Payakumbuh.

- 6) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, berupa pelaksanaan SPMB, Kesehatan Remaja, Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan Penulisan Ijazah.
- 7) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama, berupa pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah untuk 19 sekolah yang mengelola dana BOS
- 8) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama, berupa pelatihan dan sosialisasi pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama untuk sekolah 19 operator sekolah yang mengelola dana BOS.
- 9) Pemberian Layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi, berupa Sosialisasi Pemberian Layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi.
- 10) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik, berupa pemberian 283 paket Alat Tulis untuk Peserta Didik di Sekolah Negeri Kota Payakumbuh.
- 11) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, berupa Pengadaan Peralatan Labor IPA Biologi dan Fisika untuk SMPN 10 Payakumbuh, SMP IT Insan Cendekia dan SMP IT Mutiara Hati Payakumbuh sumber dana dari DAK dan pengadaan chromebook yang bersumber pada Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdiri dari 20 unit untuk SMPN 7 Payakumbuh dan 15 unit untuk SMPN 10 Payakumbuh

3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp8,442,276,810,- dan terealisasi sebesar Rp8,176,535,362,- atau 96,85% melalui 13 (tiga belas) sub kegiatan yaitu

- 1) Pembangunan sarana, prasarana dan Utilitas PAUD, berupa Pembangunan 1 unit Ruang UKS PAUD Percontohan.
- 2) Pengadaan Mebel PAUD, berupa pengadaan Lemari Arsip, Lemari Kaca, Lemari Minimalis dan Kursi Tunggu untuk TK Pembina Utara, TK Pembina Barat, TK Pembina Timur, PAUD Percontohan dan PAUD SKB
- 3) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD, berupa pembayaran insentif 362 guru honor PAUD Negeri dan Swasta se Kota Payakumbuh dan honor pengelola data (Dapodik) pada TK Negeri.
- 4) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan PAUD, berupa pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD untuk 184 orang tenaga pendidik yang

- mengikuti Diklat Berjenjang Tingkat Lanjut, Pelatihan untuk Guru PGRI dan Hibah HIMPAUDI.
- 5) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD, berupa Sosialisasi Akreditasi PAUD, Pembinaan KKG, Pembinaan Gugus PAUD, Perpanjangan Izin Satuan PAUD, Surat Penundaan Pendirian Satuan PAUD, Pembinaan Bunda PAUD, Pembinaan Organisasi Mitra PAUD, Sosialisasi Program Prioritas Kemendikdasmen, Pelaksanaan Kegiatan Anugrah Prestasi Pendidikan Tahun 2025 dan Validasi KSP PAUD untuk 138 satuan pendidikan.
 - 6) Pengelolaan Dana BOP PAUD, berupa pengelolaan Dana BOP PAUD untuk 138 PAUD Negeri dan Swasta se Kota Payakumbuh.
 - 7) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD, berupa pelatihan dan sosialisasi pengelolaan Dana BOP PAUD untuk 280 orang pada sekolah yang mengelola dana BOP.
 - 8) Pembangunan Ruang Kelas Baru, berupa Hibah Penambahan Ruang Kelas untuk TK IPHI Kota Payakumbuh.
 - 9) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, berupa kegiatan Gebyar untuk menampilkan minat, bakat dan kreativitas peserta didik PAUD, pembinaan bakat dan kreativitas peserta didik PAUD dan monitoring dan evaluasi pembinaan bakat dan kreativitas peserta didik PAUD untuk 200 orang peserta didik.
 - 10) Pemberian Layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi, berupa Sosialisasi Pemberian Layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi.
 - 11) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik, berupa pemberian 285 paket Alat Tulis untuk Peserta Didik di Sekolah Negeri Kota Payakumbuh.
 - 12) Rehabilitasi sedang/berat Gedung/Ruang Kelas Guru PAUD, berupa Rehabilitasi TK Pembina Barat (Pemasangan Terali dan Paving, Rehabilitasi TK Pembina Timur (Pemasangan Terali dan Paving, Rehabilitasi TK Pembina Utara (Pemasangan Terali dan Paving) dan Rehabilitasi PAUD Percontohan (Pemasangan Terali dan Pengecatan).
 - 13) Pengadaan Alat Praktek dan Peraga PAUD, berupa pengadaan Alat Permainan Edukatif APE) dan Alat Pembelajaran dengan target sebanyak 18 paket dengan sumber DAK untuk TK An-Nadzir, TK IT. MUTIARA HATI, TK. IT. AL HUFFAZH dan sumber dana DAU untuk KB Auladi dan PAUD Arruhama

4. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp4.608.150,759,- dan terealisasi sebesar Rp4.410.428.086,- atau 95,71% melalui 8 (delapan) sub kegiatan yaitu

- 1) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan, berupa pemberian beasiswa kurang mampu kepada 39 siswa non formal.
- 2) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, berupa penyediaan insentif 547 orang guru TPA/TPSA/MDA dan guru pendidikan kesetaraan se-Kota Payakumbuh
- 3) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, berupa pengembangan karir 60 orang pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan untuk tenaga pendidik (Pamong dan Tutor) yang mengikuti Pelatihan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning), Pelatihan Penyusunan Perangkat Pembelajaran menggunakan Artificial Intelligence (AI).
- 4) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan, berupa Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/kesetaraan untuk 6 lembaga penerima BOP non Formal/kesetaraan Negeri dan swasta se kota payakumbuh yaitu SKB Kota Payakumbuh, PKBM Kembang Delima, PKBM Tahfizul Qur'an, PKBM Al Fatih dan PKBM Dhu'afa Mandiri dan PKBM Zaid Bin Tsabit.
- 5) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan, berupa pelatihan dan sosialisasi untuk 6 orang pengelolaan Dana BOP Nonformal/Kesetaraan untuk sekolah yang mengelola dana Nonformal/Kesetaraan.
- 6) Pemberian Layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi, berupa Sosialisasi Pemberian Layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi.
- 7) Rehabilitasi sedang/berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan, berupa rehab Asrama SKB Kota Payakumbuh.
- 8) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik, berupa pelatihan Barista, pelatihan keterampilan pengelolaan makanan sehat bergizi, pelatihan keterampilan pangkas rambut untuk 98 orang peserta didik Nonformal/Kesetaraan dan Sosialisasi Penangan Anak Tidak Sekolah (ATS).

III. Program Pengembangan Kurikulum

Program Pengembangan Kurikulum dengan indikator kinerja yaitu

- Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal dengan target 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.
- Persentase sekolah dengan Pendidikan karakter berkategori baik dengan target 52,50% dan realisasi 57,65% dengan capaian kinerja 109,81%.

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan 1 (satu) sub kegiatan yaitu

1. Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp91.918.000,- dan terealisasi sebesar Rp65.088.308,- atau 70,81 % melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu

- 1) Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, berupa Pelatihan tentang kurikulum muatan lokal untuk 100 orang Pendidik.

IV. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan indikator kinerja yaitu

- Persentase Guru yang memiliki sertifikat Pendidikan dengan target 58% dan realisasi 77,01% dengan capaian kinerja 132,78%.
- Indeks Pemerataan Guru dengan target 81% dan realisasi 85% dengan capaian kinerja 104,94%.
- Persentase sekolah yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan target 66,00% dan realisasi 88% dengan capaian kinerja 133,33%.

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Dasar PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 118.017.050,- dan terealisasi sebesar Rp 107.746.443,- atau 91,30 % melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu

- 1) Penghitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, berupa sosialisasi penyusunan dokumen tunjangan profesi guru sesuai dengan Juknis dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Riset dan teknologi (Kemendikbud Ristek) RI bagi guru penerima sertifikasi se kota Payakumbuh

d. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	TindakLanjut	Tujuan/Masalah Yang diselesaikan
1	Sangat diharapkan untuk kedepannya masing-masing sekolah (SD, SMP) untuk tidak lagi melakukan pungutan diluar ketentuan yang berlaku	Sudah dikeluarkan edaran Kepala Dinas Pendidikan tentang larangan pungutan disekolah, Surat Edaran Nomor :	
2	Dalam pembuatan rencana anggaran sekolah (RKAS) agar dilibatkan warga sekolah seperti guru, komite dan Masyarakat sekitar	Sesuai aturan penyusunan RKAS memang melibatkan warga sekolah (guru, komite, masyarakat), RKAS yang diajukan harus ditanda tangani Kepala Sekolah dan Komite	
3	Agar ditambahnya mata Pelajaran adab dan fiqih dengan mendatangkan guru khusus	Sesuai aturan, penganggaran gaji/honorarium guru khusu tidak dapat diakomodir baik APBD maupun dana BOSP	
4	Untuk LKS agar dapat dimasukkan anggarannya dalam APBD selanjutnya	LKS Adalah salah satu sumber belajar yang idealnya disusun oleh guru. Prioritas belanja saat ini Adalah pembelian buku teks pembelajaran	
5	Sekolah swasta yang sudah dianggap mandiri (Maksimal penerimaan murid baru sebanyak 50 orang/tingkat) kiranya tidak berikan dana hibah atau bantuan kecuali sekolah swasta yang belum mandiri	Pemberian dana hibah/bansos mempedomani Perwako.	
6	Untuk menarik minat murid baru pada sekolah kecil yang dipinggir kota agar bisa dibantu untuk dianggarkan pemberian pakaian dan peralatan sekolah gratis untuk murid baru	Kepala Sekolah selalu dimotivasi untuk melakukan inovasi dalam SPMB. Tahun 2025 diberikan penghargaan bagi 3 sekolah yang meningkat jumlah muridnya pada SPMB	
7	Diusulkan anggaran untuk BOSDA di penganggaran selanjutnya	Sesuai kemampuan daerah, dana BOSDA belum dapat direalisasikan	
8	BOSDA yang diusulkan melalui BANGGAR akan diprioritaskan untuk Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sekolah-sekolah kecil	Untuk Pembangunan infrastruktur sudah dianggarkan sesuai numenklatur yang ada berdasarkan kemampuan keuangan daerah	
11	Bagi kepala sekolah berprestasi yang sudah melampaui masa jabatannya agar bisa diperbantukan disekolah-sekolah kecil untuk dapat meningkatkan kualitas sekolah	Sudah dilaksanakan namun belum menunjukkan peningkatan yang signifikan sebagaimana diharapkan	

2. URUSAN KESEHATAN

Urusan Kesehatan diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh melalui 2 (dua) Kebijakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp238.588.325.063,- dan terealisasi sebesar Rp220.788.222.072,- atau 92.54% dengan uraian sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Program Sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	0,34	0,61	179,41%
			Prevalensi Stunting pada Balita	2,12	2,59	87%
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Inspektorat	83	83,70	100,08

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian Kinerja Keluaran masing-masing sub kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

c. Analisis Kesesuaian antara sub kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Kesehatan dilaksanakan melalui 5 (lima) program, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 83 (delapan puluh tiga) sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja yaitu Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat dengan target kinerja 83 dan realisasi 83,70 dengan capaian kinerja 100,08%.

Pelaksanaan program ini didukung oleh 8 (delapan) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp140.047.950,- dan terealisasi sebesar Rp124.639.285,- atau 89,00% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa penyusunan dokumen perencanaan pada Dinas Kesehatan yang terdiri dari Renstra, Renja dan DPA
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, berupa penyusunan dokumen laporan pada Dinas Kesehatan yang terdiri dari LKPJ, LKJIP, SPM, Profil, LPPD dan Monev DAK

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp77.263.170.041,- dan terealisasi sebesar Rp70.112.813.947,- atau 90,75% melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, berupa pembayaran gaji dan tunjangan 786 ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksana tugas ASN, berupa pembayaran honorarium pejabat penatusahaan keuangan
- 3) Pelaksanaan penatusahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, berupa operasional dan uang lembur

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp438.974.750,- dan terealisasi sebesar Rp399.511.200,- atau 91,01% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

1. Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya, berupa pengadaan pakaian dinas untuk 309 orang ASN dan THL Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Instalasi Farmasi Kesehatan

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp329.881.400,- dan terealisasi sebesar Rp309.950.723,- atau 93,96% melalui 6 (enam) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, berupa penyediaan komponen instalasi listrik pada Dinas Kesehatan
- 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, berupa penyediaan 2 unit AC, 1 unit Kulkas, 1 unit speaker portable
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, berupa pengisian tabung gas, pengisian tabung APAR, Pembelian ATK, kertas cover, bahan computer, bahan pembersih, benda POS, Bahan habis pakai dan perabot kantor
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, berupa penyediaan bahan cetak pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
- 5) Fasilitas Kunjungan Tamu, berupa penyediaan makan dan minum untuk tamu pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD, berupa pembayaran uang representasi, uang transportasi, uang harian dan penginapan

5. Kegiatan Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 809.138.000,- dan terealisasi sebesar Rp 802.546.289,- atau 99,19% melalui 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan, berupa Pengadaan 10 unit Kendaraan dinas Operasional roda dua pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
- 2) Pengadaan mebel, berupa pengadaan mebel pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh sebanyak 42 unit yang terdiri dari kursi kerja, kursi rapat, meja aula, filing cab, backdrob aula dan meja front office.
- 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, berupa pengadaan peralatan mesin pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh sebanyak 15 unit yang terdiri dari personal computer, printer, laptop dan 1 unit handphone untuk promosi kesehatan dan layanan pengaduan

- 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, berupa pengadaan sarana parkir roda dua dan parkir roda empat pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

6. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp1.289.892.455,- dan terealisasi sebesar Rp1.219.268.188,- atau 94,52% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, berupa pembayaran jasa sumber daya air, listrik, telepon pada Kantor Bersama Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh (Dinas Kesehatan, Inspektorat dan Dinas Sosial), Puskesmas Padang Karambia dan Instalasi Farmasi Kesehatan.
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, berupa pembayaran gaji 30 orang TJP pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp446.603.100,- dan terealisasi sebesar Rp372.814.634,- atau 83,48% melalui 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan, berupa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, berupa pemeliharaan 41 unit kendaraan dinas operasional pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, berupa pemeliharaan 54 unit AC dan personal komputer pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dan Instalasi Farmasi Kota Payakumbuh
- 4) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya, berupa rehabilitasi Kantor Bersama Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh (Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial)

8. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 101.026.669.284,- dan terealisasi sebesar Rp 95.425.293.766,- atau 94,46% melalui 9 (sembilan) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Dr. Adnaan WD, berupa Peningkatan pelayanan BLUD pada RSUD Dr. Adnaan WD Kota Payakumbuh yang terdiri dari belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang jasa
- 2) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ibh, berupa Peningkatan pelayanan BLUD di Puskesmas Ibh Kota Payakumbuh yang terdiri dari belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang jasa
- 3) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Parit Rantang, berupa Peningkatan pelayanan BLUD di Puskesmas Parit Rantang Kota Payakumbuh yang terdiri dari belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang jasa
- 4) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Payolansek, berupa Peningkatan pelayanan BLUD di Puskesmas Payolansek Kota Payakumbuh yang terdiri dari belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang jasa
- 5) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tiakar, berupa Peningkatan pelayanan BLUD di Puskesmas Tiakar Kota Payakumbuh yang terdiri dari belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang jasa
- 6) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Air Tabit berupa Peningkatan pelayanan BLUD di Puskesmas Air Tabit Kota Payakumbuh yang terdiri dari belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang jasa
- 7) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas tarok, berupa Peningkatan pelayanan BLUD di Puskesmas Tarok Kota Payakumbuh yang terdiri dari belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang jasa
- 8) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lampasi, berupa Peningkatan pelayanan BLUD di Puskesmas Lampasi Kota Payakumbuh yang terdiri dari belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang jasa
- 9) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Padang Karambia, berupa Peningkatan pelayanan BLUD di Puskesmas Lampasi Kota Payakumbuh yang terdiri dari belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang jasa

II. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan indikator kinerja yaitu:

- Indeks Keluarga sehat dengan target 0,34 dan capaian 0,61 dengan capaian kinerja 179,41%.
- Prevelensi Stunting pada Balita dengan target 2,12 dan capaian 2,59 dengan capaian kinerja 87%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan dan 45 (puluh lima) Sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Kewenangan Daerah Kab/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 28.354.067.933,- dan terealisasi sebesar Rp 25.862.037.259,- atau 91,21% melalui 6 (enam) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pembangunan Puskesmas, berupa Pembangunan atau relokasi Puskesmas Parit Rantang
- 2) Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas pelayanan kesehatan, berupa pemenuhan peralatan pada 8 unit puskesmas dan 1 unit RSUD
- 3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas, berupa Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Tarok dan Puskesmas Lampasi
- 4) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya, berupa Rehabilitasi dan Pemeliharaan pada 7 Puskesmas Pembantu di Kota Payakumbuh
- 5) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, berupa pengadaan obat dan bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan pada Dinas Kesehatan, RSUD Adnaan WD Payakumbuh dan 8 Puskesmas se Kota Payakumbuh
- 6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga, berupa pelaksanaan intervensi Masalah Kesehatan terhadap 85 Keluarga oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas melalui kunjungan rumah

2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Dasar & Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp26.030.109.500,- dan terealisasi sebesar Rp24.020.218.000,- atau 92,28% melalui 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil, berupa Pelayanan Kesehatan ibu hamil pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang terdiri dari kunjungan lapangan, sosialisasi/pertemuan dan biaya operasional lainnya
- 2) Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, berupa Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir yang terdiri dari uang transport kunjungan lapangan, sosialisasi/pertemuan, Biaya uji sampel dan biaya operasional lainnya
- 3) Pengelolaan pelayanan kesehatan balita, berupa Pelayanan Kesehatan balita pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang terdiri dari uang transport kunjungan lapangan, sosialisasi/pertemuan dan biaya operasional lainnya
- 4) Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, berupa Pelayanan Kesehatan usia Pendidikan dasar pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang terdiri dari uang transport kunjungan lapangan, sosialisasi/pertemuan dan biaya operasional lainnya
- 5) Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif, berupa Pelayanan Kesehatan usia Produktif pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang terdiri dari uang transport kunjungan lapangan, sosialisasi/pertemuan dan biaya operasional lainnya
- 6) Pengelolaan Pelayanan kesehatan Usia Lanjut, berupa Pelayanan Kesehatan usia Lanjut pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang terdiri dari uang transport kunjungan lapangan, sosialisasi/pertemuan dan biaya operasional lainnya.
- 7) Pengelolaan Pelayanan kesehatan Ibu dan anak, berupa Pelayanan kesehatan Ibu dan anak pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang terdiri dari uang transport kunjungan lapangan, sosialisasi/pertemuan dan biaya operasional lainnya.
- 8) Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi, berupa Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi pada Dinas Kesehatan Kota

Payakumbuh yang terdiri dari uang transport kunjungan lapangan, sosialisasi/pertemuan dan biaya operasional lainnya.

- 9) Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes, berupa Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang terdiri dari uang transport kunjungan lapangan, sosialisasi/pertemuan dan biaya operasional lainnya
- 10) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, berupa Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang terdiri dari uang transport kunjungan lapangan, sosialisasi/pertemuan dan biaya operasional lainnya.
- 11) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK), berupa Pelayanan Kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK) pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang terdiri dari uang transport kunjungan lapangan, sosialisasi/pertemuan dan biaya operasional lainnya.
- 12) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis, berupa Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis (TBC) pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang terdiri dari uang transport kunjungan lapangan, sosialisasi/pertemuan dan biaya operasional lainnya.
- 13) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV, berupa Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang terdiri dari uang transport kunjungan lapangan, sosialisasi/pertemuan dan biaya operasional lainnya.
- 14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana, berupa Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan berpotensi bencana pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang terdiri dari belanja kendaraan roda 4 SPGDT, peralatan kesehatan, perlatan kedokteran umum, alat peraga kelengkapan pelayanan
- 15) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional, berupa Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional

- pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang terdiri dari uang transport kunjungan lapangan, sosialisasi/pertemuan dan biaya operasional lainnya
- 16) Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat, berupa Pelayanan Kesehatan gizi masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang terdiri dari uang transport kunjungan lapangan, sosialisasi/pertemuan dan biaya operasional lainnya
- 17) Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga, berupa Pelayanan Kesehatan kerja dan olah raga pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, Perangkat Daerah, Jemaah Haji dan Pemilik Usaha yang terdiri dari uang transport kunjungan lapangan, sosialisasi/pertemuan dan biaya operasional lainnya
- 18) Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan, berupa Pelayanan Kesehatan lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dan Puskesmas se Kota Payakumbuh yang terdiri dari uang transport kunjungan lapangan, sosialisasi/pertemuan dan biaya operasional lainnya
- 19) Pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan, berupa Pelayanan Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang terdiri dari uang transport kunjungan lapangan, sosialisasi/pertemuan dan biaya operasional lainnya
- 20) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya, berupa Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang terdiri dari uang transport kunjungan lapangan, sosialisasi/pertemuan dan biaya operasional lainnya
- 21) Pengelolaan Surveilans Kesehatan, berupa Pengelolaan Surveilans Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh beserta unit kerjanya yang terdiri dari uang transport kunjungan lapangan, sosialisasi/pertemuan dan biaya operasional lainnya
- 22) Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA, berupa Pelayanan Kesehatan jiwa dan NAPZA pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh beserta unit kerjanya yang terdiri dari uang transport kunjungan lapangan, sosialisasi/pertemuan dan biaya operasional lainnya

- 23) Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular, berupa Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh beserta unit kerjanya yang terdiri dari uang transport kunjungan lapangan, sosialisasi/pertemuan dan biaya operasional lainnya
- 24) Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, berupa Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang terdiri dari uang transport kunjungan lapangan, sosialisasi/pertemuan dan biaya operasional lainnya
- 25) Penyelenggaraan kabupaten/ kota sehat berupa Penyelenggaraan kabupaten/ kota sehat pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang terdiri dari uang transport kunjungan lapangan, sosialisasi/pertemuan dan biaya operasional lainnya
- 26) Operasional pelayanan Puskemas, berupa Operasional pelayanan Puskemas pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang terdiri dari Uang Transport petugas dan kader, Sosialisasi /Pertemuan, Loka karya mini Puskesmas, Pembayaran Insentif UKM bagi petugas dan operasional lainnya
- 27) Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lain, berupa Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lain pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang terdiri dari uang transport kunjungan lapangan, sosialisasi/pertemuan dan biaya operasional lainnya
- 28) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), berupa Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang terdiri dari uang transport kunjungan lapangan, sosialisasi/pertemuan dan biaya operasional lainnya
- 29) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji, berupa Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang terdiri dari uang transport kunjungan lapangan, sosialisasi/pertemuan dan biaya operasional lainnya
- 30) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi, berupa Pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi pada Dinas Kesehatan Kota

Payakumbuh yang terdiri dari uang transport kunjungan lapangan, sosialisasi/pertemuan dan biaya operasional lainnya

- 31) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria, berupa pembelian Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) malaria pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
- 32) Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usia, berupa Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usia pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang terdiri dari uang transport kunjungan lapangan, sosialisasi/pertemuan dan biaya operasional lainnya
- 33) Pengelolaan Pelayanan Imunisasi, berupa Pengelolaan Pelayanan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang terdiri dari uang transport kunjungan lapangan, sosialisasi/pertemuan dan biaya operasional lainnya.

3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp115.950.000,- dan terealisasi sebesar Rp36.900.000,- atau 31,82% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengelolaan sistem informasi Kesehatan, berupa kegiatan Pengelolaan system informasi kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang terdiri dari sosialisasi/pertemuan dan biaya operasional lainnya

4. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp42.573.450,- dan terealisasi sebesar Rp24.899.948,- atau 58,49% melalui 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya, berupa Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang terdiri dari sosialisasi/pertemuan dan biaya operasional lainnya.
- 2) Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, berupa Pengendalian Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang terdiri dari sosialisasi/pertemuan dan biaya operasional lainnya

- 3) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan, berupa Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang terdiri dari sosialisasi/pertemuan dan biaya operasional lainnya
- 4) Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan, berupa Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang terdiri dari sosialisasi/pertemuan dan biaya operasional lainnya

III. Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan

Pelaksanaan program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM manusia di wilayah kabupaten/kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp5.001.000,- dan terealisasi sebesar Rp5.001.000,- atau 89,56% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar, berupa kegiatan Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang terdiri dari sosialisasi/ pertemuan dan biaya operasional lainnya

2. Kegiatan Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten / kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp506.695.900,- dan terealisasi sebesar Rp385.495.269,- atau 76,08% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota, berupa kegiatan Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang terdiri dari pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan untuk petugas kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas serta Kader Kesehatan.

IV. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman

Pelaksanaan program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 6.028.000,- dan terealisasi sebesar Rp 5.604.390,- atau 92,97% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), berupa Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang terdiri dari uang transport kunjungan lapangan, sosialisasi/pertemuan dan biaya operasional lainnya dan jasa tenaga laboratorium

2. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 72.211.700,- dan terealisasi sebesar Rp 69.279.194,- atau 95,94% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM), berupa Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang terdiri dari uang transport kunjungan lapangan, sosialisasi/pertemuan dan biaya operasional lainnya dan jasa tenaga laboratorium.

3. Kegiatan Penerbitan sertifikat produksi pangan industri Rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat di produksi rumah tangga

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 435.942.900,- dan terealisasi sebesar Rp 376.366.077,- atau 86,33% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh industri rumah tangga, berupa Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh industri rumah tangga pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang terdiri dari uang transport kunjungan lapangan, sosialisasi/pertemuan dan biaya operasional lainnya.

V. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Pelaksanaan program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten / kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 1.088.028.200,- dan terealisasi sebesar Rp 1.077.571.192,- atau 99,04% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kementrian dan pemberdayaan Masyarakat, berupa Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kementrian dan pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang terdiri dari uang transport kader Posyandu dan petugas kesehatan, sosialisasi/pertemuan dan biaya operasional lainnya.

2. Kegiatan Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten / kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 69.748.800,- dan terealisasi sebesar Rp 58.480.910,- atau 84% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat, berupa Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang terdiri dari biaya operasional lainnya

3. Kegiatan Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten / kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 117.590.700,- dan terealisasi sebesar Rp 100.052.721,- atau 79% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM), berupa kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang terdiri dari uang transport kunjungan lapangan, sosialisasi/pertemuan, sewa gedung dll dan biaya operasional lainnya.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	TindakLanjut	Tujuan/Masalah Yang diselesaikan
	- Capaian kinerja dari subkegiatan perencanaan pembangunan relokasi puskesmas parit rantang dengan anggaran Rp392.875.000 terealisasi hanya Rp99.548.130 dikarenakan penyesuaian pada proses pengadaan barang jasa - Ada beberapa subkegiatan yang capaiannya di bawah 70 % di sebabkan karena anggaran yang ada sudah di tanggung oleh kegiatan yang ada di puskesmas - Terkait pengembangan Pembangunan Rumah Sakit sebaiknya di buat dokumen perencanaanya dan agar bisa di anggarkan segera	- Koordinasi dengan OPD terkait dalam penyusunan dokumen perencanaan tentang standar biaya perencanaan dan membuat usulan standar biaya - Meningkatkan koordinasi dengan Puskesmas dan pihak ke tiga dalam Menyusun rencana anggaran kegiatan - Dikoordinasikan dengan Rumah Sakit Adnan WD	- Agar tidak overlapping dalam pelaksanaan kegiatan - Agar rumah sakit dapat mengganggu kegiatan di maksud

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Payakumbuh melalui 10 kebijakan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp56.740.255.388,- dan terealisasi sebesar Rp52,618,909,495,- atau 92,74% dengan uraian sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Program Sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Dan Operasional Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks AKIP SKPD	82,85	82,85	100,00%
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,00	94,09	100,10%
2	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Irigasi dengan Kondisi Baik	91,84	91,83	99,98%
			Persentase Sungai yang Berfungsi Baik	92,85	90,55	97,52%
3	Meningkatnya Bangunan Gedung Yang Representatif	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Representatif	86,00	85,00	98,83%
			Persentase Penyediaan Sarana Perkantoran Tertentu Yang Representatif	81,90	81,02	98,92%
4	Meningkatnya Jalan Kota yang Memiliki Drainase	Program Pengembangan dan pengelolaan Sistem Drainase	Persentase Jalan Kota yang memiliki Drainase	67,44	79,08	117,25%
5	Meningkatnya Pengembangan Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air minum (SPAM)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Perpipaan	92,00	91,00	98,91%
6	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Jalan Lingkung Perkotaan	Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	Persentase Jalan Lingkung Kondisi Baik	48,27	48,00	99,44%
7	Meningkatnya Cakupan Layanan Persampahan	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Persentase Prasarana Pengelolaan Sampah yang Dibangun	57,14	57,00	99,75%
8	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Sesuai Standar	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kota yang Memenuhi	55,05	55,05	100,00%

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
	Teknis Untuk Konektifitas Antar Wilayah		Standar Konstruksi dan Fungsi			
9	Meningkatnya Kinerja Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Pekerjaan Jasa Konstruksi yang Berkinerja Baik	91,50	100.00	109,28%
10	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan Dan Pengendalian Tata Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kepatuhan Pelaku Pembangunan Sesuai Rencana Tata Ruang	36.75	36.43	99,12%

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

c. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang dilaksanakan melalui 13 (tiga belas) Program, 24 (dua puluh empat) kegiatan dan 61 (enam puluh satu) sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator kinerja yaitu:

- Indeks AKIP SKPD dengan target 82,85 dan terealisasi 82,85 dengan capaian 100,00%
- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 94,00 dan terealisasi 94,09 dengan capaian 100,10%

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 7(tujuh) Kegiatan dan 24 (Dua puluh empat) sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp355.885.600,- dan terealisasi sebesar Rp333.263.678,- atau 93,64% melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas PUPR tahun 2025-2029, Rencana Kerja Dinas PUPR tahun 2025, Rencana Kerja Perubahan Dinas PUPR Tahun 2025 dan penyusunan DPA Dinas PUPR
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD berupa penyusunan dokumen Pakta Integritas, dokumen Perjanjian Kinerja, dokumen indikator kinerja individu, dokumen rencana aksi kinerja, dokumen LKPJ, LKjIP, LPPD, pemberkasan SAKIP dan penyusunan dokumen SKM Dinas PUPR
- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, berupa penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Dinas PUPR

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.622.393.430,- dan terealisasi sebesar Rp7.129.270.435,- atau 74.09% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN berupa Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan PPPK) di Lingkungan Dinas PUPR

- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN berupa Penyediaan Administrasi dalam Pelaksanaan Tugas ASN dan pembayaran honorarium pengelola keuangan.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp112.102.500,- dan terealisasi sebesar Rp106.138.200,- atau 94,68% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya berupa Penyediaan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya di Lingkungan Dinas PUPR

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 532,851,500,- dan terealisasi sebesar Rp 491,043,661,- atau 92.15% melalui 7 (Tujuh) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor berupa Pembayaran Komponen Instalasi listrik/Penerangan pada gedung kantor Dinas PUPR Kota Payakumbuh
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa Penyediaan Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan di Lingkungan Dinas PUPR
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan di Lingkungan Dinas PUPR
- 4) Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan berupa Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan berupa Penyediaan Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang Dissediakan
- 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu berupa Penyediaan Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berupa Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 286,190,000,- dan terealisasi sebesar Rp 276,732,450,- atau 96.70% melalui 4 (Empat) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pengadaan Kendaraan dan Operasional atau Lapangan berupa Penyediaan Kendaraan Dinas roda 2 (dua) untuk operasional Dinas PUPR
- 2) Pengadaan Mebel berupa Pengadaan kursi kerja dan meja rapat

- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya berupa pengadaan 5 unit komputer , 2 unit laptop , 2 unit scaner , dan 5 unit printer.
- 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya berupa pengadaan 1 (satu) unit AC Dinas PUPR

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4,817,538,986,- dan terealisasi sebesar Rp 4,590,575,451,- atau 95.29% melalui 2 (Dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik berupa Pembayaran rekening listrik , telepon dan air pada kantor Dinas PUPR Kubu Gadang, UPTD laboratorium konstruksi Simpang Benteng, UPTD Alat Berat dan Kantor pengelolaan bersama Kawasan Batang Agam
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berupa Pembayaran gaji Tenaga Jasa Perorangan (TJP) dan outsourcing pada Dinas PUPR

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 757,472,040,- dan terealisasi sebesar Rp 668,127,448,- atau 92.87% melalui 5 (Lima) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan berupa Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya sebanyak 24 unit, terealisasi 23 unit dikarenakan adanya penghapusan 1 unit kendaraan roda 2 .
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berupa pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 1 unit roda 6, 7 unit roda 4, 37 roda 42
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya berupa rehab gedung kantor PUPR Kubu Gadang dan UPTD laboratorium simpang benteng.
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya berupa Pemeliharaan Mebel, PC / Komputer dan printer.
- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya berupa Pemeliharaan CCTV dan AC

II. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan Indikator kinerja yaitu :

- Persentase Irigasi dengan Kondisi Baik dengan target 91,84 terealisasi 91,83 dengan capaian 99,98%
- Persentase Sungai Berfungsi Baik dengan target 92,85 terealisasi 90,55 dengan capaian 97,52%

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 2 (dua) Kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran Rp4.769.833.960,- dan terealisasi sebesar Rp4.706.198.028,- atau 98,67% melalui 3 sub kegiatan yaitu:

- 1) Operasi dan pemeliharaan sungai dengan berupa operasi dan pemeliharaan pada 8 sungai di Kota Payakumbuh
- 2) Pengelolaan Hidrologi Dan Kualitas Air Ws Kewenangan Kabupaten/Kota berupa penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan/Pemeliharaan hidrologi/ kualitas air di Kota Payakumbuh
- 3) Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing berupa Pembebasan tanah untuk normalisasi sungai batang agam dan kegiatan pengamanan Tebing Sungai.

2. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp6,566,067,522,- dan terealisasi sebesar Rp6,399,574,320,- atau 97.46% melalui 5 (Lima) sub kegiatan yaitu:

- 1) Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan berupa peningkatan Saluran Irigasi dari saluran tanah menjadi saluran berkonstruksi (beton).
- 2) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan berupa rehab saluran irigasi yang rusak
- 3) Rehabilitasi Bendung Irigasi berupa Bendung Irigasi yang Direhabilitasi
- 4) Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan berupa operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi kewenangan Kota.
- 5) Pengelolaan Dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi berupa pembinaan Kelompok Petani Pemakai Air (P3A) dan GP3A

III. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum dengan Indikator kinerja yaitu :

- Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Perpipaan dengan target 92.00 dan realisasi 91.00 dengan capaian 98,91%

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 1(satu) Kegiatan dan 1(satu) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 217,787,500,- dan terealisasi sebesar Rp. 216,570,505,- atau 99.44%, yang didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan berupa Pembangunan Jaringan pipa distribusi Air Minum (SPAM) di Kelurahan Parik Muko Aia .

IV. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

Program Pengembangan Sistem dan pengelolaan Persampahan di daerah Kabupaten / Kota dengan Indikator kinerja yaitu :

- Persentase Prasarana Pengelolaan Sampah yang Dibangun dengan target 57,14 dan realisasi 57,00 dengan capaian 99,75%%

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 1(satu) Kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp2.816.415.195,- dan terealisasi sebesar Rp2.667.546.299,- atau 94.71% melalui 2 (Dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS berupa pembangunan hanggar TPST dan TPS3R di Padang Karambia
- 2) Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS berupa Rehabilitasi sarana dan prasarana TPS3R di Kelurahan Ibh

V. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dengan Indikator kinerja yaitu :

- Presentase Jalan Kota yang Memiliki Drainase yaitu target 67,44 dan realisasi 79,08 dengan capaian 117,25%

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 8,674,144,922,- dan terealisasi sebesar Rp. 8,615,322,697,- atau 99.32% melalui 3 (Tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan berupa Rehabilitasi saluran drainase yang rusak di 17 lokasi
- 2) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan berupa pembangunan jaringan Drainase di 29 lokasi
- 3) Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Drainase berupa operasi dan pemeliharaan rutin Drainase dan pembayaran gaji TJP

VI. Program Penataan Bangunan Gedung

Program Penataan Bangunan Gedung dengan Indikator kinerja yaitu:

- Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Representatif yaitu target 86,00 dan realisasi 85,00 dengan capaian 98,83%
- Persentase Penyediaan Sarana Perkantoran Tertentu Yang Representatif yaitu target 81,90 dan realisasi 81.02 dengan capaian 98,92%

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp304,658,512,- dan terealisasi sebesar Rp283,243,332,- atau 92.97% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota berupa penyusunan dokumen persetujuan teknis lingkungan hidup Pembangunan masjid Agung .

- 2) Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG berupa Penyediaan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

VII. Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan

Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan dengan target Indikator kinerja yaitu:

- Persentase Jalan Lingkung Kondisi Baik target sebesar 48,27 realisasi 48,00 dengan capaian 99,44%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 1(satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp2,972,127,400,- dan terealisasi sebesar Rp2,931,882,285,- atau 98.65% melalui 4 (Empat) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penataan Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional Dan Kawasan Strategis Lainnya berupa Pembangunan jalan lingkung sebanyak 19 lokasi, pemeliharaan jalan lingkung pada 9 lokasi

VIII. Program Penyelenggaraan Jalan

Program Penyelenggaraan Jalan dengan target Indikator kinerja yaitu:

- Persentase Panjang Jalan Kota yang Memenuhi Standar Konstruksi dan Fungsi target sebesar 55,05 realisasi 55,05 dengan capaian 100,00%

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 7(tujuh) sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp10,732,636,531,- dan terealisasi sebesar Rp10,142,904,720,- atau 94.51% melalui 7 (Tujuh) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pembangunan Jalan berupa pembangunan Jalan Thamrin Manan, Pengadaan Lampu Jalan, Pembangunan Trotoar
- 2) Rekonstruksi Jalan berupa rekonstruksi jalan 4 lokasi, pemasangan Lampu Jalan, pengadaan Lampu Jalan, pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
- 3) Pelebaran Jalan Menuju Standar berupa kegiatan rabat beton bahu jalan sebanyak 13 lokasi
- 4) Pemeliharaan Rutin Jembatan berupa pemeliharaan rutin Jembatan pada 6 lokasi
- 5) Survey Kondisi Jalan/Jembatan berupa survey Jalan/jembatan untuk perencanaan pembangunan/rehabilitasi jalan
- 6) Rehabilitasi Jalan berupa pembangunan dinding penahan tebing jalan
- 7) Pemeliharaan Rutin Jalan berupa pemeliharaan rutin jalan

IX. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan target Indikator kinerja yaitu :

- Persentase Pekerjaan Jasa Konstruksi yang Berkinerja Baik target sebesar 91,50 realisasi 100.00 dengan capaian 109,28%

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp204,080,000,- dan terealisasi sebesar Rp164,136,653,- atau 80.43% melalui 2 (Dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis berupa Penyediaan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi sebanyak 196 orang, capaian realisasi kegiatan ini melebihi target dikarenakan adanya penambahan peserta sebagai reward dari kementrian PU di karenakan Kota Payakumbuh memperoleh peringkat terbaik 3 nasional dalam hal pembinaan jasa konstruksi
- 2) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi berupa pembinaan Lembaga Jasa Kontruksi

2. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp73,377,756,- dan terealisasi sebesar Rp63,763,308,- atau 86.90% melalui 1 (Satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota berupa Penyediaan standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara.

3. Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp57,806,500,- dan terealisasi sebesar Rp42,575,001,- atau 73.65% melalui 1 (Satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota berupa monitoring dan evaluasi serta pengawasan Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota

X. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan Indikator kinerja yaitu:

- Persentase Kepatuhan Pelaku Pembangunan Sesuai Rencana Tata Ruang target sebesar 36,75 realisasi 36.43 dengan capaian 99,12%

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp116,555,500,- dan terealisasi sebesar Rp113,507,003,- atau 97.38% melalui 2 (Dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa proses persetujuan substansi RDTR dari kementrian ATR BPR
- 2) Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang berupa sosialisasi terkait kebijakan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang

2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp46.700.252,- dan terealisasi sebesar Rp44.630.985,- atau 95,57% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa penerbitan kesesuaian kegiatan pemnfataan ruang (KKPR)
- 2) Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang berupa updating Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Aplikasi SITARA)

3. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 227,046,910,- dan terealisasi sebesar Rp. 213,200,743,- atau 93.90% melalui 1 (Satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTR berupa Kasus yang dikenakan Sanksi administratif

UPTD Alat Berat

Termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang didukung oleh 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp1,991,000,000,- dan terealisasi sebesar Rp1,980,716,690,- atau 99.48% melalui 1 (Satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pengadaan Alat Besar ini berupa pengadaan Alat Berat (eskavator)

2. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp243,585,060,- dan terealisasi sebesar Rp214,557,405,- atau 88.08% melalui 1 (Satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar berupa pemeliharaan rutin Alat Berat dan pembayaran gaji TJP pada UPTD alat berat

UPTD Labor Konstruksi

Termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang didukung oleh 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp202,330,562,- dan terealisasi sebesar Rp184,151,733,- atau 91.02% melalui 1 (Satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya berupa pemeliharaan Peralatan dan Mesin dan pembayaran gaji pada UPTD Laboratorium konstruksi

d. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD tahun N-1	Tindak lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Pelaksanaan operasional terhadap penerangan lampu jalan umum (PJU) agar di segerakan untuk diserahkan pengelolaannya ke Dinas Perhubungan sesuai tupoksi yang ada	Pemindahan tugas dan fungsi operasional Penerangan Jalan Umum (PJU) masih menunggu pengesahan Peraturan Wali Kota (Perwako) tentang Tugas dan Fungsi (Tusi) terbaru	Penyesuaian Tugas dan Fungsi Dinas
2.	Adanya peningkatan pengawasan terhadap kualitas pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga	Dinas PUPR secara kontinu dan berkala melaksanakan pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas pekerjaan konstruksi melalui pengawas lapangan. Selain itu, pengawasan kualitas dilaksanakan melalui fungsi UPTD Laboratorium Konstruksi dengan melakukan pengujian awal melalui Job Mix Formula (JMF) serta pengujian berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi	Peningkatan pengawasan kualitas hasil pekerjaan konstruksi
3.	Ditingkatannya pemeliharaan dan kualitas trotoar dan drainase yang ada di payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus berupaya meningkatkan kualitas pembangunan drainase sebagai infrastruktur pengendali banjir serta pembangunan trotoar. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas PUPR mengembangkan inovasi melalui strategi Pasti Pas yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan atau laporan kerusakan infrastruktur, serta mendorong percepatan tindak lanjut atas pengaduan tersebut	Peningkatan pemeliharaan infrastruktur trotoar dan drainase
4.	Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang belum selesai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus berupaya melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, antara lain pembangunan infrastruktur Batang Agam. Saat ini, Dinas PUPR masih mengupayakan kelanjutan pembangunan tersebut melalui koordinasi dengan Kementerian PUPR.	Kelanjutan pembangunan infrastruktur yang telah ada

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diselenggarakan oleh **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh** melalui 1 (satu) kebijakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.210.395.430,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.669.769.388,- atau 83,30%, dengan Capaian Kinerja Program dan Capaian Kinerja Keluaran sebagai berikut.

a. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
1	Pemantapan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Pengolahan Air Limbah Domestik Akses Aman	22,74%	23,14%	101,94%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai IKM Dinas PKP	87	88,54	101,77%
		Program Pengembangan Perumahan	Penurunan Angka <i>Backlog</i>	5,761	5,617	97,50%
		Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	97,53%	97,70%	100,18%
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Penyerahan PSU Dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah	24,71%	24,71%	100%

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

c. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam PK

Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan melalui 5 (lima) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

I. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan indikator kinerja yaitu:

- Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Pengolahan Air Limbah Domestik Akses Aman dengan target kinerja 22,74% dan realisasi 23,14% dengan capaian kinerja 101,94%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp7.440.516.988,- dan terealisasi sebesar Rp5.878.961.701,- atau 79,01%, melalui 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- 1) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik berupa biaya operasi dan pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) Kota Payakumbuh di Kelurahan Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.
- 2) Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja berupa fasilitasi operasional sedot tinja di Kota Payakumbuh.
- 3) Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat berupa pengakomodiran pelaksanaan pekerjaan pembangunan tangki septik individu di Kota Payakumbuh.
- 4) Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) berupa belanja rehabilitasi dan peningkatan kapasitas IPLT Kota Payakumbuh dengan menambah unit pengolahan sehingga kapasitas pengolahan meningkat dari 15 m3 per hari menjadi 30 m3 per hari.

II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja yaitu:

- Nilai IKM dengan target kinerja 87 dan realisasi 88,54 dengan capaian kinerja 101,77%.

Pelaksanaan program ini didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp42.076.250,- dan terealisasi sebesar Rp38.801.355,- atau 92,22%, melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa dokumen perencanaan seperti dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis (Renstra) dan Dokumen Perubahan Renja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD berupa laporan capaian kinerja yaitu LKPJ, LPPD dan LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa belanja lembur pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp3.316.666.630,- dan terealisasi sebesar Rp2.875.281.941,- atau 86,69%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berupa gaji dan tunjangan ASN pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN berupa belanja honorarium pengelola keuangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp34.035.500,- dan terealisasi sebesar Rp33.255.600,- atau 97,71%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya berupa pengadaan pakaian dinas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp261.341.580,- dan terealisasi sebesar Rp248.838.348,- atau 95,22%, melalui 6 (enam) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor berupa belanja alat listrik kantor pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa belanja alat tulis kantor, kertas, benda pos, bahan komputer dan perabot kantor pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa belanja foto copy dan cetak pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan berupa belanja bahan bacaan dan surat kabar harian untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 5) Fasilitas Kunjungan Tamu berupa belanja makan minum tamu/kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berupa belanja perjalanan dinas dalam dan luar provinsi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp82.809.000,- dan terealisasi sebesar Rp79.587.000,- atau 96,11%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya berupa pengadaan 6 unit peralatan dan mesin yaitu *laptop*, *printer* dan *sound system* pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp145.424.404,- dan terealisasi sebesar Rp140.533.340,- atau 96,64%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa belanja tagihan telepon, air, listrik dan tagihan TV berlangganan.
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berupa belanja jasa tenaga kebersihan, tenaga keamanan dan jasa tenaga sopir.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp526.049.480,- dan terealisasi sebesar Rp510.673.939,- atau 97,08%, melalui 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan berupa belanja pemeliharaan, BBM dan pajak kendaraan dinas jabatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh.

- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan berupa belanja pemeliharaan, BBM dan pajak kendaraan operasional roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh.
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa belanja pemeliharaan AC, pemeliharaan komputer dan *laptop* serta pemeliharaan *printer* pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh.
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya berupa rehab bangunan kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

III. Program Pengembangan Perumahan

Program Pengembangan Perumahan dengan indikator kinerja yaitu:

- Penurunan Angka *Backlog* dengan target kinerja 5,761 dan realisasi 5,617 dengan capaian kinerja 97,50%.

Pelaksanaan program ini didukung oleh 5 (lima) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp175.761.710,- dan terealisasi sebesar Rp97.621.078,- atau 55,54%, melalui 6 (enam) sub kegiatan yaitu:

- 1) Identifikasi Perumahan di lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota berupa penyusunan dokumen pendataan terkait identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana Kabupaten/Kota.
- 2) Identifikasi Lahan-Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan berupa penyusunan dokumen identifikasi lahan-lahan potensial sebagai relokasi perumahan.
- 3) Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya Yang Belum Tertangani berupa pendataan rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani.
- 4) Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana berupa pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana.
- 5) Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota berupa pendataan dan verifikasi calon penerima rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

- 6) Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus berupa pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus.

2. Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp102.090.550,- dan terealisasi sebesar Rp73.813.099,- atau 72,30%, melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana berupa Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada masyarakat/sukarelawan.
- 2) Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan berupa Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan.
- 3) Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan berupa koordinasi dalam menyepakati penerima dan jenis pelayanan.

3. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota:

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp203.197.200,- dan terealisasi sebesar Rp0,- atau 0%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana berupa belanja rehabilitasi rumah bagi korban bencana. Rendahnya realisasi sub kegiatan ini disebabkan oleh.....

4. Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp19.999.950,- dan terealisasi sebesar Rp0,- atau 0%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Atau Yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota berupa pelaksanaan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota. Rendahnya realisasi sub kegiatan ini disebabkan oleh.....

5. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp10.758.500,- dan terealisasi sebesar Rp9.146.430,- atau 85,02%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan berupa penerbitan rekomendasi PSU perumahan oleh pengembang.

IV. Program Kawasan Permukiman

Program Kawasan Permukiman dengan indikator kinerja yaitu:

- Persentase Rumah Layak Huni dengan target kinerja 97,94% dan realisasi 97,68% dengan capaian kinerja 99,73%.

Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 (sepuluh) Ha

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 2.684.847.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.634.674.109,- atau 98,48%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni berupa belanja peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Payakumbuh.
- 2) Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU berupa pendampingan pelaksanaan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang pembiayaannya berasal dari Pemerintah Pusat melalui APBN dengan Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) dan BAZNAS serta donatur lainnya.

V. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase Penyerahan PSU Dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah dengan target kinerja 24,71% dan realisasi 24,71% dengan capaian kinerja 100%.

Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 164.819.888,- dan terealisasi sebesar Rp. 48.581.448,- atau 29,48%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan berupa fasilitasi serah terima PSU perumahan oleh pengembang ke Pemerintah Kota Payakumbuh.

d. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	TindakLanjut	Tujuan/Masalah Yang diselesaikan
1.	Terkait besaran dana hibah sebesar Rp. 30.000.000,- saat ini untuk RTLH akan di usulkan melalui rapat Banggar selanjutnya agar bisa dinaikkan anggarannya.	Untuk tahun 2026, besaran anggaran untuk Peningkatan Kualitas RTLH adalah menjadi Rp. 35.000.000,- untuk 1 (satu) unit pada sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.	Besaran anggaran untuk peningkatan kualitas RTLH telah ditingkatkan nominalnya.
2.	Dianggarkan dana hibah untuk kegiatan pembangunan rumah baru bagi keluarg miskin.	Untuk tahun 2026, telah dianggarkan pembangunan baru rumah layak huni sebanyak 5 (lima) untit dengan besaran per unit Rp. 60.000.000,- pada sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.	Terdapat 5 (lima) unit pembangunan baru rumah layak huni di Kota Payakumbuh.

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh **Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh** dan **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh**.

I. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pelaksanaan urusan pada Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan melalui 2 (dua) kebijakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.230.682.035,- dan terealisasi sebesar Rp12.166.740.111,- atau 91,96 % dengan Capaian Kinerja Program dan Capaian Kinerja Keluaran sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Program Sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
1	Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Nilai IKM	90,00	90,43	99,37
2	Peningkatan fasilitas Penegakan Perda untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100%	100%	100%
			Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%
			Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 menit	15 menit	100%

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

c. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh tahun 2025 melalui 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub kegiatan sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target kinerja pada Tahun 2025 adalah 91,00 dengan realisasi 90,43 dan capaian 99,37.

Pelaksanaan program ini didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dengan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 68.250.150 dan terealisasi sebesar Rp 67.910.401 atau 99,50%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa penyusunan Renstra, Renja, RKA dan Rencana Aksi
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa penyusunan Laporan LKPJ, LPPD, ILPPD, LKJIP, LAKIP dan Laporan SPM

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 5.325.107.819 dan terealisasi sebesar Rp 4.457.107.970 atau 83,70%, melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berupa pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 40 Orang selama 1 tahun
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN berupa Penyediaan honorarium keuangan ASN serta pengelolaan administrasi keuangan.
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD berupa Jumlah laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 336.680.750 dan terealisasi sebesar Rp 336.630.366 atau 99,99%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya berupa penyediaan 209 paket pakaian dinas beserta kelengkapannya pada Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 170.966.798 dan terealisasi sebesar Rp 170.657.336 atau 99,82%, melalui 6 (enam) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor berupa pembelian bahan/ alat listrik pada Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh
- 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga berupa Pengadaan 3 unit peralatan yaitu 2 unit AC dan 1 unit Sound System pada Kantor Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh.
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa penyediaan Alat Tulis Kantor dan Bahan Kebersihan pada Kantor Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh.
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa penyediaan barang cetak yaitu cetak disposisi surat, NCR Kwitansi, SPM dan BKU serta penggandaan dan penjilidan pada Satuan polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran kota Payakumbuh.
- 5) Fasilitasi kunjungan Tamu berupa kegiatan penyediaan makanan dan minuman jamuan tamu pada Kantor Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh.
- 6) Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD berupa perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 742.212.252 dan terealisasi sebesar Rp 732.930.222 atau 98,75%, melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berupa pengadaan 1 unit kendaraan dinas roda empat dan 4 unit kendaraan dinas roda dua Satpol PP.
- 2) Pengadaan Mebel berupa pengadaan 25 unit mebel yaitu meja pejabat eselon 3, kursi tamu, lemari arsip dan filling cabinet.
- 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa pengadaan 15 unit peralatan dan mesin yaitu 4 unit Personal Computer, 3 unit printer, 1 set CCTV dan 3 unit laptop.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 137.426.194 dan terealisasi sebesar Rp 115.853.455 atau 84,30%, melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat berupa penyediaan materai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran kota Payakumbuh.
- 2) Penyediaan Jasa komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik berupa pembayaran sumber daya air dan listrik pada markas Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor berupa Jasa sopir operasional dan Tenaga Kebersihan sebanyak 5 orang.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 453.830.000 dan terealisasi sebesar Rp 437.838.177 atau 96,48%, melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan berupa Pembayaran pajak kendaraan bermotor, penggantian suku cadang atau service dan penyediaan Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas roda empat pejabat eselon II.
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berupa Pembayaran pajak kendaraan bermotor, penggantian suku cadang atau service dan penyediaan Bahan Bakar Minyak untuk 4 unit kendaraan dinas roda enam, 5 unit kendaraan roda empat dan 10 unit kendaraan roda dua.
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa perbaikan peralatan kerja service dan penggantian suku cadang seperti Laptop, AC, Personal Computer, printer.

II. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Kinerja yaitu:

1. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan dengan target kinerja 100% dengan realisasi 100% dan capaian 100%
2. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan dengan target kinerja adalah 100% dengan realisasi 100% dan capaian 100%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan yaitu:

1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 3.437.146.866 dan terealisasi sebesar Rp 3.403.433.063 atau 99,02%, melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah dini, Pencegahan dan penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pangamanan dan Pengawasan berupa biaya operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 2) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia berupa kegiatan Peningkatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yaitu pengadaan pakaian, pembayaran uang saku dan makan minum satuan perlindungan masyarakat.
- 3) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berupa pelaksanaan latihan Pengendalian Masyarakat, Pelatihan Baris Berbaris dan bela diri untuk anggota Satpol PP Kota Payakumbuh.

2. Penegakan Peraturan daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 764.857.400 dan terealisasi sebesar Rp 745.897.097 atau 97,52%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota berupa pelaksanaan operasional pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan peraturan daerah.
- 2) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota berupa operasional Tim 7 dalam memberantas penyakit masyarakat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan di Kota Payakumbuh.

III. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dengan indikator kinerja:

1. Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dengan target adalah 100% dan realisasi 100% dengan capaian 100%
2. Waktu Tanggap (Response Time) penanganan kebakaran dengan target 15 menit realisasi 15 menit dengan capaian 100%

Program ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan dengan 6 (enam) sub kegiatan yaitu:

1. Pencegahan, pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 1.665.699.606 dan terealisasi sebesar Rp 1.574.243.155 atau 94,51%, melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota berupa pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- 2) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ kota berupa pembayaran gaji, uang transportasi dan makan minum petugas Pemadam Kebakaran.
- 3) Pengadaan Sarana Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, dan Alat Pelindung Diri berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) dan Hydrant.

2. Investigasi Kejadian Kebakaran

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 6.494.450 dan terealisasi sebesar Rp 6.275.601 atau 96,63%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Investigasi Kejadian kebakaran meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian Kebakaran berupa penyusunan laporan investigasi lanjutan penelitian dan pengujian penyebab terjadinya kebakaran.

3. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 61.874.750 dan terealisasi sebesar Rp 60.100.294 atau 97,13%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran melalui sosialisasi dan Edukasi Masyarakat berupa pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat relawan pemadam kebakaran.

4. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap kondisi Membahayakan Manusia

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 60.135.000 dan terealisasi sebesar Rp 57.862.974 atau 96,22%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/ atau Mengancam Keselamatan Manusia berupa pembayaran uang transportasi penyelenggaraan Operasi Penyelamatan non kebakaran.

d. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD tahun n-1	Tindak lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
-	N	I	H I L

II. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Urusan Trantibum Linmas Sub Urusan Bencana diselenggarakan oleh **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh** melalui 2 (dua) program dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.075.868.265,- dan terealisasi sebesar Rp4.156.846.206,- atau 81,89%, dengan Capaian Kinerja Program dan Capaian Kinerja Keluaran sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	92	89.58	97.36%
			Penilaian AKIP oleh Inspektorat	81 (A)	80.50 (A)	
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga kota payakumbuh yang menerima pelayanan penanggulangan bencana	100%	100%	100%

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada table dibawah ini:

c. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam PK

Urusan Trantibumlinmas Sub urusan Bencana dilaksanakan melalui 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja yaitu

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target kinerja 92 dan realisasi 89.58 dengan capaian kinerja 97.36 %,
- Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat dengan target kinerja A dan realisasi A dengan capaian kinerja 100%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar. Rp31.951.100, dan terealisasi sebesar Rp27.211.551 atau 85,17 %, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Renja Perubahan, penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja,
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa Penyusunan Laporan akhir Tahun, LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Profil Pendidikan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp3.827.491.635 dan teralisasi sebesar Rp2.986.547.110 atau 78,02%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berupa penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan PPK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN berupa penyediaan honorarium Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp58.084.240 dan teralisasi sebesar Rp57.258.000 atau 98,57 %, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya berupa Penyediaan pakaian dinas untuk 34 paket pakaian dinas termasuk untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp138.097.930 dan teralisasi sebesar Rp133.205.562 atau 96,46 %, melalui 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk BPBD Kota Payakumbuh.
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa penyediaan peralatan kantor yaitu pengadaan cctv, *Vacum Cleaner*, speaker aktif untuk BPBD
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa Penyediaan Alat Tulis Kantor dan alat kebersihan pada kantor BPBD Kota Payakumbuh
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa penyediaan barang cetak, penggandaan dan penjilidan pada BPBD Kota Payakumbuh.
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan berupa penyediaan 2 jenis surat kabar yaitu surat kabar Padang Ekspres dan harian Singgalang.
- 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu berupa penyediaan makan minum tamu BPBD Kota Payakumbuh.
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berupa penyediaan biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil BPBD Kota Payakumbuh.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp201.988.230 dan teralisasi sebesar Rp196.225.245 atau 97,15 %, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan mebel berupa pengadaan filing cabinet 2 buah, pengadaan meja $\frac{1}{2}$ biro, merk/nama timbul, kursi dan lemari arsip
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa pengadaan mesin potong rumput, AC, komputer, printer hard disk eksternal dan laptop BPBD Kota Payakumbuh.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp127.218.280 dan teralisasi sebesar Rp98.801.015 atau 77,60 %, melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat berupa penyediaan materai untuk BPBD Kota Payakumbuh.
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa penyediaan jasa telekomunikasi/internet, dan listrik untuk untuk Lantai 1 pada Kantor bersama BPBD padang Kaduduak.
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berupa pembayaran gaji Out Sourcing kebersihan dan tenaga keamanan serta sopir .

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp234.170.000 dan teralisasi sebesar Rp218.273.336 atau 93,20%, melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan berupa pembayaran pajak, servis dan BBM kendaraan dinas/jabatan pada BPBD Kota Payakumbuh
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berupa penyediaan pembayaran pajak, servis dan BBM kendaraan dinas/jabatan
- 3) Pemeliharaan Mebel berupa pemeliharaan sarana kantor dan inventaris kantor
- 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa jasa pemeliharaan AC dan komputer serta printer

II. Program Penanggulangan Bencana

Program Penanggulangan bencana dengan indikator kinerja yaitu:

- Persentase warga kota payakumbuh yang menerima pelayanan penanggulangan bencana dengan target kinerja 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan yaitu:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp24.999.900 dan teralisasi sebesar Rp23.162.580 atau 92,65%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) berupa kegiatan sosialisasi

kebencanaan yang diberikan kepada sekolah-sekolah dan unsur masyarakat di Kota Payakumbuh

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp309.008.250 dan teralisasi sebesar Rp297.605.419 atau 96,30%, melalui 6 (enam) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota berupa kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh BPBD dengan adanya laporan dari masyarakat melalui kelurahan
- 2) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota berupa pengadaan rompi lapangan untuk anggota siaga bencana
- 3) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota berupa pelaksanaan apel siaga bencana yang dilakukan oleh berbagai unsur yang terdiri dari personil BPBD, Forum pengurangan resiko bencana F-PRB, taruna siaga bencana, Orari, PMI, Rapi, KSB dan relawan sekota Payakumbuh
- 4) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota yaitu pengembangan kapasitas personil melalui pelatihan dan assesment
- 5) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota berupa kegiatan piket siaga bencana dan pengadaan dan pemeliharaan alat atau sarana kebencanaan
- 6) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota yaitu kegiatan pelatihan yang diberikan kepada unsur RT dan RW di daerah rawan bencana serta unsur masyarakat yang berada didaerah rawan bencana sebanyak 130 Orang

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp102.868.250 dan teralisasi sebesar Rp100.951.949 atau 98,10%, melalui 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

- 1) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota yakni kegiatan penyelamatan yang dilakukan oleh personil BPBD melalui respon cepat jika terjadi bencana dan dilakukan melalui pembayaran uang transport bagi personil yang turun langsung menanggulangi bencana
- 2) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota yakni berupa kegiatan yang dilakukan sebagai upaya penyelamatan, pertolongan atau pencarian bagi korban bencana\ serta pengadaan alat-alat SAR atau kebencanaan

- 3) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota berupa penyediaan kebutuhan dasar logistik bagi korban bencana yang terdiri dari terpal plastik, tali plastik, tote bag dan kebutuhan dasar lainnya seperti : beras, minyak susu dan mie
- 4) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana berupa kegiatan yang dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi dengan instansi dan unsur terkait dalam penanggulangan bencana yang terjadi

4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp19.990.450 dan teralisasi sebesar Rp17.604.439 atau 88,06%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota berupa kegiatan yang dilakukan setelah terjadinya bencana dengan melakukan penghitungan cepat korban dan mengkaji kerugian serta pemberian bantuan dasar terhadap korban bencana, kegiatan ini baru bisa dilaksanakan apabila terjadi bencana

d. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	TindakLanjut	Tujuan/Masalah Yang diselesaikan
		NIHIL	

6. URUSAN SOSIAL

Urusan Sosial diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Payakumbuh melalui 3 kebijakan, dengan alokasi Belanja Langsung yaitu sebesar Rp5.906.114.975,- dan terealisasi sebesar Rp5.351.749.062 ,- atau 90,61%.

a. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan kapasitas pemerintah daerah berdasarkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	90	90,51	100%
2	Meningkatkan akses dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diarahkan kepada rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial serta pemberdayaan sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	100%	100%	100%
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase keakuratan data kemiskinan (DTKS)	100%	100%	100%
		Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	100%	100%	100%
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase keterlibatan kelompok masyarakat dalam peringatan hari pahlawan	100%	100%	100%
3	Optimalisasi peran dan fungsi PSKS serta pelaksanaan sistim layanan terpadu (SLRT) dalam penanggulangan kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	100%	100%

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

c. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target Indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebesar 90 terealisasi sebesar 90,51 atau capaian 100%. Capaian ini didukung 7 (Tujuh) kegiatan dengan 19 (Sembilan Belas) Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 75.718.500,- dan terealisasi sebesar Rp 43.361.233,- atau 57,27 melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa dokumen perencanaan tahunan Dinas Sosial, dalam bentuk Renja Dinas Sosial dan dokumen pelayanan publik berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Sosial.
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa dokumen evaluasi kinerja berupa LKJIP, LKPJ Evaluasi Renja Triwulan, Evaluasi Internal Triwulan, Laporan Rencana Aksi dan Evaluasi Kinerja.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 2.714.303.210,- dan terealisasi sebesar Rp 2.476.551.810,- atau 91,24% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berupa penyediaan pembayaran gaji dan tunjangan sebanyak 22 ASN
- 2) Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN berupa penyediaan pembayaran honorarium 19 orang pejabat pengelola keuangan, barang dan jasa sebanyak.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 32.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 28.160.000,- atau 88,00% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya berupa pengadaan 32 stel Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 304.577.850,- dan terealisasi sebesar Rp 288,427,147,- atau 94,70% melalui 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa pembayaran penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yaitu Bola Lampu Sorot, Kabel NYM, Lampu Philip, Steker Arde, Stop Kontak 4 Lubang, Lampu LED, Lampu LED Panel.
- 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga berupa penyediaan 4 rekening peralatan rumah tangga yaitu Belanja Alat Modal Pendingin, Belanja Alat Modal Rumah Tangga Lainnya, Belanja Home Use dan Belanja Rumah Tangga Umum
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa Penyediaan 5 Bahan Logistik Kantor yaitu Alat Tulis, Kertas dan Cover, benda Pos, Bahan Komputer, Perabot Kantor.
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa Barang Cetak dan Penggandaan 36 meter spanduk, 21 jilid, 350 cetak map, 8 cetak kwitansi, 12 cetak blangko disposisi, 5 Kotak cetak amplop kop dinas
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan berupa Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan berupa yaitu Padang Ekspres dan Haluan.
- 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu berupa penyediaan fasilitasi untuk tamu.
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berupa penyediaan biaya perjalanan dinas dalam maupun luar daerah Provinsi Sumatera Barat bagi PNS

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 354.545.000,- dan terealisasi sebesar Rp 332.580.393,- atau 93,80% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pengadaan mebel berupa penyediaan paket mebel yaitu kursi tamu, meja rapat dan lemari arsip.
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa pembelian langsung 9 Unit PC dan printer.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 282.429.715,- dan terealisasi sebesar

Rp 274.811.542,- atau 97,30% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa pembayaran rekening tagihan 2 Rekening Telepon pada Dinas Sosial, Tagihan Air pada Taman Makan Pahlawan dan Gudang Talawi , Tagihan Listrik pada Gedung Gudang Talawi
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berupa pembayaran honorarium 12 Laporan Tenaga Jasa Perorangan dan tenaga Outsourcing

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 273.060.000,- dan terealisasi sebesar Rp 206.710.233,- atau 75,70% melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan berupa pembayaran BBM, suku cadang, service dan pajak kendaraan roda empat sebanyak 1 unit kendaraan.
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berupa pembayaran BBM, suku cadang, service dan pajak kendaraan bermotor 17 unit kendaraan.
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa pemeliharaan peralatan dan mesin sebanyak 12 unit.

II. Program Pemberdayaan Sosial.

Target program ini adalah Persentase PSKS yang berdaya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebesar 100% dengan realisasi 100%. Capaian ini tergolong tinggi, karena selama tahun 2025 jumlah PPKS yang diberdayakan dan dibantu meningkat. Capaian ini didukung dengan pelaksanaan 2 (dua) kegiatan dengan 5 (lima) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kab/kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 6.093.500,- dan terealisasi sebesar Rp 5.825.920,- atau 95,61% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Koordinasi dan Sikronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang berupa Sosialisasi Pengumpulan dan Barang

2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 384.389.000,- dan terealisasi sebesar Rp 368.682.906,- atau 95,91% melalui 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

- 1) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/ Kota berupa pembinaan kepada PSM
- 2) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota pembinaan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kota Payakumbuh
- 3) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota berupa pembinaan karang taruna, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan kelembagaan sosial lain yang ada di Kota Payakumbuh
- 4) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) berupa pembinaan kepada LK3 yang merupakan suatu lembaga yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian atau penyebarluasan informasi, outreach (penjangkauan) dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional

III. Program Rehabilitasi Sosial

Target program ini adalah Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS sebesar 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%. Capaian ini didukung dengan pelaksanaan 1 kegiatan dengan 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 571.291.050,- dan terealisasi sebesar Rp 517.658.760,- atau 90,61% melalui 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Permakanan berupa pemberian bantuan berupa bahan makanan pokok dan tambahan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis luar panti
- 2) Penyediaan Sandang berupa sandang untuk anak terlantar di luar panti
- 3) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga berupa Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga berupa kegiatan untuk memfasilitasi orang terlantar

dalam perjalanan, pemulangan gelandangan dan pengemis ke daerah asal dan penyelenggaraan pemakaman mayat terlantar

- 4) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial berupa fasilitasi pengiriman anak terlantar, penyandang disabilitas terlantar dan lanjut usia terlantar ke panti-panti sosial dalam dan luar Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan dan perawatan sosial.

IV. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Target program ini adalah Persentase keakuratan data kemiskinan (DTKS) yang berhasil dilaksanakan sebesar 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%. Tingginya capaian kegiatan ini karena didukung 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 680.239.850,- dan terealisasi sebesar Rp 649.623.796,- atau 95,50% melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota berupa melakukan validasi dan verifikasi kesesuaian data dilapangan
- 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota berupa operasional penanganan kemiskinan dan pengaduan masyarakat pada Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) misalnya layanan untuk masyarakat yang ingin mengurus Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan indikator jumlah pengaduan individu (RTS)
- 3) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat berupa bantuan uang untuk pengembangan ekonomi masyarakat miskin.

V. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Target program ini adalah Persentase korban bencana yang tertangani yang berhasil dilaksanakan sebesar 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%. Tingginya capaian kegiatan ini karena didukung 2 (dua) kegiatan dengan 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 83.212.800,- dan terealisasi sebesar Rp 27.274.535,- atau 32,78% melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Makanan berupa berupa pemberian bantuan permakanaan dan pelayanan untuk korban bencana alam atau bencana sosial.
- 2) Penyediaan Sandang berupa pemberian bantuan sandang bagi korban bencana
- 3) Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi berupa penyediaan tempat penampungan bagi korban bencana

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiap siagaan Bencana kabupaten/kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 20.037.000,- dan terealisasi sebesar Rp 19.452.600,- atau 97,08% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana berupa pembelian baju seragam anggota tagana 18 Orang

VI. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Target program ini adalah Persentase usulan masyarakat dan stakeholder yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang berhasil dilaksanakan sebesar 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%. Tingginya capaian kegiatan ini karena didukung 1 kegiatan dengan 2 (dua) sub kegiatan berikut:

1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 124.217.500,- dan terealisasi sebesar Rp 112.628.187,- atau 90,67% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota berupa rehabilitasi (Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa, Makam Pejuang '45 dan Makam Mayat Terlantar) dan pelaksanaan Hari Pahlawan
- 2) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota berupa pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa dan Makam Pejuang '45 serta Makam Mayat Terlantar

d. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD tahun N-1	Tindak lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan	
N	I	H	I	L

7. URUSAN TENAGA KERJA

Urusan Tenaga Kerja diselenggarakan oleh **Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian** melalui 6 (enam) kebijakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.171.335.557,- dan terealisasi sebesar Rp4.515.805.613,- atau 87,32%, dengan Capaian Kinerja Program dan Capaian Kinerja Keluaran sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Angkatan Kerja untuk Memenuhi Kebutuhan Pasar	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	92,00	96,32	104,70%
2	Mengembangkan Program Pelatihan Keterampilan dan Pendidikan Vokasi bagi Masyarakat Pencari Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	3,87%	13,80%	356,59%
3	Memperkuat Kerjasama, Kemitraan dan Pemanfaatan Teknologi untuk Menyerap dan/atau Menciptakan Lapangan Kerja Baru					
4	Mengembangkan Kluster Industri dan Inkubasi Bisnis dalam Penciptaan Pengusaha Baru					
5	Meningkatkan Kualitas SDM Enterpreneur Melalui Pemberdayaan, Pendampingan serta Pendidikan Formal dan Informal					
6	Mengembangkan/Fasilitasi Program Magang, Pelatihan Industri dan Sertifikat Keahlian bagi Tamatan Sekolah Kejuruan dan Pencari Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	16,53%	17,46%	105,63%

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
		Program Hubungan Industrial	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	1424 Orang	3256 Orang	228,65%

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada table dibawah ini:

c. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam PK

Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan melalui 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja yaitu :

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target kinerja 92,00 dan realisasi 96,32 dengan capaian kinerja 104,70%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp96.608.800,- dan teralisasi sebesar Rp86.406.981,- atau 89,44%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Renja Perubahan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan RKA Perubahan.
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa penyusunan laporan evaluasi kinerja selama satu tahun.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp2.746.153.533,- dan teralisasi sebesar Rp2.248.551.152,- atau 81,88%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berupa penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan PPK) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN berupa pembayaran honorarium penanggung jawab keuangan, dan pengelola barang dan jasa di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp31.625.000,- dan teralisasi sebesar Rp30.095.511,- atau 95,16%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya berupa penyediaan pakaian dinas baru beserta atribut dan kelengkapan lainnya untuk seluruh pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp380.838.000,- dan teralisasi sebesar Rp358.864.793,- atau 94,23%, melalui 8 (delapan) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan (baterai, bola lampu, isolasi listrik, kabel, dan stop kontak) bangunan kantor untuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa pengadaan *filling cabinet*, lemari arsip, rak besi, dan kamera pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga berupa pengadaan mebeul, mesin potong rumput, AC, kulkas, dispenser, dan karpet pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa penyediaan alat tulis kantor pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa penyediaan barang cetak, penggandaan dan penjilidan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan berupa penyediaan surat kabar Padang Ekspres dan surat kabar Haluan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
- 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu berupa penyediaan makan minum dan snack tamu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
- 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berupa penyediaan biaya perjalanan dinas bagi ASN (PNS dan PPK) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp415.533.000,- dan teralisasi sebesar Rp392.194.499,- atau 94,38%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan berupa pengadaan kendaraan dinas operasional lapangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa pengadaan Laptop, Personal Computer (PC), Tablet, Printer, dan Scanner pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp268.281.586,- dan teralisasi sebesar Rp214.937.252,- atau 80,12%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa penyediaan jasa telekomunikasi/internet, air dan listrik untuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berupa pembayaran gaji Tenaga Harian Lepas (THL) dan *Outsourcing* (sopir, tenaga kebersihan, dan pramu bakti) pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp366.010.000,- dan teralisasi sebesar Rp346.156.171,- atau 94,58%, melalui 5 (lima) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan berupa pembayaran pajak, servis dan BBM kendaraan dinas jabatan Eselon II pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berupa penyediaan pembayaran pajak, servis dan BBM kendaraan dinas operasional/lapangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
- 3) Pemeliharaan Mebeul berupa jasa pemeliharaan sarana kantor dan perbaikan kursi tamu/sofa pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
- 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa jasa pemeliharaan racun api, genset, CCTV, mesin potong rumput, AC, komputer/note, dan printer pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya berupa pemeliharaan gedung dan bangunan kantor pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

II. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja

Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi dengan target kinerja 3,87% dan realisasi 13,80% dengan capaian kinerja 356,59%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp731.787.386,- dan teralisasi sebesar Rp710.518.871,- atau 97,09%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi berupa paket pelatihan, yaitu pelatihan menjahit, pelatihan pembuatan roti/kue, pelatihan MUA, pelatihan bedcover, pelatihan servis HP dan pelatihan komputer.

2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp21.726.250,- dan teralisasi sebesar Rp20.337.930,- atau 93,61%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta berupa pemberian pembinaan kepada lembaga pelatihan kerja swasta.

III. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program Penempatan Tenaga Kerja dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri dengan target kinerja 16,53% dan realisasi 17,46% dengan capaian kinerja 105,63%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp29.974.450,- dan teralisasi sebesar Rp28.048.471,- atau 93,57%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Perluasan Kesempatan Kerja berupa pemberian sosialisasi peluang kerja ke Luar Negeri kepada masyarakat.

2. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp61.303.052,- dan teralisasi sebesar Rp59.477.024,- atau 97,02%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online berupa penyediaan pelayanan bagi pencari dan pemberi kerja yang terdaftar pada pasar kerja melalui sistem online dan pembayaran honor Tenaga Jasa Perorangan (TJP).

IV. Program Hubungan Industrial

Program Hubungan Industrial dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial dengan target kinerja 1424 Orang dan realisasi 3256 Orang dengan capaian kinerja 228,65%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp21.494.500,- dan teralisasi sebesar Rp20.216.958,- atau 94,06%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota berupa pemberian konsultasi pada pekerja dan pemberi kerja yang melapor ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
- 2) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota berupa penyelesaian kasus perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja yang melapor ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

d. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang diselesaikan
1.	Seleksi peserta pelatihan untuk lebih diperketat dan betul-betul bagi yang berminat sehingga diharapkan lebih tepat sasaran	Melakukan pengetatan seleksi peserta pelatihan melalui verifikasi administrasi, wawancara dan komitmen, serta pemanfaatan data pencari kerja terdaftar dan basis data sosial ekonomi untuk memastikan peserta merupakan pencari kerja aktif dan sesuai dengan kebutuhan	Meningkatkan ketepatan sasaran peserta pelatihan, menurunkan tingkat ketidakhadiran dan putus pelatihan, serta meningkatkan peluang lulusan pelatihan untuk bekerja atau berwirausaha
2.	Menjalin program kerjasama Dalam Negeri maupun Luar Negeri untuk penyaluran tenaga kerja yang ada di Kota Payakumbuh	Disnakerperin dengan memperhatikan keterbatasan sumber daya manusia, melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyaluran tenaga kerja secara selektif melalui pemanfaatan jejaringan kerjasama yang telah ada, koordinasi dengan instansi vertikal dan Perangkat Daerah Provinsi, serta optimalisasi sistem informasi ketenagakerjaan	Memperluas akses kesempatan kerja bagi pencari kerja Kota Payakumbuh, meningkatkan penempatan tenaga kerja, serta menekan angka pengangguran terbuka

8. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Payakumbuh melalui 2 (dua) kebijakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.594.860.986,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.318.133.103- atau 77,18% dengan Capaian Kinerja Program dan Capaian Kinerja Keluaran sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
1	Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai IKM	90,50	92,12	101,80%
			Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100%	100%	100%
			Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	A	100%
			Persentase pelaksanaan program dan kegiatan APBD yang bebas temuan	90%	90%	100%
2	Optimalisasi program pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemenuhan hak anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan yang duduk di legislatif	16%	16%	100%
			Persentase ARG belanja APBD	3,82%	4,21%	111%
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	100%	100%	100%
			Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100 rb penduduk	0,025%	0,026%	104%
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Organisasi Perempuan Aktif	33 lembaga	33 lembaga	100%

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Jumlah perwako, himbauan, MOU terkait perlindungan anak	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Program Pemenuhan Hak Anak	Jumlah pencapaian Kota Layak Anak (KLA)	725 skor	690 skor	95,17%
			Jumlah perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)	9 kelurahan	9 kelurahan	100%
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kekerasan terhadap anak	0,026%	0,091%	350%
			Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kab/kota	100%	100%	100%

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

c. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan melalui beberapa Program, kegiatan dan sub kegiatan, dimana target kinerja programnya telah ditetapkan kedalam Perjanjian Kinerja.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota dengan indikator:

- a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target pada tahun 2025 adalah 90,60 dan realisasi 82,19 dengan capaian kinerja 90,72%.
- b. Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat dengan target pada tahun 2025 adalah A dan realisasi A dengan capaian kinerja 100%,
- c. Persentase pelaksanaan program dan kegiatan APBD yang bebas temuan dengan target pada tahun 2025 adalah 90% dan realisasi 90% dengan capaian kinerja 100%.

Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar 11,691,500 dan terealisasi sebesar Rp 11,186,880 atau 95,68%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa penyusunan laporan pencapaian kinerja dan realisasi kinerja sesuai pedoman dengan target sebanyak 2 dokumen

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 3,678,484,797,- dan terealisasi sebesar Rp 2,639,675,409,- atau 71,76%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berupa pembayaran gaji dan tunjangan terhadap 22 orang ASN DP3AP2KB.
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN berupa pembayaran honorarium pejabat pengelola keuangan DP3AP2KB

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 27,000,000,- dan terealisasi sebesar Rp 25,396,800,- atau 94,06%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya berupa pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya sebanyak 34 stel.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 580,733,750,- dan terealisasi sebesar Rp 550,997,333,- atau 94,88%, melalui 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor berupa penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.
- 2) Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor berupa penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 1 unit.
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa penyediaan 22 paket bahan logistik kantor.
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa penyediaan barang cetak, penjilidan dan penggandaan.
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan berupa penyediaan surat kabar lokal sebanyak 672 eksemplar.
- 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu berupa penyediaan makan dan minum tamu ke DP3AP2KB.
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berupa penyediaan biaya perjalanan dinas rangka mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi baik dalam daerah maupun luar daerah Provinsi Sumatera Barat bagi ASN DP3AP2KB

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 110,795,000,- dan terealisasi sebesar Rp 107,892,000,- atau 97,38%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa pengadaan 5 item peralatan dan mesin lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 226,773,158,- dan terealisasi sebesar Rp 194,841,074,- atau 85,92%, melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat berupa Penyediaan benda pos/materai

- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa Penyediaan belanja jasa rekening air, listrik, dan telpon pada DP3AP2KB.
- 3) Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor berupa peralatan kebersihan dan pembayaran honorarium tenaga administrasi perkantoran sebanyak 10 orang.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 406,136,584,- dan terealisasi sebesar Rp 358,531,278,- atau 88.28%, melalui 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan berupa penyediaan jasa servis, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak dan pelumas kendaraan dinas jabatan eselon 2.
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berupa penyediaan jasa servis, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak dan pelumas kendaraan dinas roda dua dan roda empat sebanyak 41 unit.
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa penyediaan biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya berupa penyediaan biaya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya.

II. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator :

- a. Persentase ARG belanja langsung APBD dengan target pada tahun 2025 adalah 4,02% dan realisasi 7,40% dengan capaian kinerja 184,08%*
- b. Persentase Perempuan yang duduk di legislatif dengan target pada tahun 2025 adalah 16% dan realisasi 16% dengan capaian kinerja 100%

Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/ Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 6,807,200,- dan terealisasi sebesar Rp 6,413,950,- atau 94.22% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Advokasi Kebijakan dan pendamping pelaksanaan PUG termasuk PPRG berupa Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) kewenangan kabupaten/kota

2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi Pada organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 69,394,300,- dan terealisasi sebesar Rp 67,458,131,- atau 97.21%% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi berupa Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota terhadap organisasi masyarakat yang menjadi target.

III. Program Perlindungan Perempuan

Program Perlindungan Perempuan dengan indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan target pada tahun 2025 adalah 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%,
- b. Resiko kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) dengan target pada tahun 2025 adalah 0,0248% dan realisasi 0,006% dengan capaian kinerja 175,81%.

Program Perlindungan Perempuan didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/ Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 118,237,000,- dan terealisasi sebesar Rp 116,185,169,- atau 98.26% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota berupa pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
- 2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota berupa Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota terhadap 5 Perangkat Daerah.

2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 97,314,750,- dan terealisasi sebesar Rp 17,921,897,- atau 18.42% melalui 1 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota berupa layanan korban kekerasan perempuan melalui Mediko Lega

3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah kabupaten/ Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 50,036,500,- dan terealisasi sebesar Rp 42,602,985,- atau 85.14% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/ kota berupa pelaksanaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

IV. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Organisasi Perempuan Aktif dengan target pada tahun 2025 adalah 34 lembaga dan realisasi 34 lembaga dengan capaian kinerja 100%

Program Peningkatan Kualitas Keluarga didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 340,844,650,- dan terealisasi sebesar Rp 255,444,746,- atau 74.94% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak kewenangan Kab/Kota berupa advokasi dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak kewenangan Kab/Kota terhadap 1 perangkat daerah
- 2) Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota berupa Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota untuk 53 kelompok

2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kab/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 242,969,000,- dan terealisasi sebesar Rp 231,804,181,- atau 95.40% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas keluarga Tingkat Daerah Kab/Kota berupa Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kab/Kota sebanyak 27 orang

V. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak dengan indikator kinerja yaitu : Jumlah perwako, himbauan, MOU terkait perlindungan anak dengan target pada tahun 2025 adalah 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen dengan capaian kinerja 100%,

Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak yang didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

1. Pengumpulan, pengolahan Analisis data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di tingkat Daerah Kab/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 7,666,700,- dan terealisasi sebesar Rp 7,082,049,- atau 92.37% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota berupa Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 1 dokumen
- 2) Penyajian dan Pemanfaatan data gender dan anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota berupa Penyajian dan Pemanfaatan data gender dan anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 20 dokumen.

VI. Program Pemenuhan Hak Anak

Program Pemenuhan Hak Anak dengan indikator kinerja yaitu :

- a. Jumlah pencapaian Kota Layak Anak (KLA) dengan target pada tahun 2025 adalah 750 skor dan realisasi 690 skor dengan capaian kinerja 92,67%;
- b. Jumlah perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) dengan target pada tahun 2025 adalah 9 kelurahan dan realisasi 9 kelurahan dengan capaian kinerja 100,00%.

Program Pemenuhan Hak Anak yang didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 73,516,350,- dan terealisasi sebesar Rp 61,258,072,- atau 83.33% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha kewenangan Kabupaten/Kota berupa pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha kewenangan Kabupaten/Kota terhadap 35 organisasi.

- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota berupa pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

VII. Program Perlindungan Khusus Anak

Program Perlindungan Khusus Anak dengan indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase kekerasan terhadap anak dengan target pada tahun 2023 adalah 0,023% dan realisasi 0,091% dengan capaian kinerja 395,65%.
- b. Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak dengan target 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.

Program Perlindungan Khusus Anak didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

1. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 110,709,400,- dan terealisasi sebesar Rp 82,679,460,- atau 74.68% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak kewenangan Kabupaten/Kota berupa Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak kewenangan Kabupaten/Kota dan konsep pencegahan anak dari bahaya perilaku menyimpang terhadap 64 orang.

2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 107,759,500,- dan terealisasi sebesar Rp 14,800,668,- atau 13.73% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota berupa pelaksanaan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini karena anggaran untuk pelayanan pengaduan masyarakat menyesuaikan dengan pengaduan yang masuk ke OPD

3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 42,586,450,- dan terealisasi sebesar Rp. 20,845,485,- atau 48.95% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota berupa pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terhadap 31 orang

Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini karena Efisiensi pelaksanaan perjalanan dinas pelatihan peningkatan kapasitas SDM

d. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD tahun N-1	Tindak lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1	Sisa anggaran terletak pada Balanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp 1.809.580.712 karena adanya sisa anggaran untuk JFT yang sudah pensiun dan juga untuk ASN yang direncanakan untuk UPTD Perlindungan Anak	Akan memaksimalkan pengisian jabatan pada UPTD PPA.	
	Sisa anggaran juga disebabkan oleh Standar Biaya DAK lebih besar dari Standar Biaya Pemerintah Daerah	Akan berkoordinasi dengan Kemen PPA dan Kemendukbangga terkait standar Biaya DAK nf PPA dan BOKB.	

9. URUSAN PANGAN

Urusan Ketahanan Pangan diselenggarakan oleh **Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh** melalui 5 (lima) Kebijakan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp3.309.282.732,-** dan terealisasi sebesar **Rp2.879.799.147,-** atau **87,02%**, dengan capaian kinerja program dan capaian kinerja keluaran sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Pemantapan Pengelolaan keuangan Daerah, Termasuk Pendapatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	87,01	101,17%
2	Peningkatan produktivitas komoditi pertanian strategis	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase cadangan pangan yang tersedia (masy+Pemda)	53 %	90,29%	170,36%
3	Peningkatan pola konsumsi pangan masyarakat sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE	62%	93,7%	151,12%
			Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan	58%	71%	122,41%
4	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan	Program Penanganan kerawanan pangan	Skor PPH Ketersediaan	89,20	89,20	100,00%

5	Peningkatan pola konsumsi pangan masyarakat sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi	90%	100%	111,11%

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada tabel terlampir

Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada table dibawah ini:

c. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam PK

Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui 5 (lima) Program 14 (empat belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dengan indikator kinerja yaitu

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target Kinerja pada tahun 2025 adalah 86 dan terealisasi 87,01 dengan capaian 101,17%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah,

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp59.711.250,- dan terealisasi sebesar Rp54.641.946,- atau 91,51% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah, berupa penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang terdiri dari Penyusunan Renstra , penyusunan Rencana Kerja (Renja) awal dan Rencana Kerja (Renja) perubahan, dokumen RKA.
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, berupa penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang terdiri dari LKJIP, LKPI, Evaluasi Renja Triwulan, Evaluasi Internal Triwulan, Laporan Rencana Aksi, Evaluasi Kinerja.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp2.123.995.616,- dan terealisasi sebesar Rp1.765.630.306,- atau 83,13% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, berupa pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan TPPNS pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh
- 2) Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, berupa pembayaran honorarium pengelola keuangan, pejabat pengadaan barang dan jasa

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp31.633.000,- dan terealisasi sebesar Rp28.169.700,- atau 89,05% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan, berupa kegiatan pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Pakaian Batik Tradisional.
- 2) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai , berupa penilaian kinerja pegawai Dinas Ketahanan Pangan.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp124.348.950,- dan terealisasi sebesar Rp119.325.329,- atau 95,96% melalui 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor yaitu baterai alkaline AAA, baterai alkaline AA, Fiting Gantung, Isolasi Listrik, Lampu LED, Lampu LHE Spiral, Stop Kontak 4 lubang.
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, berupa penyediaan bahan logistik kantor yaitu 3 paket belanja bahan lainnya, 14 paket belanja alat tulis kantor, 2 paket belanja bahan untuk kegiatan kantor kertas dan cover, 1 paket belanja untuk benda pos, 6 paket belanja bahan komputer, 20 paket belanja perabot kantor, 3 paket belanja alat/bahan kegiatan kantor lainnya, 5 paket belanja natura .
- 3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, berupa penyediaan barang cetakan dan penggandaan yaitu cetak map kop dinas, fotocopy, dan cetak spanduk.
- 4) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, berupa penyediaan surat kabar dengan target sebanyak 2 media yaitu Padang Ekspres dan Singgalang.
- 5) Fasilitasi kunjungan tamu, berupa belanja makan dan minum untuk kunjungan tamu.
- 6) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, berupa penyediaan biaya perjalanan dinas dalam maupun luar daerah Provinsi Sumatera Barat bagi PNS Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dalam rangka mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp212.455.000,- dan terealisasi sebesar Rp206.649.328,- atau 97,27% melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pengadaan Mebel, berupa pengadaan mebel yaitu pengadaan 4 unit rak besi, 1 unit kursi kerja, 45 unit kursi rapat, 1 unit kursi tamu, 1 unit meja kerja, 1 unit meja rapat dan 1 unit mimbar/podium .
- 2) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya, berupa pengadaan peralatan dan mesin lainnya yaitu pengadaan 1 unit layar proyektor, 1 unit proyektor, 1 unit laptop, 2 unit PC .

- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, berupa pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yaitu pengadaan 1 unit speaker portable, 1 unit camera, 1 unit Tripod kamera fotopro.

6. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp116.355.816,- dan terealisasi sebesar Rp114.079.363,- atau 98,04% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, berupa pembayaran rekening rekening listrik dan indihome pada dinas Ketahanan Pangan .
- 2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor, berupa pembayaran gaji jasa pelayanan umum kantor 1 orang supir, 1 orang keamanan dan 1 orang tenaga kebersihan outsourcing.

7. Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp127.160.000,- dan terealisasi sebesar Rp123.102.870,- atau 96,81% melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, berupa pemeliharaan rutin kendaraan dinas roda 4 eselon II yaitu penyediaan BBM, Pembayaran pajak dan servis sebanyak 1 unit.
- 2) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional, berupa pemeliharaan rutin kendaraan dinas roda 2 sebanyak 8 unit, roda 4 sebanyak 2 unit penyediaan BBM, pembayaran pajak dan servis
- 3) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, berupa pemeliharaan sarana kantor yaitu pemeliharaan 1 unit AC kantor , 7 unit Komputer dan 5 unit printer .

II. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dengan indikator kinerja :

- Persentase cadangan pangan yang tersedia (masy+Pemda) dengan target 53 % dan terealisasi 90,29% dengan capaian 170,35%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kab/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp7.957.750,- dan terealisasi sebesar Rp7.523.405,- atau 94,54% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik berupa rapat/pertemuan bagi pelaku usaha infrastruktur logistik yaitu pengusaha / pengelola penggilingan padi dan pedagang beras mitra SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) se-Kota Payakumbuh

III. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat dengan indikator kinerja yaitu:

- Persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE dengan target 62% dan realisasi 93,7% dengan pencapaian 151,13%
- Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan dengan target 58 % dan realisasi 71% dengan pencapaian 122,41%.

Pelaksanaan program ini didukung 3 (tiga) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp182.276.750,- dan terealisasi sebesar Rp164.164.814,- atau 90,06% melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, berupa pemberian bantuan baglog jamur kepada kepada 30 kepala keluarga yang masuk wilayah prioritas 3 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2024.
- 2) Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota, berupa pelaksanaan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 3 kali dalam setahun, penyampaian informasi harga melalui Radio Safasindo 350 hari.
- 3) Penyusunan Neraca Bahan Makanan(NBM), berupa penyusunan dokumen Neraca Bahan Makanan.

2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan pangan Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp6.229.000,- dan terealisasi sebesar Rp5.752.169,- atau 92,34% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kab/Kota, ini berupa rapat dan koordinasi terkait revisi Perda cadangan Pangan

3. Kegiatan Pelaksanaan pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp240.340.950,- dan terealisasi sebesar Rp216.742.094,- atau 90,18% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun, berupa pembuatan buku PPH (Pola Pangan Harapan) Konsumsi
- 2) Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, berupa :
 - Pelatihan pengolahan pangan, yang terdiri dari Pelatihan pengolahan pangan berbahan dasar pangan lokal, Pelatihan pengolahan produksi hasil KWT (Kelompok Wanita Tani) dan Pelatihan pengolahan pangan peserta lomba pengolahan pangan tingkat Provinsi Sumatera Barat.
 - Sosialisasi Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), yang terdiri dari:
 1. Sosialisasi B2SA untuk tenaga pendidik KB, SD dan SMP serta sosialisasi B2SA untuk peserta didik (b2SA go To School)
 2. Gelar Pangan Lokal
 3. Lomba Pengolahan Pangan Tingkat Kota dan Provinsi
 4. Kebun B2SA KWT dan d Dinas Ketahanan Pangan
 5. Lomba Adhikarya Pangan Nusantara (APN)
 6. Lomba Pangan Got Talent Kota Payakumbuh
 7. Makan Bergizi Gratis

IV. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program Penanganan kerawanan Pangan dengan indikator kinerja Skor PPH Ketersediaan dengan target 89,20 dan realisasi 89,20 dengan capaian 100%. Pelaksanaan program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp5.066.000,- dan terealisasi sebesar Rp4.818.943,- atau 95,12% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan, berupa pembuatan peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan

2. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp5.880.000,- dan terealisasi sebesar Rp5.461.094,- atau 92,88% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota, berupa pembuatan peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

V. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program Pengawasan keamanan Pangan dengan indikator kinerja persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi dengan target 90% terealisasi 100% dengan capaian 111,11%. Pelaksanaan program ini didukung 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp65.872.650,- dan terealisasi sebesar Rp63.737.786,- atau 96,76% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah kabupaten/Kota, berupa :
 - Temu Teknis Penguatan Kelembagaan
 - Pengujian sampel pangan segar
 - Media Komunikasi Informasi dan Edukasi
 - Pengawasan keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
- 2) Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah kabupaten Kota, berupa:
 - Sosialisasi Keamanan Pangan Segar
 - Sosialisasi Keamanan Pangan untuk Siswa/Peserta Didik
 - Sosialisasi Pelaku Usaha

d. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD tahun n-1	Tindak lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
1.	Untuk memeperhatikan penambahan personil	Tahun 2024, sudah ada penambahan personil 2 (dua) orang PPPK. Dan untuk Tahun 2025, sudah ada penambahan personil 3 (tiga) orang PPPK, 1 (satu) orang CPNS dan 2 (dua) orang PPPK Paruh Waktu.	Dengan bertambahnya personil, diharapkan pelaksanaan kegiatan makin optimal.

10. URUSAN PERTANAHAN

Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Payakumbuh melalui 1 (satu) kebijakan yang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39,667,250,- dan terealisasi sebesar Rp. 39,276,465,- atau 99,01% dengan capaian kinerja program dan capaian kinerja keluaran sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Program Sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Capaian kinerja indikator program sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) perubahan yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Dan Pengelolaan Pertanahan	Program Penatagunaan Tanah	Persentase penetapan tanah untuk fasilitas umum perkotaan	100,00	100,00	100,00%

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian Kinerja Keluaran kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

c. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

I. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

Program penatagunaan tanah dengan Indikator kinerja yaitu :

- Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum sebesar 100.00 terealisasi 100.00 dengan capaian 100.00%

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

1. Penggunaan Tanah yang Hamparannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 202,330,562,- dan terealisasi sebesar Rp. 184,151,733,- atau 91.02% melalui 1 (Satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah berupa pengurusan sertifikat hak pakai asset pemerintah Kota Payakumbuh.

d. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD tahun n-1	Tindak lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan		
	N	I	H	I	L

11. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh **Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh** melalui 6 (enam) kebijakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp26.147.590.470,- dan terealisasi sebesar Rp21.102.9349.41,- atau 80,71%, dengan uraian sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Program Sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian (%)
1	Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai IKM	89	89	100
2	Mendorong peningkatan kualitas Lingkungan Hidup melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen informasi lingkungan hidup yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	100%
3	Meningkatkan Usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,27	58,52	100%
4	Meningkatkan ruang terbuka hijau.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH publik	14,87%	14,87%	100
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha kegiatan penghasil limbah B3 yang memiliki dokumen lingkungan dan memiliki izin PPLH	60%	57%	95%

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian (%)
5	Meningkatkan Usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Pelindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	73%	74%	101%
6	Meningkatnya persentase cakupan pelayanan persampahan	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Kelompok Masyarakat dan sekolah yang terbina dalam pengelolaan lingkungan	20%	29,8%	149%
		Program Pengelolaan Persampahan	persentase pengelolaan sampah	95,75%	94,62%	98,8%

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

c. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Urusan lingkungan hidup dilaksanakan melalui 8 (delapan) program 14 (empat belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator kinerja yaitu Nilai IKM dengan target kinerja pada tahun 2025 adalah 89 dan terealisasi 80,71 dengan capaian kinerja 90,68% .

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 6 (enam) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp44.760.650,- dan teralisasi sebesar Rp33.401.327,- atau 74,62%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2025
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa pelaksanaan penyusunan dokumen/laporan Pencapaian Kinerja yaitu berkas LPPD, berkas pakta integritas dan perjanjian kinerja (PK), berkas SAKIP 2025, dokumen rencana kinerja tahunan , dokumen laporan CALBK 2025

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp3.529.406.108,- dan teralisasi sebesar Rp3.038.748.495,- atau 86,10%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berupa pembayaran gaji beserta tunjangan untuk ASN pada Dinas Lingkungan Hidup selama satu tahun
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN berupa pembayaran honorarium pejabat pengadaan dan penyediaan tunjangan lainnya bagi ASN

3. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 198.924.000,- dan teralisasi sebesar Rp 162.819.795,- atau 81,85%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya berupa pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya sebanyak 2 paket dan 157 pasang

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp183.074.200,- dan teralisasi sebesar Rp156.150.216,- atau 85,29%, melalui 6 (enam) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa penyediaan peralatan listrik seperti baterai dan lampu
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa belanja alat/bahan kebutuhan kantor (ATK)
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa barang yang dicetak, digandakan dan dijilid
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan berupa pembelian media bahan bacaan yaitu surat kabar harian Padang Ekspres
- 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu berupa penyediaan makanan/ minuman dan snack yang disediakan untuk tamu
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berupa perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang dilakukan oleh ASN Dinas Lingkungan Hidup

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 545.486.250,- dan teralisasi sebesar Rp 531.114.716,- atau 97,37%, melalui 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berupa Penyediaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Kendaraan Operasional Kantor Roda 2) sebanyak 5 Unit
- 2) Pengadaan Mebel berupa Penyediaan Mebel (Kursi Tamu) 1 set, Gorden 85 meter dan Karpet Permadani 1 buah dengan target sebanyak 1 unit
- 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa Penyediaan peralatan dan mesin lainnya yaitu computer (Laptop) 1 unit, Personal Computer (PC Unit) 1 unit dan peralatan personal computer (Printer Komputer) 6 unit
- 4) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya berupa perencanaan Konstruksi bangunan gedung negara sederhana

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 350.034.324,- dan teralisasi sebesar Rp 312.428.611,- atau 89,26%, melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat berupa pembelian materai dan pengiriman paket

- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik (listrik, air dan telpon/ internet)
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berupa pembelian alat kebersihan kantor dan pembayaran honorarium THL Sekretariat beserta iuran jaminan/asuransi kesehatan, kecelakaan dan kematian

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 273.903.000,- dan teralisasi sebesar Rp 258.140.470,- atau 94,25%, melalui 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan berupa penyediaan jasa pemeliharaan serta penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan pembayaran pajak untuk kendaraan dinas jabatan kepala dinas
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berupa penyediaan jasa pemeliharaan serta penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan pembayaran pajak untuk kendaraan dinas operasional berupa 17 unit kendaraan
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa pemeliharaan/servis AC, komputer dan printer pada Dinas Lingkungan Hidup
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya berupa pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

II. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja yaitu jumlah dokumen informasi lingkungan hidup yang disusun dengan target kinerja pada tahun 2025 adalah 5 dokumen dan realisasi 5 dokumen dengan capaian kinerja 100%. Pelaksanaan program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 2 (satu) sub kegiatan yaitu:

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 176.422.130,- dan teralisasi sebesar Rp 155.261.791,- atau 88,01%, melalui 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota berupa perencanaan perizinan untuk persetujuan lingkungan UKL/UPL

III. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan target kinerja pada tahun 2025 adalah 70,67 dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 103,36%. Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 776.702.022,- dan teralisasi sebesar Rp 593.768.656,- atau 76,45%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut berupa pemeliharaan bangunan dan ketersediaan suku cadang alat pemantauan kualitas air secara continue dan online, pengujian kualitas air sungai, pengujian kualitas udara dengan metode passive sampler, sosialisasi terkait pengendalian pencemaran lingkungan hidup terhadap IUK dan pelaksanaan persetujuan teknis dalam pengelolaan lingkungan hidup
- 2) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota berupa belanja bahan-bahan kimia, suku cadang/alat laboratorium dan pembayaran honorarium THL UPTD Laboratorium beserta iuran jaminan/asuransi kesehatan, kecelakaan dan kematian

IV. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan indikator kinerja yaitu Persentase RTH dengan target kinerja pada tahun 2025 adalah 14,90% dan realisasi 14,89% dengan capaian kinerja 99,93%.

Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 2.083.640.010,- dan teralisasi sebesar Rp 2.046.496.525,- atau 98,22%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa penataan dan pengelolaan RTH taman kota dan jalur hijau jalan di Kota Payakumbuh dan pembayaran

honorarium THL di Bidang Penataan beserta iuran jaminan/asuransi kesehatan, kecelakaan dan kematian

V. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) dengan indikator kinerja yaitu persentase usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang memiliki dokumen lingkungan dan memiliki izin PPLH pada tahun 2025 adalah 50% dan realisasi 60% dengan capaian kinerja 120%.

Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

1. Penyimpanan Sementara Limbah B3

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 12.646.310,- dan teralisasi sebesar Rp 10.784.248,- atau 85,28%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 berupa verifikasi lapangan terkait Dokumen Standar/Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang diajukan oleh penanggung jawab usaha/kegiatan di Kota Payakumbuh dan menerbitkan Rekomendasi Teknis/Standar Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan indikator kinerja yaitu persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dengan target kinerja pada tahun 2025 adalah 75 % dan realisasi 75% dengan capaian kinerja 100%.

Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 26.679.000,- dan teralisasi sebesar Rp 22.075.035,- atau 82,74%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berupa pengawasan dan pembinaan survei dokumen lingkungan terhadap usaha/kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan berupa SPPL maupun UKL-UPL yang telah diterbitkan persetujuan lingkungan oleh Dinas lingkungan Hidup Kota Payakumbuh.

VII. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan indikator kinerja yaitu persentase kelompok masyarakat dan sekolah yang terbina dalam pengelolaan lingkungan dengan target kinerja pada tahun 2025 adalah 20% dan realisasi 31,90% dengan capaian kinerja 100%. Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 663.807.580,- dan teralisasi sebesar Rp 547.668.192,- atau 82,50%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan berupa Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan di sekolah, Peringatan Hari Lingkungan Hidup, dan Kunjungan Lapangan bersama Masyarakat Pengelola sampah/lingkungan untuk meningkatkan pemahaman partisipasi dalam pengelolaan lingkungan
- 2) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup berupa pembinaan dan penilaian sekolah Adiwiyata baik tingkat kota, provinsi, nasional dan mandiri pada tahun 2025.

VIII. Program Pengelolaan Persampahan

Program Pengelolaan Persampahan dengan indikator kinerja yaitu persentase pengelolaan sampah dengan target kinerja pada tahun 2025 adalah 96,45% dan realisasi 94,57% dengan capaian kinerja 98,05%.

Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Sampah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 17.282.104.886,- dan teralisasi sebesar Rp 13.334.076.864,- atau 76,58%, melalui 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- 1). Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota berupa pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
- 2). Penanganan Sampah melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU,TPST,TPS,SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank sampah dan Fasilitas lainnya sesuai peraturan perundangan berupa pemeliharaan sarana dan prasarana operasional persampahan, BBM operasional persampahan dan pembayaran honorarium THL Bidang Pengawasan beserta iuran jaminan/asuransi kesehatan, kecelakaan dan kematian

d. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No.	Rekomendasi DPRD tahun n-1	Tindak lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Terkait penambahan 2 unit truk dan 1 unit mobil pick up yang Digunakan untuk transportasi sampah guna lebih mengoptimalkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Dengan keterbatasan anggaran, penambahan dimaksud tidak di anggarkan pada perubahan APBD.	Di alokasikan pada tahun anggaran berikutnya.
2.	Terkait pengelolaan sampah agar bisa dilakukan rapat kerja dengan OPD Teknis terkait.	Rapat kerja dilaksanakan dengan Komisi C DPRD Kota Payakumbuh.	Koordinasi terkait pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang representatif.
3.	Dilakukannya penataan dan pemeliharaan taman kota.	Setiap Tahun tetap dilakukan pemeliharaan taman kota.	Tertata taman dan RTH yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup.
4.	Melakukan pengawasan rutin terhadap semua kegiatan yang ada di semua bagian yang ada di Dinas Lingkungan Hidup	Melaksanakan monitoring dan evluasi terhadap program dan kegiatan dimasing-masing bidang.	Tercapainya target/realisasi anggaran tahun 2025.

12. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil diselenggarakan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh** melalui 1 (satu) kebijakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.549.588.546,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.299.076.990,- atau 94,49%, dengan Capaian Kinerja Program dan Capaian Kinerja Keluaran sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
1	Pemanfaatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	93,20	95,01	101,94%
			Penilaian AKIP oleh Inspektorat	A	BB	95,94%
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Dokumen Kependudukan yang Diterbitkan	96,00%	102,26%	106,52%
		Program Pencatatan Sipil	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang Diterbitkan	98,20%	100,25%	102,09%
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	56,67%	100%	176,46%
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Kota dalam Satu Tahun	100%	100%	100%

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada table dibawah ini:

c. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam PK

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui 5 (lima) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja yaitu :

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target kinerja 93,20 dan realisasi 95,01 dengan capaian kinerja 101,4%
- Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat dengan target kinerja A dan realisasi BB dengan capaian kinerja 95,94%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 163.436.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 158.841.116,- atau 97,19%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Renja Perubahan, Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa penyusunan laporan capaian kinerja Rencana Kerja (Renja), laporan capaian kinerja Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 2.897.996.192,- dan teralisasi sebesar Rp. 2.739.253.410,- atau 94,52%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berupa penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan PPK) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN berupa pembayaran honorarium penanggung jawab keuangan dan pengelola barang dan jasa di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 51.300.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 49.877.850,- atau 97,23%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya berupa penyediaan pakaian dinas baru beserta atribut dan kelengkapan lainnya untuk seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 132.289.060,- dan teralisasi sebesar Rp. 129.022.819,- atau 97,53%, melalui 6 (enam) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa penyediaan belanja isi tabung gas, belanja bahan-bahan lainnya/ natura, belanja alat tulis kantor, belanja kertas dan cover, belanja benda pos, belanja bahan computer dan belanja perabot kantor/ alat kebersihan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa penyediaan barang cetak, penggandaan dan penjilidan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan berupa penyediaan bahan bacaan (surat kabar padang ekspres dan surat kabar singgalang) untuk masyarakat yang memakai pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu berupa penyediaan makan minum dan snack tamu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berupa penyediaan biaya perjalanan dinas bagi ASN (PNS dan PPK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 170.635.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 165.505.500,- atau 96,99%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Mebeul berupa penyediaan kursi kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa pengadaan Laptop, Personal Computer (PC), Printer, dan Harddisk Server pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 219.125.040,- dan teralisasi sebesar Rp. 201.054.890,- atau 91,75%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa penyediaan jasa telekomunikasi/internet, air dan listrik untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berupa pembayaran gaji Tenaga Harian Lepas (THL) dan *Outsourcing* (sopir, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disertai pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) nya.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 221.636.400,- dan teralisasi sebesar Rp. 213.476.851,- atau 96,32%, melalui 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan berupa pembayaran pajak, servis dan BBM kendaraan dinas jabatan Eselon II pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berupa penyediaan pembayaran pajak, servis dan BBM kendaraan dinas operasional/lapangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa jasa pemeliharaan genset, AC dan komputer unit/jaringan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya berupa pemeliharaan ruang *front office* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

V. Program Pendaftaran Penduduk

Program Pendaftaran Penduduk dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase Dokumen Kependudukan yang Diterbitkan dengan target kinerja 96,00% dan realisasi 102,26% dengan capaian kinerja 106,52%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp149.989.070,- dan teralisasi sebesar Rp146.403.645,- atau 97,61%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk berupa pemilahan dan pengarsipan dokumen kependudukan.
- 2) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk berupa pembayaran honor petugas pelayanan/operator dan penerbitan dokumen kependudukan.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 58.195.750,- dan teralisasi sebesar Rp. 54.482.299,- atau 93,62%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terkait Pendaftaran Penduduk berupa pelayanan pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil (rekam data KTP elektronik dan IKD).

VI. Program Pencatatan Sipil

Program Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang Diterbitkan dengan target kinerja 98,20% dan realisasi 100,25% dengan capaian kinerja 102,09%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 182.779.384,- dan teralisasi sebesar Rp. 177.899.688,- atau 97,33%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting berupa pemilahan dan pengarsipan dokumen pencatatan sipil.
- 2) Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil berupa pembayaran honor petugas pelayanan/operator dan penerbitan dokumen pencatatan sipil.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 21.068.700,- dan teralisasi sebesar Rp. 20.558.392,- atau 97,58%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait Pencatatan Sipil berupa pelayanan pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting.

VII. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan target kinerja 56,67% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 176,46%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 12.991.400,- dan teralisasi sebesar Rp. 12.264.134,- atau 94,40%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan berupa laporan pemutakhiran data kependudukan yaitu laporan pengolahan LAMPID (Lahir, Mati, Pindah, Datang), laporan pengolahan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024 dan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 37.639.250,- dan teralisasi sebesar Rp. 35.061.545,- atau 93,15%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan berupa penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan Semester I dan II.
- 2) Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat berupa sosialisasi administrasi kependudukan melalui media sosial, media cetak dan rapat dengan stakeholder terkait.

3. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 205.296.550,- dan teralisasi sebesar Rp. 171.851.564,- atau 83,71%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan berupa laporan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan KTP Elektronik Semester I dan II.

VIII. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Kota Dalam Satu Tahun dengan target kinerja 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 25.210.750,- dan teralisasi sebesar Rp. 23.523.287,- atau 93,31%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan yang Lainnya berupa buku Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2024, buku Data Agregat Kependudukan Semester I tahun 2025 dan buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Payakumbuh Tahun 2024.

d. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD tahun n-1	Tindak lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan		
	N	I	H	I	L

13. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Urusan pemberdayaan masyarakat diselenggarakan oleh 5 (lima) kecamatan di Kota Payakumbuh dengan rincian sebagai berikut:

I. KANTOR CAMAT PAYAKUMBUH BARAT

Urusan Kewilayahan di selenggarakan oleh **Kecamatan Payakumbuh Barat** melalui 5 (lima) kebijakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.081.277.710,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.479.690.917,- atau 85,61%, dengan Capaian Kinerja Program dan Capaian Kinerja Keluaran sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
I.	Pemantapan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Nilai IKM	91	93,52	102,76%
2.	Penyediaan Sarana Keterpaduan Pelayanan Publik	Program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Persentase Pelayanan yang diproses	100%	100%	100%
			Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan Payakumbuh Barat yang diterima Perangkat Daerah	75%	75%	100%
3.	1. Penyediaan sarana keterpaduan pelayanan publik 2. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase masyarakat yang menyampaikan usulan dalam musrenbang	75%	75%	100%
			IKM	91	93,52	102,76%
			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	100%	100%	100%

4.	Peningkatan fasilitas penegakan Perdanuntuk menciptakan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
5.	Peningkatan peran dan fungsi lembaga keagamaan	Program penyelenggaraan urusan pemerintah umum	Persentase Kegiatan Masyarakat yang berkualitas	85%	85%	100%

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada table dibawah ini:

c. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam PK

Urusan Kewilayahan pada Kecamatan Payakumbuh Barat dilaksanakan melalui 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 60 (enam puluh) sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja yaitu :

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target kinerja 91 indeks dan realisasi 93,52 indeks dengan capaian kinerja 102,76%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp147.020.000,- dan teralisasi sebesar Rp136.054.822,- atau 92,54%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa Penyusunan IKM, SOP, Renja dan Renstra Kecamatan Payakumbuh Barat.
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa Penyusunan laporan monev renja dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan pada Kecamatan Payakumbuh Barat.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp11.108.321.502,- dan teralisasi sebesar Rp9.051.491.262,- atau 81,48%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berupa penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang berjumlah 79 orang pada Kecamatan Payakumbuh Barat.
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN berupa honorarium penanggung jawab keuangan, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu sebanyak 63 orang pada Kecamatan Payakumbuh Barat.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp79.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp70.310.000,- atau 89,00%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya berupa penyediaan pakaian dinas baru beserta atribut dan kelengkapan lainnya untuk seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Payakumbuh Barat sebanyak 79 orang.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 262.509.150,- dan teralisasi sebesar Rp. 217.134.963,- atau 82,72%, melalui 6 (enam) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk Kecamatan Payakumbuh Barat.
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa penyediaan kebutuhan makan dan minum, alat kebersihan, bahan pembersih dan ATK pada Kecamatan Payakumbuh Barat.
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa penyediaan bahan cetak, penggandaan, dan penjiilidan pada Kecamatan Payakumbuh Barat.
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan berupa penyediaan surat kabar Padang Ekspres dan Singgalang pada Kecamatan Payakumbuh Barat.
- 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu berupa penyediaan makan dan minum tamu pada Kecamatan Payakumbuh Barat.
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berupa penyediaan biaya perjalanan dinas bagi ASN Kecamatan Payakumbuh Barat.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp369.579.550,- dan teralisasi sebesar Rp352.192.601,- atau 95,30%, melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Mebel berupa pengadaan mebel ruangan PATEN dan ursi sofa pada Kecamatan Payakumbuh Barat.
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa penyediaan Mesin Fingger Print, AC dan Komputer pada Kecamatan Payakumbuh Barat.
- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya berupa pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan ruangan Pelayanan PATEN pada Kecamatan Payakumbuh Barat.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 1.218.169.096,- dan teralisasi sebesar Rp. 1.133.200.048,- atau 93,02%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa penyediaan jasa telekomunikasi/internet, air dan listrik untuk Kecamatan Payakumbuh Barat.

- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berupa pembayaran gaji Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 15 orang dan *Outsourcing* (sopir, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan) sebanyak 19 orang pada Kecamatan Payakumbuh Barat disertai pembayaran BPJS, JKK dan JKM

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 467.800.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 412.518.115,- atau 88,18%, melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Kendaraan berupa pembayaran pajak, servis dan BBM kendaraan dinas sebanyak 1 unit kendaraan roda empat dan 60 unit kendaraan roda dua pada Kecamatan Payakumbuh Barat.
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa AC, komputer, printer dan laptop pada Kecamatan Payakumbuh Barat.
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya berupa sewa tanah Kantor Lurah Parik Rantang dan rehab gedung kantor pada Kecamatan Payakumbuh Barat.

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase usulan Musrenbang yang diterima Perangkat Daerah, dengan target kinerja sebesar 75% terealisasi sebesar 75% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- Persentase pelayanan yang di proses tepat waktu, dengan target kinerja sebesar 100% dengan capain kinerja sebesar 100%.

Pelaksanaan program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 34.999.750,- dan teralisasi sebesar Rp. 30.594.012,- atau 87,41,33%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait berupa pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Payakumbuh Barat.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Peringkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 5.275.250,- dan teralisasi sebesar Rp. 4.185.000,- atau 78,82%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan berupa Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kecamatan Payakumbuh Barat.

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu :

- Nilai IKM, dengan target kinerja sebesar 91 Indeks, terealisasi sebesar 92,87 Indeks dengan capaian kinerja sebesar 102,05%.
- Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif, dengan target kinerja sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Pelaksanaan program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan yaitu:

3. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 4.118.070.262,- dan teralisasi sebesar Rp. 3.887.569.941,- atau 94,40%, melalui 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan yaitu:

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan berupa pelaksanaan kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan pada 17 (tujuh belas) Kelurahan yang ada pada Kecamatan Payakumbuh Barat.

Kelurahan Bulakan Balai Kandi

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan berupa penyediaan kebutuhan sarana prasarana penunjang pelayanan publik meliputi pengadaan mesin absen sebanyak 1 unit, layer infocus sebanyak 1 set, CCTV sebanyak 1 unit, kursi kerja sebanyak 4 unit, meja kerja sebanyak 4 unit, kipas angin sebanyak 3 unit, kerpet lantan 3 x 4 sebanyak 3 buah, tangga aluminium sebanyak 1 unit, karpet lantai

sebanyak 4 gulung, sound system sebanyak 1 set, computer PC sebanyak 1 unit, laptop sebanyak 1 unit, printer sebanyak 3 unit, dan penunjang lainnya pada Kelurahan Bulakan Balai Kandi.

- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berupa kegiatan penunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat pada Kelurahan Bulakan Balai Kandi.

Kelurahan Ibh

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan berupa penyediaan kebutuhan sarana prasarana penunjang pelayanan publik meliputi pengadaan becak motor sebanyak 1 unit, mesin absen sebanyak 1 unit, CCTV sebanyak 1 unit, meja rapat sebanyak 4 unit, AC sebanyak 1 unit, tangga alumanium sebanyak 1 unit, Komputer PC sebanyak 1 unit, laptop sebanyak 1 unit, Printer sebanyak 1 unit, dan penunjang lainnya pada Kelurahan Ibh.
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berupa pemberian PMT Posyandu dan kegiatan kegiatan pemberdayaan pada Kelurahan Ibh.

Kelurahan Koto Tengah

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan berupa penyediaan kebutuhan sarana prasarana penunjang pelayanan publik meliputi pengadaan gerobak barang sebanyak 1 unit, lemari kaca sebanyak 1 buah, lemari besi/metal sebanyak 1 unit, merk timbul sebanyak 1 unit, CCTV sebanyak 1 unit, kursi tamu sebanyak 1 unit, meja tamu sebanyak 1 buah, meja kerja sebanyak 3 buah, kursi kerja 4 buah, ruang PATEN sebanyak 1 set, kursi tunggu sebanyak 1 unit, AC sebanyak 1 unit, speaker portable sebanyak 1 unit, karpet lantai sebanyak 2 buah, megafon/toa portable sebanyak 1 unit, dispenser sebanyak 2 unit, mimbar/podium sebanyak 1 buah, televisi sebanyak 2 unit, kursi kerja sebanyak 1 unit, komputer PC sebanyak 2 unit, printer sebanyak 1 unit, pembangunan gedung baru seluas 40 m² dan penunjang lainnya pada Kelurahan Koto Tengah.
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berupa pembinaan dan pemberdayaan pada Kelurahan Koto Tengah.

Kelurahan Kubu Gadang

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan berupa penyediaan kebutuhan sarana prasarana penunjang pelayanan publik meliputi pengadaan mesin absen sebanyak 1 set, CCTV sebanyak 1 set, kursi kerja sebanyak 5 buah, meja kerja

sebanyak 5 buah, meja computer sebanyak 2 buah, meja rapat sebanyak 2 buah, sofa sebanyak 1 set, kipas angin sebanyak 5 unit, tangga aluminium sebanyak 1 unit, kerpet lantai sebanyak 4 buah, dispenser sebanyak 2 unit, lemari besi sebanyak 3 unit, laptop sebanyak 1 unit, komputer PC sebanyak 1 unit, printer sebanyak 2 unit, dan penunjang lainnya pada Kelurahan Kubu Gadang.

- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berupa pemberian PMT Posyandu dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan Kubu Gadang.

Kelurahan Labuah Basilang

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan berupa penyediaan kebutuhan sarana prasarana penunjang pelayanan publik meliputi pengadaan mesin absen sebanyak 1 unit, CCTV sebanyak unit, kursi tunggu sebanyak 2 set, kursi tamu sebanyak 1 set, kursi hadap sebanyak 2 unit, kipas angin sebanyak 2 unit, lemari besi sebanyak 2 unit, computer PC sebanyak 2 unit, laptop sebanyak 2 unit, printer sebanyak 3 unit dan penunjang lainnya pada Kelurahan Labuah Basilang.
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berupa pemberian PMT Posyandu dan kegiatan Pemberdayaan pada Kelurahan Labuah Basilang.

Kelurahan Subarang Batuang

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan berupa penyediaan kebutuhan sarana prasarana penunjang pelayanan publik meliputi pengadaan becak motor sebanyak 2 unit, mesin absen sebanyak 1 unit, kipas angin sebanyak 1 unit, laptop sebanyak 1 unit, Komputer PC sebanyak 1 unit, printer sebanyak 1 unit dan penunjang lainnya pada Kelurahan Subarang Batuang.
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berupa pemberian PMT Posyandu dan Pembinaan LPM, PKK, RT/RW pada Kelurahan Subarang Batuang.

Kelurahan Nunang Daya Bangun

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan berupa penyediaan kebutuhan sarana prasarana penunjang pelayanan publik meliputi pengadaan mesin absen sebanyak 1 unit, CCTV sebanyak 1 unit, kursi plastik sebanyak 54 buah, meja rapat sebanyak 5 buah, kursi tunggu sebanyak 4 unit, mesin potong rumput sebanyak 2 unit, AC sebanyak 1 unit, dispenser sebanyak 1 unit, kulkas senyak 1 unit, gorden sepanjang 12 meter, televisi sebanyak 1 unit, sound system sebanyak 1 unit, karpet lantai sebanyak 4 buah, laptop sebanyak 1 unit, komputer PC sebanyak 2 unit,

printer sebanyak 2 unit dan penunjang kegiatan lainnya pada Kelurahan Nunang Daya Bangun.

- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berupa pemberian PMT Posyandu, kegiatan senam lansia, sosialisasi pengolahan sampah, pembinaan LPM, pembinaan PKK dan pembinaan RT/RW pada Kelurahan Nunang Daya Bangun.

Kelurahan Padang Data Tanah Mati

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan berupa penyediaan kebutuhan sarana prasarana penunjang pelayanan publik meliputi pengadaan becak motor sebanyak 1 unit, mesin absen sebanyak 1 unit, CCTV sebanyak 1 unit, plang nama Kelurahan sebanyak 1 buah, kursi kerja sebanyak 1 buah, meja kerja sebanyak 2 buah, kipas angin sebanyak 3 unit, megafon/toa portable sebanyak 2 unit, speaker portable sebanyak 1 unit, kursi tamu sebanyak 1 set, lemari arsip sebanyak 1 buah, laptop sebanyak 1 unit, komputer PC sebanyak 1 unit, printer sebanyak 1 unit dan penunjang kegiatan lainnya pada Kelurahan Padang Data Tanah Mati.
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berupa pemberian PMT posyandu ILP anak, pemberian PMT posyandu ILP dewasa dan kegiatan pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan pada Kelurahan Padang Data Tanah Mati.

Kelurahan Padang Tinggi Piliang

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan berupa penyediaan kebutuhan sarana prasarana penunjang pelayanan publik meliputi pengadaan mesin absen sebanyak 1 unit, CCTV sebanyak 1 unit, kursi kerja sebanyak 4 buah, Laptop sebanyak 2 unit, Komputer PC sebanyak 1 unit, Printer sebanyak 2 unit, speed bump (tanggul jalan) sebanyak 20 buah, dan penunjang kegiatan lainnya pada Kelurahan Padang Tinggi Piliang.
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berupa pemberian PMT Posyandu, kegiatan senam lansia dan kegiatan pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan pada Kelurahan Padang Tinggi Piliang.

Kelurahan Padang Tengah Balai Nan Duo

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan berupa penyediaan kebutuhan sarana prasarana penunjang pelayanan publik meliputi pengadaan becak motor sebanyak 1 unit, mesin absen sebanyak 1 unit, CCTV sebanyak 1 set, kursi tamu sebanyak 1 set, kursi kerja sebanyak 5 buah, speaker portable sebanyak 1 unit,

lemari besi sebanyak 2 unit, laptop sebanyak 1 set, komputer PC sebanyak 1 unit, printer sebanyak 3 unit, dan penunjang kegiatan lainnya pada Kelurahan Padang Tengah Balai Nan Duo.

- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berupa pembinaan lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan Padang Tengah Balai Nan Duo.

Kelurahan Pakan Sinayan

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan berupa penyediaan kebutuhan sarana prasarana penunjang pelayanan publik meliputi pengadaan mesin absen sebanyak 1 unit, CCTV sebanyak 1 unit, plang nama Lembaga Kelurahan sepanjang 2 meter, kursi hadap sebanyak 2 unit, kursi tunggu sebanyak 2 unit, meja resepsionis sepanjang 6.41 meter, kipas angin sebanyak 2 unit, laptop sebanyak 2 unit, komputer PC sebanyak 1 unit, printer sebanyak 1 unit, dan penunjang kegiatan lainnya pada Kelurahan Pakan Sinayan.
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berupa pemberian PMT Posyandu, kegiatan senam Bersama, kegiatan Posbindu dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan Pakan Sinayan.

Kelurahan Parak Batuang

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan berupa penyediaan kebutuhan sarana prasarana penunjang pelayanan publik meliputi pengadaan mesin absen sebanyak 1 unit, CCTV sebanyak 1 unit, meja kerja sebanyak 4 buah, kursi kerja sebanyak 3 buah, kursi tunggu sebanyak 2 set, karpet sebanyak 3 unit, gorden/vertical blind sepanjang 15 meter, kursi tamu sebanyak 1 set, lemari arsip sebanyak 2 buah, laptop sebanyak 1 unit, Komputer PC sebanyak 2 unit, printer sebanyak 2 unit dan penunjang kegiatan lainnya pada Kelurahan Parak Batuang.
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berupa penyediaan PMT Posyandu ILP Anak, Posyandu ILP Dewasa, dan pembinaan Lempaga Kemasyarakatan pada Kelurahan Parak Batuang.

Kelurahan Parit Rintang

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan berupa penyediaan kebutuhan sarana prasarana penunjang pelayanan publik meliputi pengadaan mesin absen sebanyak 1 unit, CCTV sebanyak 1 set, kursi kerja sebanyak 3 unit, kursi tamu sebanyak 1 set, kursi tunggu sebanyak 1 set, meja kerja sebanyak 3 buah, meja

rapat sepanjang 4 meter, kipas angin sebanyak 1 unit, dispenser sebanyak 1 unit, laptop sebanyak 1 unit, komputer PC sebanyak 1 unit, printer sebanyak 2 unit dan penunjang kegiatan lainnya pada Kelurahan Parit Rantang

- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berupa senam lansia, gotong royong dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan Parit Rantang.

Kelurahan Payolansek

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan berupa penyediaan kebutuhan sarana prasarana penunjang pelayanan publik meliputi pengadaan becak motor sebanyak 1 unit, mesin absen sebanyak 1 unit, ruang PATEN sebanyak 1 set, sound system sebanyak 1 set, laptop sebanyak 1 unit, komputer PC sebanyak 1 unit, printer sebanyak 1 unit, pembangunan gedung baru (pekerjaan landscape) seluas 83 M² dan penunjang kegiatan lainnya pada Kelurahan Payolansek.
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berupa pembinaan Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan Payolansek.

Kelurahan Talang

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan berupa penyediaan kebutuhan sarana prasarana penunjang pelayanan publik meliputi pengadaan mesin absen sebanyak 1 unit, CCTV sebanyak 1 unit, kursi kerja sebanyak 5 unit, kipas angin sebanyak 2 unit, kursi tamu sebanyak 1 unit, lemari arsip sebanyak 4 buah, laptop sebanyak 1 unit, komputer PC sebanyak 2 unit, printer sebanyak 2 unit dan penunjang kegiatan lainnya pada Kelurahan Talang.
- 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berupa sosialisasi makan sehat untuk ibu hamil dan balita, gotong royong, kegiatan senam lansia dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan Talang.

Kelurahan Tanjung Pauh

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan berupa penyediaan kebutuhan sarana prasarana penunjang pelayanan publik meliputi pengadaan mesin absen sebanyak 1 unit, kursi kerja sebanyak 5 unit, kursi tunggu sebanyak 4 set, meja kerja sebanyak 2 buah, meja pelayanan sebanyak 1 unit, sofa sebanyak 1 set, kipas angin sebanyak 4 unit, laptop sebanyak 1 unit, komputer PC sebanyak 1 unit, printer sebanyak 2 unit dan penunjang kegiatan lainnya pada Kelurahan Tanjung Pauh.

- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berupa sosialisasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, pengadaan PMT Posyandu, kegiatan gotong royong, dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan Tanjung Pauh.

Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan berupa penyediaan kebutuhan sarana prasarana penunjang pelayanan publik meliputi pengadaan mesin absen sebanyak 1 unit, CCTV sebanyak 1 unit, kursi rapat sebanyak 50 buah, kursi kerja sebanyak 4 buah, meja komputer sebanyak 2 buah, meja rapat sepanjang 4 meter, karpet lantai sebanyak 4 buah, tangga aluminium sebanyak 1 unit, speaker portable sebanyak 1 unit kursi tamu sebanyak 1 set, laptop sebanyak 1 set, komputer PC sebanyak 1 unit printer komputer sebanyak 2 unit dan penunjang kegiatan lainnya pada Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago.
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berupa pembinaan Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago.

4. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 161.154.900,- dan teralisasi sebesar Rp. 148.739.893,- atau 92,30%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan berupa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan bagi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan pada Kecamatan Payakumbuh Barat.

IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase pengaduan pelayanan Masyarakat yang ditindak lanjuti, dengan target kinerja sebesar 100%, terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 12.433.250,- dan teralisasi sebesar Rp. 10.552.360,- atau 84,87%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan berupa kegiatan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi trantibum, serta operasional program Labumadumas pada Kecamatan Payakumbuh Barat.

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi dengan target kinerja 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 156.549.750,- dan teralisasi sebesar Rp. 82.925.459,- atau 52,97%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal berupa kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi lingkup Kesejahteraan Sosial dan keagamaan pada Kecamatan Payakumbuh Barat meliputi Pembinaan UKS, dan Forum Kecamatan Sehat.
- 2) Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan berupa pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dan koordinasi antar Forkopincam yang terdiri dari Pejabat Daerah, TNI, Polri, unsur Masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan.

d. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang diselesaikan
	N I H I L		

II. KANTOR CAMAT PAYAKUMBUH UTARA

Urusan Kewilayahan diselenggarakan oleh **Kecamatan Payakumbuh Utara** melalui 2 (dua) kebijakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.182.554.413,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.991.308.308,- atau 80,40%, dengan Capaian Kinerja Program dan Capaian Kinerja Keluaran sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
1.	Pengoptimalan layanan publik masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	91	92,87	102,05%
			Nilai Evaluasi AKIP Kec. Payakumbuh Utara oleh Inspektorat	81 (A)	80,25 (A)	99,07%
		Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik	Persentase usulan Musrenbang yang diterima Perangkat Daerah	75%	75%	100%
			Persentase pelayanan masyarakat yang diproses tepat waktu	85%	85%	100%
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Nilai IKM	91	92,87	102,05%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Payakumbuh – Tahun 2025

			Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK,RT/RW) yang aktif	100%	100%	100%

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada table dibawah ini:

c. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam PK

Urusan Kewilayahan pada Kecamatan Payakumbuh Utara dilaksanakan melalui 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja yaitu :

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target kinerja 91 indeks dan realisasi 92,87 indeks dengan capaian kinerja 102,05%
- Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat dengan target kinerja A dan realisasi A dengan capaian kinerja 99,07%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 28.348.500,- dan teralisasi sebesar Rp. 18.648.089,- atau 65,78%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Renja Perubahan, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Payakumbuh Utara.
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa Penyusunan dokumen laporan monev Renja, LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban), (LKJIP) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, Laporan Realisasi Fisik Keuangan serta koordinasi yang dilaksanakan pada Kecamatan Payakumbuh Utara.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 7.577.632.699,- dan teralisasi sebesar Rp. 5.743.713.565,- atau 75,80%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berupa penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang berjumlah 51 orang pada Kecamatan Payakumbuh Utara.
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN berupa honorarium penanggung jawab keuangan, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu sebanyak 40 orang pada Kecamatan Payakumbuh Utara.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 53.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 49.250.700,- atau 92,93%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya berupa penyediaan pakaian dinas baru beserta atribut dan kelengkapan lainnya untuk seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Payakumbuh Utara sebanyak 51 orang.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 125.259.180,- dan teralisasi sebesar Rp. 113.836.486,- atau 90,88%, melalui 5 (lima) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk Kecamatan Payakumbuh Utara.
- 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga berupa penyediaan 2 unit AC, 1 unit Kulkas, 1 unit Dispenser dan 1 unit tangga aluminium pada Kecamatan Payakumbuh Utara.
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa penyediaan kebutuhan logistik, Bahan Kimia, Isi Tabung Gas, Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Benda Pos, Bahan Komputer, Bahan Pembersih, Alat Kebersihan dan Pakan Natura pada Kecamatan Payakumbuh Utara.
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa penyediaan cetak blanko disposisi, kwitansi dinas dan belanja foto copy pada Kecamatan Payakumbuh Utara.
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berupa penyediaan biaya perjalanan dinas bagi ASN (PNS dan PPPK) Kecamatan Payakumbuh Utara.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 58.967.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 58.617.001,- atau 99,41%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa penyediaan 2 unit Laptop, 1 unit Komputer (PC), 1 unit Printer Canon, 2 unit Printer Epson dan 1 unit Scenner pada Kecamatan Payakumbuh Utara.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 851.345.864,- dan teralisasi sebesar Rp. 751.458.821,- atau 88,27%, melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa penyediaan jasa telekomunikasi/internet, air dan listrik untuk Kecamatan Payakumbuh Utara.
- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa penyediaan Spanduk untuk Kecamatan Payakumbuh Utara.
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berupa pembayaran gaji Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 5 orang dan *Outsourcing* (sopir, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan) sebanyak 22 orang pada Kecamatan Payakumbuh Utara disertai pembayaran BPJS, JKK dan JKM.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 179.840.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 173.473.339,- atau 96,46%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Kendaraan berupa pembayaran pajak, servis dan BBM kendaraan dinas sebanyak 1 unit kendaraan roda empat dan 37 unit kendaraan roda dua pada Kecamatan Payakumbuh Utara.
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa jasa pemeliharaan AC, komputer unit PC/Notebook dan printer pada Kecamatan Payakumbuh Utara.

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase usulan Musrenbang yang diterima Perangkat Daerah, dengan target kinerja sebesar 75% terealisasi sebesar 75% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- Persentase pelayanan masyarakat yang di proses tepat waktu, dengan target kinerja sebesar 85% dengan capain kinerja sebesar 100%.

Pelaksanaan program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 29.247.850,- dan teralisasi sebesar Rp. 28.173.904,- atau 96,33%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait berupa pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Payakumbuh Utara.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Peringkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 4.572.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 4.468.194,- atau 97,73%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan berupa Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kecamatan Payakumbuh Utara.

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu :

- Nilai IKM, dengan target kinerja sebesar 91 Indeks, terealisasi sebesar 92,87 Indeks dengan capaian kinerja sebesar 102,05%.
- Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif, dengan target kinerja sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Pelaksanaan program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 2.106.104.770,- dan teralisasi sebesar Rp. 1.887.980.111,- atau 89,64%, melalui 19 (sembilan belas) sub kegiatan yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan berupa pelaksanaan kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan pada 9 (Sembilan) Kelurahan yang ada pada Kecamatan Payakumbuh Utara.

Kelurahan Balai Tongah Koto

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan berupa penyediaan kebutuhan sarana prasarana penunjang pelayanan publik meliputi pengadaan printer sebanyak 1 unit, laptop sebanyak 1 unit, kursi kerja sebanyak 5 buah, lemari arsip sebanyak 1 buah, becak motor sebanyak 1 unit, dan penunjang layanan lainnya pada Kelurahan Balai Tongah Koto.

- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berupa sosialisasi bahaya pekat dan narkoba bagi generasi muda, sosialisasi pangan sehat bumil dan balita, sosialisasi/pelatihan pengolahan kompos dan pemilihan sampah, dan sosialisasi usaha mikro pada Kelurahan Balai Tongah Koto.

Kelurahan Ikua Koto Dibalai

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan berupa penyediaan kebutuhan sarana prasarana penunjang pelayanan publik meliputi pengadaan printer sebanyak 1 unit, laptop sebanyak 1 unit, dan penunjang layanan lainnya pada Kelurahan Ikua Koto Dibalai.
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berupa sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sosialisasi pengolahan bank sampah, pelatihan pembinaan LPM, pelatihan pembinaan PKK, dan pelatihan pembinaan RT/RW pada Kelurahan Ikua Koto Dibalai.

Kelurahan Kapalo Koto Dibalai

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan berupa penyediaan kebutuhan sarana prasarana penunjang pelayanan publik meliputi pengadaan becak motor sebanyak 1 unit, mesin absen sebanyak 1 unit, printer sebanyak 1 unit dan penunjang layanan lainnya pada Kelurahan Kapalo Koto Dibalai.
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berupa sosialisasi Adat Budaya dan sosialisasi Pengolahan Sampah Rumah Tangga pada Kelurahan Kapalo Koto Dibalai.

Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan berupa penyediaan kebutuhan sarana prasarana penunjang pelayanan publik meliputi pengadaan becak motor sebanyak 1 unit, mesin absen sebanyak 1 unit, printer sebanyak 1 unit dan penunjang layanan lainnya pada Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo.
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berupa sosialisasi usaha mikro, sosialisasi adat budaya, sosialisasi pengolahan sampah, sosialisasi perlindungan Perempuan dan anak, sosialisasi penguatan kelembagaan PKK, sosialisasi penguatan kelembagaan RT/RW, dan pembinaan karang taruna pada Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo.

Kelurahan Napar

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan berupa penyediaan kebutuhan sarana prasarana penunjang pelayanan publik meliputi pengadaan mesin absen sebanyak 1 unit, merek timbul sebanyak 1 paket, kursi tunggu sebanyak 3 buah, kursi tamu sebanyak 1 unit, meja tamu sebanyak 1 buah dan penunjang layanan lainnya pada Kelurahan Napar.
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berupa kegiatan RT/RW, PKK, LPM, dan Organisasi Masyarakat lainnya pada Kelurahan Napar.

Kelurahan Ompang Tanah Sirah

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan berupa penyediaan kebutuhan sarana prasarana penunjang pelayanan publik meliputi pengadaan kursi kerja sebanyak 6 buah, kursi tamu sebanyak 1 unit, speaker portable sebanyak 1 unit, laptop sebanyak 1 unit, printer sebanyak 1 unit dan penunjang lainnya pada Kelurahan Ompang Tanah Sirah.
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berupa kegiatan RT/RW, PKK, LPM, dan Organisasi Masyarakat lainnya pada Kelurahan Ompang Tanah Sirah.

Kelurahan Tigo Koto Diateh

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan berupa penyediaan kebutuhan sarana prasarana penunjang pelayanan publik meliputi pengadaan mesin absen sebanyak 1 unit, merek timbul sebanyak 1 paket, kursi tunggu sebanyak 3 set, meja tamu sebanyak 1 buah, printer sebanyak 1 unit dan penunjang lainnya pada Kelurahan Tigo Koto Diateh.
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berupa kegiatan Organisasi Masyarakat yang ada pada Kelurahan Tigo Koto Diateh.

Kelurahan Tigo Koto Dibuah

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan berupa penyediaan kebutuhan sarana prasarana penunjang pelayanan publik meliputi pengadaan komputer (PC) sebanyak 2 unit, printer sebanyak 3 unit dan penunjang lainnya pada Kelurahan Tigo Koto Dibuah.
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berupa kegiatan RT/RW, PKK, LPM, dan Organisasi Masyarakat lainnya pada Kelurahan Tigo Koto Dibuah.

Kelurahan Taratak Padang Kampuang

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan berupa penyediaan kebutuhan sarana prasarana penunjang pelayanan publik meliputi pengadaan mesin absen sebanyak 1 unit, printer sebanyak 1 unit dan penunjang lainnya pada Kelurahan Taratak Padang Kampuang.
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berupa sosialisasi untuk pengurus LPM, dan pengadaan Kegiatan PKK, RT/RW dan LPM pada Kelurahan Taratak Padang Kampuang.

2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 43.102.850,- dan teralisasi sebesar Rp. 42.391.924,- atau 98,35%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan berupa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan bagi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan pada Kecamatan Payakumbuh Utara.

IV. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase pengaduan pelayanan Masyarakat yang ditindak lanjuti, dengan target kinerja sebesar 100%, terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

2. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 21.030.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 15.881.550,- atau 75,52%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan berupa kegiatan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi trantibum, serta operasional program Labumadumas pada Kecamatan Payakumbuh Utara.

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi dengan target kinerja 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 104.103.700,- dan teralisasi sebesar Rp. 103.414.624,- atau 99,34%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal berupa kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi lingkup Kesejahteraan Sosial dan keagamaan pada Kecamatan Payakumbuh Utara meliputi Pembinaan UKS, Forum Kecamatan Sehat, peningkatan kualitas santri yang di bina dan dilatih di pondok Al Qur'an dan kegiatan keagamaan lainnya.
- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan berupa pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dan koordinasi antar Forkopincam yang terdiri dari Pejabat Daerah, TNI, Polri, unsur Masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan.

d. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	TindakLanjut	Tujuan/Masalah Yang diselesaikan
	N I H I L		

III. KANTOR CAMAT PAYAKUMBUH TIMUR

Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Kewilayahan diselenggarakan Oleh **Kecamatan Payakumbuh Timur** melalui 2 (dua) kebijakan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp12.272.480.965,-** dengan realisasi anggaran **Rp10.602.642.407,-** atau **86,39%** dengan capaian Program dan Capaian kinerja keluaran sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
1	Pemantapan implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	IKM Kecamatan	91	92.03	101,13%
			Nilai Evaluasi AKIP Kec. Payakumbuh Timur oleh Inspektorat	81 (A)	78,70 (BB)	96,29%
2	Penyediaan sarana keterpaduan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase usulan Musrenbang yang diterima Perangkat Daerah	75%	75%	100%
			Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindak lanjuti	85%	85%	100%
3		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	100%	100%	100%
			IKM Kelurahan	90	92.03	102,25%
4		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%

5		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	100%	100%	100%

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

c. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program yang Sudah Ditetapkan Dalam PK

Urusan Kewilayahan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Payakumbuh Timur dilaksanakan melalui 5 (lima) Program 13 (tiga belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Program ini dengan indikator kinerja nilai IKM Kecamatan, target sebesar 91 terealisasi sebesar 92,03 atau 101,13%
- Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Paakumbuh Timur oleh Inspektorat dengan target kinerja 81 (A) terealisasi 78,70 (BB) atau 96,29%

Pelaksanaan proram didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dan 18 (deapan belas) sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.71.787.650,- dan terealisasi sebesar Rp. 69.935.563,- atau 97,42% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa penyusunan dokumen Renstra, Renja, DPA, Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur Kecamatan Payakumbuh Timur.
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa laporan monev renja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Kecamatan Payakumbuh Timur.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.7.346.788.960,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.060.136.428,- atau 82,49% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berupa pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang berjumlah 60 orang pada Kecamatan Payakumbuh Timur.
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN berupa honorarium pengelola keuangan yang bertugas menyusun laporan realisasi keuangan sebanyak 39 orang

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.55.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 48.229.500,- atau 87,69% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya berupa pembelian pakaian dinas ASN Kecamatan Payakumbuh Timur sebanyak 57 orang.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 55.742.550,- dan terealisasi sebesar Rp. 55.353.313,- atau 99,30% melalui 5 (lima) sub kegiatan yaitu

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor berupa pembelian komponen listrik pada Kecamatan Payakumbuh Timur.
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa penyediaan ATK, kertas dan cover, bahan kebersihan dan bahan lainnya pada Kecamatan Payakumbuh Timur.
- 3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan berupa cetak spanduk dan fotocopy pada Kecamatan Payakumbuh Timur.
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan berupa 1 jenis surat kabar harian yakni Padang Ekspres sebanyak 264 Eksemplar.
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berupa penyediaan biaya perjalanan dinas dalam maupun luar daerah Provinsi Sumatera Barat bagi ASN dan non ASN Kecamatan Payakumbuh Timur.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.734.586.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 612.666,970,- atau 83,40 % melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa pengadaan peralatan dan mesin sebanyak 5 unit yaitu AC 1 unit, Personal Komputer 3 unit dan Printer 1 unit pada Kantor Camat Payakumbuh Timur.
- 2) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya berupa Pengadaan Gedung Kantor yaitu Kantor Lurah Koto Panjang.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.643.680.846,- dan terealisasi sebesar Rp. 625.844.233,- atau 97,23 % melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa pembayaran tagihan Air, Listrik dan telepon pada Kecamatan Payakumbuh Timur
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa penyediaan bahan komputer pada Kecamatan Payakumbuh Timur
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berupa pembayaran jasa Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 14 orang dan Tenaga Outsourcing 4 orang pada Kantor Camat Payakumbuh Timur.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.461.796.688,- dan terealisasi sebesar Rp. 455.719.257,- atau 98,68% melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan berupa service, ganti oli, ganti suku cadang, BBM dan pembayaran pajak kendaraan sebanyak 1 unit kendaraan roda empat, 38 unit kendaraan roda dua pada Kantor Camat Payakumbuh Timur.
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa pemeliharaan komputer , printer, mesin potong rumput dan AC pada Kantor Camat Payakumbuh Timur.
- 3) Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya berupa rehab gedung Kantor yaitu Kantor Camat Payakumbuh Timur, Kantor Lurah Balai Jariang dan Kantor Lurah Sicincin

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- Program ini dengan indikator kinerja Persentase usulan Musrenbang yang diterima Perangkat Daerah, dengan target kinerja 75% dan terealisasi 75% atau 100%
- Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindak lanjuti dengan target kinerja 85% dan terealisasi 85% atau 100%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.46.427.250,- dan terealisasi sebesar Rp. 42.386.156,- atau 91,30% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait berupa pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat kecamatan dan mufakat RT/RW.

2. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.13.712.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.007.965,- atau 94,86% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan berupa operasional kegiatan PATEN pada Kantor Camat Payakumbuh Timur.

III. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

- Program ini dengan indikator kinerja Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK,RT/RW) yang aktif dengan target kinerja 100% terealisasi 100% atau 100%
- Program ini dengan indikator kinerja IKM Kelurahan dengan target kinerja 90 dan terealisasi 92,03 atau 102,25%

Pelaksanaan proram ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan kelurahan

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.727.665.671,- dan terealisasi sebesar Rp 2.504.108.647,- atau 91,80%. melalui 20 (dua puluh) sub kegiatan yaitu:

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan berupa pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat Kelurahan pada Kecamatan Payakumbuh Timur sebanyak 9 Kelurahan.
- 2) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan berupa pemberian uang transport Lembaga Kemasyarakatan yaitu DPC LPM dan PKK Kecamatan Payakumbuh Timur.

Kelurahan Balai Jaring

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Balai Jaring berupa pengadaan Personal Komputer sebanyak 1 unit, Printer epson L3210 2 unit, printer epson L5290 sebanyak 1 unit, Handsprayer tasco sebanyak 1 unit, kursi rapat sebanyak 30 unit, mesin potong rumput sebanyak 1 unit, speaker portabel sebanyak 1 unit, laptop sebanyak 1 unit, dan kipas angin sebanyak 1 unit pada Kelurahan Balai Jaring
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Balai Jaring berupa kegiatan sosialisasi pemanfaatan sampah rumah tangga/organik menjadi pu2k, sosialisasi pengembangan usaha mikro , sosialisasi pemanfaatan, limbah rumah tangga agar bernilai ekonomis, sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan dan pelatihan kelembagaan pada Kelurahan Balai Jaring

Kelurahan Koto Baru

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Koto Baru berupa pengadaan Personal Komputer sebanyak 1 unit, Printer sebanyak 1 unit, Laptop sebanyak 2

unit, meja kerja sebanyak 5 unit, kursi kerja 5 unit dan kipas angin sebanyak 5 unit pada Kelurahan Koto Baru.

- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Koto baru berupa sosialisasi RT/RW, sosialisasi PKK , sosialisasi budidaya magot, sosialisasi stunting dan gizi buruk, sosialisasi napza, pelatihan menyulam, pelatihan dasawisma dan pelatihan kewirausahaan pada Kelurahan Koto Baru

Kelurahan Koto Panjang

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Koto panjang berupa pengadaan Personal komputer sebanyak 1 unit, laptop sebanyak 1 unit, Printer sebanyak 1 unit, lemari arsip sebanyak 1 unit, infokus sebanyak 1 unit, meja sebanyak 6 unit, kursi sebanyak 22 buah, kipas angin sebanyak 1 unit, Sollar cell sebanyak 2 unit dan alat musik sebanyak 4 unit di Kelurahan Koto Panjang.
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berupa Pelatihan pemanfaatan sampah plastik menjadi kerajinan, Pelatihan membuat kue, Pelatihan budidaya magot, Pelatihan membatik, Pelatihan administrasi kader posyandu dan posbindu, Pelatihan penanganan P3K dalam keluarga dan Pelatihan Badcover pada Kelurahan Koto.

Kelurahan Padang Alai Bodi

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan berupa pengadaan Personal Komputer sebanyak 2 unit, Printer sebanyak 1 unit, Layar Infokus sebanyak 1 unit, Meja ½ biro sebanyak 2 unit, kipas angin sebanyak 1 unit, kursi kerja sebanyak 3 unit, lemari arsip sebanyak 1 unit, kursi rapat sebanyak 15 unit, speaker sebanyak 1 unit dan laptop sebanyak 1 unit di Kelurahan Padang Alai Bodi.
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berupa sosialisasi budidaya magot dan sosialisasi kader kesehatan pada Kelurahan Padang Alai Bodi.

Kelurahan Padang Tengah Payobadar

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Payobadar berupa pengadaan Personal Komputer sebanyak 1 unit, Laptop sebanyak 1 unit, kipas angin sebanyak 1 unit, kursi tunggu sebanyak 2 unit, kursi tamu sebanyak 1 unit, speaker sebanyak 1 unit, meja sebanyak 1 unit, sollar cell sebanyak 2 unit, infokus sebanyak 1 unit dan layar infokus sebanyak 1 unit, pada Kelurahan Padang Tengah Payobadar.

- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berupa pelatihan merajut, pelatihan menyulam dan pelatihan parenting pada Kelurahan Padang Tengah.

Kelurahan Padang Tiakar

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan berupa pengadaan Personal Komputer sebanyak 2 unit, Printer sebanyak 2 unit, laptop sebanyak 1 unit, gerobak sebanyak 2 unit, handsprayer sebanyak 2 unit, lemari kaca sebanyak 1 unit, plang nama kelembagaan kelurahan sebanyak 2 meter, layar infokus sebanyak 1 unit, kursi kerja sebanyak 2 unit dan speaker portabel sebanyak 1 unit pada Kelurahan Padang Tiakar
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berupa sosialisasi Adat dan Budaya, sosialisasi Stunting, Pelatihan Pembuatan Aneka cake, pelatihan Pengolahan Ikan, sosialisasi Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus LPM dan sosialisasi Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus RT/RW pada Kelurahan Padang Tiakar

Kelurahan Payobasung

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan berupa pengadaan Personal laptop sebanyak 1 unit, Printer sebanyak 2 unit, sollar cell sebanyak 2 unit, papan visual sebanyak 2 unit, layar infokus sebanyak 1 unit, infokus sebanyak 1 unit, meja ½ biro sebanyak 1 unit, kursi putar sebanyak 5 unit, kipas angin sebanyak 1 unit, soundsystem sebanyak 1 unit, dan tangga aluminium sebanyak 1 unit pada Kelurahan Payobasung
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berupa Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik untuk Pupuk Kompos, sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Stunting, Pelatihan Pengelolaan Sampah An-Organik utk Budidaya Magot, Pelatihan Pengelolaan Sampah An-Oganik Menjadi Kerajinan Daur Ulang dan Pelatihan Bed Cover pada Kelurahan Payobasung.

Kelurahan Sicincin

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan berupa pengadaan Personal Komputer sebanyak 1 unit, laptop sebanyak 1 unit, sollar cell 2 unit, infokus sebanyak 1 unit, layar infokus sebanyak 1 unit, kipas angin sebanyak 1 unit dan soundsystem sebanyak 1 unit di Kelurahan Sicincin.
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berupa sosialisasi pelatihan sampah organik menjadi kompos, sosialisasi kenakalan remaja dan tindakan podabn,

sosialisasi pencegahan stunting bagi ibu hamil dan balita, sosialisasi pengolahan dan pemilahan sampah, sosialisasi peran pemuda dalam pembangunan, bimtek RT/RW dan LPM pada Kelurahan Sicincin.

Kelurahan Tiakar

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan berupa pengadaan Personal Komputer sebanyak 1 unit, Printer sebanyak 1 unit, laptop sebanyak 1 unit meja rapat sebanyak 1 unit, meja $\frac{1}{2}$ biro sebanyak 2 unit, kursi kerja sebanyak 5 unit, kipas angin sebanyak 1 unit, speaker portabel sebanyak 1 unit dan lemari arsip sebanyak 1 unit di Kelurahan Tiakar
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berupa Pelatihan pengelolaan sampah dan sosialisasi PHBS pada Kelurahan Tiakar.

IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Program ini dengan indikator kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan target kinerja 100% terealisasi 100% atau 100% Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.705.600,- dan terealisasi sebesar Rp 15.595.081,- atau 99,30%. melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan berupa kegiatan rapat dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi trantibum pada Kecamatan Payakumbuh Timur.

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- Program ini dengan indikator kinerja persentase Kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi dengan target kinerja 100% terealisasi 100% atau 100% Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 113.229.750,- dan terealisasi sebesar Rp 112.667.259,- atau 99,44%. melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal berupa fasilitasi kegiatan MTQ dan Pondok Alquran pada Kecamatan Payakumbuh Timur.
- 2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan berupa kegiatan Rapat-rapat koordinasi, Monitoring dan Evaluasi lingkup Trantibum.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	TindakLanjut	Tujuan/Masalah Yang diselesaikan
	N I H I L		

IV. KANTOR CAMAT PAYAKUMBUH SELATAN

Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan kewilayahan diselenggarakan oleh **kecamatan payakumbuh selatan** melalui 5 (lima) kebijakan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp8.119.121.951,-** dan terealisasi sebesar **Rp7.180.532.440,-** atau **88,44%** dengan capaian program dan capaian kinerja keluaran sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target kinerja	Realisasi	Capaian
1	Pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	IKM kecamatan	90	92,03	100%
2	Penyediaan sarana prasarana keterpaduan pelayanan publik	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1. Persentase pelayanan yang di proses tepat waktu	85%	85%	100%
			2. Persentase usulan musrembang kecamatan payakumbuh selatan yang diterima perangkat daerah	75%	75%	100%
3	Penyediaan sarana prasarana keterpaduan pelayanan public meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1. IKM kelurahan	90%	90%	100%
			2. Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	100%	100%	100%

4	Peningkatan fasilitas penegakan perda dan untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
5	Peningkatan peran dan fungsi lembaga keagamaan	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	100%	100%	100%

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

c. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program yang Sudah Ditetapkan Dalam PK

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dengan indikator kinerja nilai ikm kecamatan, target sebesar 90 terealisasi sebesar 92,03 atau 102,25%, didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.20.000.200,- dan teralisasi sebesar Rp.18.805.751,- atau 94,03% melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah berupa penyusunan 4 jenis dokumen perencanaan berupa dokumen Renja, RKA, DPA dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Payakumbuh Selatan.
- 2) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD berupa penyusunan 4 laporan capaian kinerja berupa laporan rencana aksi, laporan rencana kerja tahunan, laporan capaian kinerja dan laporan dalbang.
- 3) Evaluasi kinerja perangkat daerah berupa penyusunan 2 laporan yaitu laporan evaluasi berupa laporan LKJIP dan IKM.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp5.218.332.649,- dan teralisasi sebesar Rp4.385.183.195,- atau 84,03% melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN berupa pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang berjumlah 46 orang.
- 2) Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN berupa pembayaran Honorarium PA, KPA, PPTK, PPK SKPD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, pejabat pengadaan barang dan jasa yang berjumlah 31 orang
- 3) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD berupa penyusunan 4 laporan berupa laporan evaluasi kinerja, laporan LP2KD, laporan keuangan semester I, laporan keuangan semester II.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar **Rp3.000.000,-** dan teralisasi sebesar Rp35.936.250,- atau 97,13% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya berupa pakaian dinas PDH Pegawai Kecamatan dan Kelurahan.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp116.483.200,- dan teralisasi sebesar Rp113.498.441,- atau 97,44% melalui 6 (enam) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor berupa pembelian 10 paket yang terdiri dari 3 jenis baterai, 1 jenis contra steker, 1 fitting, 1 jenis kabel, 3 jenis lampu dan 1 jenis terminal kabel.
- 2) Penyediaan bahan logistik kantor berupa penyediaan 3 paket kebutuhan yaitu ATK, bahan/alat kebersihan dan makan minum rapat.
- 3) Penyediaan barang cetakan dan dan penggandaan berupa penyediaan 5 paket kebutuhan berupa penggandaan/fotocopi, benner, penjilidan, spanduk dan cetak blanko/amplop/kwitansi.
- 4) Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan berupa 1 jenis surat kabar harian yakni Padang Ekspres sebanyak 414 eksemplar.
- 5) Fasilitasi kunjungan tamu berupa kebutuhan pelayanan untuk tamu Camat Payakumbuh Selatan dan pelayanan PATEN meliputi minuman mineral
- 6) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD berupa penyediaan biaya perjalanan dinas dalam maupun luar daerah provinsi Sumatera Barat sebanyak 9 laporan perjalanan.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp397.764.140,- dan teralisasi sebesar Rp390.166.876,- atau 98,09% melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan mebel berupa pengadaan lemari arsip sebanyak 3 unit, kursi kerja/rapat/tamu/sofa sebanyak 32 unit, meja sebanyak 1 unit dan mimbar sebanyak 1 unit.
- 2) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya berupa pengadaan mouse komputer sebanyak 1 unit, ac sebanyak 1 unit, dispenser sebanyak 3 unit, televisi sebanyak 1 unit, pc sebanyak 8 unit, laptop sebanyak 1 unit, printer sebanyak 6 unit.
- 3) Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya berupa pembangunan dan tebing kantor camat payakumbuh selatan.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.543.383.772,- dan teralisasi sebesar Rp.516.668.308,- atau 95,08% melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa pembayaran tagihan 9 rekening listrik, 10 rekening air dan 1 rekening telepon.

- 2) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor berupa jasa sewa tenda untuk pelaksanaan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan.
- 3) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor berupa pembayaran jasa tenaga kebersihan kantor *outsourcing*, jasa tenaga kebersihan lapangan *outsourcing*, jasa tenaga kebersihan lapangan TJP, jasa tenaga keamanan, jaminan kesehatan, JKK, JKM.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp365.717.930,- dan teralisasi sebesar Rp360.619.047,- atau 98,61% melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan berupa pembayaran bbm, biaya service, ganti oli, ganti suku cadang dan pembayaran pajak kendaraan sebanyak 31 unit yang terdiri dari 1 unit kendaraan roda empat, 30 unit kendaraan roda dua.
- 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya berupa pemeliharaan ac, komputer, printer
- 3) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya berupa perbaikan atap Kantor Lurah limbukan

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini dengan indikator kinerja yaitu:

- Persentase pelayanan yang diproses tepat waktu, target sebesar 85% terealisasi sebesar 85% atau 100%, didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan sebagai berikut :
- Persentase usulan musrembang kecamatan payakumbuh selatan yang diterima perangkat daerah, target sebesar 75% terealisasi 75% atau 100%

Didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp16.749.950,- dan teralisasi sebesar Rp15.963.133,- atau 95,30% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait berupa ATK, kertas, bahan komputer, makan minum rapat, honorarium, belanja perjalanan dinas dalam

kota untuk pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat kecamatan yang menghasilkan 1 laporan musrenbang kecamatan.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp2.384.850,- dan teralisasi sebesar Rp2.304.217,- atau 96,62% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Peningkatan efektifitas kegiatan pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan berupa pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) dilaksanakan untuk menyediakan 10 jenis pelayanan terpadu pada masyarakat.

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini dengan Indikator Kinerja yaitu:

- Nilai IKM kelurahan, target kinerja 90 terealisasi 92,03 atau 102,25%
- Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) target kinerja 100% terealisasi 100% atau 100%

didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp1.300.666.860,- dan teralisasi sebesar Rp1.247.105.081,- atau 95,88% melalui 13 (tiga belas) sub kegiatan yaitu:

- 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan berupa belanja ATK, kertas, bahan komputer, makan minum rapat, honorarium, belanja perjalanan dinas dalam kota untuk pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat kelurahan yang menghasilkan 1 laporan musrenbang kelurahan.

Kelurahan Balai Panjang

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan berupa belanja round up 6 (enam) botol, belanja pemeliharaan bentor sebanyak 2 (dua) unit, pemeliharaan mesin potong rumput 1 (satu) unit, belanja infokus sebanyak 1 (satu) unit, belanja layar infokus 1 (satu) unit, belanja plang kantor 1 (satu) unit, belanja kipas angin 1 (satu) unit, belanja kulkas 1 (satu) unit, belanja speaker portable 1 (satu) unit, belanja tangga aluminium 1 (satu) unit, belanja komposter besar 3 (tiga) unit, belanja laptop 1 (satu) unit dan belanja printer 1 (satu) unit.

- 2) Pemberdayaan masyarakat di kelurahan berupa belanja bahan lainnya, belanja atk, belanja kertas, belanja fotocopi, belanja benda pos, belanja bahan komputer, belanja spanduk, belanja bahan pembersih, belanja makan minum rapat, belanja honorarium narasumber, belanja juri lomba, belanja pengganti transport, belanja hadiah lomba yang di peruntukkan untuk pelaksanaan pembinaan, sosialisasi, pelatihan, senam, lomba serta monitoring evaluasi kegiatan pemberdayaan di kelurahan. sebanyak 3 LKK

Kelurahan Kototuo Limokampung

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan berupa penyediaan kebutuhan sarana prasarana pengelolaan kebersihan dan kegiatan kelurahan meliputi belanja round up 7 (tujuh) botol, belanja kemoceng 4 (empat) buah, belanja sapu plastik 4 (empat) buah, pemeliharaan bentor 2 (dua) unit, pemeliharaan mesin potong rumput 1 (satu) unit, belanja chainshaw 1 (satu) unit, belanja lemari besi 4 pintu 1 (satu) unit belanja kipas angin 4 (empat) unit, belanja gordien 1 (satu) unit, belanja karpet belanja speaker portable 1 (satu) unit, belanja laptop 1 (satu) unit, belanja bank sampah mini 3 (tiga) paket.
- 2) Pemberdayaan masyarakat di kelurahan berupa belanja bahan lainnya, belanja atk, belanja kertas, belanja fotocopi, belanja benda pos, belanja bahan komputer, belanja spanduk, belanja bahan natura, belanja makan minum rapat, belanja honorarium narasumber, belanja juri lomba, belanja pengganti transport, belanja hadiah lomba yang di peruntukkan untuk pelaksanaan pembinaan, sosialisasi, pelatihan, senam, lomba dan pelatihan serta monitoring evaluasi kegiatan pemberdayaan di kelurahan sebanyak 3 LKK

kegiatan pemberdayaan kelurahan (limbukan)

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan berupa penyediaan kebutuhan sarana prasarana pengelolaan kebersihan dan kegiatan kelurahan berupa belanja kanopi 12 (dua belas) m2, belanja merk stainless 12 (dua belas) unit, belanjja round up 4 (empat) botol, pemeliharaan bentor 2 (dua) unit, pemeliharaan mesin potong rumput 1 (satu) unit, belanja infokus sebanyak 1 unit, belanja kursi tunggu 5 (lima) unit, belanja meja lipat 5 (lima) unit, belanja meja kerja 1 (satu) unit, belanja meja resepsionis 5 (lima) meter, belanja toa portable 1 (satu) unit, belanja speaker portable 1 (satu) unit, belanja laptop 1 (satu) unit, belanja pc 1 (satu) unit,

belanja printer 1 (satu) unit, belanja bank sampah 1 (satu) paket, belanja gendang tabuah 2 (dua) set.

- 2) Pemberdayaan masyarakat di kelurahan berupa belanja bahan lainnya, atk, kertas, fotocopi, bahan komputer, alat listrik, spanduk, makan minum rapat, honorarium narasumber, instruktur senam, pengganti transport yang di peruntukkan untuk pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan pelatihan serta monitoring evaluasi kegiatan pemberdayaan di kelurahan sebanyak 3 LKK

Kelurahan Padang Karambia

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan berupa penyediaan kebutuhan sarana prasarana pengelolaan kebersihan dan kegiatan kelurahan meliputi belanja refill racun api, pemeliharaan bentor 2 (dua) unit, pemeliharaan mesin potong rumput 2 (dua) unit, belanja filling kabinet 1 (satu) unit, belanja lemari besi 4 pintu 1 (satu) unit, belanja infokus 1 (satu) unit, belanja layar infokus 1 (satu) unit, belanja kursi kerja 5 (lima) unit, belanja sofa sebanyak 1 (satu) unit, belanja speaker portable 1 (satu) unit belanja dispenser 1 (satu) unit dan belanja printer 1 (satu) unit.
- 2) Pemberdayaan masyarakat di kelurahan berupa belanja belanja atk, belanja kertas, belanja fotocopi, belanja benda pos, belanja bahan komputer, belanja spanduk, belanja bahan pembersih, belanja makan minum rapat, belanja honorarium narasumber, belanja instruktur senam, belanja juri lomba, belanja pengganti transport, belanja hadiah lomba yang di peruntukkan untuk pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan pelatihan serta monitoring evaluasi kegiatan pemberdayaan di kelurahan sebanyak 3 LKK

Kelurahan Sawah Padang Aur Kuning

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan berupa penyediaan kebutuhan sarana prasarana pengelolaan kebersihan dan kegiatan kelurahan meliputi belanja kanopi 41 (empat puluh satu) unit, belanja paving block 750 buah, pasir halus 5 (lima) kubik, belanja semen 2 (dua) zak, belanja cat tembok 15 kg, belanja besi plat 15 m, belanja round up 33 botol, belanja refil racun api 5 (lima) tabung, belanja isolasi 1 (satu) buah, belanja lampu led sebanyak 5 (lima) buah, belanja kabel nym 1 (satu) rol, pemeliharaan bentor 2 (dua) unit, pemeliharaan mesin potong rumput 1 (satu) unit, belanja filling kabinet 1 (satu) unit, belanja meja portable 3 (tiga) buah, belanja kursi tunggu 5 (lima) buah, belanja mesin potong rumput sebanyak

1 (satu) unit, belanja speaker portable 3 (tiga) buah, belanja printer 1 (satu) unit, belanja bank mini sampah 1 (satu) buah.

- 2) Pemberdayaan masyarakat di kelurahan berupa belanja bahan lainnya, belanja atk, belanja kertas, belanja fotocopi, belanja benda pos, belanja spanduk, belanja makan minum rapat, belanja honorarium narasumber, belanja instruktur senam, belanja juri lomba, belanja pengganti transport, belanja hadiah lomba yang di peruntukkan untuk pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan pelatihan serta monitoring evaluasi kegiatan pemberdayaan di kelurahan.

Kelurahan Kapalo Koto Ampangan

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan berupa penyediaan kebutuhan sarana prasarana pengelolaan kebersihan dan kegiatan kelurahan meliputi belanja sarung tangan 12 (dua belas), mantel hujan 2 (dua) buah, belanja baju kaos 4 (empat) buah, belanja celana training sebanyak 4 (empat) buah, pemeliharaan bentor 2 (dua) unit, pemeliharaan mesin potong rumput 1 (satu) unit, belanja laptop 1 (satu) unit, belanja printer 1 unit dan belanja PJU 2 (dua) unit.
- 2) Pemberdayaan masyarakat di kelurahan berupa belanja ATK, belanja kertas, belanja fotocopi, belanja benda pos, belanja bahan komputer, belanja spanduk, belanja makan minum rapat, belanja honorarium narasumber, belanja instruktur senam, belanja juri lomba, belanja pengganti transport, belanja hadiah lomba yang di peruntukkan untuk pelaksanaan berupa pembinaan, sosialisasi dan pelatihan serta monitoring evaluasi kegiatan pemberdayaan di kelurahan sebanyak 3 LKK.

2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp18.50.150,- dan teralisasi sebesar Rp17.662.835,- atau 95,11% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan berupa belanja atk, kertas, bahan komputer, makan minum rapat, lomba, honorarium untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yaitu DPC LPM kecamatan dan PKK kecamatan, pembinaan kepada LPM dan PKK yang ada di 6 kelurahan se-kecamatan Payakumbuh Selatan.

IV. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini dengan indikator kinerja yaitu persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, target 100% terealisasi 100% atau 100%. Didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp3.599.900,- dan teralisasi sebesar Rp3.504.530,- atau 97,35% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan berupa belanja ATK, kertas, makan minum rapat, honorarium, pengganti transport untuk kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi trantibum.

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini dengan indikator kinerja yaitu persentase kegiatan kemasyarakatan yang diasilitasi, target 100% terealisasi 100% atau 100%. Didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp78.468.350,- dan teralisasi sebesar Rp73.114.766,- atau 97,35% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal berupa belanja ATK, kertas, makan minum rapat, honorarium, pengganti transport untuk kegiatan pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Pondok Quran yaitu tahfiz quran, tartil quran, tilawah quran, khutbah jumat/pidacil, Forum Kota Sehat (FKS), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
- 2) Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan berupa makan minum rapat, honorarium untuk kegiatan rapat, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan bersama dengan tim pelaksana kegiatan yaitu pejabat daerah, tni, polri, unsur masyarakat dan lembaga.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	TindakLanjut	Tujuan/Masalah Yang diselesaikan
	N I H I L		

V. KANTOR CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI

Urusan Kewilayahan yang diselenggarakan oleh **Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh** melalui 2 (dua) kebijakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.734.262.146,- dan terealisasi sebesar Rp.6.796.108.794,- atau **87,87%**, dengan Capaian Kinerja Program dan Capaian Kinerja Keluaran sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
1	Pengoptimalan layanan publik masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Nilai IKM	90	91,36	101,51%
2		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Usulan Musrenbang yang diterima Perangkat Daerah	70%	100%	142,86%
			Persentase Pelayanan masyarakat yang diproses tepat waktu	85%	85%	100%
3		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
4		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	100%	100%	100%
5	Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Nilai IKM	90%	91,36	101,51%

			Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif	100%	100%	100%

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

c. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam PK

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dengan indikator nilai IKM, target sebesar 90 terealisasi sebesar 91,36 didukung oleh 7 kegiatan dan 19 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp76.458.250,- dan teralisasi sebesar Rp69.860.115,- atau 91,37% melalui 2 sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa Penyusunan Renstra, Renja, Perubahan Renja dan DPA Kecamatan Lamposi Tigo Nagari.
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa penyusunan laporan monev renja dan evaluasi realisasi kinerja fisik dan keuangan.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.5.069.265.110,- dan teralisasi sebesar Rp.4.303.076.578,- atau 84,89%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berupa pembayaran gaji dan tunjangan ASN Kecamatan Lamposi Tigo Nagori
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN berupa pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan di Lingkungan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.39.000.000,- terealisasi sebesar Rp.37.878.750,- atau sebesar 97,13%, melalui 1 sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya berupa pengadaan Pakaian Dinas Harian untuk ASN sebanyak 39 paket

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.176.153.500,- terealisasi sebesar Rp.167.908.973,- atau sebesar 95,32%, melalui 5 sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa berupa penyediaan alat listrik dan elektronik
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa pengadaan rak besi penyimpan arsip, infokus, layar infokus, Merk timbul, Back drop, kursi kerja, meja rapat
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa penyediaan kebutuhan logistik kantor seperti belanja alat kebersihan dan bahan pembersih, Alat Tulis Kantor, Belanja

alat/bahan untuk kegiatan kantor(kertas dan cover), Bahan-bahan Kimia, Bahan Komputer .

- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa penyediaan bahan cetak, biaya penggandaan dan penjiilidan pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berupa penyediaan biaya perjalanan dinas dalam maupun luar daerah Provinsi Sumatera Barat.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.286.921.300,- terealisasi sebesar Rp.280.757.344,- atau 97,85%, melalui 4 sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor berupa pengadaan gerobak untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- 2) Pengadaan Mebel berupa Kursi kerja 1 unit, Kursi tamu 1 unit, Meja kerja 4 unit, lemari arsip 1 unit
- 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa pengadaan PC sebanyak 4 unit, printer sebanyak 3 unit, layar infokus 1 unit, Mesin potong rumput 1 unit, AC 1 unit, Power supply 2 unit, dan scanner 1 unit.
- 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya berupa pemasangan paving blok Kelurahan Parambahan dan Kantor Camat Lamposi Tigo Nagori, serta pemasangan Kanopi Kantor Camat Lamposi Tigo Nagori.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp440.446.866,- terealisasi sebesar Rp431.188.704,- atau 97,90%, melalui 2 sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa pembayaran tagihan Listrik, tagihan air dan tagihan telepon untuk kebutuhan Kantor Camat dan Kantor Lurah di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berupa pembayaran jasa Tenaga Harian Lepas (THL) dan outsourcing sebanyak 14 orang pada Kantor Camat Lamposi Tigo Nagori

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.159.214.080,- terealisasi sebesar Rp.136.348.507,- atau 85,64%, melalui 3 sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berupa biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda dua 23 unit, roda empat 1 unit.
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa AC 4 unit, PC 9 unit, printer 4 unit.
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya berupa rehab gedung pada Kantor.

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan Indikator Kinerja :

- Persentase usulan dalam musrenbang Kecamatan Latina yang diterima perangkat daerah dengan target 70%, terealisasi 100% dengan capaian 142,86%
- Persentase pelayanan yang diproses tepat waktu dengan target 85%, terealisasi 85% dengan capaian 100%

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 2 Kegiatan dan 2 sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.25.091.450,- dan terealisasi sebesar Rp.22.488.879,- atau sebesar 89,63% didukung oleh 1 sub kegiatan :

- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait berupa pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat kecamatan pada Kantor Camat Lamposi Tigo Nagori.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.571.400,- dan terealisasi sebesar Rp.2.194.488,- atau sebesar 61,45%, didukung oleh 1 sub kegiatan :

- 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan berupa kegiatan PATEN pada Kantor Camat Lamposi Tigo Nagori.

III. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan dengan Indikator Kinerja :

- Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif, dengan target 100% dan terealisasi 100% dengan capaian 100%
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target kinerja 90, terealisasi 91,36 dengan capaian 101,51%

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 2 Kegiatan dan 13 sub Kegiatan sebagai berikut

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.350.262.040,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.246.455.091,- atau sebesar 92,31%, didukung oleh 13 sub kegiatan :

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan berupa pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat kelurahan pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

Kelurahan Koto Panjang Dalam

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Koto Panjang Dalam berupa Pemeliharaan 2 unit becak motor, pemeliharaan 1 unit mesin potong rumput, Pengadaan 1 unit Becak Motor, Pengadaan 1 unit PC, Pengadaan 2 unit Printer
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Koto Panjang Dalam berupa kegiatan mengembangkan kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai.

Kelurahan Koto Panjang Padang

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Koto Panjang Padang berupa penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik berupa Pengadaan Taman Digital, Pemeliharaan Becak Motor 2 Unit, Pemeliharaan Mesin potong rumput 1 unit, infokus 1 unit, layar infokus 1 unit, kusi tunggu 4 unit, Meja kerja 4 unit, lemari 2 unit, Komputer 1 unit, Printer 1 unit
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Koto panjang Padang berupa kegiatan mengembangkan kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, serta

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai

Kelurahan Padang Sikabu

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Padang Sikabu berupa penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik berupa Pemeliharaan becak motor 2 unit, Pemeliharaan mesin potong rumput 1 unit, Pengadaan Becak Motor 1 unit, Pengadaan meja 1 unit, karpet 1 unit, lemari 1 unit, komputer 1 unit, printer 1 unit
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Padang Sikabu berupa kegiatan mengembangkan kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai.

Kelurahan Parambahan

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Parambahan berupa penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik berupa Pengadaan Taman digital, Pemeliharaan Becak motor 2 unit, Pemeliharaan Mesin Potong rumput 1 unit, Infokus 1 unit, Layar Infokus 1 Unit, Kursi Tunggu 4 unit, Kursi Kerja 2 Unit, Kursi Rapat 20 Unit, Speaker Portable 1 unit, Komputer 1 unit, Printer 1 Unit
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parambahan berupa kegiatan mengembangkan kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai.

Kelurahan Sungai Durian

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Durian berupa penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik berupa Pemeliharaan Mesin Potong rumput 1 unit, Pemeliharaan Becak Motor 2 unit, Plank Nama Lembaga Kemasyarakatan 1 unit, Meja Kerja 6 unit, Kursi Kerja 5 unit, Kursi Tunggu 2 unit, Meja rapat 6 unit, Kursi rapat 35 unit, Komputer 1 unit, Printer 1 unit
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Durian berupa kegiatan mengembangkan kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

dengan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai

Kelurahan Parik Muko Aia

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Parik Muko Aia berupa penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik dengan berupa Pemeliharaan Mesin Potong rumput 1 unit, Pemeliharaan Becak Motor 2 unit, Sofa Tamu 1 unit, AC 1 unit, Karpet 2 unit, Lemari 2 unit, Kursi rapat 30 unit
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parik Muko Aia berupa kegiatan mengembangkan kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai

2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.790.000,- terealisasi sebesar Rp.42.340.730,- atau sebesar 92,47%, didukung oleh 1 sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan berupa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan bagi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti dengan target 100%, terealisasi 100% atau dengan capaian 100%, Program ini didukung oleh 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.228.350,- dan terealisasi sebesar Rp.7.829.076,- atau sebesar 84,84%, didukung oleh 1 sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan berupa kegiatan

pembinaan, monitoring dan evaluasi trantibum pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator kinerja Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi dengan target 100%, sudah terealisasi 100% dengan capaian 100%, didukung oleh 1 Kegiatan , 2 Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.52.859.800,- dan terealisasi sebesar Rp.47.781.559,- atau sebesar 90,39%, melalui 2 sub kegiatan :

- 1) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal berupa kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi lingkup Kesejahteraan Sosial dan keagamaan pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori meliputi Pembinaan UKS, Forum Kecamatan Sehat, peningkatan kualitas santri yang di bina di pondok Alqur'an dan kegiatan keagamaan lainnya
- 2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan memfasilitasi koordinasi tingkat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

d. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	TindakLanjut	Tujuan/Masalah Yang diselesaikan
	N I H I L		

14. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Payakumbuh melalui 2 (dua) kebijakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.869.332.060- dan terealisasi sebesar Rp. 2.243.561.290,- atau 78,19% dengan Capaian Kinerja Program dan Capaian Kinerja Keluaran sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan	Program Pengendalian Penduduk	Persentase kebijakan propinsi tentang data kependudukan yang dilaksanakan oleh Pemko Payakumbuh	100%	100%	100%
			TFR (Total Fertility Rate)	2,69%	2,40%	89,22%
2	Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan dan ketahanan keluarga	Pembinaan Keluarga Berencana	Unmed need	14,50	16,61	25,45 %
			Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR)	20,30%	60,03%	295,71%
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Yang efektif	71,68%	71,68%	100%
			Rata-rata Usia Perkawinan	22,5 tahun	23,4 tahun	104%

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

c. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Pengendalian Penduduk dan KB dilaksanakan melalui beberapa Program dan kegiatan, dimana target kinerja programnya telah ditetapkan kedalam Perjanjian Kinerja.

I. Program Pengendalian Penduduk

Program Pengendalian Penduduk dengan indikator :

- Persentase kebijakan propinsi tentang data kependudukan yang dilaksanakan oleh Pemko Payakumbuh dengan target pada tahun 2025 adalah 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.
- TFR (Total Fertility Rate) dengan target sebanyak 2,65% dan terealisasi sebanyak 1,70% dengan capaian kinerja 64,15%.

Program ini didukung dengan 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah daerah Provinsi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian Kuantitas Penduduk

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp17,979,000,- dan terealisasi sebesar Rp16,039,330 atau 89.21% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan kependudukan jenjang SD/MI dan SLTP/MTs, jalur Non Formal dan Informal berupa pelaksanaan Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal pada 14 satuan pendidikan

2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp196,200,000,- dan terealisasi sebesar Rp176,848,906,- atau 90.14% melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga berupa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga yang dilaksanakan sebanyak 12 kali
- 2) Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga berupa pencatatan dan pengumpulan data keluarga sebanyak 12 laporan

- 3) Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB berupa pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB sebanyak 12 dokumen

II. Program Pembinaan Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana dengan indikator kinerja yaitu :

- Unmetneed dengan target pada tahun 2025 adalah 13,50 dan realisasi 8,22 dengan capaian kinerja 139,11 %.
- Persentase pemakaian kontrasepsi Modren (*Modren Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*) dengan target sebanyak 42,60% dan terealisasi sebanyak 57,80% dengan capaian kinerja 135,68%.

Program Pembinaan Keluarga Berencana yang didukung oleh 4 (empat) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan yaitu :

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 541,800,000,- dan terealisasi sebesar Rp 417,870,136,- atau 77.13% melalui 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- 1) Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa cetak dan elektronik serta media luar ruang berupa pelaksanaan promosi dan KIE Program KKBPK melalui media cetak dan elektronik serta media luar ruang
- 2) Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (rakordes) dan mini lokakarya (minilok) berupa pelaksanaan koordinasi dan mini lokakarya program KKBPK
- 3) Pengelolaan Operasional dan sarana di balai Penyuluhan KKBPK berupa pelaksanaan pengelolaan operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
- 4) Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja berupa pelaksanaan advokasi program bangga kencana oleh pokja advokasi kepada 8 organisasi.

2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 662.024.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 654.424.906,- atau 98,85% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) berupa pelaksanaan penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) terhadap 280 kader.

3. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 213.307.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 201.566.200,- atau 94,50% melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengendalian pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang layanan KB ke Fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya berupa pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya
- 2) Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) berupa kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka Panjang (MJKP) untuk 360 orang.
- 3) Pembinaan pelayanan keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Faskes termasuk jaringan dan jejaringnya berupa pelaksanaan pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Faskes termasuk jaringan dan jejaringnya.

4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 263.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 240.754.375,- atau 91,47%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas berupa pelaksanaan dan pengelolaan program Bangga Kencana di 47 Kampung KB

III. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dengan indikator :

- Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Yang efektif dengan target 73,67% dan realisasi 73,67% capaian 100%
- Rata-rata Usia Perkawinan dengan target pada tahun 2025 adalah 22,5 tahun dan realisasi 23,4 tahun dengan capaian kinerja 104%.

Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera yang didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 708.338.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 539.313.835,- atau 76,14% melalui 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pembentukan Kelompok ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga berupa pembentukan 10 kelompok ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga
- 2) Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) berupa pelaksanaan pengelolaan ketahanan keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
- 3) Pengadaan sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R) dan pemberdayaan ekonomi keluarga /UPPKS berupa Pengadaan 10 unit sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R) dan pemberdayaan ekonomi keluarga /UPPKS
- 4) Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS berupa penyediaan biaya operasional bagi 945 orang pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga

2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp607.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp600.160.000,- atau 98,85%. melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) berupa pelaksanaan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting

2) Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) berupa pelaksanaan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita.

d. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

No.	Rekomendasi DPRD tahun N-1	Tindak lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan		
	N	I	H	I	L

15. URUSAN PERHUBUNGAN

Urusan Perhubungan diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh melalui 2 (dua) kebijakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.963.806.219,- dan terealisasi sebesar Rp8.008.706.338,- atau 89,34 %, dengan Capaian Kinerja Program dan Capaian Kinerja Keluaran sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
1	Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai IKM	89,00%	89,03%	100,03%
2	Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Umum Perkotaan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	86,00%	89,31%	103,85%

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

c. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam PK

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target kinerja pada tahun 2025 adalah 89,00% dan realisasi 89,03% dengan capaian kinerja 100,03%, yang didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dengan 20 (dua puluh) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 101.958.850 dan terealisasi sebesar Rp.84.039.519 atau 82,42% melalui 2 (dua) sub Kegiatan yaitu :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa Belanja ATK, Belanja Makan Minum dan Belanja Spanduk untuk kegiatan Forum Perangkat Daerah/Forum renja OPD.
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa Belanja ATK, Belanja Makan Minum, Belanja Spanduk dan Belanja Lembur.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 4.949.607.725 dan terealisasi sebesar Rp.4.238.610.688 atau 85,64% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berupa Belanja Gaji, Belanja Tunjangan ASN dan PPPK
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN berupa Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 105.793.240 dan terealisasi sebesar Rp.97.621.550 atau 92,28% melalui 1 (satu) sub Kegiatan yaitu :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya berupa Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH), Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL), dan Belanja Pakaian Lapangan Petugas Parkir (serta pekerja kebersihan).

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 284.241.548 dan terealisasi sebesar Rp.282.293.960 atau 99,31% melalui 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor berupa belanja alat-alat listrik kantor.
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa Belanja Modal Mebel, kursi dan lemari.
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa Belanja ATK, Belanja alat kebersihan kantor.
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa Belanja Cetak karcis dan Belanja ATK.
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan berupa Belanja Surat Kabar Harian.
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berupa Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 134.739.000 dan terealisasi sebesar Rp.127.896.502 atau 94,92% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan berupa Belanja Modal Kendaraan Bermotor Roda Dua.
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa Belanja Modal Personal Computer, Belanja PC, Laptop dan Printer.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 91.409.236 dan terealisasi sebesar Rp.68.028.825 atau 74,42% melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos/Materai.
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa Belanja tagihan telepon, air dan listrik.
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa Belanja pemeliharaan peralatan kantor.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 347.760.000 dan terealisasi sebesar Rp.326.084.400 atau 93,77% melalui 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat.
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan berupa Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional dan Lapangan.
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa Belanja pemeliharaan dan perbaikan laptop, printer dan komputer.
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya berupa Pengawasan, Perencanaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung.

II. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan indikator kinerja yaitu persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas dengan target kinerja pada tahun 2025 sebesar 86,00% terealisasi 89,31% dengan capaian kinerja 103,85%, yang didukung oleh 8 (delapan) kegiatan dengan 16 (enam belas) sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran, pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota berupa DED/dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAJ.

2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp1.161.592.800 dan terealisasi sebesar Rp1.099.806.576 atau 94,68% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota berupa Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat seperti speed bump, water road barrier, pagar besi pembatas jalan, warning light, cermin tikungan dan rambu rambu lalu lintas lainnya.
- 2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan berupa Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat yaitu pemeliharaan warning light, traffic light dan pemeliharaan marka jalan.

3. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp1.118.911.070 dan terealisasi sebesar Rp1.030.339.216 atau 92,08% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota berupa Belanja ATK, Belanja Makan dan Minum, Belanja Jasa Tenaga Perhubungan, Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus/patwal.
- 2) Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota berupa Belanja ATK, Belanja Makan dan Minum, Belanja Jasa Kantor, Belanja Perjalanan Dinas untuk kegiatan Wahana Tata Nugraha (WTN), pemilihan Pelajar Pelopor dan Sopir teladan.

4. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran, pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pengendalian Dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota berupa Belanja ATK, Belanja Makan dan Minum untuk kegiatan pengawasan angkutan.

5. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran, pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berupa DED/dokumen penyusunan rencana umum jaringan trayek.

6. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran, pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C berupa Belanja operasional untuk kegiatan pengawasan terminal.
- 2) Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C berupa Belanja ATK, Belanja Makan Minum, Belanja pelatihan/sosialisasi.

3) **Rehabilitas dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Umum dan Penunjang)**
berupa rehab dan pemeliharaan terminal tipe C.

7. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 363.250.750 dan terealisasi sebesar Rp.358.320.287 atau 98,64% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota berupa Belanja Jasa tenaga Pelayanan Umum/gaji petugas parkir.

8. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 304.542.000,- dan terealisasi sebesar Rp.295.664.815,- atau 97,09% melalui 5 (lima) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor berupa Belanja cetak blanko kartu induk uji kendaraan, belanja cetak formulir kendaraan dan Belanja Modal Alat Uji Kendaraan Bermotor
- 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Kendaraan Bermotor berupa kegiatan sosialisasi dan bimtek untuk penguji kendaraan bermotor.
- 3) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor berupa Belanja Cetak Bukti Lulus Uji atau Blu-e.
- 4) Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor berupa Belanja iklan/sosialisasi SOP PKB.
- 5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor berupa Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel serta kalibrasi alat uji kendaraan bermotor.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No.	Rekomendasi DPRD Tahun n-1	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
a	Agar Dinas Perhubungan diberi Insentif Operasional Kir, Operasional Parkir dan Operasional Lalu Lintas	Akan dilakukan pengusulan anggaran insentif Operasional Kir, Operasional Parkir dan Operasional Lalu Lintas pada APBD Dinas Perhubungan	Insentif yang diberikan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi guna meningkatkan kinerja, disiplin, dan kualitas pelayanan.
b	Melakukan revitalisasi trafic light dan rambu rambu lalu lintas	Akan dilakukan revitalisasi traffic light dan rambu lalu lintas secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan	Meningkatkan keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas.

		kemampuan keuangan daerah	
c	Penertiban angkutan umum (Angkot, Angdes, AKDP, AKAP) dan kendaraan wisata (Bendi) serta di tentukan trayek masing - masing kendaraan yang mengakomodir semua kepentingan angkutan	Bedasarkan permenhub No. PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek. Kita akan menertibkan Angkutan Kota yang menjadi urusan kita, dan akan melengkapi rambu untuk trayek	- Meningkatkan kelancaran lalu lintas - Menciptakan angkutan umum yang tertib dan teratur - Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang
d	Terkait Terminal Type C agar bisa diaktifkan kembali dan dilakukan revitalisasi	Terminal Type C akan diaktifkan dan melakukan revitalisasi	Agar angkutan umum (angkot) tidak melakukan pengeteman di luar terminal dan alur angkot tetap tertib sesuai rute, guna menjamin kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan
e	Agar dapat direalisasikan pembangunan gedung parkir di Kota Payakumbuh yang lebih representatif	Sudah kita lakukan pengusulan pembangunan gedung parkir di Kota Payakumbuh	Dengan dibangunnya gedung parkir di Kota Payakumbuh, arus lalu lintas di pusat kota menjadi lebih lancar karena kendaraan dapat diparkir di lokasi khusus serta mengurangi parkir liar di badan jalan

16. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan Komunikasi dan Informatika diselenggarakan oleh **Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh** melalui 1 (satu) kebijakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.556.280.212,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.213.737.063,- atau 85,95%, dengan Capaian Kinerja Program dan Capaian Kinerja Keluaran sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan Layanan Sistem Informasi yang Terintegrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	86,30	86,67	100,43%
			Penilaian AKIP oleh Inspektorat	81,20	81,40	100,25%
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pelayanan Penyaluran Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media	100%	100%	100%
			Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	78,00%	80,00%	102,56%
		Program Aplikasi Informatika	Persentase (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas	100%	100%	100%
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3	3,89	129,67%
			Persentase Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	85%	85%	100%

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada table dibawah ini:

c. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam PK

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja yaitu :

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target kinerja 86,30 dan realisasi 86,67% dengan capaian kinerja 100,43%
- Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat dengan target kinerja 81,20 dan realisasi 81,40 dengan capaian kinerja 100,25%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp81.258.950,- dan teralisasi sebesar Rp56.688.934,- atau 69,76%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa penyusunan Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Renja Perubahan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa penyusunan dokumen laporan, yaitu LKJIP, LKPJ, LPPD, laporan evaluasi kinerja triwulan, laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan, laporan capaian IKU/IKD, laporan keuangan dan laporan aset Dinas Komunikasi dan Informatika.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp3.779.034.098,- dan teralisasi sebesar Rp3.071.922.195,- atau 81,29%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berupa penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan PPK) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN berupa honorarium penanggung jawab keuangan dan pengelola barang dan jasa di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp34.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp32.967.000,- atau 96,96%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya berupa penyediaan pakaian dinas baru beserta atribut dan kelengkapan lainnya untuk seluruh pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp215.363.600,- dan teralisasi sebesar Rp190.144.405,- atau 88,29%, melalui 5 (lima) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa penyediaan alat tulis kantor, benda pos, alat kebersihan, dan alat/bahan komputer pada kantor Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa penyediaan barang cetak, penggandaan dan penjilidan pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 4) Fasilitasi Kunjungan Tamu berupa penyediaan makan minum dan snack tamu Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berupa penyediaan biaya perjalanan dinas bagi ASN (PNS dan PPK) Dinas Komunikasi dan Informatika.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp281.059.840,- dan teralisasi sebesar Rp260.426.850,- atau 92,66%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berupa penyediaan kendaraan dinas operasional pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa pengadaan alat studi (liputan), alat komunikasi, komputer, dan peralatan komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp63.289.752,- dan teralisasi sebesar Rp61.543.615,- atau 97,24%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa penyediaan jasa telekomunikasi/internet untuk Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berupa pembayaran gaji sopir dan tenaga administrasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp180.210.000,- dan teralisasi sebesar Rp164.416.866,- atau 91,24%, melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan berupa pembayaran pajak, servis dan BBM kendaraan dinas jabatan Eselon II pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berupa penyediaan pembayaran pajak, servis dan BBM kendaraan dinas operasional/lapangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa jasa pemeliharaan mebeul pada Dinas Komunikasi dan Informatika. (realisasi fisik 54,17%, dan realisasi keuangan 56,22%)

II. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase Pelayanan Penyaluran Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media dengan target kinerja 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.
- Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah dengan target kinerja 78,00% dan realisasi 80% dengan capaian kinerja 102,56%.

Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik Pemerintah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp1.435.811.072,- dan teralisasi sebesar Rp1.267.482.887,- atau 88,28%, melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Relasi Media berupa pembayaran jasa publikasi pemberitaan program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dengan media berbayar yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Payakumbuh.

- 2) Pelayanan Informasi Publik berupa dokumentasi, publikasi, dan pelayanan informasi publik, yaitu informasi berkala, informasi setiap saat, dan informasi serta merta.
- 3) Pengelolaan Media Komunikasi Publik berupa fasilitasi pengelolaan penyediaan sarana publikasi pada media cetak, media elektronik (radio, televisi, siber) dan media luar ruangan (baliho dan spanduk).

III. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas dengan target kinerja 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.
- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan target kinerja 3 dan realisasi 3,75 dengan capaian kinerja 125%.
- Persentase Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan target kinerja 85% dan realisasi 85% dengan capaian kinerja 100%.

Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp3.486.252.900,- dan teralisasi sebesar Rp3.108.144.311,- atau 89,15%, melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah berupa pengembangan pada aplikasi DiSakola (aplikasi PPDB Online), Sigma (aplikasi pengelola aset kota), dan e-SPPD versi 3 (aplikasi perjalanan dinas).
- 2) Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah berupa penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
- 3) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berupa pengadaan layanan bandwidth Kota Payakumbuh, IP *Public*, pemeliharaan jaringan intra, CCTV, peralatan *mainframe server*, pelatihan dan sertifikasi IT serta belanja tenaga ahli teknologi informasi yang digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

d. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang diselesaikan
1	Pembuatan super aplikasi untuk mengintegrasikan seluruh aplikasi informatika yang ada di Perangkat Daerah Kota Payakumbuh	Mengintegrasikan seluruh aplikasi layanan ke aplikasi My Kopay	Menjadikan aplikasi My Kopay sebagai super aplikasi
2	Membuat <i>commander center</i> Kota Payakumbuh	Direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2027	Penyiapan ruangan dan aplikasi <i>dashboard</i>

17. URUSAN KOPERASI DAN URUSAN KECIL MENENGAH

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diselenggarakan oleh **Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh** melalui 3 (tiga) kebijakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.681.557.671,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.101.004.822,- atau 92,44%, dengan Capaian Kinerja Program dan Capaian Kinerja Keluaran sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
1	Pemanfaatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	92,00	93,47	101,60%
			Penilaian AKIP oleh Inspektorat	A	A	100%
2	Meningkatkan Pembinaan Terhadap Koperasi	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	39,86%	30,46%	76,42%
		Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Fasilitas Penerimaan NIK untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	70,00%	100,00%	142,86%
		Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	65,00%	75,86%	116,70%
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	22,38%	23,37%	104,42%
3	Fasilitasi Pemasaran Produk UMKM	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Meningkatnya Status Usaha Mikro dari Non Formal Menjadi Formal (Legalitas Usaha)	0,3%	0,3%	100%
		Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang Difasilitasi Perluasan Jaringan Pasarnya	0,2%	0,2%	100%

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada table dibawah ini:

c. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam PK

Urusan Koperasi dan UKM dilaksanakan melalui 5 (lima) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja yaitu :

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target kinerja 92,00% dan realisasi 93,47% dengan capaian kinerja 101,60%
- Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat dengan target kinerja A dan realisasi A dengan capaian kinerja 100%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp54.916.900,- dan teralisasi sebesar Rp53.169.461,- atau 96,82%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa penyusunan dokumen rencana kerja perubahan Tahun 2025, dan dokumen rencana kerja Tahun 2026.
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pengendalian kegiatan Tahun 2025, LKPJ Tahun 2025, LKJIP Tahun 2024, laporan evaluasi triwulan pelaksanaan Renja, RKPD dan SAKIP, laporan pelaksanaan pengelolaan informasi publik, laporan evaluasi SPIP, dan laporan SKM.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 4.683.746.223,- dan teralisasi sebesar Rp. 4.260.910.622,- atau 90,97%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berupa penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan PPK) di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM.
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN berupa honorarium penanggung jawab keuangan dan pengelola barang dan jasa di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 39.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 38.961.000,- atau 99,90%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya berupa penyediaan pakaian dinas baru beserta atribut dan kelengkapan lainnya untuk seluruh pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 199.525.400,- dan teralisasi sebesar Rp. 188.118.150,- atau 94,28%, melalui 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa penyediaan baterai, kabel, dan alat penerangan.
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa pengadaan mesin *finger print*.
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa penyediaan alat tulis kantor pada Dinas Koperasi dan UKM.
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa penyediaan barang cetak, penggandaan dan penjilidan pada Dinas Koperasi dan UKM.
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan berupa penyediaan koran Haluan pada Dinas Koperasi dan UKM.
- 6) Fasilitas Kunjungan Tamu berupa penyediaan makan minum dan snack tamu Dinas Koperasi dan UKM.
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berupa penyediaan biaya perjalanan dinas bagi ASN (PNS dan PPK) Dinas Koperasi dan UKM.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 100.306.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 95.784.400,- atau 95,49%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Mebeul berupa pengadaan kursi tunggu tamu pada Dinas Koperasi dan UKM.
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa pengadaan laptop, *Personal Computer* (PC), Printer, dan gerobak sampah dorong.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 1.631.348.048,- dan teralisasi sebesar Rp. 1.499.498.234,- atau 91,92%, melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa pembayaran rekening air, listrik, dan telepon Dinas Koperasi dan UKM.
- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa pemeliharaan AC, PC/Notebook, dan Printer.
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berupa pembayaran gaji Tenaga Harian Lepas (THL) dan *Outsourcing* (sopir, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan) pada Dinas Koperasi dan UKM.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 507.680.480,- dan teralisasi sebesar Rp. 503.498.722,- atau 99,18%, melalui 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan berupa pembayaran pajak, servis dan BBM kendaraan dinas jabatan Eselon II pada Dinas Koperasi dan UKM.
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berupa penyediaan pembayaran pajak, servis dan BBM kendaraan dinas operasional/lapangan pada Dinas Koperasi dan UKM.
- 3) Pemeliharaan Mebeul berupa pemeliharaan mobiler kantor pada Dinas Koperasi dan UKM.
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya berupa pemeliharaan ruang *front office* pada Dinas Koperasi dan UKM.

II. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program Pengawasan dan Pemeriksanaan Koperasi dengan indikator kinerja yaitu

- Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan target kinerja 39,86% dan realisasi 30,46% dengan capaian kinerja 76,42%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, KSP/USP yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 19.749.200,- dan teralisasi sebesar Rp. 19.234.409,- atau 97,39%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota berupa pengawasan dan pemeriksaan secara berkala melalui 4 (empat) aspek terhadap unit usaha koperasi.

III. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase Fasilitasi Penerbitan NIK untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 70,00% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 142,86%.

Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 14.999.550,- dan teralisasi sebesar Rp. 14.764.502,- atau 98,43%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota berupa pemeriksaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam pada unit usaha koperasi.

IV. Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi

Program Pendidikan dan Pelatihan dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 65,00% dan realisasi 75,86% dengan capaian kinerja 116,70%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 75.999.470,- dan teralisasi sebesar Rp. 75.260.845,- atau 99,03%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi berupa pembayaran gaji pendamping koperasi dan pendamping UMKM dan honorarium peserta pelatihan perkoperasian.

V. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan indikator kinerja yaitu

- Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dengan target kinerja 22,38% dan realisasi 23,37% dengan capaian kinerja 104,42%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 161.207.650,- dan teralisasi sebesar Rp. 160.444.584,- atau 99,53%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota berupa fasilitasi pembentukan koperasi merah putih di Kota Payakumbuh.

VI. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase Meningkatnya Status Usaha Mikro dari Non Formal Menjadi Formal (Legalitas Usaha) dengan target kinerja 0,3% dan realisasi 0,3% dengan capaian kinerja 100%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan, dan Koordinasi

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 108.231.900,- dan teralisasi sebesar Rp. 107.588.901,- atau 99,41%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro berupa fasilitasi pengajuan sertifikasi halal pada unit usaha.
- 2) Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro berupa pemberian pendampingan penguatan dan pengembangan usaha mikro dalam bentuk bimbingan teknis terhadap unit usaha koperasi.

VII. Program Pengembangan UMKM

Program Pengembangan UMKM dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase Usaha Mikro yang Difasilitasi Perluasan Jaringan dengan target kinerja 0,2% dan realisasi 0,2% dengan capaian kinerja 100%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 84.846.850,- dan teralisasi sebesar Rp. 83.770.992,- atau 98,73%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan berupa pelaksanaan bimbingan teknis pemasaran online dan kelas bisnis UMKM

d. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	TindakLanjut	Tujuan/Masalah Yang diselesaikan		
	N	I	H	I	L

18. URUSAN PENANAMAN MODAL

Urusan Penanaman Modal diselenggarakan oleh **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh** melalui 4 (empat) kebijakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.880.968.285,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.280.774.326,- atau 87,70%, dengan Capaian Kinerja Program dan Capaian Kinerja Keluaran sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
1	Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Nilai IKM	95	95,76	100,8 %
			Nilai evaluasi Akip oleh Inspektorat	81,20	82,20	101,23%
2	Pembentukan BUMD untuk mendorong percepatan pertumbuhan sektor strategis	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap Target Investasi	100 %	107,52%	107,52%
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	10 %	10%	100%
3	Menciptakan iklim investasi Yang kondusif	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100%	100%	100 %
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100 %	100 %	100 %
4	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan Usaha	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	100%

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja:

- Nilai IKM dengan target kinerja pada tahun 2025 adalah 95 dan realisasi 95,76 dengan capaian kinerja 100,8 %.
- Nilai Evaluasi AKIP DPMPSTSP oleh Inspektorat, dengan target kinerja pada tahun 2025 adalah 81,20 dan realisasi 82,20 dengan capaian kinerja 101,23%

Program ini didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dengan 20 (dua puluh) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 28.072.150,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.362.151 atau 86,78 % melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu Renstra, Renja, dan DPA.
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa penyusunan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yaitu LKPJ, LkjiP, LPPD, dan SKM

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 2.984.602.310,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.526.475.457,- atau 84,65% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berupa penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebanyak 22 orang.
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN berupa pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan.

3. Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 87.495.650,- dan terealisasi sebesar Rp. 81.334.823,- atau 92,96% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya berupa penyediaan Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dan Pakaian Lapangan bagi aparatur DPMPSTSP Kota Payakumbuh sebanyak 46 orang.
- 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan berupa pelaksanaan Bimbingan Teknis terkait Pelayanan Publik bagi aparatur DPMPSTSP Kota Payakumbuh sebanyak 35 orang

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 97.056.200 dan terealisasi sebesar Rp. 93.726.546,- atau 96,57% melalui 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa penyediaan paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa penyediaan Alat Tulis Kantor, Alat Kebersihan, Materai, Pengisian APAR, Bahan Komputer, dan bahan habis pakai lainnya
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa penyediaan Kertas, Fotokopi dan Cetak
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan berupa penyediaan koran/media cetak
- 5) Fasilitas Kunjungan Tamu berupa penyediaan makan dan minum tamu pada DPMPTSP Kota Payakumbuh
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berupa fasilitas penyelenggaraan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti oleh DPMPTSP Kota Payakumbuh

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 98.124.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 94.606.499 atau 96,42% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pengadaan Mebel berupa penyediaan sebanyak 2 unit mebel yaitu kursi kerja dan meja rapat
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa penyediaan sebanyak 2 unit Peralatan yaitu Personal Computer, Printer dan Laptop

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 737.596.280,- dan terealisasi sebesar Rp. 706.317.178,- atau 95,76% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa pembayaran jasa sumber daya air, listrik, telepon pada Kantor DPMPTSP Kota Payakumbuh
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berupa pembayaran jasa tenaga administrasi, jasa pelayanan umum, jasa kebersihan, jasa keamanan dan sopir sebanyak 23 orang

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 305.885.674,- dan terealisasi sebesar Rp. 301.656.737,- atau 98,62% melalui 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan berupa pemeliharaan kendaraan, pembayaran pajak, dan BBM Kendaraan Dinas Roda 4 Pejabat eselon II DPMPSTSP Kota Payakumbuh sebanyak 1 unit.
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berupa pemeliharaan kendaraan, pembayaran pajak, dan BBM kendaraan dinas roda empat dan roda dua sebanyak 17 unit
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa pemeliharaan peralatan dan mesin yaitu *Mobiler, Air Conditioner, Personal Computer* dan *Printer* sebanyak 20 unit
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya berupa rehabilitasi aula DPMPSTSP Kota Payakumbuh

II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator kinerja yaitu Realisasi Total terhadap Target Investasi dengan target kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 100 % dan realisasi sebesar 107,52 % dengan capaian kinerja 107,52% yang didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 56.014.950,- dan terealisasi sebesar Rp. 54.386.575,- atau 97,09% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyusunan Peta Potensi Investasi kabupaten/Kota berupa penyusunan Kajian Investasi dan Peta Potensi Investasi sebanyak 1 dokumen.

III. Program Promosi Penanaman Modal

Program Promosi Penanaman Modal dengan indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi dengan target kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 10 % dan realisasi sebesar 10 % dengan capaian kinerja 100% yang didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 54.922.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.753.060,- atau 34,14% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota berupa sewa stand pameran dan pembuatan video promosi Penanaman Modal.

IV. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator kinerja yaitu Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan dengan target kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%, yang didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 351.349.471,- dan terealisasi sebesar Rp. 325.190.080,- atau 92,55% melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik berupa operasional Mall Pelayanan Publik seperti Makan Minum Rapat, Alat Tulis Kantor, Alat Kebersihan, Pemeliharaan Peralatan Kantor, dan operasional lainnya.
- 2) Penyediaan dan Pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko berupa operasional Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan Perizinan Berusaha pada Mall Pelayanan Publik.
- 3) Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa kegiatan pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator kinerja yaitu Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha dengan target kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 100%

dan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%, yang didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 41.660.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.137.674,- atau 60,34% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahnya berupa fasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya
- 2) Pengawasan Penanaman Modal berupa pelaksanaan inspeksi lapangan kepada pelaku usaha dalam rangka evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha (data, profil dan informasi kegiatan usaha)

VI. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator kinerja yaitu Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal dengan target kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%, yang didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 38.188.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.827.546,- atau 75,49% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik berupa fasilitasi pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan penyusunan Buku Profil Penanaman Modal.

d. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD tahun N-1	Tindak lanjut	Tujuan/masalah
1	Peningkatan pengawasan dan anggaran terhadap pelaku-	Peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha yang	Tercapainya kinerja OPD dalam

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Payakumbuh – Tahun 2025

	pelaku usaha yang ada di Kota Payakumbuh	telah memiliki izin rutin dilakukan setiap bulannya. Sedangkan untuk peningkatan anggaran terhadap pelaku-pelaku usaha disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.	meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatnya nilai investasi di Kota Payakumbuh
2	Perlu pengawasan periodik untuk perizinan usaha	Pengawasan secara periodik tetap dilakukan setiap tahunnya dengan memperhatikan kondisi yang terjadi di lapangan.	
3	Melakukan peninjauan lapangan bagi setiap pelaku usaha yang melakukan perizinan melalui OSS, untuk mengurangi adanya dampak dampak sosial dikemudian hari	Peninjauan kelapangan merupakan agenda rutin yang tetap dilakukan setiap waktu, bagi seluruh perizinan yang melalui OSS.	

19. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Urusan Kepemudaan dan Olahraga diselenggarakan oleh **Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga** melalui 3 kebijakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.754.342.755,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.509.039.736,- atau 97.50%, dengan uraian sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan daya saing angkatan kerja siap pakai	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Jumlah pemuda pelopor yang sampai ke tingkat nasional	5 orang	2 orang	40%
			Persentase pemuda yang berwirausaha	350 orang	350 orang	100%
			Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	30 OKP	30 OKP	100%
2.	Peningkatan pembibitan atlet dan pembinaan olahraga prestasi	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah medali pada event olahraga tingkat daerah	55 medali	76 medali	138.18%
3.	Menyelenggarakan event-event untuk menarik wisatawan dengan menerapkan protokol kesehatan		Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik	100 %	100 %	100%

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

c. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan melalui beberapa Program, dimana target kinerja programnya telah ditetapkan kedalam perjanjian kinerja

I. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan indikator kinerja yaitu Jumlah pemuda pelopor yang sampai ke tingkat nasional dengan target 5 orang terealisasi 2 orang dengan capaian kinerja 40 % (realisasi rendah dikarenakan tidak tersedianya pemuda pelopor di 3 bidang)
- Persentase pemuda yang berwirausaha dengan target 350 orang terealisasi 350 orang dengan capaian 100%
- Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif dengan target 30 OKP terealisasi 30 OKP dengan capaian 100%

Program ini didukung oleh 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan yaitu :

1. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/ Kota wirausaha Muda Pemula dan pemuda kader Kabupaten/ Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 76.940.000.-, dan terealisasi sebesar Rp. 52.333.405.- atau 68,02% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota berupa kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda melalui sumpah pemuda dan program organisasi kepemudaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
- 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota berupa berupa **Mimbar Suara Pemuda** bekerjasama dengan KNPI Kota Payakumbuh. Pelaksanaan kegiatan menghadirkan peserta sebanyak 20 orang pemuda dalam berbagai bentuk penyampaian gagasan seperti puisi, pidato, orasi maupun *stand-up comedy* bertema kepemudaan, kebangsaan dan bela Negara. Dan penampilan akan dinilai oleh dewan juri.

2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 49.653.750.-, dan terealisasi sebesar Rp. 34.272.258.- atau 69,02 % melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota berupa pelatihan untuk kader pemuda dengan jumlah peserta 30 orang selama 2 hari pada tanggal 25 dan 26 Juni 2025.

II. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahrgaan

Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahrgaan dengan indikator yaitu :

- Jumlah medali pada event olahraga tingkat daerah dengan target 55 medali terealisasi 76 Medali dengan capaian 138.18 %.
- Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik dengan target 90% terealisasi 90% dengan capaian kinerja 100%.

Program ini didukung oleh 3 kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan yaitu

1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 1.289.201.755.-, dan terealisasi sebesar Rp. 1.254.800.056.- atau 97.33 % melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota berupa Pelaksanaan kegiatan berupa:
 - a. Belanja bahan-bahan kimia untuk kolam renang dan lapangan olahraga
 - b. Perencanaan, pengawasan dan rehab atap lapangan tenis indoor
 - c. Perencanaan, pengawasan dan Pemeliharaan Payakumbuh Bugar
 - d. Perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga dan lapangan olahraga
 - e. Pemeliharaan Lapangan Bola dan Kawasan
- 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar

berupa Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar yaitu ; Special Olympic Indonesia (SOIna), Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS), Kejuaraan daerah, Provinsi dan Nasional.

2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 3.471.686.760,-, dan terealisasi sebesar Rp. 3.361.722.164,- atau 96.83 % melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota, berupa Penyelenggaraan beberapa event diantaranya sepak bola KU 12, Walikota Cup KU 12, kejuaraan Sepak bola KU 14, Kejuaraan Sepak Bola KU 35, Kejuaraan sepak bola KU 45, BATAPA Criterium II Tahun 2023 (Balap Sepeda) dan Kejurda Tenis Lapangan serta bantuan hibah KONI Kota Payakumbuh
- 2) Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/ kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota berupa fasilitasi kegiatan berupa bantuan kejuaraan/hadiah pertandingan, transportasi akomodasi atlet dan pelatih untuk mengikuti pertandingan bagi atlet dan pelatih. Output sub kegiatan ini berupa bantuan hadiah untuk kegiatan NON Porprov, bantuan kejuaraan/hadiah.
- 3) Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga berupa kegiatan partisipasi dan keikutsertaan dalam kejuaraan di tingkat daerah, wilayah dan nasional.

3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 429.199.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 373.416.699,- atau 87 % melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional berupa fasilitasi pelaksanaan senam Jumat dan minggu pagi untuk masyarakat Kota Payakumbuh di Medan Nan Bapaneh Ngalau Indah, Festival Parade Onthel, Fun bike Payakumbuh city of randang, Hibah KORMI

III. Pogram Pengembangan Kapastitas Kepramukaan

Program Pengembangan kapasitas kepramukaan dengan indicator : Peringkat Pramuka tingkat propinsi dengan target 1 organisasi kepramukaan terealisasi sebanyak

1. **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 437.661.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 432.495.155,- atau 98.82 % melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah berupa fasilitasi dana hibah dan dana operasional kegiatan organisasi kepramukaan atau Kwartir Cabang 0314 Gerakan Pramuka Kota Payakumbuh

d. **Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya**

No	Rekomendasi DPRD tahun n-1	Tindak lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1	Pembinaan pemuda melalui karang taruna	Dilakukan pelatihan bagi pemuda kader dan organisasi pemuda	Memberikan pembekalan kepada pemuda dan organisasi untuk meningkatkan kemandirian serta peluang usaha
2	Pembinaan terhadap pemuda berprestasi	Melakukan pembinaan dan penyediaan anggaran untuk reward/penghargaan bagi pemuda yang berprestasi	Semakin meningkatnya kompetensi pemuda dan meningkatkan semangat untuk berbuat lebih baik
3	Tingkatkan pembinaan terhadap pemuda pelopor	Menyediakan anggaran untuk pembinaan dan memotivasi pemuda pelopor yang ada	Memberikan motivasi kepada pemuda pelopor agar memelopori pemuda dan masyarakat

20. URUSAN STATISTIK

Urusan Statistik diselenggarakan oleh **Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh** melalui 1 (satu) kebijakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 54.182.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 53.121.580,- atau 98,04%, dengan Capaian Kinerja Program dan Capaian Kinerja Keluaran sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%
			Indeks Pembangunan Statistik	2.69	2.69	100%

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada table dibawah ini:

c. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam PK

Urusan Statistik dilaksanakan melalui 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

I. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah dengan target kinerja 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%
- Indeks Pembangunan Statistik dengan target kinerja 2.69 dan realisasi 2.69 dengan capaian kinerja 100%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 54.182.500,- dan teralisasi sebesar Rp. 53.121.580,- atau 98,04%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia berupa pelaksanaan penyusunan dan distribusi publikasi statistik melalui penyusunan buku Payakumbuh Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Statistik Sektoral, dan Profil Statistik Daerah.

d. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	TindakLanjut	Tujuan/Masalah Yang diselesaikan
	N I H I L		

21. URUSAN PERSANDIAN

Urusan Persandian diselenggarakan oleh **Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh** melalui 1 (satu) kebijakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 112.822.752,- dan terealisasi sebesar Rp. 109.590.425,- atau 97,14%, dengan Capaian Kinerja Program dan Capaian Kinerja Keluaran sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	46.20	49.76	107,70%
			Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	85,00%	90,00%	105,80%

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada table dibawah ini:

c. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam PK

Urusan Persandian dilaksanakan melalui 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan indikator kinerja yaitu :

- Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dengan target kinerja 46.2 dan realisasi 49.76 dengan capaian kinerja 107,70%
- Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah dengan target kinerja 85,00% dan realisasi 90,00% dengan capaian kinerja 105,80%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 112.822.752,- dan teralisasi sebesar Rp. 109.590.425,- atau 97,14%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berupa monitoring dan evaluasi serta operasional layanan ke seluruh Perangkat Daerah dalam rangka penyediaan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah.

d. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang diselesaikan
	N	I	H

I

22. URUSAN KEBUDAYAAN

Urusan Kebudayaan diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melalui 2 kebijakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **1.795.915.540,-** dan terealisasi sebesar Rp. **1.572.299.830,-** atau 90.00 %, dengan Capaian Kinerja Program dan Capaian Kinerja Keluaran sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
1.	Penguatan tugas pokok dan fungsi lembaga adat	Program pengembangan Kebudayaan	Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif	80 kelompok	80 kelompok	100%
2.	Menyelenggarakan event-event untuk menarik wisatawan dengan menerapkan protokol kesehatan		Jumlah penyelenggaraan festival budaya	19 event	19 event	100 %
			Jumlah pemangku adat yang aktif pada kegiatan adat dan budaya daerah	27 orang	27 orang	100%
		Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Jumlah benda cagar budaya yang dilindungi	28 BCB	42 BCB	150%
		Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Koleksi permuseum yang dipelihara	100 %	100%	100 %

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran.

Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada table dibawah ini:

c. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

I. Program Pengembangan Kebudayaan

Program Pengembangan Kebudayaan dengan 3 indikator kinerja yaitu:

- Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif dengan target kinerja pada tahun 2025 adalah 80 kelompok dan terealisasi 80 kelompok dengan capaian 100%;
- Jumlah penyelenggaraan festival budaya dengan target pada tahun 2025 adalah 19 event terealisasi 19 event dengan capaian 100 % serta,
- Jumlah pemangku adat yang aktif pada kegiatan adat dan budaya daerah dengan target 27 orang terealisasi 27 orang dengan capaian 100%

Program yang didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 5(lima) sub kegiatan yaitu:

1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 60.712.600.-, dan terealisasi sebesar Rp. 59.291.704.- atau 97,66% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan berupa fasilitasi penyelenggaraan monitoring WBTB dan Pendataan objek kebudayaan.

2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 338.334.900.-, dan terealisasi sebesar Rp. 243.000.845.- atau 71,82 %. melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya berupa Penampilan kesenian pada kegiatan atraksi budaya wisata, pegelaran dan lomba-lomba/ event budaya
- 2) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional berupa acara seremonial penyambutan tamu dalam rangka pengenalan kebudayaan khas kota payakumbuh sekaligus mengembangkan seni budaya daerah kota Payakaumbuh berupa workshop/pelatihan

3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 1.183.341.350.-, dan terealisasi sebesar Rp. 1.063.642.237.- atau 89,88 % melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat berupa kegiatan cetak buku dan pengadaan buku adat budaya serta pengadaan sarana prasarana untuk pusat literasi adat
- 2) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat berupa Fasilitasi operasional LKAAM, KAN dan Bundo Kandung se Kota Payakumbuh

II. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan indikator kinerja jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya dengan target 2 lembaga. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

1. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kab/kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 74.097.300.-, dan terealisasi sebesar Rp. 70.842.104 atau 95.61 %. melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional berupa fasilitasi keg pembinaan sanggar dan komunitas seni , penyempurnaan Perda Mars Kota Payakumbuh

III. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya dengan indikator kinerja Jumlah benda cagar budaya yang dilindungi dengan target 28 BCB terealisasi 42 BCB dengan capaian 150%. yang didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 18.807.800.-, dan terealisasi sebesar Rp. 18.474.510.- atau 98.23 % melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya berupa pendataan, penetapan dan pengelolaan Warisan Budaya Benda (Cagar Budaya) dan Tak Benda yang ada di Kota Payakumbuh

IV. Program Pengelolaan Permuseuman

Program Pengelolaan Permuseuman dengan indikator Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum dengan target 100% dan terealisasi sebanyak 100% yang didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu

1. **Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 120.621.590.-, dan terealisasi sebesar Rp. 117.048.430.- atau 97.04 % melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Perlindungan, Pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu berupa pendataan dan pengdokumentasian WBTB
- 2) Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum pemeliharaan benda koleksi museum da pengadaan pakaian tradisi

d. **Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya**

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang diselesaikan
	N	I	H I

L

23. URUSAN KEARSIPAN

Urusan Kearsipan diselenggarakan oleh **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh** melalui 1 (satu) kebijakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.347.900,- dan realisasi sebesar Rp. 65.128.866,- (72,09%), dengan uraian sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Program Sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
1	Pengembangan dan Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip	70,15%	70,97%	101,17%

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

c. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Urusan kearsipan dilaksanakan melalui 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

1. Program Pengelolaan Arsip

Program Pengelolaan Arsip dengan indikator kinerja yaitu Tingkat ketersediaan arsip dengan target 70,15% dan realisasi 70,97% capaian 101,17%. Pelaksanaan program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar 36,355.900,- dan terealisasi sebesar 35.477.386,- atau 97,58 % melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota berupa pengawasan kearsipan dinamis pada perangkat daerah di Kota Payakumbuh.

2. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar 53.992.000 dan terealisasi sebesar 29.651.480 atau 54,92% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Akuisisi , Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis , berupa Preservasi arsip di Depo Arsip

d. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang diselesaikan
1.	Untuk mendapat dukungan dianjurkan senantiasa melakukan koordinasi dan konsultasi ke Provinsi dan Pusat	Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, Perpustnas RI dan ANRI	

24. URUSAN PERPUSTAKAAN

Urusan Perpustakaan diselenggarakan oleh **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh** melalui 1 (satu) kebijakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.576.551.706,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.030.417.001,- atau 84,73%, dengan uraian sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Program Sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
1	Mendorong pengembangan budaya literasi & layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT;	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai IKM (Nilai)	86,75	87,83	101,24%
		Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (Nilai)	66,20	66,18*	99,97%
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan (Exemplar)	102	102	100,00%
			Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Rasio)	1,60	2,50	156,25%

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

c. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Urusan perpustakaan dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja yaitu:

- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target kinerja adalah 86,75 dan realisasi 87,83 dengan capaian kinerja 101,24%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 16.410.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.716.550,- atau 77,49 %, melalui 2 (dua) sub kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaitu Renstra , Renja dan Renja Perubahan
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, berupa Penyusunan Dokumen laporan Evaluasi kinerja berupa penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP), LKPJ, LPPD/EKPPD, Laporan Monev, Laporan Evaluasi Renja dan Dokumen SAKIP

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 2.240.749.580 dan terealisasi sebesar Rp. 1.807.400.588 atau 80,66 %, melalui 2 (dua) sub kegiatan :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, berupa Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, berupa pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan honorarium pejabat pengadaan barang / jasa

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 16.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 15.451.200 atau 96,57 %, melalui 1 (satu) sub kegiatan :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya, berupa pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya untuk ASN pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 146.394.100 dan terealisasi sebesar Rp. 139.148.478 atau 95,05 %, melalui 6 (enam) sub kegiatan :

- 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, berupa penyediaan komponen listrik
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, berupa Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, berupa penyediaan barang cetakan dan penggandaan berupa penyediaan belanja cetak spanduk, cetak buku, cetak buku biografi, penggandaan/fotocopy, penjiilidan dan banner
- 4) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, berupa penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yaitu surat kabar harian Haluan, Padang Ekspres, Pos Metro dan Singgalang
- 5) Fasilitas Kunjungan Tamu, berupa Fasilitas Kunjungan Tamu berupa penyediaan makanan dan minuman/snack untuk kunjungan tamu dinas perpustakaan dan kearsipan
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, berupa biaya perjalanan dinas untuk keperluan koordinasi dan konsultasi baik untuk dalam daerah propinsi Sumatera Barat maupun luar daerah Provinsi Sumatera Barat

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 127.247.000 dan terealisasi sebesar Rp. 123.676.200 atau 97,19 %, melalui 1 (satu) sub kegiatan :

- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, berupa pengadaan mesin dengan target chainsaw 1 unit, CCTV 8 unit, potong rumput 2 unit, AC 2 PK 1 unit, sound system 1 unit, komputer PC 2 unit, hardisk eksternal 1 unit dan UPS 2 unit, terelalisasi sebanyak chainsaw 1 unit, CCTV 8 unit, potong rumput 2 unit, AC 2 PK 1 unit, sound system 1 unit, komputer PC 2 unit, hardisk eksternal 1 unit dan UPS 2 unit

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 315.332.296 dan terealisasi sebesar Rp. 269.869.563 atau 85,58 %, melalui 2 (dua) sub kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Listrik, berupa pembayaran tagihan jasa telepon, tagihan air PDAM, dan tagihan rekening listrik kantor dan depo arsip
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, berupa pembayaran honorarium Tenaga Jasa Perorangan untuk administrasi kantor, tenaga kebersihan kantor,

tenaga kearsipan, tenaga outsourcing kebersihan & keamanan serta upah tenaga harian pembersih gedung/halaman Kantor Bukik Sibaluik

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 210.864.360 dan terealisasi sebesar Rp. 167.859.085 atau 79,61%, melalui 3 (tiga) sub kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, berupa penyediaan belanja BBM, belanja Oli, Belanja Suku Cadang, Belanja Servis, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Perpanjangan STNK kendaraan jabatan kepala dinas
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, berupa penyediaan belanja BBM, belanja Oli, Belanja Suku Cadang, Belanja Servis, Keur mobil perpustakaan keliling, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Perpanjangan STNK kendaraan roda 4
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, berupa pemeliharaan AC/alat pendingin ruangan sebanyak 16 unit , pemeliharaan Komputer PC/notebook sebanyak 9 unit, pemeliharaan printer sebanyak 4 unit serta pemeliharaan mesin potong rumput 2 unit

II. Program Pembinaan Perpustakaan

Program Pembinaan Perpustakaan dengan indikator kinerja yaitu:

- Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (Nilai) dengan target kinerja adalah 66,20 dan realisasi 66,18 dengan capaian kinerja 99,97%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan yaitu :

1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 466.024.870 dan terealisasi sebesar Rp. 458.426.463 atau 98,37 %, melalui 4 (empat) sub kegiatan :

- 1) Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan, berupa pembinaan terhadap Pelaksanaan Perpustakaan Keliling ke Sekolah, pembinaan perpustakaan sekolah, pembinaan perpustakaan Kelurahan/TBM yang perpustakaannya berada pada kantor kelurahan maupun di rumah warga
- 2) Pengembangan Perpustakaan Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, berupa kegiatan pengadaan perabot dan peralatan perpustakaan umum daerah

Kabupaten/Kota yaitu pengadaan kursi anak, kursi auditorium, meja anak, perosotan, dan pagar pembatas permainan anak.

- 3) Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka, berupa pemeliharaan koran dengan dan buku koleksi umum perpustakaan
- 4) Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik, berupa kegiatan otomasi perpustakaan dalam bentuk pengenterian ke aplikasi inisilite

2. Pembudayaan Gemar Membaca tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 25.324.300 dan terealisasi sebesar Rp. 24.274.924 atau 95,86 %, melalui 1 (satu) sub kegiatan :

- 1) Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat, berupa lomba menggambar bagi anak TK/Paud dan lomba bercerita bagi murid SD/MI se Kota Payakumbuh untuk tujuan peningkatan minat baca untuk Perpustakaan umum daerah Kota Payakumbuh yang dilaksanakan di aula perpustakaan umum Daerah Kota Payakumbuh

III. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno dengan indikator kinerja yaitu:

- Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan (Exemplar) dengan target kinerja adalah 102 dan realisasi 102 dengan capaian kinerja 100%
- Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Rasio), dengan target kinerja adalah 1,60 dan realisasi 2,50 dengan capaian kinerja 156,25%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

1. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 12.204.700 dan terealisasi sebesar Rp. 11.593.950 atau 95,00 %, melalui 1 (satu) sub kegiatan :

- 1) Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara berupa seleksi dan pengadaan bahan pustaka koleksi etnis nusantara

d. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang diselesaikan
1	Untuk mendapat dukungan dianjurkan senantiasa mealkukan koordinasi dan konsultasi ke Provinsi dan Pusat	Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, Perpunas RI dan ANRI	

B. PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN

1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Urusan Kelautan dan Perikanan diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, dengan alokasi anggaran Rp. 1.030.705.131,- dan terealisasi sebesar Rp.963.519.344,- atau 93,48% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Program Sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (PK) 2025	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Produktifitas komoditi Pertanian Strategis	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	- Jumlah Produksi Ikan Konsumsi	560 ton	560,35	100,06%
			- Persentase Kelompok Pembudidaya Yang Menerapkan Teknologi Anjuran	45 %	65 %	144,44%
2	Peningkatan Produktifitas komoditi Pertanian Strategis	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	- Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	7,10 Ton	7,45 Ton	104,92%
			- Angka Konsumsi Ikan	33,40 kg/kapita/Tahun	44,29* kg/kapita/Tahun	132,60%

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

c. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Perikanan dan Kelautan dilaksanakan melalui 2 (dua) program, 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan sebagai berikut:

I. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan indikator kinerja yaitu:

- Jumlah Produksi Ikan Konsumsi dengan target 560 Ton dan realisasi 560,35 Ton dengan capaian kinerja 100,06%.
- Persentase Kelompok Pembudidaya Yang Menerapkan Teknologi Anjuran dengan target 45% dan terealisasi 65% dengan capaian kinerja 144,44%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 629.473.050,- dan terealisasi sebesar Rp 608.866.850,- atau 96,73% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil, berupa pelaksanaan pelatihan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) untuk 20 orang peserta, pelaksanaan pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) untuk 40 orang peserta dan Pemberian bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan berupa hibah uang kepada 11 kelompok pembudi daya ikan.
- 2) Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan berupa pelaksanaan Sekolah Lapangan Ikan Lele, Nila, dan Mina Padi kepada 6 kelompok pembudi daya ikan.

2. Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 329.959.581,- dan terealisasi sebesar Rp 289.938.943,- atau 87,87% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, berupa fasilitasi aktifitas operasional UPTD Perbenihan dan Pakan Ikan di Dinas Pertanian selama 12 bulan.
- 2) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota, berupa pemberian obat pada kolam yang tercemar penyakit ikan yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi berkembangnya hama

dan penyakit ikan dan meningkatkan mutu kualitas air kolam masyarakat untuk mendukung kegiatan budidaya perikanan

II. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan indikator kinerja yaitu:

- Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan dengan target 7,10 Ton dan realisasi 7,45 Ton dengan capaian kinerja 104,92%.
- Angka Konsumsi Ikan dengan target 33,40% dan terealisasi 44,29% dengan capaian kinerja 132,60%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

- 1) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, berupa pelaksanaan pelatihan mutu olahan hasil perikanan, pelaksanaan sosialisasi gemarikan, bazar olahan hasil perikanan dan lomba masak tingkat kota Payakumbuh.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang diselesaikan		
	N	I	H	I	L

2. URUSAN PARIWISATA

Urusan Pariwisata diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melalui 5 kebijakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.663.289.183,- dan terealisasi sebesar Rp.5.374.152.661,- atau 93.75%, dengan Capaian Kinerja Program dan Capaian Kinerja Keluaran sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
1.	Pemantapan Implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	90	71.75	71.75%
2.	Membangun kemitraan antar jasa usaha pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase promosi kepariwisataan yang dilaksanakan	80%	80%	100%
3.	Mengembangkan paket-paket destinasi wisata		Rata-rata lama tinggal wisatawan	1,5 hari	1,5 hari	100%
			Jumlah kerjasama yang dilakukan dengan pelaku usaha jasa pariwisata	7 Kerjasama	7 kerjasama	100%
4.	Menyelenggarakan event-event untuk menarik wisatawan dengan menerapkan protokol kesehatan	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah karya ekonomi kreatif yang difasilitasi	1 fasilitasi	1 fasilitasi	100%
5.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase objek unggulan dalam kondisi baik	45%	45%	100%
			Jumlah pengembangan destinasi pariwisata	1 ow	1 ow	100%

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

c. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Kepariwisata dilaksanakan melalui beberapa Program, dimana target kinerja programnya telah ditetapkan kedalam perjanjian kinerja

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota dengan indikator Nilai IKM dengan target kinerja pada tahun 2025 adalah 90 dan terealisasi 71.75 dengan capaian kinerja 71.75 %. yang didukung oleh 6 kegiatan dan 20 Sub kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 46.587.900.-, dan terealisasi sebesar Rp. 45.938.415.- atau 98.55 %, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa penyusunan dokumen Perubahan Renja 2025, Pra Renja 2026, Renja 2026, RKA Perubahan 2025, pra RKA 2026, RKA 2026 dan Renstra 2025-2029 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh dengan target 7 Dokumen dan terealisasi sebanyak 7 Dokumen.
- 2). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa pembuatan Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, LKPJ, LPPD/ILPPD, EKPPD, LKjIP pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh dengan target 6 Dokumen

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp4.210.736.571.- dan terealisasi sebesar Rp. 3.398.055.732.- atau 80.70 %, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berupa pembayaran gaji dan tunjangan ASN untuk 14 bulan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 34 orang terealisasi 29 orang dengan capaian 85.29 %
- 2). Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN berupa Pembayaran honorarium PA, KPA, PPK SKPD, Pejabat Pengadaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Penyimpan Barang dan Pengurus Barang, Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 32.000.000.-, dan terealisasi sebesar Rp. 31.968.000.- atau 99.90 % melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya berupa penyediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dengan target 1 paket (32 Set), terealisasi sebanyak 1 paket (32 set) dengan capaian 100%

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 140.302.350.- dan terealisasi sebesar Rp. 138.835.552.- atau 98.95% melalui 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa penyediaan komponen alat listrik/penerangan bangunan dan alat elektronik pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh dengan target 1 paket (3 Jenis) dan teralisasi 1 paket (3 Jenis) dengan capaian 100%
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa penyediaan alat tulis kantor pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh dengan target 43 Jenis dan terealisasi sebanyak 43 jenis dengan capaian 100%.
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan target 1 paket barang cetak teralisasi 1 paket (16 jenis) barang cetak dan Penggandaan dengan capaian 100%
- 5) Fasilitas Kunjungan Tamu berupa penyediaan makan dan minum tamu pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh dengan target 12 laporan (130 porsi), 800 galon dan terealisasi sebanyak 12 laporan (130 porsi) 800 galon dengan capaian 100%
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD penyediaan biaya perjalanan dinas dalam maupun luar daerah Provinsi Sumatera Barat ASN pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh dengan target 136 laporan dan terealisasi sebanyak 136 laporan dengan capaian 100%

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 522.340.722.- dan terealisasi sebesar Rp. 501.945.702.- atau 96.10%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pengadaan Mebel berupa pengadaan Mebel dengan target 1 paket yang terealisasi 1 paket yang terdiri atas filing cabinet, lemari arsip dan meja kerja dan kursi rapat.
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa pengadaan peralatan dan mesin kantor 6 unit yang terealisasi sebanyak 6 unit yang terdiri atas 1 PC, 2 Laptop dan 3 Printer

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 140.302.350.-, dan terealisasi sebesar Rp. 138.835.552.- atau 98.95% melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat berupa penyediaan jasa surat menyurat dalam bentuk pengadaan Alat Tulis Kantor pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh.
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa pembayaran rekening air, rekening listrik dan rekening telpon pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh dengan target 1 laporan (21 rekening).
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berupa penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 482.225.270.- dan terealisasi sebesar Rp. 389.298.773.- dan capaian 80.73%, melalui 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan berupa pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor serta penyediaan jasa servis, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak dan pelumas kendaraan dinas/operasional pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan berupa pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor serta penyediaan jasa servis, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak dan pelumas kendaraan dinas/operasional pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh dengan target sebanyak

26 unit kendaraan dinas yaitu 5 unit kendaraan roda empat dan 21 unit kendaraan roda dua

- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa perbaikan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 2 (dua) unit
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya berupa pemeliharaan sarana dan prasarana gedung perkantoran berupa Rehabilitasi dan pemeliharaan gedung eks Restourant

II. Program Pemasaran Pariwisata

Program Pemasaran Pariwisata dengan indikator yaitu :

- Persentase promosi kepariwisataan yang dilaksanakan dengan target kinerja pada tahun 2023 adalah 80% dan terealisasi 80% dengan capaian 100%,
- Rata-rata lama tinggal wisatawan dengan target 1,5 hari terealisasi 1,5 hari dengan capaian 100%
- Jumlah kerjasama yang dilakukan dengan pelaku usaha jasa pariwisata dengan target 7 kerjasama terealisasi 7 kerjasama dengan capaian 100%.

Program ini didukung oleh 1 kegiatan dan 2 Sub kegiatan

1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 346.612.550.- dan terealisasi sebesar Rp. 226.972.120.- atau 72.25% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri berupa pemotretan dan pembuatan kalender promosi dan pelatihan bagi pelaku jasa usaha kepariwisataan.
- 2) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota berupa pembekalan Uda Uni Kota Payakumbuh, penampilan seni dalam rangka HUT Kota Payakumbuh.

III. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan indikator Jumlah karya ekonomi kreatif yang difasilitasi dengan target kinerja pada tahun 2025 adalah 1 fasilitasi dan terealisasi 1 fasilitasi sehingga capaiannya 100% yang didukung oleh 1 kegiatan dan 3 Sub kegiatan

1. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia parawisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 461.976.700.- dan terealisasi sebesar Rp. 251.568.418.- atau 54.45% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif berupa fasilitasi ekraf sector film dan music seni pertunjukan berkolaborasi dengan Payakumbuh Youth Arte Commite. Kegiatan Rakorna Indonesia Crative Cities Network (ICNN), Kegiatan pengukuhan pengurus Forum Ekraf Kota Payakumbuh. Rangkaian event ekraf Payakumbuh Creative Festival 2025.
- 2) Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif berupa Pelaksanaan forum ekraf, penyerahan sertifikat HAKI pelkua ekraf Kota Payakumbuh, Seminar Ekraf sector Fashion dan Kriya dalam rangkaian event Payakumbuh Creative mARTket 2025, pelaksanaan lokakarya ekraf sector kuliner “workshop Barista Basic dan personal branding Barista.

IV. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan indicator kinerja yaitu :

- Persentase objek wisata unggulan dalam kondisi baik dengan target 45% teralisasi 45% dengan capaian 100%,
- Jumlah pengembangan destinasi pariwisata dengan target 1 objek wisata terealisasi 1 objek wisata dengan capaian 100%

yang didukung oleh 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan.

1. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp360.601.120.- dengan realisasi sebesar Rp329.663.949.- atau 91.42 % melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota berupa pemeliharaan terhadap objek wisata, belanja bahan kimia, pakaian dinas lapangan belanja jasa tenaga kebersihan, pemeliharaan bermotor roda tiga, belanja pemeliharaan alat pembersih.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD tahun n-1	Tindak lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Disparpora diharapkan lebih memperhatikan kegiatan ekonomi kreatif yang ada pada masyarakat	Memberikan pelatihan kepada para pelaku ekraf	Agar para pelaku ekraf dapat menyeimbangkan karya dan dapat memasarkann produk yang dihasilkan
2.	Meningkatkan Sarana dan prasarana destinasi wisata	Melaksanakan pemeliharaan terhadap objek wisata yang ada dan pembuatan tangga objek wisata ngalau indah	Terpeliharanya objek wisata dan diharapkan terjadi peningkatan kunjungan

3. URUSAN PERTANIAN

Urusan Bidang Pertanian diselenggarakan oleh **Dinas Pertanian Kota Payakumbuh**, dengan alokasi dana Belanja Langsung yaitu sebesar Rp. 18.330.389.621,- dan terealisasi sebesar Rp.16.556.046.543,- atau sebesar 90,32%, dengan Capaian Kinerja Program dan Capaian Kinerja Keluaran sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Program Sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
1	Pemantapan Pengelolaan Keuangan Daerah, Termasuk Pendapatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai IKM	86	89,65	104,24%
			Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh inspektorat	83,50	83,75	100,3%
2	Peningkatan Produktifitas komoditi Pertanian Strategis	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	18,34 %	18,35 %	100,05 %
			Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Peternakan	85 %	85 %	100 %
3	Peningkatan Produktifitas komoditi Pertanian Strategis	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	59,20 %	59,30 %	100,16 %
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase angka kematian ternak	0,30 %	0,30 %	100 %
			Persentase fasilitas	35 %	35 %	100 %

No	Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
			pemasaran hasil produksi peternakan			
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana Pertanian	60 %	50 %	83,33 %
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase fasilitasi pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan	40 %	30 %	75 %
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Luas Tanam Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna	45 %	46,10 %	102,44 %
			Persentase Kelompok Tani Ternak yang menerapkan teknologi tepat guna	23 %	23,47 %	102,04 %

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

c. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Pertanian dilaksanakan melalui 7 Program, 19 Kegiatan dan 37 sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja yaitu:

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target kinerja 86% dan realisasi 89,65% dengan capaian kinerja 104,24%
- Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat dengan target kinerja 83,50 dan realisasi 83,75 dengan capaian kinerja 100,3%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 8 (delapan) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 109.376.550,- dan terealisasi sebesar Rp 108.821.665,- atau 99,49% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa fasilitasi penyusunan dokumen Renstra, Renja dan DPA Dinas Pertanian.
- 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, berupa fasilitasi penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yaitu berupa dokumen LKPJ, LPPD, LKJIP dan dokumen Laporan Keuangan

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 11.057.807.284,- dan terealisasi sebesar Rp 9.713.709.878,- atau 87,84% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, berupa pembayaran Gaji dan Tunjangan 98 orang ASN pada Dinas Pertanian
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN, berupa fasilitasi pembayaran Honor 48 orang Pelaksana Teknis Keuangan Dinas Pertanian

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 95.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 91.741.500,- atau 96,57% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, berupa pengadaan 95 stel Pakaian Dinas beserta atributnya untuk ASN di Lingkungan Dinas Pertanian Kota Payakumbuh

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 252.933.390,- dan terealisasi sebesar Rp 249.184.440,- atau 98,52% melalui 5 (lima) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung pada kantor Dinas Pertanian Kota Payakumbuh di Jl. Panglima Polim Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Payakumbuh Timur, Balai Penyuluh Pertanian di masing-masing Kecamatan se-Kota Payakumbuh, UPTD Pembenihan dan UPJA, UPTD Puskesmas, UPTD Perbenihan dan Pakan Ikan, UPTD RPH dan Pasar Ternak dan UPTD Perbibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, berupa pengadaan peralatan Kebersihan dan Alat Tulis Kantor serta penyediaan air galon Dinas Pertanian Kota Payakumbuh
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa penyediaan spanduk, barang cetak dan penggandaan pada Dinas Pertanian Kota Payakumbuh
- 4) Fasilitasi Kunjungan Tamu, berupa fasilitasi terhadap kunjungan 626 orang tamu ke Dinas Pertanian Kota Payakumbuh
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, berupa penyediaan biaya perjalanan dinas dalam maupun luar daerah Provinsi Sumatera Barat pada Dinas Pertanian Kota Payakumbuh

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 570.229.678,- dan terealisasi sebesar Rp 520.247.941,- atau 91,23% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, berupa penyediaan jasa telekomunikasi/internet, air dan listrik untuk gedung kantor Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, BPP di 5 Kecamatan, UPTD Perbenihan dan Pakan Ikan, UPTD Puskesmas, UPTD RPH dan Pasar Ternak, UPTD Perbenihan dan Pelayanan Jasa Alsintan
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, berupa penyediaan honor Tenaga Harian Lepas Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Sopir pada Dinas Pertanian

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 235.324.100,- dan terealisasi sebesar Rp 232.609.380,- atau 98,85% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya berupa Pengadaan 28 unit peralatan kantor pada Dinas Pertanian Kota Payakumbuh

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 863.178.423,- dan terealisasi sebesar Rp 829.479.588,- atau 96,10% melalui 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, berupa belanja servis, pembelian suku cadang dan belanja bahan bakar minyak serta pelumas dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, berupa belanja servis, pembelian suku cadang dan belanja bahan bakar minyak serta pelumas dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional untuk 104 kendaraan dinas
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, berupa penyediaan Jasa Perbaikan 72 unit Peralatan Kerja yaitu perbaikan/servis komputer, laptop, printer, dan AC pada Dinas Pertanian Kota Payakumbuh.
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, berupa Rehab Gedung Kantor di lokasi Terminal Agribisnis Kota Payakumbuh

8. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 236.606.000,- dan terealisasi sebesar Rp 234.268.551,- atau 99,01% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, berupa fasilitasi operasional, pemenuhan sarana serta prasarana di BLUD UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak

II. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan indikator kinerja yaitu:

- Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan dengan target kinerja 18,34% dan realisasi 18,35% dengan capaian kinerja 100,05%
- Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Peternakan dengan target kinerja 85% dan realisasi 85% dengan capaian kinerja 100%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 226.129.712,- dan terealisasi sebesar Rp 142.726.976,- atau 63,12% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi, berupa monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan RDKK Pupuk bersubsidi tahun 2025, pemantauan penyaluran pupuk bersubsidi di 5 kecamatan, serta monitoring pemakaian dan pemberian bantuan 3 unit alat mesin pertanian di Kota Payakumbuh
- 2) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, berupa pelaksanaan Fasilitas Pengawasan pada 3 Sub Terminal Agribisnis dan 1 Terminal Agribisnis

2. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 786.332.004,- dan terealisasi sebesar Rp 699.464.169,- atau 88,95% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman, berupa pelaksanaan pengembangan dan penyediaan benih padi bersertifikat sebanyak 15.713 kg pada UPTD Perbenihan dan Jasa Alsintan
- 2) Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman, berupa peningkatan produktivitas padi seluas 200 Ha, Jagung seluas 3 Ha, cabe seluas 1 Ha dan bawang seluas 1 Ha

3. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp49.053.000,- dan terealisasi sebesar Rp45.137.170,- atau 92,02% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, berupa fasilitasi pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) dalam bentuk nitrogen cair sebanyak 200 liter, pelaksanaan 1 kali pelatihan pengolahan pakan dan Pembinaan kelompok penerima bantuan pemerintah pada 5 Kecamatan di Kota Payakumbuh

III. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan indikator kinerja yaitu:

- Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian dengan target kinerja 59,20% dan realisasi 59,30% dengan capaian kinerja 100,16%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 305.597.900,- dan terealisasi sebesar Rp 303.864.494,- atau 99,43% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B, berupa pelaksanaan Pengawasan Alih Fungsi Lahan LP2B, dan Pembuatan Peta LP2B Skala 1:5000 di 3 kecamatan.

2. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 2.163.228.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.134.531.776,- atau 98,67% melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani, berupa fasilitasi terhadap pembangunan 7 unit irigasi usaha tani di Kota Payakumbuh
- 2) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, berupa fasilitasi pembangunan 7 unit jalan usaha tani di Kota Payakumbuh
- 3) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan, berupa pelaksanaan pemeliharaan IPAL pada Rumah Potong Hewan Modern Kota Payakumbuh yang ada di Kelurahan Koto Panjang

IV. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan indikator kinerja yaitu:

- Persentase Angka Kematian Ternak dengan target kinerja 0,30% dan realisasi 0,30% dengan capaian kinerja 100%
- Persentase Fasilitasi Pemasaran Hasil Produksi Peternakan dengan target kinerja 35% dan realisasi 35% dengan capaian kinerja 100%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 140.926.266,- dan terealisasi sebesar Rp 140.926.266,- atau 97,17% melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan, berupa pengawasan Potongan Betina Produktif di 5 Kecamatan dan Fasilitasi Higiene Sanitasi sebanyak 27 unit untuk memastikan praktik Kebersihan dan Kondisi Sanitasi yang baik
- 2) Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan, berupa pelaksanaan sosialisasi pengurusan Izin Usaha olahan hasil Peternakan berupa NKV kepada 20 orang Pelaku Usaha dalam memasarkan produk olahannya dan Pembayaran Gaji Tenaga Jasa Perorangan
- 3) Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan, berupa pelaksanaan sosialisasi penyakit hewan menular, zoonosis dan pengambilan sampel surveilans sebanyak 4 jenis penyakit

2. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 452.606.186,- dan terealisasi sebesar Rp 405.093.174,- atau 89,50% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan, berupa fasilitasi terhadap kegiatan operasional di Pasar Ternak dan RPH yang terdiri dari Pelayanan Potongan 3570 ekor Sapi di RPHM dan fasilitasi pelayanan 160 pedagang di Pasar ternak

3. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 175.599.328,- dan terealisasi sebesar Rp 166.069.359,- atau 94,57% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner, berupa fasilitasi terhadap pengadaan obat-obatan untuk pelayanan di pusat kesehatan hewan

V. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan indikator kinerja yaitu:

- Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana Pertanian dengan target kinerja 60% dan realisasi 50% dengan capaian kinerja 83,33%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 49.999.100,- dan terealisasi sebesar Rp 47.409.247,- atau 94,82% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, berupa fasilitasi terhadap pengadaan racun hama bagi masyarakat yang sawahnya terserang hama untuk kelompok tani yang disebar di 5 BPP pada masing-masing Kecamatan
- 2) Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, berupa Sosialisasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) pada 5 kecamatan di kota Payakumbuh

VI. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program Perizinan Usaha Pertanian dengan indikator kinerja yaitu:

- Persentase Fasilitasi Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan dengan target kinerja 40% dan realisasi 30% dengan capaian kinerja 75%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam daerah Kabupaten/ Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 17.773.750,- dan terealisasi sebesar Rp 15.873.882,- atau 89,31% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian, berupa pelatihan pengolahan jahe yang diikuti oleh 30 orang petani millennial utusan dari masing-masing kecamatan se-kota payakumbuh

VII. Program Penyuluhan Pertanian

Program Penyuluhan Pertanian dengan indikator kinerja yaitu:

- Persentase Luas Tanam Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna dengan target kinerja 45% dan realisasi 46,10% dengan capaian kinerja 102,44%
- Persentase Kelompok Tani Ternak yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna dengan target kinerja 23% dan realisasi 23,47% dengan capaian kinerja 102,04%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 542.688.950,- dan terealisasi sebesar Rp 478.877.938,- atau 88,24% melalui 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan, berupa fasilitasi terhadap peningkatan penyuluh pertanian di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan se Kota Payakumbuh melalui pelaksanaan 20 kali training penyuluh dan 2 kali teras bawang dan hidroponik
- 2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, berupa fasilitasi peningkatan kelembagaan kelompok tani yang ada di Kota Payakumbuh, melalui pelaksanaan 5 kali rembuk KTNA, monev kelembagaan 89 kelompok, 2 kali pelatihan jamur tiram dan penilaian kelas kelompok tani terhadap 244 kelompok tani di Kota Payakumbuh
- 3) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota, berupa Pelaksanaan 2 kali Sekolah Lapang urban farming dan 2 kali pelatihan kompos
- 4) Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian, berupa penyediaan dana operasional 41 orang penyuluh yang bersumber dari DAK Non Fisik

d. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD tahun n-1	Tindak lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
1	Saran pimpinan asuransikan seluruh lahan pertanian yang dilakukan	Secara substansi teknis kita dari OPD teknis sudah sangat sejalan dengan usulan dari ini hal ini sesuai dari amanah dari Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimana salah satu pasal bagian Insentif dan Disinsentif pada point 2e dengan memfasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian salah satunya dengan kegiatan AOTP dan AUTS/k (Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan lebih kurang 1.745,39 Ha).	Tujuan AOTP adalah : (a). Memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi kerusakan tanaman padi yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan karena risiko banjir, kekeringan, dan/atau serangan OPT. (b) Mengalihkan kerugian akibat risiko banjir, kekeringan, dan/atau serangan OPT kepada pihak lain melalui pertanggungjawaban asuransi.
		Secara teknis Tahun Anggaran 2022/2023 dari Dinas Pertanian sudah mengajukan anggaran dengan skema Premi Asuransi senilai Rp. 180.000,-/hektar/musim tanam, dengan besaran bantuan premi dari pemerintahan (APBN) sebesar 80% atau senilai Rp. 144.000,-/hektar/musim tanam dan petani bertanggung sebesar 20% atau senilai Rp. 36.000,-/hektar/musim tanam per petani dengan harga pertanggungjawaban sebesar Rp. 6.000.000,-/ha. Namun hal ini melalui tim TAPD sekda tidak bisa dianggarkan dengan alasan tidak adanya pencantolan kode rekening yang bisa dibayarkan kepada JASINDO sebagai perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Kementan.	Masalah yang diselesaikan : (a) Terlindunginya petani dari kerugian kerusakan tanaman atau gagal panen karena memperoleh jaminan ganti-rugi jika tanaman padi mengalami kerusakan akibat bencana banjir, kekeringan, dan/atau serangan OPT. (b) Teralihkannya kerugian petani akibat risiko banjir, kekeringan, dan/atau serangan OPT kepada pihak lain melalui skema pertanggungjawaban asuransi.

4. URUSAN PERDAGANGAN

Urusan Perdagangan diselenggarakan oleh **Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh** melalui 2 (dua) kebijakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.813.110.978,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.085.582.526,- atau 87,48%, dengan Capaian Kinerja Program dan Capaian Kinerja Keluaran sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Transaksi Perdagangan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Usaha Perdagangan yang Memiliki Izin Usaha	29,00%	71,51%	246,58%
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang Mematuhi SOP	92,00%	91,47%	101,63%
			Persentase Sarana Prasarana Pasar/pertokoan dalam Kondisi Baik	80,00%	87,50%	109,38%
2	Peningkatan Kelancaran Distribusi Barang/Jasa	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Peningkatan Jumlah Komoditi yang Diperdagangkan	3,00%	4,00%	133,33%
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pelaku Usaha yang Tertib Niaga	27,00%	63,37%	234,70%
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Kerjasama Perdagangan	5 Kerja Sama	5 Kerja Sama	100%

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada table dibawah ini:

c. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam PK

Urusan Perdagangan dilaksanakan melalui 5 (lima) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

I. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase Usaha Perdagangan yang Memiliki Izin Usaha dengan target kinerja 29,00% dan realisasi 71,51% dengan capaian kinerja 246,58%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 19.679.350,- dan teralisasi sebesar Rp. 18.735.142,- atau 95,20%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen berupa pemeriksaan depot air minum dan bahan berbahaya pada makanan seperti kerupuk, ikan asin, ikan basah, mie basah, tahu, dan bakso.

II. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator kinerja yaitu:

- Persentase Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang Mematuhi SOP dengan target kinerja 92,00% dan realisasi 91,47% dengan capaian kinerja 101,63%
- Persentase Sarana Prasarana Pasar/pertokoan dalam Kondisi Baik dengan target 80,00% dan realiasi 87,50% dengan capaian kinerja 109,38%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 3.660.805.928,- dan teralisasi sebesar Rp. 3.254.975.181,- atau 88,91%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan berupa pembangunan pusat penampungan pasca kebakaran pasar pusat pertokoan blok barat, dan pembangunan kanopi parkir pasar ibu.

- 2) Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan berupa pemeliharaan drainase, kanopi, dan tenda pada pasar pabukoon dan bangunan pusat pertokoan.

2. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 1.437.986.650,- dan teralisasi sebesar Rp. 1.337.304.992,- atau 93,00%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan berupa pendukung operasional penertiban pasar dalam bentuk pembayaran honorarium tim penertiban pasar.

III. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase Peningkatan Jumlah Komoditi yang Diperdagangkan dengan target kinerja 3,00% dan realisasi 4,00% dengan capaian kinerja 133,33%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 166.885.950,- dan teralisasi sebesar Rp. 163.055.156,- atau 97,70%, melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota berupa laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang.
- 2) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan berupa laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan.
- 3) Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota berupa laporan pelaksanaan operasi pasar murah kepada masyarakat dalam penanganan kemiskinan ekstrim dan penanggulangan inflasi Kota Payakumbuh.

2. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 17.962.050,- dan teralisasi sebesar Rp. 17.200.936,- atau 95,76%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan berupa dokumen pemeriksaan kelengkapan legalitas perizinan.
- 2) Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi berupa laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi terhadap distributor dan pengecer pupuk.

IV. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan indikator kinerja yaitu:

- Persentase Pelaku Usaha yang Tertib Niaga dengan target kinerja 27,00% dan realisasi 63,37% dengan capaian kinerja 234,70%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 59.086.700,- dan teralisasi sebesar Rp. 57.677.752,- atau 97,62%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan berupa.

V. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Kerjasama Perdagangan dengan target kinerja 5 Kerjasama dan realisasi 5 Kerjasama dengan capaian kinerja 100%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 450.704.350,- dan teralisasi sebesar Rp. 236.633.367,- atau 52,50%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Payakumbuh – Tahun 2025

- 1) Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota berupa pelaksanaan temu bisnis ke Pekanbaru dengan mengikutsertakan UMKM Kota Payakumbuh.
- 2) Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota berupa pelaksanaan promosi dan pameran produk unggulan daerah dengan mengikutsertakan UMKM Kota Payakumbuh. (realiasi keuangan 48,13%)

d. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	TindakLanjut	Tujuan/Masalah Yang diselesaikan
	N I H I L		

5. URUSAN PERINDUSTRIAN

Urusan Perindustrian diselenggarakan oleh **Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh** melalui 9 (sembilan) kebijakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.329.332.756,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.198.378.609,- atau 90,15%, dengan Capaian Kinerja Program dan Capaian Kinerja Keluaran sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
1	Penguatan Kelembagaan Sentra-Sentra Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	25,00%	41,16%	164,64%
2	Mendorong Tumbuhnya Industri Manufaktur					
3	Peningkatan Keahlian dan Keterampilan bagi Pelaku Industri Kecil					
4	Fasilitasi Pemasaran dan Promosi Produk					
5	Penguatan Infrastruktur Pendukung Industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	72,32%	83,45%	115,39%
6	Meningkatnya Penerapan Standardisasi Usaha dan Produk					
7	Penguatan dan Penerapan Industri Halal dan Sertifikasi Halal					
8	Mendorong Pengembangan Layanan Usaha, Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah dan	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini	60,00%	60,00%	100%

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
	Kemudahan Akses Pembiayaan Usaha					
9	Peningkatan Kualitas Pendataan dan Pengawasan Industri					

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada table dibawah ini:

c. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam PK

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui 5 (lima) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

I. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri dengan target kinerja 25,00% dan realisasi 41,16% dengan capaian kinerja 164,64%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 1.255.935.306,- dan teralisasi sebesar Rp. 1.130.263.375,- atau 89,99%, melalui 5 (lima) sub kegiatan yaitu:

- 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri berupa kegiatan pelatihan penataan kelembagaan Sentra IKM.
- 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri berupa kegiatan pelatihan dan sosialisasi, yaitu pelatihan ecoprint, pelatihan bambu, pelatihan batik, pelatihan rajut, pelatihan manajemen usaha industri, dan sosialisasi kredit usaha serta perpajakan.
- 3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri berupa dokumen kegiatan untuk mendukung kelancaran operasional layanan, penguatan fungsi pembinaan IKM Randang, pemenuhan standar keamanan pangan, cara produksi pangan yang baik sesuai standardisasi BPOM serta sarana dan prasarana pendukung pada Sentra IKM Randang Kota Payakumbuh.
- 4) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat berupa kegiatan operasional Dekranasda (rapat, perjalanan dinas, event, perlombaan, dan publikasi kegiatan) dan pembayaran gaji Tenaga Jasa Perorangan (TJP).
- 5) Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di Level Kabupaten/Kota berupa kegiatan pengawasan jaminan produk halal bagi IKM yang telah memiliki sertifikat halal.

II. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan dengan target kinerja 72,32% dan realisasi 83,45% dengan capaian kinerja 115,39%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 58.206.550,- dan teralisasi sebesar Rp. 53.814.162,- atau 92,45%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota berupa pengawasan perizinan berusaha sektor industri bagi IKM yang telah memiliki perizinan berusaha.
- 2) Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem *Online Single Submission Risk Base Approach* (OSS RBA) berupa kegiatan fasilitasi sertifikasi, yaitu fasilitasi Sertifikasi Halal Reguler dan *Self Declare* bagi IKM, fasilitasi Sertifikasi Merek bagi IKM, dan verifikasi teknis Perizinan Resiko Menengah Tinggi/Tinggi.

III. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan indikator kinerja yaitu :

- Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini dengan target kinerja 60% dan realisasi 60% dengan capaian kinerja 100%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 15.190.900,- dan teralisasi sebesar Rp. 14.301.072,- atau 94,14%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) berupa kegiatan *Updating* Data Industri Tahun 2025.
- 2) Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas berupa kegiatan pemantauan kepemilikan akun dan pelaporan IKM di SIINas.

d. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang diselesaikan
1	Seleksi peserta pelatihan untuk lebih diperketat dan betul-betul bagi yang berminat sehingga diharapkan lebih tepat sasaran	Seleksi peserta pelatihan dilaksanakan melalui wawancara dan pemenuhan komitmen melalui surat pernyataan	Peserta pelatihan sesuai dengan kriteria yang diharapkan sehingga tujuan pelatihan bisa tepat sasaran

C. PELAKSANAAN URUSAN PENUNJANG**1. FUNGSI PENUNJANG BIDANG PERENCANAAN**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan melalui 3 (tiga) kebijakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.764.362.594,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.702.796.872,- atau 87,89%, dengan uraian sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perubahan perjanjian kinerja

Pencapaian Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan didukung oleh keselarasan antara tujuan dan sasaran, Tujuan yang dirumuskan menjadi arah utama pelaksanaan program dan kegiatan

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Berbasis Inovasi dan Kelitbangan	Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan Kinerja	26,00	25,04	96,30
		Indeks Inovasi Daerah	54,85	51,50	93,89

sasaran yang ditetapkan berfungsi sebagai tolok ukur kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pemerintah daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat	85,00	83,00	97,64
2.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	90,00	80,31	89,23

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
		Pembangunan Daerah				
3.	Mengoptimalkan pengembangan dan penelitian serta inovasi daerah dalam layanan publik	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	86,00*	86,00*	100%

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing sub kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian kinerja keluaran masing-masing sub kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

c. Analisis Kesesuaian antara sub kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Urusan perencanaan dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, dimana target kinerja programnya telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator:

- Nilai IKM. Target kinerja pada tahun 2025 adalah 89,00 dengan realisasi 88,53 dan capaian kinerja 99,47%.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pemerintah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp102.954.450,- dan terealisasi sebesar Rp100.882.130,- atau 97,99% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa penyusunan 6 (enam) dokumen perencanaan dan pelayanan publik yaitu Renja perubahan 2025, Renja 2026, Survey Kepuasan Masyarakat 2 semester Tahun 2025 dan Renstra 2025-2029 dan SAKIP
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa penyusunan 7 laporan kinerja perangkat daerah yaitu laporan triwulan I, II, III, dan IV, LKPJ, LKJIP dan SPIP.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp5.429.549.712,- dan terealisasi sebesar Rp4.785.375.331,- atau 88,14% melalui 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berupa pembayaran gaji, dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dengan target 37 orang ASN.
- 2) Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN berupa pembayaran honorarium pengelola keuangan dan honorarium pejabat pengadaan pada bappeda dengan target 1 dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp43.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp42.957.000,- atau 99,90% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya berupa pengadaan pakaian dinas bagi ASN Bappeda dengan target 43 paket pakaian dinas dan kelengkapannya

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp245.004.850,- dan terealisasi sebesar Rp239.404.598,- atau 97,71% melalui 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Bappeda Kota Payakumbuh, dengan target sebanyak 8 paket
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa penyediaan bahan logistik kantor berupa air galon isi ulang, hand sanitizer, sabun cuci piring, sabun cuci tangan, alat tulis kantor dan alat kebersihan kantor dengan target 10 paket Bahan logistik kantor
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan berupa penyediaan barang cetak (Amplop dinas, kop surat logo, memo, kop dinas, map kop dinas, lembar disposisi, kwitansi NCR, BKU NCR, SPP/SPM), penggandaan dan penjiilidan dan cetak spanduk
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan berupa penyediaan jenis surat kabar nasional yaitu 1 jenis surat kabar lokal yaitu Padang Ekspres
- 5) Fasilitas Kunjungan Tamu berupa Penyediaan Makan dan Minum tamu berupa penyediaan makan dan minum tamu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 1 laporan fasilitasi kunjungan
- 6) Penyelenggaraan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berupa penyediaan biaya perjalanan dinas dalam maupun luar daerah Provinsi Sumatera Barat bagi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh untuk mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, dengan target 1 laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 7) Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD berupa pengelolaan website Bappeda, dengan target 1 Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp783.802.000,- dan terealisasi sebesar Rp619.693.000,- atau 79,06% melalui 4 (empat) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan berupa 1 unit kendaraan dinas jabatan

- 2) Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan berupa 1 unit kendaraan dinas roda 2 operasional
- 3) Pengadaan Mebel berupa pengadaan 1 buah lemari arsip dua pintu, 1 buah lemari arsip tiga pintu dan 18 kursi kerja
- 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa pengadaan 1 unit finger print, 1 unit CCTV, 3 unit laptop, 8 unit printer, 1 unit scanner.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp222.676.082,- dan terealisasi sebesar Rp209.927.046,- atau 94,27% melalui 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) berupa penyediaan jasa telekomunikasi/internet, air dan listrik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 1 laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berupa penyediaan jasa tenaga jasa perorangan yang terdiri dari penyediaan jasa sopir kepala badan dan penyediaan jasa tenaga lainnya (kebersihan dan penjaga malam) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp443.656.000,- dan terealisasi sebesar Rp340.097.354,- atau 76,66% melalui 4 (empat) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan berupa pembayaran pajak, bahan bakar minyak, servis dan pelumas kendaraan dinas roda empat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berupa pembayaran pajak, bahan bakar minyak, servis dan pelumas kendaraan dinas roda empat sebanyak 5 unit dan 20 unit untuk kendaraan dinas roda dua dengan realisasi 69,37%. Rendahnya realisasi keuangan dalam sub kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan.
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa servis komputer, pendingin ruangan (AC), Laptop, printer dengan target 21 unit dan terealisasi sebanyak 13 unit dengan capaian kinerja 60,49%. Rendahnya realisasi fisik dan keuangan karena belanja sesuai faktur dan kebutuhan.

- 4) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor tau Bangunan Lainnya berupa rehabilitasi gedung kantor Bappeda dengan target 1 paket rehap gedung kantor.

II. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator:

- Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD Target 100% terealisasi 100 dengan capaian 100%
- Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra Target 100% terealisasi 100 dengan capaian 100%

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah didukung oleh 4 (empat) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp464.774.950,- dan terealisasi sebesar Rp449.101.613,- atau 96,63% melalui 4 (empat) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Pelaksanaan Konsultasi Publik berupa Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan rancangan awal RKPD 2026 dan RPJMD 2025–2029 yang dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat.
- 2) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota berupa forum antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan perangkat daerah dan pelaksanaan musrenbang kabupaten/ kota untuk mendapat masukan penyempurnaan rancangan awal RKPD kota dan juga pelaksanaan musrenbang RPMJD 2025-2029 Payakumbuh.
- 3) Penyiapan Bahan Musrenbang Kecamatan berupa penyiapan bahan dan usulan untuk pelaksanaan musrenbang kecamatan.
- 4) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota berupa penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2026, RKPD 2026 , Perubahan RKPD dan dokumen perubahan renja RPJMD Kota Payakumbuh 2025-2029 dan dokumen RKPD Tahun 2026.

2. Analisa Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp11.429.500,- dan terealisasi sebesar Rp11.336.278,- atau 99,18% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten/kota berupa penyusunan Buku Profil Daerah Kota Payakumbuh

3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp100.809.750,- dan terealisasi sebesar Rp96.636.350,- atau 95,86% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota berupa pengendalian laporan evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah
- 2) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah berupa evaluasi pencapaian indikator kinerja daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dan RPJMD.

4. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp90.773.900,- dan terealisasi sebesar Rp89.780.275,- atau 98,91% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah berupa forum kegiatan pengumpulan data pembangunan daerah yang tertuang dalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dengan target 3 dokumen hasil penerapan sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah.

III. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator :

- Persentase konsistensi program RKPD terhadap program (RPJMD) RPD. Target kinerja pada tahun 2025 adalah 100% dengan realisasi 100% dan capaian kinerja 100%.

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan yaitu :

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp246.301.000,- dan terealisasi sebesar Rp245.416.190,- atau 99,64% melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) berupa koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dokumen (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup bidang pemerintahan.
- 2) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) berupa Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
- 3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Hormanisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia berupa koordinasi yang optimal dalam perencanaan penanggulangan kemiskinan, menyamakan persepsi dalam penyusunan instrumen penanggulangan kemiskinan dan koordinasi dan pengendalian program - program penanggulangan kemiskinan.

2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp101.916.550,- dan terealisasi sebesar Rp8.654.699,- atau 98,49% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian berupa asistensi penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup bidang ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh. Rendahnya realisasi pada sub kegiatan ini disebabkan oleh adanya Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi RAD Pangan yang penyelesaiannya harus sama dengan RPJMD 2025-2029. Informasi awal dari Bappenas, penyusunannya harus selesai pada bulan september dan oktober 2025, namun pada pelaksanaannya sampai akhir Desember 2025, Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi daerah tersebut tidak ada.
- 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian berupa monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup bidang ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh.

3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp207.305.450,- dan terealisasi sebesar Rp193.267.147,- atau 93,23% melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- 1) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur berupa asistensi penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh
- 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur berupa monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh
- 2) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur berupa sinkronisasi dan koordinasi penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 8 laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur

IV. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program pengembangan inovasi daerah dengan indikator :

- Persentase Hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan. Target kinerja pada tahun 2025 adalah 95% dengan realisasi 95% dan capaian kinerja 100%.

Program pengembangan inovasi daerah didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp99.999.700,- dan terealisasi sebesar Rp99.972.489,- atau 99,97% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penelitian dan Pengembangan bidang aspek-aspek sosial berupa penelitian yang berjudul “fenomena Peningkatan Minat terhadap sekolah swasta dibanding sekolah negeri”

2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp99.999.700,- dan terealisasi sebesar Rp99.973.023,- atau 99,97% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berupa dokumen penelitian berjudul “Strategi Pengembangan Pusat Perkotaan Kota Payakumbuh (Rekomendasi Arsitektur).

3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp70.409.000,- dan terealisasi sebesar Rp70.322.349,- atau 99,88% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi berupa kegiatan motivasi inovasi dan pendampingan untuk inovasi unggulan pada perangkat daerah dengan target 1 laporan hasil fasilitasi inovasi & teknologi tepat guna daerah

d. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1	Terkait perencanaan Pembangunan infrastruktur agar dapat dilakukan secara berkelanjutan dan tuntans sehingga memiliki dampak yang signifikan ke masyarakat	perencanaan infrastruktur telah dilakukan secara berkelanjutan sesuai tertuang yang tertuang dengan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	
2	Peningkatan kualitas dan kemampuan faskel di setiap kelurahan	Setiap tahun dilakukan pelatihan faskel untuk update informasi terkait proses perencanaan sesuai regulasi	
3	Terkait musrenbang di setiap kelurahan agar dapat disesuaikan secara proporsional dan kebutuhan setiap kelurahan agar Pembangunan dapat dilakukan secara merata	1. Musrenbang di masing – masing kelurahan menyesuaikan dengan Tingkat kebutuhan pada tiap kelurahan dalam mewujudkan Pembangunan yang merata 2. Tingkat kebutuhan kelurahan akan menyesuaikan dengan kebutuhan real Pembangunan di kelurahan	

2. FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEUANGAN

Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh menyelenggarakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang didukung oleh 1 (satu) kebijakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.326.162.376,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.968.739.449,- atau 64,17%.

Dalam penganggaran APBD perubahan, disaat finalisasi evaluasi APBDP terdapat catatan bahwa SILPA BLUD Kota Payakumbuh sebesar Rp6.726.011.484,- harus dimasukkan kedalam penganggaran Belanja SKPKD, program penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, kegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak. Sehingga dalam perjalanan tersebut alokasi anggaran perubahan BKD semula sebesar Rp. 16.600.150.892,- mendapatkan penambahan sebesar Rp. 6.726.011.484,-. Kemudian apabila diambil alokasi anggaran sebesar Rp. 16.600.150.892,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.968.739.449,- maka adapun persentase realisasi kinerja keuangan BKD adalah 90,17% dengan uraian sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah; menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	BB	BB	100%
			Nilai IKM	87,50	88,43	101,1%
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan Perda APBD tepat waktu	27 Des	30 Des	98%
			Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja	95%	89,42%	94,12%
			Laporan keuangan berbasis akrual	Ada	Ada	100%
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase PD dengan laporan aset sesuai	93,54%	95%	101,56%

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
			dengan Peraturan Pengelolaan BMD			
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	13,50%	21,33%	158%

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing sub kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian kinerja keluaran masing-masing sub kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

c. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Urusan keuangan dilaksanakan melalui 4 (empat) program 15 Kegiatan, dan 66 sub kegiatan dimana target kinerja programnya telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator:

- Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat. Target kinerja pada tahun 2025 adalah BB dengan realisasi BB dan capaian kinerja 100%.
- Nilai IKM dengan target kinerja 87,50 terealisasi 88,43 atau sebesar 101,1%

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota daerah didukung oleh 8 (delapan) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp44.823.400,- dan terealisasi sebesar Rp39.289.530,- atau 87,65% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa penyusunan Renja dan Perubahan Renja BKD
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa penyusunan 4 dokumen yaitu dokumen SAKIP (LKjIP), LKPJ dan LPPD, laporan IKM dan dokumen SPIP.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp9.360.761.879,- dan teralisasi sebesar Rp8.596.292.163,- atau 91,83%, melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berupa pembayaran gaji dan tunjangan ASN pada Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh sebanyak 62 orang ASN
- 2) Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN berupa pembayaran honorarium pengelola keuangan dan honorarium pejabat pengadaan pada BKD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD berupa penyusunan dokumen fungsional, LRA, Laporan Keuangan semester 1 dan semester 2 dengan target 4 laporan.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp130.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp127.705.500,- atau 98,24% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya berupa pengadaan pakaian dinas untuk pegawai Badan Keuangan Daerah dengan target kinerja 65 stel pakaian dinas

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp415.643.900,- dan teralisasi sebesar Rp382.887.135,- atau 92,12% melalui 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor berupa penyediaan komponen instalasi listrik dengan target 8 Paket
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa pengadaan logistik kantor sebanyak 41 paket
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa cetak, fotocopy dan jilid sebanyak 2 paket
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan berupa penyediaan bahan bacaan sebanyak 1 dokumen media cetak
- 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu berupa fasilitasi kunjungan tamu dengan target 12 laporan. Rendahnya realisasi kinerja keuangan pada sub kegiatan ini dikarenakan tidak dapat diperkirakan kapan serta berapa jumlah orang yang berkunjung setiap bulannya.
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berupa belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah dengan target 30 laporan

5. Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp693.450.038,- dan teralisasi sebesar Rp617.203.350,- atau 89% melalui 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan berupa pengadaan 8 unit kendaraan dinas operasional lapangan roda 2
- 2) Pengadaan Mebel berupa pengadaan 3 unit lemari arsip
- 3) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya berupa pengadaan 9 unit yaitu 2 unit AC, 2 unit PC, 3 unit laptop, 2 unit printer

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp257.198.390,- dan teralisasi sebesar Rp243.817.726,- atau 94,80% melalui 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat berupa penyediaan materai dan perangko dengan target kinerja 3 laporan.

- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa pembayaran rekening telepon dan astinet selama 12 bulan.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp415.440.000,- dan teralisasi sebesar Rp305.763.591,- atau 73,60% melalui 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan berupa belanja pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan eselon 2 (dua) sebanyak 1 unit
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berupa belanja pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional dengan target kinerja 35 unit kendaraan dinas operasional
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa pemeliharaan 5 unit peralatan dan mesin. Rendahnya realisasi sub kegiatan ini dikarenakan selisih standar harga pemeliharaan per unit peralatan maupun mesin dengan harga pasar.

8. Peningkatan Pelayanan BLUD

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp1.009.045.000,- dan teralisasi sebesar Rp962.386.011,- atau 95,38% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD berupa penyaluran fasilitasi pembiayaan

II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator :

- Penetapan Perda APBD tepat waktu, dengan target kinerja 27 Desember terealisasi 30 Desember atau 98%
- Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja. Target kinerja pada tahun 2025 adalah 95% dengan realisasi 89,42% dan capaian kinerja 94,12%.
- Laporan keuangan berbasis akrual dengan target kinerja ada dan capaian kinerja 100%

Program Pengelolaan Keuangan Daerah didukung dengan 5 (lima) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan, yaitu :

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp1.534.697.600,- dan teralisasi sebesar Rp1.411.379.515,- atau 91,96% melalui 9 (sembilan) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS berupa koordinasi penyusunan KUA dan PPAS dengan target 2 dokumen
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS berupa koordinasi penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan target 2 dokumen
- 3) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD berupa koordinasi penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- 4) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi perubahan RKA-SKPD berupa koordinasi penyusunan dan Verifikasi perubahan RKA-SKPD
- 5) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD berupa koordinasi penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- 6) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi perubahan DPA-SKPD berupa koordinasi penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
- 7) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD berupa koordinasi penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- 8) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD berupa koordinasi penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- 9) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran berupa Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp441.428.450,- dan teralisasi sebesar Rp299.155.877,- atau 67,77% melalui 6 (enam) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah berupa pelaksanaan koordinasi pengelolaan kas daerah dengan target 3 dokumen
- 2) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD berupa penerbitan 124 dokumen

- 3) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya berupa Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya, dengan target 60 dokumen
- 4) Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK) berupa Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi dilaksanakan dengan target kinerja 750.
- 5) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait berupa Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi dilaksanakan dengan target kinerja 384.
- 6) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota berupa Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 80 orang dengan realisasi keuangan sebesar 42,93%. Rendahnya realisasi pada sub kegiatan ini dikarenakan bimtek yang direncanakan diadakan untuk pejabat pengelola keuangan daerah dilaksanakan secara bersamaan dengan bidang akuntansi.

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp302.219.300,- dan teralisasi sebesar Rp279.369.250,- atau 92,44% melalui 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban berupa Rekonsiliasi dan Verifikasi dengan target kinerja jumlah berita acara rekonsiliasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan pendapatan Lo dan beban semesteran dan tahunan sebanyak 87 dokumen
- 2) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran target kinerja jumlah laporan keuangan triwulan, semesteran dan tahunan, jumlah laporan e-audit sebanyak 21 laporan
- 3) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berupa penyusunan laporan LKPD dengan target kinerja sebanyak 37 laporan.

- 4) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota berupa penyusunan Perda dan Perwako Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan target 2 dokumen
- 5) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah berupa penyusunan dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah dengan target kinerja 2 dokumen.
- 6) Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- 7) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah berupa penyusunan dokumen kebijakan dan panduan teknis penyelenggaraan akuntansi daerah.
- 8) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota berupa Bimtek Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 75 orang peserta.

4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp6.726.011.484,- dan teralisasi sebesar Rp4.500.000,- atau 0,07% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak berupa pengelolaan dana darurat dan mendesak. Rendahnya realisasi keuangan karena disesuaikan dengan keadaan darurat dan keperluan mendesak seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang memenuhi syarat untuk dibiayai dengan dana BTT.

5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp471.094.250,- dan teralisasi sebesar Rp393.225.341,- atau 83,47% melalui 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah berupa inventarisasi data/laporan yang dikirimkan untuk pemerintah pusat dan propinsi dengan target kinerja 45 dokumen

- 2) Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah berupa Implementasi dan Pemeliharaan aplikasi Bidang Keuangan Daerah dengan target kinerja 1 dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan bidang keuangan daerah
- 3) Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota berupa Pembinaan SKPD dalam pemanfaatan aplikasi Bidang Keuangan Daerah dengan target kinerja 32 orang

III. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator Persentase PD dengan laporan aset sesuai dengan Peraturan Pengelolaan BMD dengan target kinerja 93,54% dan terealisasi 95% atau dengan capaian kinerja 101,56%..

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah didukung dengan 1 kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp346.316.250,- dan teralisasi sebesar Rp281.716.636,- atau 81,35% melalui 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Penyusunan Standar Satuan Harga berupa penyusunan standar harga satuan sebanyak 1 Dokumen
- 2) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah berupa penyusunan dokumen RKPMD dengan target kinerja 2 dokumen
- 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah berupa pendampingan penatausahaan barang milik daerah oleh SKPD dengan target kinerja 31 laporan
- 4) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan SKPD dengan target kinerja 31 dokumen
- 5) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah berupa pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan SKPD dengan target kinerja 31 SKPD
- 6) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah berupa pendampingan penyusunan laporan BMD SKPD dengan target kinerja 31 laporan

IV. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator persentase realisasi PAD dengan target kinerja 13,50% dan capaian kinerja 21,33% atau 158%

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah didukung dengan 1 kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan dan yaitu :

1. Pengelolaan pendapatan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.959.598.235,- dan teralisasi sebesar Rp814.832.183,- atau 84,91% melalui 12 (dua belas) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah berupa Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dengan target 12 laporan hasil penyuluhan
- 2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah berupa Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah dengan target 10 unit
- 3) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah berupa Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah dengan target 12 laporan
- 4) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah berupa Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dengan target 1 laporan
- 5) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berupa Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan target 2 objek pajak.
- 6) Penetapan wajib pajak daerah berupa penetapan wajib pajak daerah dengan target kinerja 12 dokumen
- 7) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah berupa Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan target 1 layanan.
- 8) Penagihan Pajak Daerah berupa penagihan objek pajak daerah dengan target 1 dokumen
- 9) Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah berupa pelaksanaan Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah dengan target 12 dokumen hasil Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah

10) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah berupa pengelolaan retribusi daerah dengan target 1 dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah.

11) Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah berupa pelaksanaan Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dengan target 12 laporan.

d. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1	Untuk realisasi anggaran kedepannya tolong lebih profesional dalam menerapkan penganggaran	Untuk kedepannya BKD akan lebih hati-hati, cermat dan teliti dalam menyusun perencanaan penganggaran, sehingga realisasi belanja bisa lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan rencana kerja pemerintah dan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Daerah harus melakukan sinergitas dan penyelarasan kebijakan Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat, guna mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah yang telah diselaraskan dengan target dan sasaran kinerja pelayanan publik tiap- tiap urusan pemerintahan serta menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah. Selanjutnya, dengan berpedoman pada prioritas pembangunan yang telah dituangkan dan ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah serta kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Daerah	Realisasi anggaran bisa lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan dari tahun-tahun sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
		bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD. Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara pemerintah Kota Payakumbuh berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah yang telah disinergikan dan diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah dan rencana kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar.	
2	Diharapkan Badan Keuangan Daerah lebih intensif dalam mengelola pajak dan retribusi daerah untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam struktur APBD disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai turunan dari Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru saja ditetapkan tanggal 4 Januari 2024. Untuk teknisnya ada beberapa Peraturan Walikota yang sedang kita susun dan kita siapkan rancangannya. Mudah-mudahan dengan adanya Peraturan Daerah tersebut pajak daerah dan retribusi daerah bisa kita tingkatkan.	Pajak daerah dan retribusi daerah bisa lebih ditingkatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah.

3. FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEPEGAWAIAN

Urusan Kepegawaian diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Payakumbuh melalui 3 (tiga) kebijakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.713.358.470,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.181.111.898,- atau 91,35%, dengan Capaian Kinerja Program dan Capaian Kinerja Keluaran sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Program Sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
1	Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai IKM	90,00	89,43	99,37%
2	Peningkatan pengelolaan manajemen kepegawaian melalui proses recruitmen yg sesuai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah, mutasi & promosi sesuai dengan kompetensinya, serta kejelasan pengembangan karir aparatur	Program Kepegawaian Daerah	Indek Merit Sistem	0,86	0,63	73,26%
3	Peningkatan kualitas aparatur pelayanan, peningkatan kompetensi & perubahan mentalitas/budaya melayani	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	79,00	80,11	101,41%

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

c. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target kinerja pada tahun 2025 adalah 90,00 dan terealisasi 89,43 dengan capaian 99,37%. Pelaksanaan program ini didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 197.939.150,- dan terealisasi sebesar Rp 162.018.909 atau 91,84%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa penyusunan dokumen Rancangan Awal Renja, Rancangan Akhir Renja, Rancangan Awal Renja Perubahan, Rancangan Akhir Renja Perubahan.
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa penyusunan dokumen laporan evaluasi kinerja BKPSDM (Evaluasi Renja TW 1,2,3,4).

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 14.819.382.569,- dan terealisasi sebesar Rp 13.587.221.194,- atau 91,69%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berupa pembayaran gaji dan tunjangan ASN terhadap 290 orang ASN.
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN berupa pembayaran honorarium pejabat pengelola keuangan BKPSDM Kota Payakumbuh tahun 2025

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 50.875.000,- dan terealisasi sebesar Rp 47.345.187,- atau 93,06%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya berupa pengadaan pakaian dinas beserta atributnya sebanyak 64 paket.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 180.908.200,- dan terealisasi sebesar Rp 174.604.004,- atau 96,52%, melalui 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan ruangan dan bangunan kantor.
- 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga berupa Penyediaan 1 paket Gorden

- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa penyediaan 1 paket alat tulis kantor.
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa penyediaan barang cetak, penggandaan dan penjilidan.
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan berupa penyediaan 2 surat kabar lokal yaitu Padang Ekspres dan Singgalang
- 6) Fasilitas Kunjungan Tamu berupa penyediaan makan dan minum tamu BKPSDM
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berupa penyediaan biaya perjalanan dinas dalam maupun luar daerah Provinsi Sumatera Barat bagi PNS Badan Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh dalam rangka mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 312.699.000,- dan terealisasi sebesar Rp 310.028.550,- atau 99,15%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Mebel berupa pengadaan kursi rapat sebanyak 53 unit dan meja $\frac{1}{2}$ Biro sebanyak 3 unit.
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa Pengadaan PC, Laptop, Printer, Scanner, TV, AC dengan total sebanyak 22 unit.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 117.300.001,- dan terealisasi sebesar Rp 107.520.340,- atau 91,66%, melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa penyediaan jasa telekomunikasi/internet, air dan listrik di kantor BKPSDM Kota Payakumbuh
- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa perbaikan/servis AC, printer dan laptop/komputer.
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berupa penyediaan peralatan kebersihan, pembayaran honorarium Tenaga Jasa Perseorangan

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 157.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp 155.241.767,- atau 98,69%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan berupa penyediaan jasa servis, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak dan pelumas kendaraan dinas jabatan eselon 2.

- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berupa penyediaan jasa servis, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak dan pelumas kendaraan dinas roda dua dan roda empat sebanyak 15 unit.

II. Program Kepegawaian Daerah

Program Kepegawaian Daerah dengan indikator kinerja yaitu Indeks Merit Sistem dengan target kinerja pada tahun 2025 adalah 0,86 dan realisasi 0,63 dengan capaian kinerja 73,26%, yang didukung oleh 4 (empat) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan yaitu:

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 125.472.700,- dan terealisasi sebesar Rp 120.186.208,- atau 95,79%, melalui 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN berupa pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
- 2) Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN berupa pelaksanaan pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
- 3) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian berupa penerimaan kelengkapan bahan usulan pensiun dan pengusulan penerbitan SK Pensiun bagi PNS Pemerintah Kota Payakumbuh.
- 4) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian berupa penyediaan data kepegawaian yang terkini dan akurat

2. Mutasi dan Promosi ASN

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 698.838.600,- dan terealisasi sebesar Rp 564.931.137,- atau 80.84%, melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengelolaan Mutasi ASN berupa penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tentang mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
- 2) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN berupa penyelenggaraan administrasi kenaikan pangkat bagi PNS Kota Payakumbuh. Periode kenaikan pangkat dijadwalkan 6 kali dalam setahun yaitu periode Februari, April, Juni, Agustus, Oktober dan Desember. Sesuai dengan mekanisme administrasi kenaikan pangkat PNS Golongan IV/b keatas yang diurus ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, PNS Golongan III/d s/d IV/a yang diurus ke Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dan PNS Golongan III/c kebawah yang diurus ke Badan Kepegawaian Negara Regional XII di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

- 3) Pengelolaan Promosi ASN berupa penyelenggaraan proses promosi ASN dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional.

3. Pengembangan Kompetensi ASN

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 371.439.000,- dan terealisasi sebesar Rp 322.264.565,- atau 86.76%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN berupa pemberian bantuan bagi ASN Kota Payakumbuh yang sedang melaksanakan tugas belajar dimana besaran bantuan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Payakumbuh tentang Pemberian Bantuan terhadap Aparatur yang Melaksanakan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 84.297.750,- dan terealisasi sebesar Rp 55.556.517,- atau 65,91%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur berupa pelaksanaan evaluasi dan penilaian SKP tahun 2024 terhadap ASN Pemerintah Kota Payakumbuh.
- 2) Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai berupa pendataan dan pengusulan PNS Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai calon penerima penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Tahun 2025 ke Sekretariat Negara Republik Indonesia di Jakarta sebanyak 250 orang serta pelaksanaan Anugerah ASN Award.
- 3) Pembinaan Disiplin ASN berupa fasilitasi penanganan kasus pelanggaran disiplin, permohonan perceraian dan proses pemberhentian sementara PNS Pemerintah Kota Payakumbuh dalam bentuk pelaksanaan sidang Musyawarah Pertimbangan Pegawai Kota Payakumbuh.
- 4) Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai berupa pemberian bimbingan dan konseling terhadap PNS Pemerintah Kota Payakumbuh yang akan melakukan perkawinan dan/atau perceraian.

III. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan indikator kinerja yaitu Indeks Profesionalitas ASN dengan target kinerja pada tahun 2025 adalah 79,00 dan terealisasi 80,11 dengan capaian 101,41%. Pelaksanaan program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan dengan sub kegiatan 3 (tiga) yaitu:

1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 188.578.750,- dan terealisasi sebesar Rp 184.241.705,- atau 97,70%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum berupa penyelenggaraan Diklat Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 408.327.750,- dan terealisasi sebesar Rp 389.951.815,- atau 95,50%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah , Jabatan Pimpinan Tinggi , Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan berupa fasilitasi keikutsertaan CPNS Pemerintah Kota Payakumbuh untuk mengikuti Pelatihan Dasar untuk 34 orang.
- 2) Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan TenagaPengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan berupa fasilitasi keikutsertaan ASN Pemerintah Kota Payakumbuh untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III (4 orang peserta) dan Diklat Kepemimpinan Nasional Tingkat II (2 orang peserta) yang diselenggarakan oleh PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi dan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD tahun N-1	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan		
	N	I	H	I	L

D. PENGAWAS

Urusan Pengawasan Urusan Pemerintah diselenggarakan oleh **Inspektorat Kota Payakumbuh** melalui 1 (satu) kebijakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.055.502.758,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.583.690.722,- atau 86,69%, dengan Capaian Kinerja Program dan Capaian Kinerja Keluaran sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Evaluasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat	83,00	84,05	101,26%
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,00	90,73	101,94%
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP	3	Hasil Penilaian BPKP belum keluar	
			Nilai Indeks Reformasi Pada Area Pengawasan	66	Hasil Penilaian BPKP belum keluar	
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah Yang Meningkatkan Nilai Evaluasi Internal dan Eksternal	100%	100%	100%
			Nilai Maturitas SPIP	3	Hasil Penilaian BPKP belum keluar	
			Rata-Rata Nilai AKIP Hasil Evaluasi Inspektorat	A	BB	99,75%

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

c. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam PK

Urusan Pengawasan Urusan Pemerintah dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja yaitu:

- Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat dengan target kinerja 83,00 dan realisasi 84,05 dengan capaian kinerja 101,26%.
- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 89,00 dan realisasi 90,73 dengan capaian kinerja 101,94%.

Pelaksanaan program ini didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 113.032.250,- dan terealisasi sebesar Rp. 101.289.611,- atau 89,61%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja (Renja) Perubahan, Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi SAKIP, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Pohon Kinerja/*Cascading* pada Inspektorat Kota Payakumbuh.
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa dokumen laporan akhir tahun, LKPJ (Laporan Pertanggung Jawaban), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Rencana Aksi SAKIP pada Inspektorat Kota Payakumbuh.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 8.099.500.204,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.728.379.561,- atau 83,07%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berupa gaji dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) di lingkungan Inspektorat Kota Payakumbuh.
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN berupa honorarium pengelolaan keuangan di lingkungan Inspektorat Kota Payakumbuh.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 88.254.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 84.123.822,- atau 95,32%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya berupa pengadaan pakaian dinas untuk Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Inspektorat Kota Payakumbuh.
- 2) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan berupa pelaksanaan sosialisasi kepada seluruh APIP di lingkungan Inspektorat Kota Payakumbuh.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 589.056.540,- dan terealisasi sebesar Rp. 564.642.437,- atau 95,86%, melalui 8 (delapan) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa pengadaan barang pendukung kelistrikan guna menjamin pencahayaan dan operasional perangkat kantor selama satu tahun.
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa penyediaan peralatan seperti *filling cabinet*, lemari besi, alat penghancur kertas, dan *cctv* kantor pada Inspektorat Kota Payakumbuh.
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga berupa pengadaan *AC*, lemari es, *dispenser*, karpet, TV, *vertical blind*, *rice cooker* pada Inspektorat Kota Payakumbuh.
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa penyediaan alat tulis kantor dan alat kebersihan kantor pada Inspektorat Kota Payakumbuh.
- 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan berupa penyediaan barang cetak, penggandaan dan penjilidan pada Inspektorat Kota Payakumbuh.
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan berupa penyediaan surat kabar untuk Inspektorat Kota Payakumbuh.
- 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu berupa penyediaan makan minum tamu Inspektorat Kota Payakumbuh.
- 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berupa penyediaan biaya perjalanan dinas pada Inspektorat Kota Payakumbuh.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 777.113.004,- dan terealisasi sebesar Rp. 754.787.790,- atau 97,13%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Mebel berupa penyediaan lemari, kursi kerja, kursi rapat, meja kerja, sofa dan *backdrop* kantor pada Inspektorat Kota Payakumbuh.

- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa pengadaan *laptop, PC unit, tablet* dan *printer* pada Inspektorat Kota Payakumbuh.

6. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 87.040.760,- dan terealisasi sebesar Rp. 85.642.203,- atau 98,39%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berupa pembayaran gaji Tenaga Harian Lepas (THL), sopir dan tenaga *outsourcing* kebersihan dan keamanan.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 293.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 278.422.194,- atau 94,83%, melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas berupa pembayaran pajak, servis, suku cadang dan BBM kendaraan dinas jabatan pada Inspektorat Kota Payakumbuh.
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan berupa pembayaran pajak, servis, suku cadang dan BBM kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) pada Inspektorat Kota Payakumbuh.
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa pemeliharaan terhadap komputer *PC/laptop* kantor, *AC, printer* dan peralatan mesin lainnya pada Inspektorat Kota Payakumbuh.

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator kinerja yaitu :

- Nilai Kapabilitas APIP dengan target kinerja 3 dan realisasi [...] dengan capaian kinerja [...]
- Nilai Indeks Reformasi Pada Area Pengawasan dengan target kinerja 66 dan realisasi [...] dengan capaian [...]
- Rata-Rata Nilai AKIP Hasil Evaluasi Inspektorat dengan target kinerja A dan realisasi BB dengan capaian kinerja sebesar 99,75%

Pelaksanaan program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal:

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 550.035.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 538.370.160,- atau 97,88%, melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

Commented [I1]: Realisasi belum diisi karena hasil penilaian BPKP belum keluar

Commented [I2]: Capaian belum diisi karena hasil penilaian BPKP belum keluar

Commented [I3]: Realisasi belum diisi karena hasil penilaian BPKP belum keluar

Commented [I4]: Capaian belum diisi karena hasil penilaian BPKP belum keluar

- 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah berupa pelaksanaan kegiatan audit kinerja pengawasan pada masing-masing OPD.
- 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah berupa pelaksanaan kegiatan audit keuangan pengawasan pada masing-masing OPD.
- 3) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP berupa pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI, APIP, BPKP maupun KPK.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 159.294.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 156.808.750,- atau 98,44%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah berupa kegiatan dalam memproses temuan lebih lanjut yang merugikan keuangan negara/ daerah melalui jalur administratif (tuntutan ganti rugi).
- 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu berupa pelaksanaan kegiatan dengan tujuan tertentu pada OPD yang telah ditetapkan. Laporan yang dihasilkan dalam kegiatan ini berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) baik kasus, maupun pemeriksaan tujuan tersentu lainnya.

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program Perumusan, Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan indikator kinerja yaitu:

- Persentase Perangkat Daerah Yang Meningkatkan Nilai Evaluasi Internal dan Eksternal dengan target kinerja 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.
- Nilai Maturitas SPIP dengan target kinerja 3 dan realisasi ... dengan capaian ...

Pelaksanaan program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi:

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 298.575.250,- dan terealisasi sebesar Rp. 291.224.194,- atau 97,54%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi berupa pendampingan dan asistensi terhadap Reformasi Birokrasi dan ZI pada OPD.
- 2) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi berupa kegiatan yang dituangkan dalam bentuk laporan

Commented [15]: Realisasi belum diisi karena hasil penilaian BPKP belum keluar

Commented [16]: Capaian belum diisi karena hasil penilaian BPKP belum keluar

yang berisi upaya mencegah korupsi melalui sosialisasi baik tatap muka maupun *online*.

d. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang diselesaikan
1.	Tidak ada catatan dan rekomendasi khusus untuk Inspektorat dari Pansus	-	-

E. FUNGSI PENUNJANG LAINNYA**I. SEKRETARIAT DAERAH**

Unsur Pendukung Kesekretariaan Daerah diselenggarakan oleh **Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh** melalui 3 kebijakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.669.454.451,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.316.068.333,- atau 90,60%, dengan uraian sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian (%)
1	Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	IKM Sekretariat Daerah	89,02	89,80	100,88
			Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	BB	94,70
			Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja yang selaras dengan Renstra	100%	100%	100
			Persentase ketepatan penyelesaian dokumen SAKIP Setdako sesuai pedoman	100%	100%	100
			Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja oleh KemenPan RB	12.60	12,60	100
			Indeks Kelembagaan Perangkat Daerah	39.09	39,09	100
			Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM dengan kategori BAIK pada tahun n	100%	100%	100%
			Persentase Unit Pelayanan Publik dengan Kategori Baik	66.67%	100%	149,99
			Persentase pemenuhan kebutuhan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100
			Persentase layanan perkantoran yang terfasilitasi dengan baik	100%	100%	100
			Persentase sarana dan prasarana	90%	90%	100

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian (%)
			kantor serta rumah dinas yang terpelihara dengan baik			
			Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang sesuai SOP	100%	100%	100
			Persentase pelayanan informasi kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang Dipublikasikan	100%	100%	100
2.	Meningkatnya Fasilitas Pembahasan Produk Hukum	Program Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD Kota Payakumbuh	3.1900	3,0788	-
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang baik	100%	100%	100
			Persentase masalah kewilayahan yang ditangani	100%	100%	100
			Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	95%	95%	100
			Persentase mesjid yang berfungsi secara optimal	85%	85%	100
			Persentase Organisasi Sosial Yang Aktif	80%	80%	100
			Persentase lembaga keagamaan yang aktif	80%	80%	100
			Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100
			Persentase kasus bantuan hukum yang tertangani	100%	100%	100
			Persentase perda yang dibahas di DPRD setelah diusulkan pemrakarsa	100%	100%	100
			Persentase peraturan perundangundangan	100%	100%	100

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian (%)
			yang dipublikasikan ke masyarakat			
3.	Melakukan Penguatan Kelembagaan Kompetensi Aparatur Pengadaan Barang dan Jasa	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase pengelolaan kegiatan yang tertib administrasi sesuai aturan	100%	100%	100
			Persentase jumlah paket lelang yang melalui elektronik	100%	100%	100
			Persentase terlaksananya strategi pengendalian inflasi	100%	100%	100
			Persentase terlaksananya kebijakan ekonomi & SD energi dan mineral	100%	100%	100
			Persentase BUMD dan BLUD yang sehat dan menguntungkan	100%	100%	100

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

c. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Pendukung Kesekretariat Daerah dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, 20 (dua puluh), dan 60 (enam puluh) sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator kinerja yaitu :

- Nilai IKM dengan target kinerja pada tahun 2025 adalah 88,60 dan realisasi 89,80 dengan capaian kinerja 101,35%
- Nilai Evaluasi AKIP SETDAKO oleh Inspektorat dengan target kinerja pada tahun 2025 adalah A (80,15) dan realisasi BB (75,90) dengan capaian kinerja 94,70%

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 12 (dua belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 125.759.700,- dan teralisasi sebesar Rp 119.721.603,- atau 95,20%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa Penyusunan 4 dokumen yaitu Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Renja Perubahan, penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa penyusunan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yaitu Laporan LKPJ, LKJIP, Laporan evaluasi Kinerja triwulanan, dokumen laporan LPPD Sekretariat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp11.207.775.551,- dan teralisasi sebesar Rp9.557.129.463,- atau 85,27%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berupa pembayaran gaji ASN Sekretariat daerah sebanyak 71 orang/bulan.
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN berupa pembayaran honorarium pengelola keuangan, pejabat pengadaan/ UKPBJ, dan pengelola barang Setdako

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp49.909.760,- atau 99,82%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD berupa pembayaran premi asuransi kendaraan dinas.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp80.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp67.150.000,- atau 83,94%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya berupa pembelian pakaian dinas pegawai Sekretariat Daerah

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp3.222.058.000,- dan teralisasi sebesar Rp3.129.653.629,- atau 97,13%, melalui 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa pembelian paket alat-alat listrik dan penerangan bangunan kantor sebanyak 11 paket
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa pembelian peralatan dan perlengkapan kantor seperti filling kabinet, dispenser, printer, bendera, marawa, slinger
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa pembelian alat tulis kantor, kertas dan cover dan bahan komputer sebanyak 20 jenis
- 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan berupa penyediaan barang cetak dan penggandaan
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan berupa penyediaan 3 dokumen bahan bacaan (harian, mingguan dan bulanan)
- 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu berupa memfasilitasi tamu daerah dan kebutuhan lainnya serta administrasi penunjang seperti makan minum, penginapan, plakat, cendera mata.
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berupa biaya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp5.506.838.588,- dan teralisasi sebesar Rp5.056.039.945,- atau 91,81%, melalui 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan berupa pengadaan kendaraan dinas jabatan sebanyak 3 unit
- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berupa pengadaan kendaraan dinas operasional sebanyak 3 unit

- 3) Pengadaan Mebel berupa pembelian mebel lemari, kursi kerja, kursi kerja, sofa
- 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa pembelian peralatan dan mesin kantor seperti, pompa air, CCTV, Vidiotron, AC, Laptop, Televisi, Printer
- 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya berupa pengadaan partisi ruangan dan rehab kantor dan rumah dinas
- 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya berupa pembelian mesin potong rumput dan backdrop pada kantor dan rumah dinas

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp3.359.289.278,- dan teralisasi sebesar Rp3.090.415.207,- atau 92,00%, melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa belanja tagihan telepon, air, listrik dan TV berlangganan
- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa belanja jasa penyelenggaraan acara, belanja sewa mebel dan peralatan umum
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berupa Belanja Alat/ bahan untuk kegiatan kantor dan Belanja Jasa Tenaga Administrasi dan Kebersihan Outsourcing

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp1.930.838.685,- dan teralisasi sebesar Rp1.878.760.827,- atau 97,30%, melalui 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan berupa biaya operasional/ pemeliharaan kendaraan dinas pejabat seperti pembelian BBM, Suku Cadang, Service, Pembayaran pajak
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berupa biaya operasional/ pemeliharaan kendaraan dinas pejabat seperti pembelian BBM, Suku Cadang, Service, Pembayaran pajak
- 3) Pemeliharaan Mebel berupa belanja pemeliharaan Mebel kantor dan rumah dinas.

- 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa belanja pemeliharaan sarana kantor seperti komputer, printer, alat studio dan kamera
- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya berupa biaya pemeliharaan Gedung dan bangunan Kantor dan Rumah Dinas/jabatan
- 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya berupa biaya pemeliharaan jaringan listrik kantor dan rumah dinas
- 7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya berupa biaya pemeliharaan sarana kantor pada Rumah dinas Walikota, Rumah Dinas Wakil Walikota, Rumah Dinas Sekretaris Daerah dan Kantor Balaikota

9. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp1.644.569.667,- dan teralisasi sebesar Rp1.531.360.881,- atau 93,12%, melalui 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berupa pembayaran tunjangan jabatan KDH dan Insentif pajak dan retribusi daerah dengan target sebanyak 2 orang
- 2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berupa penyediaan paket pakaian dinas yang terdiri dari PDH, PDU, PSH, PSL, PSR, dan pakaian lapangan
- 3) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berupa biaya pemeriksaan kesehatan Kepala Daerah dilaksanakan dengan target untuk 8 orang Tidak dapat terealisasi karena padatnya agenda Kepala Daerah sehingga Medical Check Up belum bisa dilaksanakan
- 4) Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berupa belanja operasional KDH/WKDH dilaksanakan dengan target untuk 2 orang

10. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp1.244.148.700,- dan teralisasi sebesar Rp1.212.371.553,- atau 97,45%, melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah berupa biaya kebutuhan rumah tangga kepala daerah, bahan pembersih, perabot rumah, peralatan dapur, makan minum, dan peralatan lainnya

- 2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah berupa biaya kebutuhan rumah tangga kepala daerah, bahan pembersih, perabot rumah, peralatan dapur, makan minum, dan peralatan lainnya
- 3) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah berupa biaya kebutuhan rumah tangga kepala daerah, bahan pembersih, perabot rumah, peralatan dapur, makan minum, dan peralatan lainnya

11. Penataan Organisasi

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp283.644.850,- dan teralisasi sebesar Rp278.557.526,- atau 98,21%, melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan berupa Penyusunan Anjab ABK/ Peta Jabatan, Ranperda dan Ranperkada tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2) Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana berupa penyusunan dokumen Survey Kepuasan Masyarakat
- 3) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi berupa penyusunan LKjIP dan Dokumen RB

12. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp2.057.041.032,- dan teralisasi sebesar Rp1.808.687.163,- atau 87,93%, melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- 1) Fasilitasi Keprotokolan berupa biaya Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah
- 2) Fasilitasi Komunikasi Pimpinan berupa biaya Perjalanan Dinas Kepala Daerah, Pembayaran iuran APEKSI
- 3) Pendokumentasian Tugas Pimpinan berupa Kerjasama media, peliputan, dokumentasi dan publikasi kegiatan pimpinan

II. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator kinerja yaitu :

- Nilai LPPD dengan target kinerja pada tahun 2025 adalah 3,1900 dan realisasi tidak dapat disajikan karena menunggu Kepmendagri terkait penilaian LPPD Kab/Kota se-Indonesia. Sedangkan pada evaluasi tahun sebelumnya mendapat nilai 3,0788
- Indeks Reformasi Hukum dengan target kinerja pada tahun 2025 adalah 87,20 dan realisasi 87,60 dengan capaian kinerja 100,46%,

1. Administrasi Tata Pemerintahan

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 654.010.050,- dan teralisasi sebesar Rp 601.877.746,- atau 92,03%, melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penataan Administrasi Pemerintahan berupa Pelaksanaan Lomba Kelurahan, Lomba LPM dan Orientasi LPM
- 2) Pengelolaan Administrasi Kewilayahan berupa jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan
- 3) Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah berupa penyusunan dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu LPPD, LKPJ, ILPPD, SPM dan Laporan Kegiatan.

2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp3.247.850.150,- dan teralisasi sebesar Rp3.053.562.263,- atau 94,02%, melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- 1) Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual berupa fasilitasi pengelolaan bina mental dan spiritual, Fasilitasi MTQ Nasional Tk Propinsi, dan wirid pengajian ASN.
- 2) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial berupa penyaluran hibah kepada masjid/mushalla, lembaga keagamaan, dan perguruan tinggi, fasilitasi pembinaan sekolah sehat dan fasilitasi pelaksanaan rakor dgn organisasi kemasyarakatan.
- 3) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat berupa fasilitasi keberangkatan jamaah haji ke embarkasi dan peringatan hari besar islam

3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 637.771.000,- dan teralisasi sebesar Rp 484.181.194,- atau 75,92%, melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- 1) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah berupa fasilitasi penyusunan produk hukum daerah (Perda, Perwako dan Keputusan Walikota dan Keputusan Sekretaris Daerah)
- 2) Fasilitasi Bantuan Hukum berupa biaya fasilitasi bantuan hukum/ perkara hukum yang ditangani
- 3) Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum berupa pendokumentasian produk hukum daerah dan pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum (JDIH)

4. Fasilitas Kerjasama Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp17.584.400,- dan teralisasi sebesar Rp 16.679.923,- atau 94,86%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri berupa fasilitas usulan kerjasama Pemerintah Kota Payakumbuh
- 2) Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama berupa pelaksanaan Evaluasi terhadap Kesepakatan Bersama dan Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani

III. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program Perekonomian Dan Pembangunan dengan indikator kinerja yaitu :

- Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dengan target kinerja pada tahun 2025 adalah 91,58 dan realisasi 91,58 dengan capaian kinerja 100%

1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp97.031.700,- dan teralisasi sebesar Rp88.148.903,- atau 90,85%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD berupa Monitoring dan Evaluasi, Pembinaan Pengelolaan BUMD dan BLUD yang ada di Kota Payakumbuh
- 2) Pengendalian dan Distribusi Perekonomian berupa biaya pelaksanaan rapat koordinasi terkait bidang ekonomi, pengendalian inflasi dan penyusunan buku perkembangan produksi daerah

2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp18.603.350,- dan teralisasi sebesar Rp17.333.175,- atau 93,17%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan berupa pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan APBD

3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp274.036.900,- dan teralisasi sebesar Rp264.228.791,- atau 96,42%, melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa berupa dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang/ jasa dilaksanakan
- 2) Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik berupa dokumen hasil pengelolaan layanan pengadaan secara LPSE

- 3) Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa berupa jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa .

4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp10.602.850,- dan teralisasi sebesar Rp10.298.781,- atau 97,13%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air berupa dokumen kebijakan bidang pertambangan energi serta monitoring ke lapangan terkait kecukupan dan distribusi BBM bersubsidi

d. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

No.	Rekomendasi DPRD tahun n-1	Tindak lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	N	I	H
			I

IV. SEKRETARIAT DPRD

Urusan pendukung urusan pemerintahan diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh melalui 1 (satu) buah kebijakan yaitu Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.33.874.702.378,- dan terealisasi sebesar Rp.31.737.793.193,- atau 93,69%, dengan uraian sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
I	Pemantapan Implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	85	85.22	101%
			Nilai AKIP	A	BB	90
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	100	100	100%

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

c. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Urusan Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan melalui 2 (dua) Program, 15 (lima belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan Indikator Kinerja

- Nilai IKM target kinerjanya adalah sebesar 85 dan terealisasi sebesar 85,22 capaian kinerjanya sebesar 101%
- Nilai AKIP dengan target kinerja A realisasi A capaian kinerja 100 %

Pelaksanaan program ini didukung oleh 9 (sembilan) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 64.433.400 dan teralisasi sebesar Rp 47.903.319 atau 74,35%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, berupa penyusunan dokumen renja, renstra, dan renja perubahan
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, berupa penyusunan dokumen LKPJ, LKJIP, evaluasi internal dan laporan triwulan

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 3.101.334.220 dan teralisasi sebesar Rp 2.574.550.468 atau 83,01%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, berupa penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta tambahan penghasilan ASN sebanyak 24 orang
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, berupa penyediaan honorarium pengelola keuangan dan honorarium pejabat pengadaan serta makan dan minum lembur

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 25.000.000 dan teralisasi sebesar Rp 23.587.500 atau 94,35%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, berupa penyediaan pakaian dinas harian untuk ASN di lingkungan SEKretariat DPRD Kota Payakumbuh

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 2.763.976.300 dan teralisasi sebesar Rp 2.531.928.819 atau 91,60%, melalui 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, berupa belanja alat Listrik
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, berupa belanja belanja plakat, spanduk, sewa papan bunga, mesin pompa air, printer, mesin absen, lemari arsip, layer proyektor, kursi tamu, AC, Karpet, Tablet, Scanner.
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, berupa penyediaan bahan-bahan lainnya, ATK, catridge, dan peralatan kebersihan serta alat-alat lainnya
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, berupa belanja cetak serta foto copy
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, berupa penyediaan surat kabar harian padang ekspres
- 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu, berupa penyediaan makan minum jamuan tamu Sekretariat.
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, belanja perjalanan dinas pendamping Kunker dan Konsultasi Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Perda, Komisi-komisi, Pansus, dalam dan luar Provinsi

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 2.435.742.000 dan teralisasi sebesar Rp 2.128.751.500 atau 87,40%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan , berupa Belanja modal kendaraan bermotor roda 4 sebanyak 3 unit
- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya , berupa Belanja Modal CCTV untuk sekertariat DPRD

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 1.034.847.580 dan teralisasi sebesar Rp 934.517.492 atau 90,30%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, berupa pembayaran rekening telepon kantor dan rumah jabatan, rekening air kantor dan rumah jabatan, rekening listrik kantor dan rumah jabatan, serta pembayaran internet dan TV berlangganan pada kantor DPRD
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, berupa pembelian alat-alat kebersihan dan bahan-bahan kantor lainnya. Belanja jasa honorarium TJP, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan keselamatan kerja non ASN bagi TJP, an belanja vakum cleaner

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 923.279.000 dan teralisasi sebesar Rp 719.483.924 atau 77,93%, melalui 5 (lima) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan, berupa pemeliharaan kendaraan roda 4 dan penyediaan belanja asuransi barang milik daerah/asuransi kendaraan dinas jabatan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, berupa penyediaan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan bantuan BBM operasional untuk bus.
- 3) Pemeliharaan Mabel, berupa belanja pemeliharaan alat dan alat rumah tangga-alat rumah tangga
- 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, berupa belanja isi tabung gas, pemeliharaan computer, CCTV Genset dan AC
- 5) Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya, berupa pemeliharaan bangunan gedung seperti ruang Ketua DPRD

8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 9.384.212.008 dan teralisasi sebesar Rp 9.146.947.140 atau 97,47%, melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, berupa pembayaran gaji dan tunjangan DPRD seperti belanja uang representasi, belanja tunjangan keluarga, belanja tunjangan beras, belanja uang paket DPRD, belanja tunjangan jabatan DPRD, belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD, belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya. Tunjangan Reses, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD seperti

jaminan kesehatan, kematian, tunjangan perumahan, transportasi, belanja uang jasa pengabdian dan belanja operasional Pimpinan

- 2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD , berupa pengadaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Payakumbuh
- 3) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD, berupa belanja medical check up bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

9. Layanan Administrasi DPRD

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 173.295.120 dan teralisasi sebesar Rp 162.251.540 atau 93,63%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD , berupa belanja cetak baliho, belanja makan minum rapat-rapat paripurna HUT Kota, rapat paripurna khusus, paripurna HUT RI, rapat-rapat AKD. belanja jasa pengamanan. Belanja jasa penyelenggaraan acara, belanja sewa mebel, belanja sewa tenda VIP serta belanja modal alat kesehatan olah raga (meja dan bad pimpan)
- 2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD , berupa penyediaan peralatan rumah tangga, laundry, natura , makan minum rumah tangga.

II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan Indikator Kinerja Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik dengan target kinerjanya adalah sebesar 100 dan terealisasi sebesar 100 sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 %.

Pelaksanaan program ini didukung oleh 6 (enam) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan yaitu:

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 77.769.450 dan teralisasi sebesar Rp 40.828.827 atau 52,50%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, berupa belanja makan minum rapat-rapat pembahasan Ranperda

2. Pembahasan Kebijakan Anggaran

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 428.231.250 dan teralisasi sebesar Rp 267.935.332 atau 62,57%, melalui 5 (lima) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pembahasan KUA dan PPAS , berupa penyediaan ATK, belanja makan minum rapat-rapat untuk pembahasan KUA dan PPAS
- 2) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS , berupa penyediaan ATK, belanja makan minum rapat-rapat pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- 3) Pembahasan APBD, berupa penyediaan ATK, belanja makan minum rapat-rapat pembahasan APBD
- 4) Pembahasan APBD Perubahan , berupa penyediaan ATK, belanja makan minum rapat-rapat pembahasan APBD Perubahan
- 5) Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD, berupa penyediaan ATK, belanja makan minum rapat-rapat pembahasan Pertanggungjawaban APBD

3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 86.583.050 dan teralisasi sebesar Rp 43.408.392 atau 50,13%, melalui 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintah dan Hukum , berupa belanja ATK, foto copy, makan minum rapat serta biaya perjalanan dinas (transportasi)
- 2) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, berupa belanja ATK, foto copy, makan minum rapat serta biaya perjalanan dinas (transportasi),
- 3) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, berupa belanja ATK, foto copy, makan minum rapat serta biaya perjalanan dinas (transportasi)
- 4) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian, berupa belanja ATK, foto copy, makan minum rapat serta biaya perjalanan dinas (transportasi)

4. Peningkatan Kapasitas DPRD

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 1.248.756.000 dan teralisasi sebesar Rp 1.160.740.684 atau 92,95%, melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pendalaman Tugas DPRD, berupa penyediaan biaya pelaksanaan Bimtek yang diikuti seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD seperti kontribusi Bimtek, belanja perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD
- 2) Publikasi dan Dokumentasi Dewan, berupa belanja foto copy, cetak (foto, kalender, spanduk), biaya makan minum rapat, honorarium tim penyusun jurnal/website, belanja jasa dokumentasi dan belanja jasa publikasi

pemberitaan (media cetak, online dll), peliputan khusus media cetak serta belanja internet

- 3) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, berupa pembayaran honorarium jasa tenaga ahli fraksi,

5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 5.450.840.000 dan teralisasi sebesar Rp 5.283.835.564 atau 96,94%, melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Kunjungan Kerja Dalam Daerah , berupa belanja perjalanan dinas kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam dan luar provinsi
- 2) Pelaksanaan Reses, berupa penyediaan ATK (foto copy, kertas), belanja makan minum rapat, sewa kursi/meja, sewa sound system serta sewa tenda

6. Fasilitasi Tugas DPRD

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 6.676.403.000 dan teralisasi sebesar Rp 6.671.122.692 atau 99,92%, melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, berupa penyediaan biaya perjalanan dinas (konsultasi) Pimpinan dan Anggota DPRD, serta biaya pemeliharaan (BBM),

d. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan		
	N	I	H	I	L

V. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh menyelenggarakan Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan melalui dilaksanakan melalui 1(satu) kebijakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.131.791.538,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.946.739.776,- atau 95,52% dengan uraian sebagai berikut.

a. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian (%)
1	Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai IKM	93	93,14	100,15%
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	90	90,52	100,58%
2	Penguatan Kelembagaan dan Kompetensi Pengelola Organisasi Masyarakat dan Parpol	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100	100	100%
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase ormas yang aktif	93	91,6	98,49%
3	Peningkatan Fasilitasi dalam menunjang keamanan,	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,	100%	100%	100%

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian (%)
	ketertiban an ketentraman masyarakat	Ekonomi, sosial dan budaya	Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan			
			Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100%	100%	100%

b. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat pada table dibawah ini :

c. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan melalui 6 (Enam) Program, 12 (Dua Belas) kegiatan dan 29 (Dua Puluh Sembilan) sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target kinerja 93 dan terealisasi 93,14 dengan capaian kinerja 100,15%

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dan 19 sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 62.008.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 47.758.972 atau 77,02% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa Dokumen Perencanaan Perangkat berupa penyusunan dokumen perencanaan yaitu Renstra, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Rencana Kerja Perubahanan (Renja Perubahan).
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa penyusunan laporan evaluasi kinerja yaitu Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJiP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Hasil Forum Konsultasi Publik .

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 1.216.759.251,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.102.705.482,- atau 90,63% melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berupa pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 10 orang
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN berupa pembayaran 9 orang honorarium pengelola keuangan SKPD

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 13.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.149.172,- atau 93,46% melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya berupa pengadaan 13 slet pakaian dinas harian untuk ASN dan Tenaga Jasa Perorangan (TJP)

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 211.499.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 208.956.379,- atau 98,80 % melalui 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor berupa penyediaan alat-alat listrik dan elektronik pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yaitu 1 unit Printer, 2 unit PC, 2 unit Laptop dan 2 unit Filing Cabinet pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa penyediaan alat tulis kantor, kertas dan cover serta bahan komputer pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa penyediaan kebutuhan barang cetak, penggandaan dan penjilidan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh.
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan berupa penyediaan media cetak Padang Ekspres dan Pos Metro pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh.
- 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu berupa penyediaan makan dan minum tamu pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh .
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berupa penyediaan biaya perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah Provinsi Sumatera Barat bagi PNS Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 7.565.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.531.350,- atau 99,56 % melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pengadaan Mebel penyediaan berupa 1 unit kursi dan 2 unit meja kerja .

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 54.623.244,- dan terealisasi sebesar Rp. 52.173.821,- atau 95,52 % melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa pembayaran rekening telepon, rekening air, dan rekening listrik pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh.

- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor yaitu *Air Conditioner* (AC), Komputer, Printer, Laptop.
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berupa pembayaran belanja jasa 1 orang petugas kebersihan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 69.800.480,- dan terealisasi sebesar Rp. 69.472.973,- atau 99,53 % melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan berupa penyediaan service, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak, pelumas dan pajak kendaraan dinas roda empat 1 unit
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan berupa penyediaan jasa service, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak, pelumas dan pajak kendaraan dinas roda dua sebanyak 8 unit pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh.
- 3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya berupa pemeliharaan gedung Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh.

II. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan indikator cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan. Target kinerja pada tahun 2025 adalah 90% dengan realisasi 90,52% dengan capaian kinerja 100,58 % didukung oleh 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 840.015.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 812.149.094,- atau 96,68 % melalui 2 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan berupa pelaksanaan kegiatan sosialisasi penguatan forum pembauran kebangsaan, sosialisasi wawasan kebangsaan, rapat tim Forum Pembauran Kebangsaan Kota Payakumbuh, dan pelaksanaan Upacara Hari Lahir

Pancasila , Upacara Hari Bela Negara di tingkat Kota Payakumbuh, dan Pelaksanaan Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan

- 2) Pembentukan Paskibraka berupa pelaksanaan seleksi calon paskibraka tingkat Kota Payakumbuh dan Calon Paskibraka Utusan Payakumbuh untuk Provinsi Sumatera Barat, pemusatan dan pelatihan paskibraka, Pengukuhan Paskibraka dan Pelaksanaan Pengibaran Bendera Merah Putih serta Penurunan Bendera Merah Putih pada Upacara HUT RI di Kota Payakumbuh.

III. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan indikator Pendidikan Partai Politik. Target kinerja pada tahun 2025 adalah 100% dengan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100% didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 882.230.113,- dan terealisasi sebesar Rp. 872.795.705,- atau 98,93 % melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah berupa pelaksanaan kegiatan bimtek bantuan keuangan untuk partai politik, rapat-rapat tim PPE Perkembangan Politik, Rapat verifikasi bantuan keuangan Partai Politik dan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kota Payakumbuh.
- 2) Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah berupa pelaksanaan Pendidikan politik bagi pengurus BEM se Kota Payakumbuh.
- 3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah berupa pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kepada Partai Politik.

IV. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan indikator persentase organisasi Masyarakat yang aktif. Target kinerja pada tahun 2025 adalah 93% dengan realisasi 91,6% dengan capaian kinerja 98,49 % didukung oleh 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 119.924.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 114.154.499,- atau 95,19 % melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu

- 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas , Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah berupa pelaksanaan kegiatan rapat tim pengawasan ormas, pembinaan organisasi Masyarakat di Kota Payakumbuh serta pelaksanaan deklarasi tolak aksi Ormas terafiliasi kegiatan premanisme serta pemberian hibah uang untuk Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan Kota Payakumbuh.

V. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan indikator persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah. Target kinerja pada tahun 2025 adalah 100% dengan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100% didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 225.995.650,- dan terealisasi sebesar Rp. 224.830.756,- atau 99,48 % melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah berupa rapat tim fasilitasi

P4GN dan rapat tim Pakem dan rapat tim FKUB serta pemberian hibah uang kepada BNN Kota Payakumbuh dan FKUB Kota Payakumbuh.

VI. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dengan indikator persentase konflik sosial yang diselesaikan. Target kinerja pada tahun 2025 adalah 100% dengan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100% didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 428.370.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 422.061.573,- atau 98,53 % melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah berupa pelaksanaan kegiatan rapat tim penanganan konflik Rapat, Rapat Tim fasilitas lebaran dan Nataru serta Pengamanan Lebaran dan Nataru.
- 2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah berupa pelaksanaan kegiatan rapat Tim Kewaspadaan Dini Daerah , rapat tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan rapat koordinasi untuk anggota FKDM kota, kecamatan dan kelurahan se Kota Payakumbuh.
- 3) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berupa pelaksanaan kegiatan rapat-rapat Forkopimda dan Focus Group Discussion Bersama Forkopimda

d. Tindak lanjut rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	N	I	H
	I	H	I



BAB IV

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dan Penugasan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali kota Payakumbuh
Tahun 2025

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Tujuannya adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah. Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota merupakan sebagian urusan pemerintahan di luar 6 (enam) urusan pemerintahan absolut yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah. Urusan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan kementerian/lembaga yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan dan laporan barang. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan sub sistem keuangan negara sebagai konsekwensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah

daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dan pemerintah daerah yang dalam sistem pengaturannya tidak hanya mencakup aspek pendapatan daerah, tetapi juga aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban. Sejalan dengan itu, maka penyerahan dan pelimpahan wewenang pemerintahan juga harus diikuti dengan pengaturan pendanaan dan pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif.

Berdasarkan arah kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan) RI dalam mendukung Swasembada Pangan 2025, Satuan Kerja (Satker) yang difokuskan pada peningkatan produksi pangan (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Sarana dan Prasarana) memiliki tujuan dan sasaran strategis untuk mencapai kemandirian pangan nasional lebih cepat dari target semula. Hal ini sejalan dengan ***Asta Cita (visi ke-2)***, khususnya dalam memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa.

Hubungan keduanya bersifat strategis: swasembada pangan digunakan untuk memastikan kedaulatan, kesejahteraan petani, dan stabilitas nasional, yang didukung melalui rehabilitasi irigasi, reformasi pupuk subsidi, dan mekanisasi pertanian dengan Total Anggaran sebesar **Rp. 6.003.590.000,-**, yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Dirjen Lahan dan Irigasi (Dirjen LIP)

Program usulan (Aplikasi e-form) dibawah dirjen LIP, Dinas Pertanian Kota Payakumbuh melalui Bidang Sarana dan Prasarana mengajukan kegiatan Optimasi Lahan (Oplah) Non Rawa dengan mengusulkan lokasi berdasarkan data hasil CPCL melalui data spatial (polygon) dan data tabular dengan usulan lebih kurang 1.038 ha Tahun Anggaran 2025 dengan alokasi anggaran lebih kurang **Rp. 5.885.960.000,- (Tahap II seluas 788 ha dan Tahap III seluas 250 ha)** yang meliputi kegiatan :

- a. Rehabilitasi/Pembangunan RJIT sebanyak 44 lokasi di masing-masing kelompok tani
- b. Pembangunan Irigasi Perpomaan sebanyak 2 lokasi kelompok tani

Pembangunan/Rehabilitasi dan Irigasi perpompaan ini berupa bapem dengan mekanisme pelaksanaan secara swakelola oleh kelompok tani. Secara teknis

SID yang akan dituangkan dalam bentuk RUKK dikerjakan oleh Tim Pelaksana Universitas Andalas Padang yang selanjutnya didampingi oleh konsultan pengawasan pada pelaksanaan pembangunan fisik dilapangan.

Sasaran bapem dari Kemeterian Pertanian ini dimaksudkan dalam rangka peningkatan IP selain berupa bapem pembangunan fisik juga olah lahan dengan bantuan berupa biaya olah lahan sebesar Rp. 900.000,-/ha.

2. Dirjen Sarana dan Prasarana

Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementerian Pertanian tahun 2025 difokuskan pada penguatan swasembada pangan, melalui modernisasi pertanian, serta penyaluran pupuk bersubsidi. Pada Tahun Anggaran 2025 Kota Payakumbuh mendapatkan anggaran lebih kurang **Rp. 117.630.000,-** dengan sasaran utama kegiatan berupa fasilitasi penyusunan pupuk bersubsidi melalui fasilitasi penyusunan e-RDKK dimasing-masing kelompok tani yang ada di Kota Payakumbuh disamping pendampingan dari tim verval kecamatan sampai tingkat kota berupa monev dan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025 merupakan wujud nyata sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mendukung tercapainya swasembada pangan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Asta Cita. Dengan total anggaran sebesar Rp6.003.590.000,- yang bersumber dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, seluruh kegiatan yang dilaksanakan — mulai dari Optimasi Lahan Non Rawa, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (RJIT), Pembangunan Irigasi Perpompaan, hingga fasilitasi penyusunan pupuk bersubsidi melalui e-RDKK diarahkan secara konsisten untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan produktivitas pertanian di Kota Payakumbuh.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pembantuan ini tidak terlepas dari koordinasi yang erat antara Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, kelompok tani, tim pelaksana teknis dari Universitas Andalas Padang, serta konsultan pengawasan di lapangan. Semua pihak telah menjalankan peran masing-masing dengan penuh tanggung

jawab, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.



BAB V

Penutup

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Payakumbuh
Tahun 2025

BAB V

PENUTUP

Memperhatikan gambaran kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, baik penyelenggaraan urusan wajib ataupun penyelenggaraan urusan pilihan dan pelaksanaan tugas pembantuan telah berjalan dengan baik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari totalitas dukungan yang diberikan semua pihak, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh selaku representasi masyarakat Kota Payakumbuh. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini perkenalkan kami atas nama Pemerintah Kota Payakumbuh mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan penuh dari segenap unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh serta seluruh masyarakat Kota Payakumbuh.

Namun demikian tidak dapat dipungkiri, dengan keterbatasan sumberdaya pembangunan kota yang dimiliki, belum seluruh harapan, tuntutan dan kebutuhan masyarakat dapat diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Payakumbuh bersama-sama dengan segenap komponen pembangunan Kota harus terus bekerjasama dan sama-sama bekerja untuk mewujudkan harapan-harapan dan kebutuhan yang lebih besar tersebut pada masa yang akan datang.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Payakumbuh Tahun 2025 ini kami sampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh untuk dapat dijadikan bahan *progress report* dan informasi pembangunan Kota Payakumbuh selama tahun anggaran 2025 dan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mendatang.